



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 2021

GERAK CEPAT
MENUJU
SULAWESI TENGAH
LEBIH SEJAHTERA
DAN LEBIH MAJU



H. RUSDY MASTURA
GUBERNUR SULAWESI TENGAH



Drs. H. MA'MUN AMIR
WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

INSPEKTORAT DAERAH

Jln. DEWI SARTIKA NO. 47 TELP. (0451) 488152 - 488034 PALU
Kode Pos 94114 PALU

PERNYATAAN TELAH DIREVIU PEMERINTAH PRIVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Palu, tanggal 30 Maret 2022

**INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



Drs. M. MUCHLIS, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 197102221990121001



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KATA PENGANTAR

Puji Syukur senantiasa kita panjatkan Kehadirat Allah SWT, Karena atas izin-Nya, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021 beserta Indikator Kinerja dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah.

Penyusunan LPPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang memuat hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan serta penerapan dan pencapaian SPM dan LAKIP yang dilaksanakan oleh perangkat daerah pada tahun 2021. Dalam laporan ini juga disampaikan capaian kinerja pada setiap urusan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam pedoman penyusunan LPPD tahun 2021

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini disampaikan, untuk menjadi bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan untuk kemajuan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

H. RUSDY MASTURA

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi
BAB I	
PEDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I-2
1.1.1 Penjelasan Umum	I-2
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah.....	I-17
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimum	I-80
BAB II	
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	
2.1 Capaian Kinerja Makro	II-1
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	II-1
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran	II-1
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	II-6
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	II-8
BAB III	
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	
3.1 Dasar Hukum	III-1
3.2 Gambaran Umum	III-1
3.3 Capaian Kinerja	III-2
3.3.1 Tugas Pembantuan Pusat	III-2
Permasalahan dan Kendala	III-9
Saran dan Tindak Lanjut	III-11
BAB IV	
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	IV-1
BAB V	
PENUTUP	V.1

BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan manusia Indonesia sebagaimana tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, membutuhkan usaha dan kerja sama yang serasi, selaras dan seimbang antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan sebuah konsekuensi penyelenggaraan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah dan sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, maka kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan umum pasal 1 Peraturan tersebut, sebagai berikut :

- 1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
- 2) Laporan Keterangan Pertanggung jawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- 3) Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RLPPD adalah informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Berpijak pada peraturan perundang-undangan di atas, maka Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah ini merupakan salah satu perwujudan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus sebagai pertanggungjawaban moral kepada Pemerintah dan masyarakat Sulawesi Tengah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah ini merupakan *progress report* terhadap laporan pelaksanaan tugas dan perkembangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah ini secara garis besar menggambarkan aspek-aspek berikut ini :

1. Dasar Hukum, Visi dan Misi Kepala Daerah, serta Data Umum Daerah;
2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan;
4. Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
5. Penutup;

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang – undang Pembentukan Daerah

Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 yang meliputi empat wilayah kabupaten yaitu: Donggala, Poso, Banggai dan Buol Tolitoli. Pada tahun 1994 dibentuklah Kotamadya Palu dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994. Dalam perkembangannya selama kurang lebih tiga puluh lima tahun, tepatnya sejak Tahun 1964 sampai dengan Tahun 1999, terjadi suatu perubahan yang ditandai dengan era Reformasi sebagai konsekuensi perubahan tatanan politik bangsa, maka keluarlah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Seiring dengan harapan masyarakat terhadap pemekaran wilayah maka diterbitkan pula Undang-undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-una, Undang-

undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara, dengan demikian maka hingga akhir 2018 Provinsi Sulawesi Tengah telah memiliki 12 (dua belas) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yang terdiri dari 175 Kecamatan serta 1845 Desa dan 175 Kelurahan.

b. Data Geografis Wilayah

❖ Batas Administrasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Maluku dan Maluku Utara.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makasar dan Provinsi Sulawesi Barat.

❖ Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah

Luas wilayah daratan Provinsi Sulawesi Tengah adalah 61.841,29 km². Sementara untuk wilayah Perairan Laut seluas 193.923,75 km², dan secara geografis Provinsi Sulawesi Tengah terletak antara 2022' Lintang Utara dan 3048' Lintang Selatan serta 119022 dan 124022' Bujur Timur.

❖ Topografis.

Dilihat dari letak wilayahnya, Provinsi Sulawesi Tengah sebagian besar merupakan daerah pegunungan dan daratan tinggi serta daratan rendah yang terdapat didaratan, lembah dan berada di daerah pantai. Pembagian wilayah berdasarkan ketinggian dari permukaan laut sbb :

- Daratan rendah dengan ketinggian 0–100 meter dari permukaan laut sekitar 20, 20 persen.

- Wilayah dengan ketinggian 100-500 meter dari permukaan laut sekitar 27,20 persen,
- Wilayah dengan ketinggian 500-1000 meter dari permukaan laut sekitar 26,27 persen.
- Wilayah dengan ketinggian diatas 1000 meter dari permukaan laut sekitar 26,33 persen.

Demikian juga dengan tingkat kemiringan lahan, yakni:

- Kemiringan 0-2 derajat sekitar 13,00 persen.
- Kemiringan 2,1-15 derajat sekitar 1,00 persen.
- Kemiringan 15,1-40 derajat sekitar 16,10 persen.
- Kemiringan diatas 40,1 derajat sekitar 50,60 persen.
- Pulau-pulau kecil (belum terdata) sekitar 19,30 persen.

Sulawesi Tengah adalah salah satu Provinsi di Pulau Sulawesi yang mempunyai kekayaan alam yang cukup beragam, kandungan mineral, air dan segala isinya, flora dan fauna yang beraneka ragam. Kawasan lindung di Sulawesi Tengah dengan proporsi 35,55% dari luas total wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, daerah kawasan lindung ini menyebar merata diseluruh wilayah Sulawesi Tengah. Jenis kawasan lindung di Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan kriteria kawasan lindung terdiri dari :

- ❖ Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, meliputi :
 - Kawasan hutan lindung
 - Kawasan resapan air
- ❖ Kawasan Perlindungan setempat, meliputi :
 - Sempadan Pantai
 - Sempadan Sungai
 - Kawasan sekitar danau
 - Kawasan sekitar mata air.
- ❖ Kawasan suaka alam, meliputi :
 - Kawasan cagar alam
 - Kawasan suaka marga satwa.
- ❖ Kawasan pelestarian alam, meliputi :

- Kawasan Taman Nasional
- Kawasan Taman Hutan Rakyat
- Taman Wisata Alam.
- ❖ Kawasan Cagar Budaya
- ❖ Kawasan rawan Bencana Alam.
- ❖ Kawasan lindung lainnya meliputi :
 - Kawasan taman baru
 - Kawasan Pantai berhutan bakau.

c. Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan faktor penting dalam pembangunan karena bukan hanya berperan sebagai pelaksana pembangunan, namun juga menjadi sasaran pembangunan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk, pembangunan harus diarahkan pada pengendalian jumlah penduduk, peningkatan kualitas, serta penerangan mobilitas sehingga mempunyai ciri dan karakteristik yang bersinergi dengan tujuan pembangunan. Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk suatu wilayah dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk mengetahui kecenderungan penyebaran penduduk. Jumlah penduduk yang besar cenderung mengelompok pada lokasi tertentu, sehingga menyebabkan pola penyebaran tidak merata. Kepadatan penduduk yang tinggi pada umumnya ditemukan di wilayah perkotaan, karena merupakan sentra aktivitas ekonomi. Secara rinci sebaran jumlah penduduk dapat dilihat pada Tabel I.1.

Tabel I.1
Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2017-2021

No.	Kabupaten/kota	Jumlah Penduduk Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021

1.	Banggai Kepulauan	116.811	117.633	118.400	120.142	123.934
2.	Banggai	365.616	371.322	376.810	362.275	369.344
3.	Morowali	117.330	119.292	121.300	161.727	162.098
4.	Poso	245.993	251.185	256.390	244.875	248.698
5.	Donggala	299.174	301.591	304.110	300.436	306.598
6.	Tolitoli	230.996	233.409	235.800	225.154	223.427
7.	Buol	155.593	158.790	162.180	145.254	150.924
8.	Parigi Moutong	474.339	482.794	490.920	440.015	451.312
9.	Tojo Una-Una	150.820	152.476	153.990	163.829	166.327
10.	Sigi	234.588	237.011	239.420	257.585	258.483
11.	Banggai Laut	72.298	73.697	75.000	70.435	72.902
12.	Morowali Utara	122.985	125.624	128.320	120.789	126.812
13.	Palu	379.872	385.619	391.380	373.218	373.654
Sulawesi Tengah		2.966.325	3.010.443	3.054.023	2.985.734	3.034.513

Sumber: BPS Sulawesi Tengah, Tahun 2017-2021

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Sulawesi Tengah selama 5 tahun terakhir dari 2017-2021 cenderung meningkat, yakni dari 2.966.325 jiwa pada tahun 2017 menjadi 3.034.513 jiwa pada tahun 2021. Terlihat bahwa di kabupaten Parigi Moutong yang terbesar, menyusul terbesar kedua dan ketiga masing-masing Kota

Palu, dan Kabupaten Banggai, sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kabupaten Banggai Laut.

Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan Penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat penambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial. Secara rinci data pertumbuhan penduduk menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel I.2.

d. Jumlah Kabupaten/Kota

Tabel I.2

Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017-2021

No.	Kabupaten	Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)				Rataan
		2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	
1.	Banggai Kepulauan	0,69	0,70	0,65	1,47	0,88
2.	Banggai	1,55	1,56	1,48	-3,86	0,18
3.	Morowali	1,85	1,67	1,68	33,33	9,63
4.	Poso	2,15	2,11	2,07	-4,49	0,46
5.	Donggala	0,94	0,81	0,84	-1,21	0,34

6.	Tolitoli	1,09	1,04	1,02	-4,52	-0,34
7.	Buol	2,16	2,05	2,13	-10,44	-1,02
8.	Parigi Moutong	1,82	1,78	1,68	-10,37	-1,27
9.	Tojo Una-Una	1,08	1,10	0,99	6,39	2,39
10.	Sigi	1,04	1,03	1,02	7,59	2,67
11.	Banggai Laut	1,99	1,94	1,77	-6,08	-0,10
12.	Morowali Utara	2,21	2,15	2,15	-5,87	0,16
13.	Palu	1,54	1,54	1,49	-4,64	-0,02
	Rata-rata	1,53	1,49	1,45	-2,24	0,56

Sumber: BPS Sulawesi Tengah, Tahun 2017-2021.

Berdasarkan perhitungan data penduduk BPS Tahun 2017 hingga 2021 pertumbuhan penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah terus menurun setiap tahunnya. Tercatat pada Tahun 2016-2017, rata-rata pertumbuhan penduduk sebesar 1,53 persen dan pada Tahun 2019-2020 pertumbuhan penduduk menurun menjadi 2,24 persen.

Tingkat kepadatan untuk daerah-daerah yang wilayahnya luas dan sumber daya alamnya potensial untuk dikembangkan sangat membutuhkan tenaga kerja dalam pengelolaannya. Dalam hal ini yang diperlukan adalah pemerataan jumlah penduduk, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian dalam proses pembangunan adalah

beberapa masalah kependudukan antara lain persebaran dan kepadatan penduduk dalam suatu daerah. Secara rinci data Tingkat Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada Tabel I.3.

Tabel I.3
Tingkat Kepadatan Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021

No.	Kabupaten	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1.	Banggai Kepulauan	120.142	2.488,79	0,65
2.	Banggai	362.275	9.672,70	1,48
3.	Morowali	161.727	3.037,04	1,68
4.	Poso	244.875	7.112,25	2,07
5.	Donggala	300.436	4.275,08	0,84
6.	Tolitoli	225.154	4.079,77	1,02
7.	Buol	145.254	4.043,57	2,13
8.	Parigi Moutong	440.015	5.089,91	1,68
9.	Tojo Una-Una	163.829	5.721,15	0,99
10.	Sigi	257.585	5.196,02	1,02
11.	Banggai Laut	70.435	725,67	1,77
12.	Morowali Utara	120.789	10.004,28	2,15

13.	Palu	373.218	395,06	1,49
Provinsi Sulawesi Tengah		2.985.734	61.841,29	48
Tahun 2019				49
Tahun 2018				49
Tahun 2017				48

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2017-2021.

Tingkat kepadatan penduduk Sulawesi Tengah cenderung meningkat sejak periode Tahun 2017-2020 yakni dari 48 jiwa/Km² pada tahun 2017 menjadi 49 jiwa/Km² pada Tahun 2019. Kota Palu merupakan daerah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, sementara terendah di Kabupaten Morowali Utara

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Tabel Jumlah PNS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

NO	Uraian	Jenis Kelamin				Total
		Pria	%	Wanita	%	
	Provinsi Sulawesi Tengah	5537	48.21%	5949	51.79%	11486

Keadan PNS Provinsi Sulawesi Tengah 2021

NO	Jenis Kelamin	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pria	6456	6221	5993	5831	5537
2.	Wanita	6316	6241	6199	6094	5949
Total		7.147	12.772	12.462	12.192	11.925

PNS Provinsi Sulawesi Tengah 5 Tahun Terakhir

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
4	PENDAPATAN DAERAH	4.327.677.511.238,00	4.690.755.791.004,80	108,39	4.193.329.057.130,07
		1.247.983.639.798,00	1.494.014.931.911,51	119,71	1.122.670.398.589,07
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	934.000.000.000,00	1.074.421.924.800,60	115,03	914.780.331.698,60
4.1.1	Pajak Daerah	18.092.405.000,00	19.110.160.345,00	105,63	14.690.106.655,58
4.1.2	Retribusi Daerah	32.380.692.073,00	32.558.872.743,29	100,55	21.914.954.430,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah	263.510.542.725,00	367.923.974.022,62	139,62	171.285.005.804,89
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.022.204.549.603,00	3.144.403.189.573,00	104,04	3.056.236.498.750,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.022.204.549.603,00	3.144.403.189.573,00	104,04	3.055.555.418.224,00
4.2.1.1	Dana Perimbangan	2.977.169.551.603,00	3.099.368.191.573,00	104,10	3.030.626.794.224,00
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	45.034.998.000,00	45.034.998.000,00	100,00	24.928.624.000,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	681.080.526,00
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	681.080.526,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	57.489.321.837,00	52.337.669.520,29	91,04	14.422.159.791,00
4.3.1	Pendapatan Hibah				
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	22.084.408.107,00	16.767.305.768,00	75,92	14.422.159.791,00
	BELANJA DAERAH	35.404.913.730,00	35.570.363.752,29	100,47	0,00
5	BELANJA OPERASI	4.669.877.792.403,00	4.319.599.809.754,93	92,50	4.281.057.917.890,90
	Belanja Pegawai	3.509.149.393.125,00	3.289.856.910.184,77	93,75	3.144.723.540.352,95
	Belanja Barang dan Jasa				

5.1	Belanja Hibah	1.458.829.705.062,00	1.263.356.173.715,00	86,60	1.348.495.563.229,00
5.1.1	Belanja Bantuan Sosial	1.474.431.810.012,00	1.323.897.277.824,77	89,79	907.419.260.623,95
5.1.2	BELANJA MODAL	572.263.574.741,00	699.443.960.645,00	122,22	887.617.216.500,00
5.1.5	Belanja Modal Tanah	3.624.303.310,00	3.159.498.000,00	87,18	1.191.500.000,00
5.1.6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	551.710.548.662,00	472.826.631.415,16	85,70	665.439.891.390,95
5.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.575.077.500,00	868.556.000,00	33,73	835.750.000,00
5.2.1	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Belanja Modal Aset Tetap	156.781.842.193,00	118.899.402.834,00	75,84	229.478.761.975,00
5.2.2	Lainnya	160.486.066.118,00	146.500.635.512,15	91,29	244.805.546.096,95
5.2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	211.720.700.951,00	203.823.761.156,01	96,27	147.282.208.399,00
5.2.4	Belanja Tidak Terduga	20.146.861.900,00	2.734.275.913,00	13,57	43.037.624.920,00
5.2.5	BELANJA TRANSFER				
5.3	Belanja Bagi Hasil	48.340.941.009,00	23.674.085.565,00	48,97	2.399.381.313,00
5.3.1		48.340.941.009,00	23.674.085.565,00	48,97	2.399.381.313,00
5.4		560.676.909.607,00	533.242.182.590,00	95,11	468.495.104.834,00
5.4.1		504.788.909.607,00	502.418.982.590,00	99,53	427.382.228.304,00

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI I 2020
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	55.888.000.000,00	30.823.200.000,00	55,15	41.112.876.530,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(342.200.281.165,00)	371.155.981.249,87	(108,46)	(87.728.860.760,83)
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	342.200.281.165,00	342.200.237.073,77	100,00	429.929.141.925,60
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	342.200.281.165,00	342.200.237.073,77	100,00	429.929.141.925,60
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	342.200.281.165,00	342.200.237.073,77	100,00	429.929.141.925,60
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	713.356.218.323,64	0,00	342.200.281.164,77

Sumber Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 sebelum Audit BPK RI

Pada Tahun Anggaran 2021 Pendapatan Daerah Sulawesi Tengah direncanakan sebesar Rp.4.327.677.511.238,00 pada akhir desember tahun 2021 terealisasi melebihi target sebesar Rp.4.695.449.444.004,80 atau 108,50 persen. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Target PAD pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.1.247.983.639.798,00 terealisasi melebihi dari yang ditargetkan sebesar Rp.1.494.014.931.911,51 atau 119,71 persen. Dana Perimbangan yang merupakan transfer Pemerintah Pusat Tidak terealisasi seluruhnya dalam kurun waktu tahun 2021. Hal ini ditunjukkan dengan target angka dana perimbangan pada tahun 2021 sebesar Rp.3.022.204.549.603,00 terealisasi sebesar Rp.3.149.096.842.573.00 atau sebesar 104,20 persen. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD bersumber dari Pendapatan Hibah, Dana Penyesuaian Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp.57,489,321,837,00 pada akhir tahun terealisasi sebesar Rp.52,337,669,520,29 atau sebesar 91,04 persen.

Pada Tahun 2021 Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah direncanakan sebesar Rp. 4.669.877.792.403,00 dan pada akhir desember tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 4.319.599.809.754,93 atau 92,50 persen. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja

Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Target Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 3.509.149.393.125,00 terealisasi kurang dari rencana yang ditargetkan yaitu sebesar Rp. 3.289.856.910.184,77 atau 93,75 persen. Hal ini disebabkan realisasi belanja pegawai hanya mencapai 86,60 persen, Belanja Hibah 122,22 persen, Belanja Bansos 87,18 persen, Belanja Barang dan Jasa 89,79 persen. Sedangkan di sisi Belanja Modal pada tahun 2021 menargetkan pengeluaran belanja sebesar Rp. 551.710.548.662,00 terealisasi sebesar Rp. 472.826.631.415,16 atau terealisasi sebesar 85,70 persen. Belanja ini terdiri dari realisasi belanja Belanja Modal Tanah sebesar 33,73 persen, Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar 75,84 persen serta Modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar 91,29 persen, Jalan, Jaringan, dan Irigas terealisasi sebesar 96,27 persen, dan Belanja Aset Tetap terealisasi sebesar 13,57 persen. Kemudian pada target dan realisasi Belanja Tidak Terduga menargetkan pengeluaran sebesar Rp. 48.340.941.009,00 terealisasi sebesar Rp. 23.674.085.565,00 atau terealisasi 14,29 persen. Sedangkan pada Belanja Transfer pada tahun 2021 menargetkan pengeluaran dengan target sebesar Rp. 560.676.909.607,00 terealisasi sebesar Rp. 533.242.182.590,00 terealisasi 95,11 persen. Belanja ini terdiri dari Belanja Bagi Hasil terealisasi sebesar 99,53 persen, Belanja Bantuan Keuangan terealisasi sebesar 55,15 persen. Pada Tahun 2021 Penerimaan Pembiayaan Daerah Sulawesi Tengah ditargetkan sebesar Rp. 342.200.281.165,00 dan realisasi Total Pembiayaan Netto pada akhir tahun

2020 adalah sebesar Rp. 342.200.237.073,77. Sehingga menghasilkan jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp. 713.356.218.323,64

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah

Berdasarkan potensi daerah, analisis permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis baik pada skala daerah, nasional dan global, maka dirumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Daerah (RPJMD). Mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2005-2025 Tahap Keempat, Visi dan Misi Gubernur/Wakil Gubernur yang disusun atas dasar kondisi obyektif kekinian daerah, maka Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026, ditetapkan dengan rumusan :

“Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”

Sulawesi Tengah adalah kesatuan wilayah dan masyarakat provinsi yang terbentuk berdasarkan undang-undang Nomor 13 Tahun 1964, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7) yang disahkan pada 23 september 1964. Sebagai daerah otonom, maka Provinsi

Sulawesi Tengah dalam kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah dan berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia, yang secara administratif terbagi ke dalam 12 kabupaten dan 1 kota.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

1. Visi

Akselerasi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan implementasi otonomi daerah, merupakan kebijakan yang sangat strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan faktor *endowment* yang dimiliki daerah. Secara garis besar eksistensi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026, dinyatakan strategis oleh karena beberapa faktor, antara lain : Pertama, dokumen perencanaan yang disusun, disamping melanjutkan tahapan pembangunan RPJMD periode 2016-2021, juga mempertimbangkan berbagai dampak sosial, ekonomi dan budaya dua momentum penting dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan, yaitu (1). Kondisi pasca gempa dan tsunami, (2). Kondisi saat dan pasca pandemi Covid-19 (new normal); Kedua, RPJMD juga mengakomodir aspek kewilayahan secara holistik-integratif dan komprehensif dalam suatu pendekatan perencanaan yang “ *Incorporated*”,

sehingga tercipta keselarasan perencanaan perencanaan antar kabupaten/kota dengan provinsi; Ketiga, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026 akan menjadi acuan dan pondasi yang kuat untuk menjadi titik awal dalam penyusunan klerangka perencanaan jangka panjang daerah (RPJMD) periode selanjutnya menuju 100 tahun Provinsi Sulawesi Tengah.

Sebagai suatu rangkaian proses, penyusunan RPJMD dilaksanakan berdasarkan tahapan-tahapan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, sehingga perencanaan pembangunan daerah dapat menjadi pedoman dan arahan dalam memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya daerah secara efisien, efektif dan berdaya guna. Optimalisasi pemanfaatan potensi daerah menjadi sumber daya pembangunan harus didukung oleh model dan paradigma perencanaan dengan pendekatan holistik, tematik, terintegrasi dan spasial, yaitu suatu perencanaan yang sistematis, terstruktur dan terukur serta pelibatan seluruh masyarakat secara partisipatif.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah hanya dapat diwujudkan bila didasarkan pada konsep perencanaan yang disertai dengan tindakan nyata sesuai dengan program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Visi dan Misi sebagai satu kesatuan konsep perencanaan, merupakan ajuan bagi semua pemangku kepentingan dalam menyusun

program dan kegiatannya masing-masing. Misi merupakan cara bagaimana mewujudkan Visi, sehingga perencanaan pembangunan harus disusun dan dirumuskan secara rinci dan realistis disertai dengan tindakan nyata sebagai arah kebijakan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan.

Visi pembangunan daerah sebagai gambaran arah tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, secara obyektif dan faktual harus memiliki kewajaran dan kelayakan untuk diwujudkan dalam situasi, kondisi dan kapasitas sumber daya daerah yang tersedia berdasarkan keragaman potensi kewilayahan. Pemanfaatan kapasitas sumber daya yang bersifat strategis tersebut dimaksudkan guna menjawab permasalahan dan isu-isu strategis daerah, sehingga pemerintahan dan pembangunan dapat terselenggara secara konsisten dan berkelanjutan serta menjamin eksistensi daerah di masa depan.

Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang tertuang dalam RPJMD juga merupakan konsepsi dasar dari suatu tatanan kehidupan yang dicita – citakan, sehingga dapat menjadi daya pendorong dan daya ungkit (*leverage*) bagi seluruh komponen masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik dimasa mendatang. Secara konsepsional gagasan “*Incorporated*” merupakan suatu pendekatan perencanaan yang memadukan perbedaan potensi kewilayahan menjadi satu kekuatan dalam menentynkan arah dan tujuan pembangunan daerah yang bersifat strategis.

Pencapaian tujuan pembangunan harus pula ditunjang oleh pengelolaan manajemen pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemberdayaan masyarakat, memnyatukan persepsi, interpretasi dan komitmen seluruh elemen masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan daerah.

Berdasarkan potensi daerah, analisis permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis baik pada skala daerah, nasional dan global, maka dirumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Daerah (RPJMD). Mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2005-2025 Tahap Keempat, Visi dan Misi Gubernur/Wakil Gubernur yang disusun atas dasar kondisi obyektif kekinian daerah, maka Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026, ditetapkan dengan rumusan :

“Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”

Sulawesi Tengah adalah kesatuan wilayah dan masyarakat provinsi yang terbentuk berdasarkan undang-undang Nomor 13 Tahun 1964, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7) yang

disahkan pada 23 september 1964. Sebagai daerah otonom, maka Provinsi Sulawesi Tengah dalam kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah dan berwenang menmgatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesi, yang secara administratif terbagi ke dalam 12 kabupaten dan 1 kota.

Visi sebagai cita-cita dan haraopian yang ingin diwujudkan oleh Provinsi Sulawesi Tengah 5 (lima) tahun ke depan, dapat dimaknai pada tabel berikut:

Tabel I.1.

Perumusan Penjelasan Visi

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
	<p>1. Gerak Cepat</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dapat dimaknai sebagai suatu tindakan yang dilakukan secara cepat melebihi tindakan normal, termasuk cepat dalam bertindak untuk menyelesaikan berbagai masalah, serta cepat mengetahui jika terjadi suatu kesalahan untuk kemudian memberikan solusi yang tepat.

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
<p><i>“SULAWESI TENGAH MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING”</i></p>		
	<p>2. Lebih Sejahtera</p>	<p>▪ Dapat dimaknai sebagai gambaran kondisi masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah yang terbebas dari ancaman dan tekanan fisik, terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik pangan, sandang, perumahan yang layak dan memperoleh akses pelayanan dasar dibidang pendidikan dan kesehatan yang lebih berkualitas dan adil bagi seluruh masyarakat serta terbukanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dengan penghasilan yang lebih memadai. Lebih sejahtera juga dapat dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang memiliki akses yang lebih luas dan lebih merata dalam menmgembangkan potensi</p>

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
		<p>dirinya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya secara ekonomi dan sosial; serta terciptanya rasa aman dari berbagai ancaman</p>
	<p>3.Lebih Maju</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gambaran dari kondisi suatu masyarakat yang lebih dinamis dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, ke arah yang lebih baik melalui berbagai inovasi yang terintegrasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi . ▪ Lebih maju dapat pula merupakan suatu kondisi kehidupan komunitas masyarakat yang jauh lebih baik secara ekonomi, sosial maupun budaya sehingga dapat mengatasi

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
		berbagai permasalahan yang dihadapi secara mandiri.

Visi daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang tertuang dalam RPJPD Periode 2021-2026 harus pula merefleksikan Visi yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2005-2025, yaitu “*Sulawesi Tengah Yang Maju, Mandiri, Sejahtera, Aman Dan Berkeadilan*”. Provinsi Sulawesi Tengah dengan kondisi geografis wilayah daratan yang memiliki basis pada sumber daya alam dan wilayah perairan yang potensial sebagai keunggulan daerah, sehingga dapat di kelola dan dimanfaatkan secara optimal guna meningkatkan daya saing daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

Makna yang terkandung dalam visi RPJPD tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Adanya peningkatan, pertumbuhan dan pengembangan berbagai bidang pembangunan yang berorientasi ke masa depan;
2. Melakukan inovasi melalui adaptasi dan responsif terhadap berbagai perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi;
3. Memiliki kemampuan, prakarsa, motivasi dan mempunyai rasa percaya diri dalam mengolah dan mengembangkan potensi yang dimiliki secara swadaya;

4. Terciptanya kondisi kehidupan masyarakat yang sejahtera, yaitu memadai dari segi ekonomi dan sosial, terbebas dari berbagai hambatan dan kesulitan hidup serta terciptanya suasana kebahagiaan hidup secara bersama;
5. Terjaminnya suasana kehidupan masyarakat yang harmonis, sehingga tercipta solidaritas dan kebersamaan sebagai warga negara, hidup berdampingan untuk terwujudnya masyarakat yang sejahtera serta terjalinnya sinergitas kesadaran, ketaatan dan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat;
6. Terciptanya rasa keadilan masyarakat dalam memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban, perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai wujud penegakan supremasi hukum dan HAM, serta saling menghormati keberagaman dalam kebangsaan dan bernegara.

2. MISI

Sebagai penjabaran Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026, maka dirumuskan Misi sebagai berikut:

Misi 1: Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui berbagai aksi, yaitu membangun sistem pendidikan terpadu berbasis pendidikan kejuruan/vokasi, pesantren, melaksanakan kegiatan *retrieval*, yaitu menelusuri dan menyekolahkan

kembali anak usia SLTA yang putus sekolah karena alasan ekonomi, serta meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan melalui fasilitasi dan penyediaan pembiayaan kesehatan gratis bagi keluarga miskin dan rentan, mengembangkan Sistem Jaminan Gizi dan Tumbuh kembang Anak di Perkotaan, Perdesaan dan Wilayah Terpencil untuk memastikan penurunan angka *stunting* dan penurunan angka kematian ibu dan Balita, mengefektifkan penanganan masyarakat terdampak *Covid-19* secara menyeluruh dan melanjutkan pemantauan terhadap penyintas maupun masyarakat secara umum melalui pelayanan kesehatan preventif dan promotif guna memastikan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Misi 2: Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan Dan HAM.

Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan kelembagaan birokrasi yang kuat, sehingga mampu memberikan pelayanan prima dan berkualitas, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan kepada masyarakat, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Peningkatan sumber daya manusia aparatur pemerintah melalui berbagai pendidikan dan pelatihan teknik untuk meningkatkan kompetensi aparatur yang profesional melalui inovasi berbasis Iptek, sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efisien, efektif dan akuntabel. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan melalui penegakan supermasi hukum sehingga

seluruh masyarakat memperoleh pelayanan yang adil dan merata sebagai perwujudan azas kesamaan dihadapan hukum (equality before the law) serta menjunjung tinggi penegakan Hukum. Program Utama yang hendak dijalankan adalah membangun aparatur sipil negara yang profesional, reformasi sistem perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas birokrasi yang bertransformasi dari *Money Follow Function* menjadi *Money Follow Program*, reformasi kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien, serta reformasi pelayanan publik yang berkualitas melalui digitalisasi dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi secara optimal. Percepatan reformasi birokrasi guna meningkatkan penguatan kelembagaan pemerintah daerah, merupakan keniscayaan sehingga harus dilakukan melalui berbagai kebijakan terkait dengan 8 area perubahan dalam mendorong reformasi birokrasi tersebut, yang meliputi: (1) Manajemen perubahan; (2) Deregulasi kebijakan; (3) Penataan organisasi; (4) Penataan Tatalaksana; (5) Penataan Sumber daya aparatur; (6) Penguatan akuntabilitas; (7) Penguatan pengawasan, dan; (8) Peningkatan kualitas pelayanan public.

Misi 3: Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan

dan penguatan kelembagaan ekonomi dan sosial, sehingga mampu menggerakkan perekonomian guna meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Misi ini juga dimaksudkan sebagai upaya mengatasi kerentanan sosial yang dihadapi oleh masyarakat khususnya masyarakat miskin dan masyarakat yang terdampak bencana alam dan sosial, sekaligus merupakan bagian dari tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di Provinsi Sulawesi Tengah. Percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem juga menjadi fokus penanganan bidang sosial yang harus didukung oleh penyediaan dana yang memadai termasuk dana desa.

Misi 4: Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.

Misi ini dimaksudkan untuk mengembangkan infrastruktur daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha kreatif, peningkatan aktivitas pengelolaan sumber daya alam berbasis potensi wilayah di berbagai sector ekonomi terutama usaha kecil dan menengah, membuka keterisolasian dan meningkatkan konektivitas antar wilayah, khususnya daerah terpencil. Merevitalisasi berbagai sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, irigasi dan sanitasi sebagai daerah yang sewaktu-waktu terancam bencana alam. Percepatan pembangunan infrastruktur guna membuka akses transportasi darat antar daerah dalam provinsi dan antar provinsi, termasuk akses yang

menghubungkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu dengan wilayah-wilayah *hinterland*.

Misi 5: Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan.

Misi ini untuk mewujudkan terciptanya pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah, yaitu dengan menjalankan program redistribusi asset bagi pembangunan berkeadilan, Sinergitas Memanfaatkan Dana Desa dan Dana Kelurahan di Kabupaten/Kota bagi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan antar Kecamatan maupun antar Perdesaan, memperkuat kelembagaan ekonomi di perdesaan dan wilayah terpencil termasuk membangun rantai usaha antara Bumdes dengan BUMD dan swasta, serta mengembangkan potensi ekonomi perdesaan bagi pemerataan antar wilayah melalui peningkatan produktivitas dan kapasitas SDM, dan penyediaan lapangan kerja melalui program padat karya guna menurunkan angka pengangguran.

Misi 6: Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup sehingga tercipta suatu kehidupan harmonis dan bahagia, melalui peningkatan kualitas penyediaan air bersih, listrik, perumahan dan penataan lingkungan kumuh. Misi ini akan diwujudkan melalui program penataan ruang

terintegrasi, penataan permukiman dan manajemen pengelolaan sampah, penyediaan ruang terbuka hijau, mitigasi perubahan iklim dan penegakan hukum dan rehabilitasi lingkungan hidup, serta memastikan agar seluruh aktivitas kegiatan masyarakat ramah lingkungan, guna mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.

Misi 7: Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulawesi Tengah dan di luar Provinsi bertetangga.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan percepatan pembangunan dan optimalisasi pengelolaan sektor unggulan melalui peningkatan kerja sama pembangunan antar daerah dalam lingkup provinsi maupun dengan daerah di luar provinsi. Misi ini akan dijalankan melalui kerjasama antar daerah utamanya sekawasan Teluk Tolo baik Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, se Kawasan Laut Sulawesi di Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, sekawasan Teluk Tomini dan Perairan Halmahera Bagian Barat terdiri dari Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah, menata hubungan antara Provinsi Sulawesi Tengah dengan Pemerintah Pusat yang lebih sinergis, serta meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan di

Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelayanan publik dan peningkatan inovasi dan daya saing Provinsi Sulawesi Tengah.

Misi 8: Meningkatkan Pelayanan Publik bidang Pendidikan dan Kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistematis dan digital.

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik terutama bidang pendidikan dan kesehatan serta pelayanan publik pada semua bidang kepada masyarakat melalui teknologi informasi dan pengembangan sistem terintegrasi dan digitalisasi, guna mewujudkan pelayanan prima, efisien dan efektif.

Misi 9: Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.

Misi ini merupakan perwujudan cita-cita untuk mencapai 100 tahun Sulawesi Tengah di Tahun 2064, melalui kajian pembentukan daerah otonomi baru. Guna mewujudkan misi ini, perlu pertimbangkan berbagai regulasi dan kebijakan Pemerintah terkait dengan pembentukan daerah otonomi baru, namun demikian upaya penyiapan perlu dilakukan melalui berbagai kajian kelayakan secara komprehensif.

Masyarakat Sulawesi Tengah yang Lebih Sejahtera dan Lebih Maju dapat dimaknai sebagai terciptanya suatu tatanan masyarakat secara kolektif,

yang lebih maju di segala bidang kehidupan sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup lahir dan bathin secara swadaya yang dicapai melalui pemanfaatan secara optimal sumber daya dengan pelibatan secara aktif seluruh pemangku kepentingan dalam kegiatan pembangunan.

RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah seyogyanya menjadi bagian dari pencapaian 5 Misi yang merupakan penjabaran dari Visi RPJPD Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 yaitu *“Sulawesi Tengah Maju, Mandiri dan Berdaya Saing”*, sehingga terjadi keselarasan misi antara perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah yang tertuang dalam RPJMD dengan misi yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025. sebagaimana disajikan pada keterangan sebagai berikut:

Misi 1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Misi RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu Misi: (1). Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; (5). Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.

Misi 2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan Dan HAM.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Misi RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu Misi: (6). Penegakan Sistem Hukum yang Berbasis Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; (7). Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan

Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; (8). Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, dan; (9). Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Misi 3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Misi RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu Misi (2). Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing.

Misi 4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Misi RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu Misi: (3). Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; dan (9). Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Misi 5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Misi RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu Misi: (2). Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing; dan (3). Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.

Misi 6. Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Misi RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu Misi: (4). Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Misi 7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulawesi Tengah dan di luar Provinsi bertetangga.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Misi RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu Misi: (2). Struktur Ekonomi yang Produktif Mandiri dan Berdaya Saing, dan (9). Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Misi 8. Meningkatkan Pelayanan Publik bidang Pendidikan dan Kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistematis dan digital.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Misi RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu Misi: (1). Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, dan; (8). Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.

Misi 9. Mendorong Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Misi RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu Misi: (3). Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.

Selanjutnya, selain RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 memiliki keselarasan dengan RPJMN Tahun 2020-2024, maka perlu pula memperhatikan direktif presiden sebagai arahan dalam upaya yang akan dilakukan dalam pencapaian Sasaran Visi Indonesia 2045, sehingga terjadi

keselarasan misi antara perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah yang tertuang dalam RPJMD dengan 5 Sasaran Visi Indonesia 2045.

Keselarasn Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026, dengan Pencapaian Sasaran Visi Indonesia 2045, diuraikan sebagai berikut:

Misi 1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.

Misi ini memiliki keselarasn dengan sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu (1). Pembangunan Sumber Daya Manusia.

Misi 2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan Dan HAM.

Misi ini memiliki keselarasn dengan sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu (3). Penyederhanaan Regulasi, dan; (4). Penyederhanaan Birokrasi.

Misi 3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.

Misi ini memiliki keselarasn dengan sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu (1). Pembangunan Sumber Daya Manusia, dan; (5). Transformasi Ekonomi.

Misi 4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.

Misi ini memiliki keselarasn dengan sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu (2). Pembangunan Infrastruktur, dan; (5). Transformasi Ekonomi.

Misi 5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan.

Misi ini memiliki keselarasan dengan sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu (1). Pembangunan Sumber Daya Manusia; (2). Pembangunan Infrastruktur, dan; (5). Transformasi Ekonomi.

Misi 6. Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.

Misi ini memiliki keselarasan dengan sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu (1). Pembangunan Sumber Daya Manusia; (2). Pembangunan Infrastruktur, dan; (5). Transformasi Ekonomi.

Misi 7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulawesi Tengah dan di luar Provinsi bertetangga.

Misi ini memiliki keselarasan dengan sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu (2). Pembangunan Infrastruktur; (3). Penyederhanaan Regulasi, dan; (5). Transformasi Ekonomi.

Misi 8. Meningkatkan Pelayanan Publik bidang Pendidikan dan Kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistematis dan digital.

Misi ini memiliki keselarasan dengan sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu (1). Pembangunan Sumber Daya Manusia; (2). Pembangunan Infrastruktur; (3). Penyederhanaan Regulasi, dan;

Misi 9. Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.

Misi ini memiliki keselarasan dengan sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu (1). Pembangunan Sumber Daya Manusia; (2). Pembangunan Infrastruktur; dan (5). Transformasi Ekonomi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, secara normative mengatur keselarasan antara misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026 perlu pula memperhatikan tiga dimensi pembangunan, yang meliputi: (1) Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat; (2) Dimensi Pembangunan sektor unggulan dan prioritas, dan; (3) Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan.

Pembangunan daerah sebagai bagian yang terpisahkan dengan pembangunan nasional, maka menjadi penting untuk menyelaraskan misi RPJMD dengan tujuh agenda pembangunan nasional periode 2020-2024. Keselarasan misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026, dengan Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024, diuraikan sebagai berikut:

Misi 1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Agenda Pembangunan Nasional, yaitu agenda: (3). Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, dan; (4). Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Misi 2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan Dan HAM.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Agenda Pembangunan Nasional, yaitu agenda: (3). Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; dan (4). Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dan; (7). Stabilitas Polhukankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Misi 3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Agenda Pembangunan Nasional, yaitu agenda: (1). Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan; (2). Pembangunan Wilayah untuk mengurangi Kesenjangan, dan; (3). Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.

Misi 4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Agenda Pembangunan Nasional, yaitu agenda: (2). Pengembangan Wilayah untuk mengurangi Kesenjangan, dan; (5) Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Misi 5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Agenda Pembangunan Nasional, yaitu agenda: (1). Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, dan; (7). Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Misi 6. Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Agenda Pembangunan Nasional, yaitu agenda: (2). Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan; (4). Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dan; (6). Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Misi 7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulawesi Tengah dan di luar Provinsi bertetangga.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Agenda Pembangunan Nasional, yaitu agenda: (2). Pengembangan Wilayah untuk mengurangi Kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Misi 8. Meningkatkan Pelayanan Publik bidang Pendidikan dan Kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistematis dan digital.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Agenda Pembangunan Nasional, yaitu agenda: (7). Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Misi 9. Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Agenda Pembangunan Nasional, yaitu agenda: (2) Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan.

Keselarasan misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026, dengan berbagai dokumen perencanaan pada skala nasional, provinsi dan RPJP maupun RTRW Provinsi Sulawesi Tengah, harus pula terintegrasi dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Hal ini dimaksudkan agar pembangunan daerah yang akan dilaksanakan lima tahun akan datang menjadi bagian dari target-target tujuan pembangunan global, sehingga pada Tahun 2030, akan menghasilkan kondisi kesejahteraan yang relative semakin membaik bagi penduduk di seluruh dunia dengan tetap menjaga

keberlanjutan pembangunan di masa yang akan datang, melalui pelaksanaan pembangunan yang berbasis pada keseimbangan lingkungan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) bertujuan mewujudkan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Penyusunan perencanaan pembangunan yang mengintegrasikan SDGs ke dalam dokumen perencanaan, tercermin dari program yang akan dilaksanakan dalam lima tahun mendatang, bertujuan untuk:

- 1) Menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan ketersediaan dan kecukupan pangan, meningkatkan derajat kesehatan, melaksanakan pendidikan yang berkualitas, meningkatkan kesetaraan gender serta penyediaan air bersih dan sanitasi yang berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat secara merata;
- 2) Penyediaan energy yang terjangkau, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pekerjaan yang layak, pembangunan infrastruktur dan pengembangan industri inklusif dan inovatif, penurunan kesenjangan dan penataan kota inklusif dan berkelanjutan;

- 3) Menumbuhkan perilaku konsumsi dan produksi berkelanjutan, meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan perubahan iklim pengurangan resiko bencana, menjaga kelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem laut dan ekosistem darat.
- 4) Menjaga perdamaian, keadilan dan penguatan kelembagaan, membangun politik dan hukum serta menjalin kemitraan untuk melaksanakan semua tujuan pembangunan.

Pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs, bertumpu pada prinsip dasar manajemen pembangunan, yaitu memanfaatkan secara optimal seluruh potensi sumberdaya pembangunan yang dimiliki daerah dengan tetap mengacu pada batas-batas toleransi kerusakan lingkungan, degradasi daya dukung lahan, perubahan iklim dan berkelanjutan ekosistem laut dan darat.

Target pencapaian SDGs yang mencakup 17 tujuan, yang dikelompokkan dalam 4 pilar pembangunan, yaitu Pilar Sosial, Ekonomi, Lingkungan dan Hukum & Tata Kelola. Misi Pemerintah Daerah sebagai penjabaran Visi diuraikan ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, untuk selanjutnya menentukan program dan kegiatan. Integrasi visi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Periode 2021-2026, dengan berbagai pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Misi 1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Tujuan dan Program dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), yaitu tujuan: (1). mengakhiri segala bentuk kemiskinan; (2). Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan; (3). Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; (4). Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua; (6). Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua, dan; (16). Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

Misi 2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan Dan HAM.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Tujuan dan Program dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), yaitu tujuan: (1). mengakhiri segala bentuk kemiskinan; (2). Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan; (3). Menjamin kehidupan yang sehat dan

meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; (4). Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua; (5). Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan; (8). Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua, dan; (16). Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

Misi 3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Tujuan dan Program dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), yaitu tujuan: (1). mengakhiri segala bentuk kemiskinan; (2). Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan; (3). Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; (4). Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua; (6). Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua; (7). Menjamin akses energi yang terjangkau andal, berkelanjutan, dan modern

untuk semua; (8). Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua; (9). Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi; (10). Mengurangi kesenjangan intra dan antar Negara; (12). Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; (14). Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan; (15). Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari , menghentikan penggusuran, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan; (16). Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

Misi 4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Tujuan dan Program dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), yaitu tujuan: (7). Menjamin akses energi yang terjangkau andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua; (9). Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi; (10). Mengurangi kesenjangan intra dan antar Negara; (11). Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman,

tanggung, dan berkelanjutan, dan; (12). Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

Misi 5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Tujuan dan Program dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), yaitu tujuan: (4). Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua; (6). Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua; (7). Menjamin akses energi yang terjangkau andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua; (8). Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua; (9). Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi; (10). Mengurangi kesenjangan intra dan antar Negara; (15). Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggusuran, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan; (16). Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk

semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

Misi 6. Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Tujuan dan Program dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), yaitu tujuan: (1). mengakhiri segala bentuk kemiskinan; (2). Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan; (3). Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; (4). Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua; (13). Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya; (14). Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan; (16). Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan, dan; (17). Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Misi 7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulawesi Tengah dan di luar Provinsi bertetangga.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Tujuan dan Program dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), yaitu tujuan: (17). Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Misi 8. Meningkatkan Pelayanan Publik bidang Pendidikan dan Kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistematis dan digital.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Tujuan dan Program dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), yaitu tujuan: (2). Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan; (3). Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; (4). Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua, dan; (9). Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.

Misi 9. Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Tujuan dan Program dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), yaitu tujuan: (8). Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua; (12). Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, dan; (14). Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.

Selanjutnya, keselarasan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan acuan serta terintegrasi dan RKP semua program pencampain misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026.

Dalam penyusunan kebijakan, rencana atau program, kegiatan dan sub kegiatan, KLHS perlu menyiapkan rumusan alternatif penyempurnaan kebijakan rencana atau program agar dampak atau risiko lingkungan yang tidak diharapkan dapat diminimalisir, sedangkan dalam evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, terhadap rencana program dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak dan/atau risiko negative terhadap lingkungan.

Melalui proses KLHS, diharapkan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana program dan/atau kegiatan dapat mengetahui dan memahami pentingnya menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana program dan/atau kegiatan. Dengan demikian, maka implementasi program atau kegiatan yang mengacu pada misi RPJMD dapat mempertimbangkan seberapa besar dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas pembangunan terhadap keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem dan lingkungan.

b. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Sebagai penjabaran Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah

Periode 2021-2026, maka dirumuskan Misi sebagai berikut:

Misi 1: Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui berbagai aksi, yaitu membangun sistem pendidikan terpadu berbasis pendidikan kejuruan/vokasi, pesantren, melaksanakan kegiatan *retrieval*, yaitu menelusuri dan menyekolahkan kembali anak usia SLTA yang putus sekolah karena alasan ekonomi, serta meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan melalui fasilitasi dan penyediaan pembiayaan kesehatan gratis bagi keluarga miskin dan rentan, mengembangkan Sistem Jaminan Gizi dan Tumbuh kembang Anak di Perkotaan, Perdesaan dan Wilayah Terpencil untuk memastikan penurunan angka *stunting* dan penurunan angka kematian ibu dan Balita, mengefektifkan penanganan masyarakat terdampak *Covid-19* secara menyeluruh dan melanjutkan pemantauan terhadap penyintas maupun masyarakat secara umum melalui pelayanan kesehatan

prefentif dan promotif guna memastikan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Misi 2: Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan Dan HAM.

Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan kelembagaan birokrasi yang kuat, sehingga mampu memberikan pelayanan prima dan berkualitas, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan kepada masyarakat, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Peningkatan sumber daya manusia aparatur pemerintah melalui berbagai pendidikan dan pelatihan teknik untuk meningkatkan kompetensi aparatur yang professional melalui inovasi berbasis Iptek, sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efisien, efektif dan akuntabel. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan melalui penegakan supermasi hukum sehingga seluruh masyarakat memperoleh pelayanan yang adil dan merata sebagai perwujudan azas kesamaan dihadapan hukum (equality before the law) serta menjunjung tinggi penegakan Hukum. Program Utama yang hendak dijalankan adalah membangun aparatur sipil negara yang profesional, reformasi sistem perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas birokrasi yang bertransformasi dari *Money Follow*

Function menjadi *Money Follow Program*, reformasi kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien, serta reformasi pelayanan publik yang berkualitas melalui digitalisasi dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi secara optimal. Percepatan reformasi birokrasi guna meningkatkan penguatan kelembagaan pemerintah daerah, merupakan keniscayaan sehingga harus dilakukan melalui berbagai kebijakan terkait dengan 8 area perubahan dalam mendorong reformasi birokrasi tersebut, yang meliputi: (1) Manajemen perubahan; (2) Deregulasi kebijakan; (3) Penataan organisasi; (4) Penataan Tatalaksana; (5) Penataan Sumber daya aparatur; (6) Penguatan akuntabilitas; (7) Penguatan pengawasan, dan; (8) Peningkatan kualitas pelayanan public.

Misi 3: Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan ekonomi dan sosial, sehingga mampu menggerakkan perekonomian guna meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Misi ini juga dimaksudkan sebagai upaya mengatasi kerentanan sosial yang

dihadapi oleh masyarakat khususnya masyarakat miskin dan masyarakat yang terdampak bencana alam dan sosial, sekaligus merupakan bagian dari tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di Provinsi Sulawesi Tengah. Percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem juga menjadi fokus penanganan bidang sosial yang harus didukung oleh penyediaan dana yang memadai termasuk dana desa.

Misi 4: Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.

Misi ini dimaksudkan untuk mengembangkan infrastruktur daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha kreatif, peningkatan aktivitas pengelolaan sumber daya alam berbasis potensi wilayah di berbagai sector ekonomi terutama usaha kecil dan menengah, membuka keterisolasian dan meningkatkan konektivitas antar wilayah, khususnya daerah terpencil. Merevitalisasi berbagai sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, irigasi dan sanitasi sebagai daerah yang sewaktu-waktu terancam bencana alam. Percepatan pembangunan infrastruktur guna membuka akses transportasi darat antar daerah dalam provinsi dan antar provinsi,

termasuk akses yang menghubungkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu dengan wilayah-wilayah *hinterland*.

Misi 5: Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan.

Misi ini untuk mewujudkan terciptanya pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah, yaitu dengan menjalankan program redistribusi asset bagi pembangunan berkeadilan, Sinergitas Memanfaatkan Dana Desa dan Dana Kelurahan di Kabupaten/Kota bagi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan antar Kecamatan maupun antar Perdesaan, memperkuat kelembagaan ekonomi di perdesaan dan wilayah terpencil termasuk membangun rantai usaha antara Bumdes dengan BUMD dan swasta, serta mengembangkan potensi ekonomi perdesaan bagi pemerataan antar wilayah melalui peningkatan produktivitas dan kapasitas SDM, dan penyediaan lapangan kerja melalui program padat karya guna menurunkan angka pengangguran.

Misi 6: Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup sehingga tercipta suatu kehidupan harmonis dan bahagia,

melalui peningkatan kualitas penyediaan air bersih, listrik, perumahan dan penataan lingkungan kumuh. Misi ini akan diwujudkan melalui program penataan ruang terintegrasi, penataan permukiman dan manajemen pengelolaan sampah, penyediaan ruang terbuka hijau, mitigasi perubahan iklim dan penegakan hukum dan rehabilitasi lingkungan hidup, serta memastikan agar seluruh aktivitas kegiatan masyarakat ramah lingkungan, guna mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.

Misi 7: Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulawesi Tengah dan di luar Provinsi bertetangga.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan percepatan pembangunan dan optimalisasi pengelolaan sektor unggulan melalui peningkatan kerja sama pembangunan antar daerah dalam lingkup provinsi maupun dengan daerah di luar provinsi. Misi ini akan dijalankan melalui kerjasama antar daerah utamanya sekawasan Teluk Tolo baik Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, se Kawasan Laut Sulawesi di Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, sekawasan

Teluk Tomini dan Perairan Halmahera Bagian Barat terdiri dari Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah, menata hubungan antara Provinsi Sulawesi Tengah dengan Pemerintah Pusat yang lebih sinergis, serta meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan di Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelayanan publik dan peningkatan inovasi dan daya saing Provinsi Sulawesi Tengah.

Misi 8: Meningkatkan Pelayanan Publik bidang Pendidikan dan Kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistematis dan digital.

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik terutama bidang pendidikan dan kesehatan serta pelayanan publik pada semua bidang kepada masyarakat melalui teknologi informasi dan pengembangan sistem terintegrasi dan digitalisasi, guna mewujudkan pelayanan prima, efisien dan efektif.

Misi 9: Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.

Misi ini merupakan perwujudan cita-cita untuk mencapai 100 tahun Sulawesi Tengah di Tahun 2064, melalui kajian pembentukan daerah otonomi baru. Guna mewujudkan misi ini, perlu pertimbangkan berbagai regulasi dan kebijakan Pemerintah terkait dengan pembentukan daerah otonomi baru, namun demikian upaya penyiapan perlu dilakukan melalui berbagai kajian kelayakan secara komprehensif.

Masyarakat Sulawesi Tengah yang Lebih Sejahtera dan Lebih Maju dapat dimaknai sebagai terciptanya suatu tatanan masyarakat secara kolektif, yang lebih maju di segala bidang kehidupan sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup lahir dan bathin secara swadaya yang dicapai melalui pemanfaatan secara optimal sumber daya dengan pelibatan secara aktif seluruh pemangku kepentingan dalam kegiatan pembangunan.

RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah seyogyanya menjadi bagian dari pencapaian 5 Misi yang merupakan penjabaran dari Visi RPJPD Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 yaitu *“Sulawesi Tengah Maju, Mandiri dan Berdaya Saing”*, sehingga terjadi keselarasan misi antara perencanaan pembangunan Provinsi

Sulawesi Tengah yang tertuang dalam RPJMD dengan misi yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025. sebagaimana disajikan pada keterangan sebagai berikut:

Misi 1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Misi RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu Misi: (1). Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; (5). Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.

Misi 2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan Dan HAM.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Misi RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu Misi: (6). Penegakan Sistem Hukum yang Berbasis Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; (7). Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; (8). Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, dan; (9). Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Misi 3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Misi RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu Misi (2). Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing.

Misi 4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Misi RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu Misi: (3). Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; dan (9). Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Misi 5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Misi RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu Misi: (2). Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing; dan (3). Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.

Misi 6. Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Misi RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu Misi: (4). Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Misi 7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulawesi Tengah dan di luar Provinsi bertetangga.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Misi RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu Misi: (2). Struktur Ekonomi yang Produktif Mandiri dan Berdaya Saing, dan (9). Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Misi 8. Meningkatkan Pelayanan Publik bidang Pendidikan dan Kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistematis dan digital.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Misi RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu Misi: (1). Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, dan; (8). Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.

Misi 9. Mendorong Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Misi RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu Misi: (3). Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.

Selanjutnya, selain RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 memiliki keselarasan dengan RPJMN Tahun 2020-2024, maka perlu pula memperhatikan direktif presiden sebagai arahan dalam upaya yang akan dilakukan dalam pencapaian Sasaran Visi Indonesia 2045, sehingga terjadi keselarasan misi antara perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah yang tertuang dalam RPJMD dengan 5 Sasaran Visi Indonesia 2045.

Keselarasan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026, dengan Pencapaian Sasaran Visi Indonesia 2045, diuraikan sebagai berikut:

Misi 1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.

Misi ini memiliki keselarasan dengan sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu (1). Pembangunan Sumber Daya Manusia.

Misi 2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan Dan HAM.

Misi ini memiliki keselarasan dengan sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu (3). Penyederhanaan Regulasi, dan; (4). Penyederhanaan Birokrasi.

Misi 3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.

Misi ini memiliki keselarasan dengan sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu (1). Pembangunan Sumber Daya Manusia, dan; (5). Transformasi Ekonomi.

Misi 4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.

Misi ini memiliki keselarasan dengan sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu (2). Pembangunan Infrastruktur, dan; (5). Transformasi Ekonomi.

Misi 5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan.

Misi ini memiliki keselarasan dengan sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu (1). Pembangunan Sumber Daya Manusia; (2). Pembangunan Infrastruktur, dan; (5). Transformasi Ekonomi.

Misi 6. Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.

Misi ini memiliki keselarasan dengan sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu (1). Pembangunan Sumber Daya Manusia; (2). Pembangunan Infrastruktur, dan; (5). Transformasi Ekonomi.

Misi 7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulawesi Tengah dan di luar Provinsi bertetangga.

Misi ini memiliki keselarasan dengan sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu (2). Pembangunan Infrastruktur; (3). Penyederhanaan Regulasi, dan; (5). Transformasi Ekonomi.

Misi 8. Meningkatkan Pelayanan Publik bidang Pendidikan dan Kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistematis dan digital.

Misi ini memiliki keselarasan dengan sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu (1). Pembangunan Sumber Daya Manusia; (2). Pembangunan Infrastruktur; (3). Penyederhanaan Regulasi, dan;

Misi 9. Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.

Misi ini memiliki keselarasan dengan sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu (1). Pembangunan Sumber Daya Manusia; (2). Pembangunan Infrastruktur; dan (5). Transformasi Ekonomi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, secara normative mengatur keselarasan antara misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode

2021-2026 perlu pula memperhatikan tiga dimensi pembangunan, yang meliputi: (1) Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat; (2) Dimensi Pembangunan sektor unggulan dan prioritas, dan; (3) Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan.

Pembangunan daerah sebagai bagian yang terpisahkan dengan pembangunan nasional, maka menjadi penting untuk menyelaraskan misi RPJMD dengan tujuh agenda pembangunan nasional periode 2020-2024. Keselarasan misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026, dengan Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024, diuraikan sebagai berikut:

Misi 1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Agenda Pembangunan Nasional, yaitu agenda: (3). Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, dan; (4). Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Misi 2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan Dan HAM.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Agenda Pembangunan Nasional, yaitu agenda: (3). Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; dan (4). Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dan; (7). Stabilitas Polhukankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Misi 3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Agenda Pembangunan Nasional, yaitu agenda: (1). Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan; (2). Pembangunan Wilayah untuk mengurangi Kesenjangan, dan; (3). Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.

Misi 4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Agenda Pembangunan Nasional, yaitu agenda: (2). Pengembangan Wilayah untuk mengurangi Kesenjangan, dan; (5) Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Misi 5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Agenda Pembangunan Nasional, yaitu agenda: (1). Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, dan; (7). Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Misi 6. Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Agenda Pembangunan Nasional, yaitu agenda: (2). Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan; (4). Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dan; (6). Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Misi 7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulawesi Tengah dan di luar Provinsi bertetangga.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Agenda Pembangunan Nasional, yaitu agenda: (2). Pengembangan Wilayah untuk mengurangi Kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Misi 8. Meningkatkan Pelayanan Publik bidang Pendidikan dan Kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistematis dan digital.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Agenda Pembangunan Nasional, yaitu agenda: (7). Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Misi 9. Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Agenda Pembangunan Nasional, yaitu agenda: (2) Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan.

Keselarasan misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026, dengan berbagai dokumen perencanaan pada skala nasional, provinsi dan RPJP maupun RTRW Provinsi Sulawesi Tengah, harus pula terintegrasi dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Hal ini dimaksudkan agar pembangunan daerah yang akan dilaksanakan lima tahun akan datang menjadi bagian dari target-target tujuan pembangunan global, sehingga pada Tahun 2030, akan menghasilkan kondisi kesejahteraan yang relative semakin membaik bagi penduduk di seluruh dunia dengan tetap menjaga keberlanjutan pembangunan di masa yang akan datang, melalui pelaksanaan pembangunan yang berbasis pada keseimbangan lingkungan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) bertujuan mewujudkan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Penyusunan perencanaan pembangunan yang mengintegrasikan SDGs ke dalam dokumen perencanaan, tercermin dari program yang akan dilaksanakan dalam lima tahun mendatang, bertujuan untuk:

- 5) Menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan ketersediaan dan kecukupan pangan, meningkatkan derajat kesehatan, melaksanakan pendidikan yang berkualitas, meningkatkan kesetaraan gender serta penyediaan air bersih dan sanitasi yang berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat secara merata;
- 6) Penyediaan energy yang terjangkau, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pekerjaan yang layak, pembangunan infrastruktur dan pengembangan industri inklusif dan inovatif, penurunan kesenjangan dan penataan kota inklusif dan berkelanjutan;

- 7) Menumbuhkan perilaku konsumsi dan produksi berkelanjutan, meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan perubahan iklim pengurangan resiko bencana, menjaga kelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem laut dan ekosistem darat.
- 8) Menjaga perdamaian, keadilan dan penguatan kelembagaan, membangun politik dan hukum serta menjalin kemitraan untuk melaksanakan semua tujuan pembangunan.

Pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs, bertumpu pada prinsip dasar manajemen pembangunan, yaitu memanfaatkan secara optimal seluruh potensi sumberdaya pembangunan yang dimiliki daerah dengan tetap mengacu pada batas-batas toleransi kerusakan lingkungan, degradasi daya dukung lahan, perubahan iklim dan berkelanjutan ekosistem laut dan darat.

Target pencapaian SDGs yang mencakup 17 tujuan, yang dikelompokkan dalam 4 pilar pembangunan, yaitu Pilar Sosial, Ekonomi, Lingkungan dan Hukum & Tata Kelola. Misi Pemerintah Daerah sebagai penjabaran Visi diuraikan ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, untuk selanjutnya menentukan program dan kegiatan. Integrasi visi pembangunan daerah yang tertuang dalam

RPJMD Periode 2021-2026, dengan berbagai pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Misi 1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Tujuan dan Program dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), yaitu tujuan: (1). mengakhiri segala bentuk kemiskinan; (2). Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan; (3). Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; (4). Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua; (6). Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua, dan; (16). Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

Misi 2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan Dan HAM.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Tujuan dan Program dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), yaitu tujuan: (1). mengakhiri segala bentuk kemiskinan; (2). Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan; (3). Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; (4). Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua; (5). Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan; (8). Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua, dan; (16). Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

Misi 3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Tujuan dan Program dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), yaitu

tujuan: (1). mengakhiri segala bentuk kemiskinan; (2). Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan; (3). Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; (4). Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua; (6). Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua; (7). Menjamin akses energi yang terjangkau andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua; (8). Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua; (9). Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi; (10). Mengurangi kesenjangan intra dan antar Negara; (12). Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; (14). Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan; (15). Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari , menghentikan pengusuran, memulihkan degradasi lahan, serta

menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan; (16).
Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

Misi 4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Tujuan dan Program dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), yaitu tujuan: (7). Menjamin akses energi yang terjangkau andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua; (9). Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi; (10). Mengurangi kesenjangan intra dan antar Negara; (11). Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan, dan; (12). Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

Misi 5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Tujuan dan Program dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), yaitu

tujuan: (4). Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua; (6). Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua; (7). Menjamin akses energi yang terjangkau andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua; (8). Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua; (9). Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi; (10). Mengurangi kesenjangan intra dan antar Negara; (15). Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggusuran, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan; (16). Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

Misi 6. Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Tujuan dan Program dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), yaitu tujuan: (1). mengakhiri segala bentuk kemiskinan; (2). Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan; (3). Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; (4). Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua; (13). Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya; (14). Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan; (16). Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan, dan; (17). Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Misi 7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulawesi Tengah dan di luar Provinsi bertetangga.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Tujuan dan Program dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), yaitu tujuan: (17). Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Misi 8. Meningkatkan Pelayanan Publik bidang Pendidikan dan Kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistematis dan digital.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Tujuan dan Program dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), yaitu tujuan: (2). Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan; (3). Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; (4). Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua, dan; (9). Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.

Misi 9. Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.

Misi ini memiliki keselarasan dengan Tujuan dan Program dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), yaitu tujuan: (8). Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua; (12). Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, dan; (14). Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.

Selanjutnya, keselarasan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan acuan serta terintegrasi dan RKP semua program pencampain misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026.

Dalam penyusunan kebijakan, rencana atau program, kegiatan dan sub kegiatan, KLHS perlu menyiapkan rumusan alternatif penyempurnaan kebijakan rencana atau program agar dampak atau risiko lingkungan yang tidak diharapkan dapat diminimalisir, sedangkan dalam evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan alternatif

penyempurnaan kebijakan, terhadap rencana program dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak dan/atau risiko negative terhadap lingkungan.

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimum

Bagian ini memuat hal-hal terkait dasar pertimbangan penerapan standar pelayanan minimal, dasar penerapan standar pelayanan minimal, kebijakan umum daerah dalam rencana penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan gambaran orientasi dan komitmen yang ditetapkan pemerintahan daerah selama satu tahun dalam rangka penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran.

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan rencana Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berada pada Misi Kedua Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM .

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N - 1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	69,55	69,79	
2	Angka Kemiskinan	13,06	12,18	
3	Angka Pengangguran	3,77	3,75	
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,86	11,70	
5	Pendapatan Per-Kapita	64,07	69,15	
6	Ketimpangan Pendapatan	0,321	0,326	

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Ke giatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasala han
1.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.576.924.857.415	1.484.812.054.023	Adanya Perbedaan Antara Satuan Harga Pada Simda Dan Sisd, Sehingga Terdapat Selisih Atau Silpa	Menelaah Satuan Harga Saat Pembuatan Dppa, Menyesuaikan Pada Satuan Harga Sisd
2.	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.499.163.772	137.983.869.147	Adanya Sisa Anggaran	Sisa Anggaran Tidak Dicairkan
3.	Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	38.586.667.831	36.017.149.306	Adanya Sisa Anggaran	Sisa Anggaran Tidak Dicairkan
4.	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	13.183.045.839,00	11.497.082.244,00	Sisa Pembelanjaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Dikembali kan Ke Kas Daerah
5.	Dinas Cipta Karya Dan Sumber Daya Air	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	192.333.840.581	174.853.076.033	Adanya Sisa Anggaran	Sisa Anggaran Tidak Dicairkan
6.	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	5.325.868.108	4.912.161.612	Adanya Sisa Anggaran	Sisa Anggaran Tidak Dicairkan
7.	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja	260.650.000	257.985.150		

		Perangkat Daerah				
8.	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	26.787.621.077	24.075.166.696		
9.	Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	10.880.116.653	10.646.035.246		
10.	Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.964.395.654	9.816.559.095		
11.	Dinas Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	14.793.465.136	13.949.596.941		
12.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Prov.Sulteng	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	9.675.209.775	8.039.222.712		
13.	Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	19.468.314.148	17.555.861.139		
14.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	23.711.719.733	22.616.419.680		
15.	Dinas Koperasi Dan Ukm Provinsi Sulawesi Tengah	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	21.059.065.026	18.468.688.530		
16.	Dinas Penanaman	Penunjang Urusan	1.421.691.725	1.417.731.675		

	Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pemerintah Daerah Provinsi				
17.	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	13.372.403.429	11.993.930.204	Bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Tapd) Segera Melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja (Apbd) Tahun Anggaran 2021, Yang Bertujuan Untuk Percepatan Penanggulangan Dan Pengendalian Covid-19	Untuk Menjaga Kestinambungan Pembangunan Di Sulawesi Tengah, Di Tengah Mewabahnya Covid-19 Opd Tidak Di Perkanankan Melakukan Pergeseran Belanja Modal Ke Belanja Barang Dan Jasa Kecuali Atas Persetujuan Tertulis Dari Gubernur Sulawesi Tengah.
18.	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	16.962.616.577	15.399.464.386		Sisa Anggaran Tidak Dicairkan (Dikembalikan)
19.	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	23.976.398.958	21.672.728.842	Adanya Sisa Anggaran	Sisa Anggaran Tidak Dicairkan (Dikembalikan)
20	Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	15.300.639.473	13.888.320.689		
21.	Dinas Tanaman	Program	5.220.996.771	4.986.385.794		

	Dan Hortikultura	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				
22.	Dinas Kehutanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	58.697.737.657	54.058.784.631		
23.	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	14.261.705.594	13.365.905.845		
24.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	33.940.486.619	30.054.871.223		
25.	Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	5.722.496.363	5.449.878.046		
26.	Bpkad Provinsi Sulawesi Tengah	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	100.874.508.105	66.751.650.997		
27.	Badan Kepegawaian Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.451.446.607	12.315.720.841		
28.	Bppid Prov. Sulteng	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	10.312.212.010	8.524.989.298		
29.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	14.742.476.975	13.235.798.833		
30.	Sekretariat Dewan	Program Penunjang	83.985.452.123	72.059.993.613		

	Perwakilan Rakyat	Penyelenggaraan Pemerintahan				
31.	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	52.147.604.986	43.777.197.735		
32.	Inspektorat Daerah Prov. Sulteng	Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	2.466.673.400	2.400.418.400		
33.	Bpbd Prov. Sulawesi Tengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	11.820.669.846	11.123.799.123		

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	
1	Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	5.722.496.363	5.449.878.046		
2	BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	100.874.508.105	66.751.650.997		
	Badan Kepegawaian	Program Penunjang	13.451.446.607	12.315.720.841		

3	Daerah	Urusan Pemerintah Daerah				
4	Bppid Prov. Sulteng	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	10.312.212.010	8.524.989.298		
5	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	14.742.476.975	13.235.798.833		
6	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	83.985.452.123	72.059.993.613		
7	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	52.147.604.986	43.777.197.735		
8	Inspektorat Daerah Prov. Sulteng	Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	2.466.673.400	2.400.418.400		
9	Bpbd Prov. Sulawesi Tengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	11.820.669.846	11.123.799.123		

2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik.

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang dipakai dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 1 : Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91%≤100%	Sangat Baik
2	76%≤ 90%	Tinggi
3	66%≤75%	Sedang
4	51%≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017

A. Target kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Tabel 2 : Target kinerja dalam perjanjian kinerja Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
Misi 1 : Melanjutkan reformasi birokrasi, mendukung pengakuan supremasi hukum dan HAM			
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik yang efektif dan efisien.	- Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	81,26 - 100%
2	Meningkatnya pengawasan, akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi.	- Opini BPK	WTP
		- Nilai akuntabilitas kinerja	BB
		- Indeks Reformasi Birokrasi	62 Poin
Misi 2 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah dan mendukung kemandirian energi			
3	Tersedianya berbagai infrastruktur yang merata dan memadai.	- Persentase kemandirian jaringan jalan dalam kondisi mantap	62%
		- Persentase rumah tangga pengguna listrik	98%
		- Persentase rumah tangga pengguna air bersih	72%
		- Persentase rumah layak huni	74,55%
		- Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	15,45 %
Misi 3 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan			
4	Menurunnya angka kemiskinan.	- Persentase penduduk diatas garis kemiskinan.	85,40-85,60%

5	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi.	- Indeks gini	0,31-0,35 %
6	Terwujudnya koperasi yang tangguh, berdaya saing, professional dan mandiri.	- Persentase koperasi aktif	65,71%
7	Meningkatnya daya saing, efisiensi dan produktifitas perdagangan.	- Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	11,59%
		- Ekspor bersih perdagangan	1.200 Juta USD
8	Terwujudnya industri yang tangguh, professional dan mandiri	- Pertumbuhan industri	7,80-8,00%
9	Meningkatnya nilai dan realisasi investasi.	- Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN	Rp. 18.550.510.000.000
10	Meningkatnya kesejahteraan gender dalam pembangunan ekonomi.	- Peningkatan indeks pembangunan Gender (IPG)	93%
		- Peningkatan indeks pemberdayaan Gender (IDG)	76,00 – 77,00%
11	Meningkatnya jumlah wisatawan	- Jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara	20.000 orang
		- Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	4.000.000 orang
12	Terciptanya kesempatan kerjadan penempatan tenaga kerja.	- Tingkat pengangguran terbuka	3,25-3,00%
		- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.	70,01%
13	Terbukanya keterisolasiandaerah-daerah terpencil.	- Persentase kabupaten/kota tidak tertinggal.	69,23%

	Misi 4 : Mewujudkan pengelolaan sumberdaya agribisnis dan maritim yang optimal dan berkelanjutan sejajar dengan provinsi maju di Kawasan timur Indonesia		
14	Optimalnya tata kelola hutan untuk pengendalian kerusakan DAS dan hutan lindung.	Persentase kerusakan kawasan - hutan	0,14%
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	- Indeks kualitas lingkungan hidup.	71 Poin
16	Meningkatnya kesejahteraan petani.	- Nilai tukar petani.	104,99%
17	Meningkatnya produksi dan mutu tanaman hortikultura, tanaman pangan dan perkebunan.	- Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	27,84%
		- Jumlah PDRB sub sektor perkebunan	Rp. 13.497.176
18	Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat nelayan dan perikanan budidaya.	- Nilai tukar nelayan	108,76%
		- Nilai ekspor hasil perikanan (USD)	US\$ 3.784.000
	Misi 5 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan berbudaya		
19	Tuntasnya angka melek aksara.	- Persentase angka melek aksara	97,26-97,50%
20	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan untuk menuntaskan pendidikan dasar dan pengembangan pendidikan menengah.	- Angka Partisipasi Kasar (APK) : SD/MI/Paket A SMP/MTs/Paket B	102,75-103,75% 93,00-93,75%

		SMA/MA/SMK/Paket C	85,00-85,75%
		- Angka Partisipasi Murni (APM): SD/MI/Paket A	94,50-96,25%
		SMP/MTs/Paket B	74,50-75,25%
		SMA/MA/SMK/Paket C	66,00-70,00%
21	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan.	- Angka usia harapan hidup.	68,25 -68,50 Tahun
22	Suksesnya Keluarga Berencana dan terciptanya keluarga berkualitas.	- Cakupan peserta KB aktif	87,01%
		- Persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera I.	35%

B. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Tabel 3 : Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	T A R G E T	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
	Misi 1 : Melanjutkan reformasi birokrasi, mendukung pengakuan supremasi hukum dan HAM			
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik yang efektif dan efisien.	- Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	81,26 - 100 %	96,75%
2	Meningkatnya pengawasan, akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi.	- Opini BPK	WTP	WTP
		- Nilai akuntabilitas kinerja	BB	B
		- Indeks Reformasi Birokrasi	62 Poin	62,86
	Misi 2 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah dan mendukung kemandirian energi			

3	Tersedianya berbagai infrastruktur yang merata dan memadai.	Persentase kemandapan jaringan jalan dalam kondisi mantap	62%	100,50%
		Persentase rumah tangga pengguna listrik	98%	100,05%
		Persentase rumah tangga pengguna air bersih	72%	122,93%
		Persentase rumah layak huni	74,55%	102,03%
		Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	15,45 %	91,52%
Misi 3 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan				
4	Menurunnya angka kemiskinan.	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan.	85,40-85,60%	75,29%
5	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi.	Indeks gini	0,31-0,35%	93,14%
6	Terwujudnya koperasi yang tangguh, berdaya saing, professional dan mandiri.	Persentase koperasi aktif	65,71%	84,10%
7	Meningkatnya daya saing, efisiensi dan produktifitas perdagangan.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	11,59%	55,31%
		Ekspor bersih perdagangan	1.200 Juta USD	408,57%
8	Terwujudnya industri yang tangguh, professional dan mandiri	Pertumbuhan industri	7,80-8,00%	311,03%
9	Meningkatnya nilai dan realisasi investasi.	Nilai realisasi investasi		

		PMDN & PMA	18.550.510.000.000	211,12%
10	Meningkatnya kesejahteraan gender dalam pembangunan ekonomi.	- Peningkatan indeks pembangunan Gender (IPG)	93%	100%
		- Peningkatan indeks pemberdayaan Gender (IDG)	76,00-77,00%	100%
11	Meningkatnya jumlah wisatawan	- Jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara	20.000 orang	5,43%
		- Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	4.000.000 orang	17,84%
12	Terciptanya kesempatan kerjadan penempatan tenaga kerja.	- Tingkat pengangguran terbuka	3,25-3,00%	80%
		- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.	70,01%	98,17%
13	Terbukanya keterisolasiandaerah- daerah terpencil.	- Persentase kabupaten/kota tidak tertinggal.	69,23%	111,11%
Misi 4 : Mewujudkan pengelolaan sumberdaya agribisnis dan maritim yang optimal dan berkelanjutan sejajar dengan provinsi maju di Kawasan timur Indonesia				
14	Optimalnya tata kelola hutan untuk pengendalian kerusakanDAS dan hutan lindung.	- Persentase kerusakan kawasan hutan	0,14%	92,86%
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	- Indeks kualitas lingkungan hidup.	85 Poin	109,54%
16	Meningkatnya kesejahteraan petani.	- Nilai tukar petani.	104,99%	98,59%

17	Meningkatnya produksi dan mutu tanaman hortikultura, tanaman pangan dan perkebunan.	Kontribusi sektor - pertanian terhadap PDRB	27,84%	63,69%
		- Jumlah PDRB sub sektor perkebunan	Rp. 13.497.176	96,23%
18	Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat nelayan dan perikanan budidaya.	- Nilai tukar nelayan	108,76%	94,95%
		Nilai ekspor hasil - perikanan (USD	US\$ 3.784.000	29,92%
Misi 5 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan berbudaya				
19	Tuntasnya angka melek aksara.	- Persentase angka melek aksara	97,26-97,50%	100,80%
20	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan untuk menuntaskan pendidikan dasar dan pengembangan pendidikan menengah.	Angka Partisipasi Kasar - (APK) :		
		SD/MI/Paket A SMP/MTs/Paket B SMA/MA/SMK/Paket C	102,75-103,75% 93,00-93,75% 85,00-85,75%	99,93% 99,38% 99,13%
		- Angka Partisipasi Murni (APM) :		
		SD/MI/Paket A SMP/MTs/Paket B SMA/MA/SMK/Paket C	94,50-96,25% 74,50-75,25% 66,00-70,00%	96,97% 99,65% 92,89%
21	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan.	Angka usia harapan hidup. -	68,25 -68,50 Tahun	100,48%
22	Suksesnya Keluarga Berencana dan terciptanya keluarga berkualitas	Cakupan peserta KB aktif -	87,01%	61,27%
		- Persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera I.	35%	70,37%

C. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya dan Target Akhir Pembangunan Jangka Menengah

Tabel 4 : Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir RPJMD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI					CAPAIAN % 2021	CAPAIAN % AKHIR RPJMD	KET
				2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya kualitas dan pelayanan publik yang efektif dan efisien	persentase indeks kepuasan masyarakat	90%	83,21	94,83%	82,71%	97,00%	96,75%	96,75	96,75	
2	Meningkatnya pengawasan,akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi.	opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	100	
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B	B	B	B	
		Indeks Reformasi Birokrasi	62 poin	61,6	61,80	62,92	62,15	62,86	101,39	101,39	
3	Tersedianya berbagai infrastruktur yang merata dan memadai	persentase kemandapan jaringan jalan dalam kondisi mantap (Jalan Provinsi)	62%	60,89%	60,46%	60,57%	61,78%	62,31%	100,50	100,50	
		persentase rumah tangga yang menggunakan	98%	79,56%	87,31%	94,67%	97,01%	98,05%	100,05	100,05	
		persentase rumah tangga pengguna air bersih	72%	59,26%	60,10%	60,10%	75,38%	88,51%	122,93	122,93	
		persentase rumah layak huni	74,55%	70,02%	74,74%	62,86%	68,65%	76,06%	102,03	102,03	
		kontribusi sektor pertambangan terhadap PDR	15,45%	12,69%	13,60%	15,13%	13,4%	14,14%	91,52	91,52	
4	Menurunnya angka kemiskinan	persentase penduduk diatas garis kemiskinan	85,40%-85,60%	85,8%	86,2%	86,82%	99,92%	101,4%	81,3	81,3	
5	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi	indeks gini	0,31-0,35	0,345	0,317%	0,330%	0,321%	0,326%	93,14	93,14	
6	Terwujudnya koperasi yang tangguh,berdaya saing,profesional,dan mandiri	persentase koperasi aktif	10%	64,1%	73,44	57%	55,50%	55,26%	84,10	84,10	
7	Meningkatnya daya saing,efisiensi dan produktif perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDR	6,50%	21,92%	21,78%	20,07%	7,07%	6,41%	55,31	55,31	
		ekspor bersih perdagangan	US\$1.200.000	US\$1.734,23	US\$2.288,1	US\$2.785,55%	US\$5.0595,71	US\$4902,86	408,57	335,59	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI					CAPAIAN % 2021	CAPAIAN % AKHIR RPJMD	KET
				2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Terwujudnya industri yang tangguh, profesional dan mandiri	pertumbuhan industri	3,33%	7,20%	8,21%	19,42%	11,08%	24,26%	311,03	311,03	
9	Meningkatnya nilai dan realisasi investasi	Nilai realisasi investasi PMDN PMA	Rp.18.550.510.000	Rp.1.929.657.000.000 Rp.16.335.000.000.000	Rp.12.689.562.560.000 Rp.9.010.437.440.000	Rp.4.438.790.800.000 Rp.27.075.580.350.000	Rp.5.261.315.800.000 Rp.25.617.411.570.000	Rp.3.012.341.100.000 Rp.39.684.282.680.000	188,27 234,12	188,27 182,88	
10	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan ekonomi	peningkatan indeks pembangunan gender (IPG)	93%	91,66%	92,08%	92,20%	92,43%	92,3	99,25	99,25	
		peningkatan indeks pemberdayaan gender	76-77%	70,38%	73,95%	74,50%	75,50%	75,68	98,29	98,29	
11	Meningkatnya jumlah wisatawan	jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	21.500 orang	63.207 orang	25.471 orang	24.660 orang	11.921 orang	1.085 orang	5,43	5,05	
		jumlah kunjungan wisatawan nusantara	4.000.000 orang	3.200.614 orang	3.432.178 orang	3.090.171 orang	1.812.995 orang	713.618 orang	17,84	17,84	
12	Terciptanya kesempatan kerja dan penempatan kerja	tingkat pengangguran terbuka	3,25 - 3,00	3,81%	3,43%	3,15%	3,77%	3,75%	80	80	
		tingkat partisipasi angkatan kerja	70,01	67,14%	69,52%	67,59%	69,44%	68,73%	98,17	98,17	
13	Terbukanya keterisolasian daerah-daerah terpencil	persentase kabupaten/kota tidak tertinggal	69,23%	80,8%	30,8%	76,92%	62%	76,92%	111,11	111,11	
14	Optimalnya tata kelola hutan untuk pengendalian kerusakan DAS dan hutan lindung	persentase kerusakan kawasan hutan	0,14%	0,01%	0,01%	0,01%	0,06%	0,15%	92,86	92,86	
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	indeks kualitas lingkungan hidup	71 poin	69,39 poin	69,50 poin	80,23 poin	77,78 poin	77,53 poin	109,54	109,54	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI					CAPAIAN % 2021	CAPAIAN % AKHIR RPJMD	KET
				2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai tukar petani	104,99	96,01%	108,68%	99,41%	88,87%	103,51%	98,59	98,59	
17	Meningkatnya produksi dan mutu tanaman hortikultura, tanaman pangan dan Perkebunan	kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	27,84	28,98%	26,14%	24,33%	26,24%	17,73%	63,69	63,69	
		jumlah PDRB sub sektor	Rp.13.497.176	Rp.11.551.515	Rp.12.009.909	Rp.12.480.042	Rp.12.480.042	Rp.12.987.676	96,23	96,23	
18	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Nilai tukar nelayan	108,76	117,1%	114,56%	106,77%	98,11%	103,27%	94,95	94,95	
		Nilai ekspor hasil perikanan	US\$3.784.000	US\$3.227.836	US\$4.961.250	US\$3.763.124,02	US\$3.763.124,02	US\$1.132.001,29	29,92	29,92	
19	Tuntasnya angka melek aksara	persentase melek aksara	99,25%-100,00%	96,1%	95,50%	96,53%	96,50%	98,28%	100,80	100,80	
20	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan untuk meningkatkan pendidikan dasar dan pengembangan pendidikan menengah	Angka Partisipasi Kasar (APK)									
		- SD/MI/Paket A	102,75-103,75	104,00%	108%	104,30%	104,00%	103,68%	99,93	99,93	
		- SMP/Mts/Paket B	93,00-93,75	91,50%	92%	92,30%	92,50%	93,17%	99,38	99,38	
		- SMA/MA/SMK/Paket c	85,00-85,75	83,50%	83,75%	84,75%	85,25%	85%	99,13	99,13	
		Angka partisipasi Murni (APM)									
		- SD/MI/Paket A	94,5-96,25	92,50%	103%	94,00%	94,00%	93,33	96,97	96,97	
		- SMP/Mts/Paket B	74,50-75,25	72,00%	73,00%	74,00%	74,00%	74,99	99,65	99,65	
		- SMA/MA/SMK/Paket C	66,00-70,00	64,50%	64,75%	65,57%	66,00%	65,02	92,89	92,89	
21	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	Angka Usia harapan hidup	68,2 tahun	67,35 tahun	67,32 thun	67,78 tahun	68,69 tahun	68,83 tahun	100,48	100,48	
22	Suksesnya keluarga berencana dan terciptanya keluarga berkualitas	Cakupan peserta KB aktif	87,01%	78%	77%	78%	78,10%	53,31%	61,27	61,27	
		Persentase Keluarga Pra sejahtera dan sejahtera 1	35%	68,4%	68,13%	65,48%	65,48%	64,30%	48,71	48,71	

D. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis yang secara langsung mendukung ketercapaian visi dan misi Gubernur Sulawesi Tengah. Analisis terhadap 23 sasaran strategis dengan 37 indikator kinerja yang ditetapkan sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada RPJMD 2016-2021, yang mana Laporan kinerja ini merupakan tahun terakhir Perencanaan Jangka Menengah Daerah. Berikut ini gambaran mengenai capaian kinerja sasaran strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien

Sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien diukur ketercapaiannya dengan indikator persentase indeks kepuasan masyarakat. Capaian kinerja sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5 : Capaian kinerja Sasaran Strategis 1

No.	Indikator Kinerja	Target	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD 2021	% Capaian Thd Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	%	81,26-100	96,75	96,75	81,26-100	96,75
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis					96,75		96,75

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi persentase indeks kepuasan masyarakat tahun 2021 mencapai 96,75% atau tingkat capaian sebesar 96,75% dengan kategori “**sangat baik**” dari target yang ditentukan sebesar 81,26 – 100%, capaian ini sama dengan capaian akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah Sulawesi Tengah. Survey Kepuasan Masyarakat ini ditentukan berdasarkan hasil survei responden dengan pengukuran 9 unsur pelayanan. Selain itu berdasarkan Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, terdapat perubahan klasifikasi angka pada pengkategorian Mutu Layanan. Berdasarkan Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 Capaian kinerja ini berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori SANGAT BAIK, karena berada dalam kisaran nilai interval konversi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 88,31 – 100,00. Untuk lebih jelasnya, hasil survei IKM pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6 : Survei IKM Tahun 2021

Keterangan :			No.	UNSUR PELAYANAN	NRR
- U1 s/d U9	= Unsur-Unsur Pelayanan		U1	Persyaratan	3,710
- NRR	= Nilai Rata-Rata		U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,820
- IKM	= Indeks Kepuasan Masyarakat		U3	Waktu Penyelesaian	3,750
- *)	= Jumlah NRR IKM tertimbang		U4	Biaya/Tarif	4,000
- **)	= Jumlah NRR Tertimbang x 25		U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,890
- NRR Per Unsur	= Jumlah nilai per unsur dibagi		U6	Kompetensi Pelaksana	3,930
	Jumlah Kuesioner yang terisi		U7	Perilaku Pelaksana	4,000
NRR tertimbang	= NRR per unsur x 0.071		U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	4,000
per unsur			U9	Sarana dan Prasarana	4,000
IKM UNIT PELAYANAN :		98,00			
Mutu Pelayanan :					
A (Sangat Baik)	: (3,5324 - 4,00)	88,31 - 100,00			
B (Baik)	: (3,0644 - 3,532)	76,61 - 88,30			
C (Kurang Baik)	: (2,60 - 3,064)	65,00 - 76,60			
D (Tidak Baik)	: (1,00 - 0,5996)	25,00 - 64,99			

Sumber : DPMPTSP Prov.Sulteng, 2021

Beberapa faktor penunjang tercapainya sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien adalah:

- Fasilitasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang merupakan kegiatan memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan. Tujuan dan sasaran kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan perizinan untuk meningkatkan jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani.
- Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan berbasis IT sesuai dengan amanat Presiden Republik Indonesia untuk memudahkan dan mempercepat pelayanan perizinan dan Non Perizinan di daerah dengan hadirnya OSS (Online Single Submission) sebagai bentuk aplikasi layanan perizinan satu pintu yang bersifat menyeluruh.
- Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi, Kebijakan dan Penyuluhan Layanan Perizinan dan Non Perizinan ini merupakan kegiatan untuk merumuskan kebijakan dibidang Pengaduan dan Advokasi dan kebijakan laporan Layanan Perizinan dan Non perizinan.
- Kegiatan Fasilitasi Layanan Pengaduan dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan merupakan kegiatan yang memfasilitasi layanan pengaduan dan Informasi pelayanan perizinan dan non perizinan.

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas dan pelayanan publik yang efektif dan efisien ini didukung oleh program pelayanan penanaman modal.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya pengawasan, akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi

Sasaran Strategis ini diukur ketercapaiannya melalui 3 indikator kinerja, yaitu Opini BPK, Nilai akuntabilitas kinerja, dan Indeks reformasi birokrasi. Capaian kinerja sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7 : Capaian kinerja Sasaran Strategis 2

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD 2021	% Capaian Thd Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	100	WTP	100
2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Predikat	BB	B	B	BB	B
3.	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	62	62,86	101,39	62	101,39

Hasil Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 31 Desember 2021 dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun 2021 sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektifitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 terealisasi sebesar 69,37 poin dengan predikat B, tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu predikat "BB". Capaian ini sama dengan capaian akhir RPJMD. Hasil evaluasi Kemenpan-RB menunjukkan bahwa tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran cukup baik jika dibandingkan dengan capaian kerjanya. Hal ini disebabkan pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Provinsi Sulawesi Tengah sudah mulai berjalan dengan baik namun sangat perlu dilakukan beberapa perbaikan lebih lanjut. Adapun beberapa langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

guna meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu melakukan identifikasi cross cutting program dan kegiatan Perangkat Daerah, melakukan perbaikan indikator kinerja utama dan indikator individu serta perjanjian kinerja Perangkat Daerah, desk penyusunan laporan kinerja Perangkat Daerah.

Reformasi birokrasi diarahkan pada perubahan di delapan aspek manajemen pemerintahan yaitu organisasi, Tata laksana, Peraturan Perundang-Undangan, Sumberdaya Manusia, Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik dan Pola Pikir (*mind-set*) serta Budaya Kerja (*culture-set*). Indeks Reformasi Birokrasi Sulawesi Tengah Tahun 2021 memperoleh nilai 62,86 kategori B dengan capaian kinerja 101,39% dari target yang ditetapkan sebesar 62 poin, capaian ini sama dengan capaian akhir RPJMD. Hasil evaluasi Kemenpan-RB menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah berupaya untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada area pemenuhan dan reform, serta diikuti dengan peningkatan nilai pada komponen hasil. Namun terdapat penurunan pada hasil antara area perubahan.

Adapun beberapa langkah yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah guna meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi pemerintah antara lain:

- a. Memfasilitasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kegiatan *Coaching Clinic* penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.
- b. Melakukan desk penginputan data Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 ke beberapa Perangkat Daerah Sampel pada Bulan Mei Tahun 2021;
- c. Melakukan Bimbingan Teknis ke seluruh APIP Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka meningkatkan kapasitas APIP selaku Tim Penilai Internal pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, utamanya pada Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi beserta data dukung yang harus dipenuhi Perangkat Daerah;
- d. Merumuskan perbaikan indikator kinerja utama (IKU) kepala Daerah terpilih bersama pihak Bappeda dan Inspektorat Daerah Prov. Sulteng guna tercapainya keselarasan dokumen perencanaan dalam hal ini RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah utamanya pada Misi yang terkait Tata Kelola pemerintahan yang baik;

- e. Melakukan Bimbingan Teknis Bedah Lembar Kerja Evaluasi PMPRB ke semua Perangkat Daerah, guna mendukung Misi Kepala Daerah Terpilih pada RPJMD Provinsi 2021-2026 dalam rangka peningkatan indeks Reformasi Birokrasi Provinsi;
- f. Menyempurnakan dokumen Road Map RB Provinsi yang berkesesuaian dengan RPJMD Provinsi 2021-2026 untuk kemudian diformalkan ke dalam Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2026.

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya pengawasan, akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi didukung oleh program:

1. Program pembinaan kinerja dan pelayanan publik
2. Program penataan dan penguatan kelembagaan dan reformasi birokrasi
3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sasaran Strategis 3 : Tersedianya berbagai infrastruktur yang merata dan memadai

Sasaran Strategis ini diukur ketercapaiannya melalui 5 indikator kinerja, yaitu Persentase kemantapan jaringan jalan dalam kondisi mantap, Persentase rumah tangga pengguna listrik, Persentase rumah tangga pengguna air bersih, Persentase rumah layak huni dan Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB. Capaian kinerja sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut :

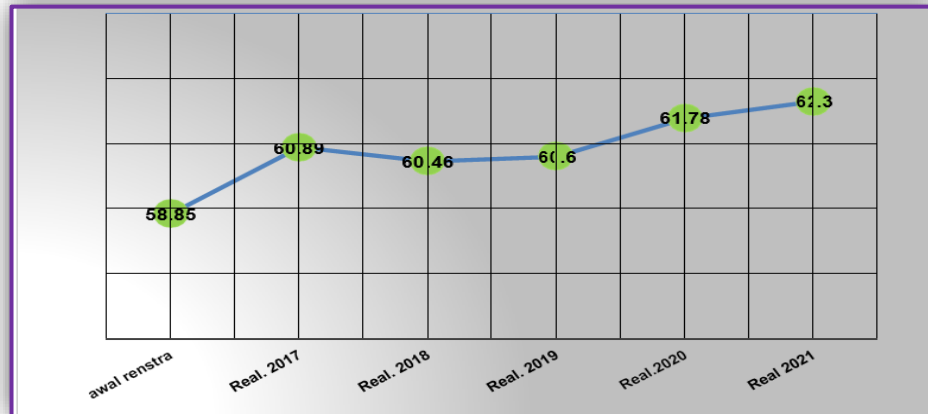
Tabel 8 : Capaian kinerja Sasaran Strategis 3

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD 2021	% Capaian Thd Target Akhir RPJMD
			Target	Real	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase kemantapan jaringan jalan dalam kondisi mantap	%	62	62,31	100,50	62	100,50
2.	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	%	98	98,05	100,05	98	100,05
3.	Persentase rumah tangga pengguna air bersih	%	72	88,51	122,93	72	122,93
4.	Persentase rumah layak huni	%	74,55	76,06	102,03	74,55	102,03
5.	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	%	15,45	14,14	91,52	15,45	91,52
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis					103,41		103,41

Berdasarkan Tabel di atas sasaran strategis tersedianya berbagai infrastruktur yang merata dan memadai dengan lima indikator kinerja rata-rata tercapai sebesar 103,41% dengan kategori "**Sangat Baik**", sama dengan capaian akhir periode Perencanaan pembangunan jangka menengah Sulawesi Tengah. Untuk indikator persentase kemantapan jaringan jalan dalam kondisi mantap terealisasi sebesar 62,31% atau tingkat capaian sebesar 100,50% melebihi target yang ditetapkan sebesar 62%. Untuk indikator Persentase rumah tangga pengguna listrik terealisasi sebesar 98,05% atau tingkat capaian sebesar 100,05% melebihi target yang ditetapkan sebesar 98%. Untuk indikator persentase rumah tangga pengguna air bersih terealisasi sebesar 88,51% atau tingkat capaian sebesar 122,93% melebihi target yang ditetapkan sebesar 72%. Selanjutnya indikator persentase rumah rumah layak huni terealisasi sebesar 76,06% atau tingkat capaian sebesar 102,03% dari target yang ditetapkan sebesar 74,55%. Untuk indikator Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB terealisasi sebesar 14,14% atau tingkat capaian sebesar 91,52% melebihi target yang ditetapkan sebesar 15,45%.

Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Capaian ini dihitung berdasarkan kemantapan seluruh ruas-ruas jalan provinsi di Sulawesi Tengah, yaitu persentase seluruh ruas-ruas jalan provinsi di Sulawesi Tengah (berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 620/299/DIS.BMPR-G.ST/2017 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi) yang berkondisi baik dan sedang terhadap panjang totalnya. Pencapaian ini secara umum didapatkan melalui kegiatan rekonstruksi jalan dan pemeliharaan berkala jalan sepanjang kurang lebih 50,224 km yang anggarannya bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Tengah, dan APBN dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK). Pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan ini tersebar di beberapa Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. Selain itu pencapaian kinerja ini juga adalah hasil dari kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan di ruas-ruas kewenangan provinsi. Peningkatan jalan tahun 2017 s/d 2020 dapat dilihat pada gambar berikut :

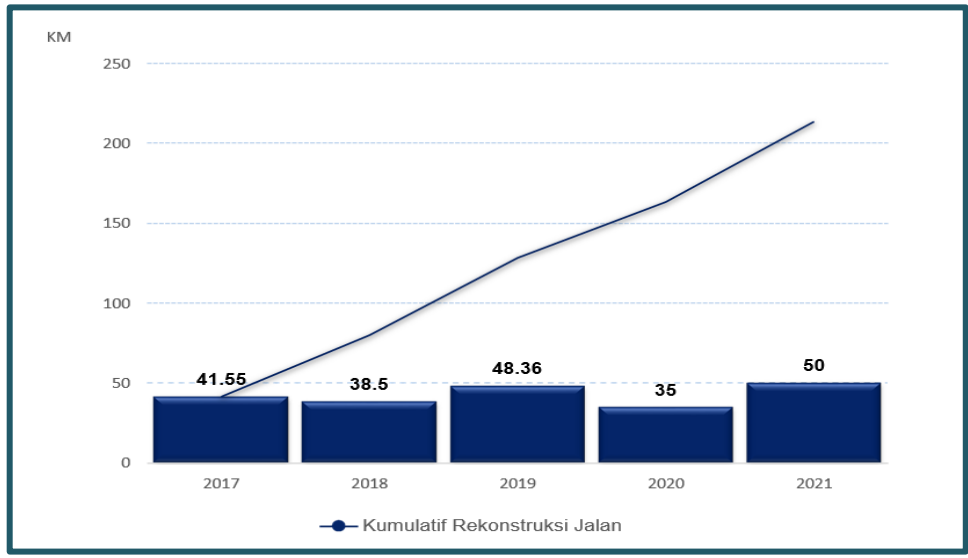
Gambar 1 : Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi Sulawesi Tengah



Sumber : DBMPR Prov.Sulteng, 2022

Melihat dari sebaran kemantapan jalan di tiap kabupaten yang ada, terdapat beberapa kabupaten yang membutuhkan perhatian yang lebih besar untuk penanganan jalan berupa kegiatan rekonstruksi maupun pemeliharaan berkala jalan. Lebih jauh, bahwa kemantapan jalan tidak dapat dianggap linier dengan panjang jalan yang ditingkatkan kondisinya, sebab kondisi jalan juga dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh karena itu penentuan kondisinya berdasarkan data hasil survei. Survei dilaksanakan melalui Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Data Base Jalan dengan menggunakan metode SDI. Surface distress index (SDI) adalah indeks nilai perkerasan jalan yang didapat dari survei kondisi jalan yang diusulkan oleh Bina Marga. SDI membagi kondisi jalan menjadi 4, yaitu kondisi baik, kondisi sedang, kondisi rusak ringan dan kondisi rusak berat. Menurut RCS (Road Condition System) atau SKJ (Survey Kondisi Jalan) 2011, hanya ada 4 unsur yang dipergunakan sebagai dukungan untuk menghitung besaran nilai SDI yaitu : % luas retak, rata-rata lebar retak, jumlah lubang per km, dan rata-rata kedalaman rutting bekas roda. Pencapaian kinerja persentase kemantapan jaringan jalan dalam kondisi mantap ini didukung oleh program penyelenggaraan jalan pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Sulawesi Tengah tahun anggaran 2021.

Gambar 2 : Rekap Paket Rekonstruksi Jalan Provinsi Sulawesi Tengah 2017-2021



Sumber : DBMPR Prov.Sulteng, 2022

Sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan perekonomian, kebutuhan energi listrik juga turut meningkat. Selain penggunaan energi fosil untuk pembangkitan tenaga listrik yang lambat laun mulai dikurangi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas ESDM mengoptimalkan pengelolaan energi daerah yang berasal dari energi baru terbarukan. Hal ini menjadi salah satu sasaran strategis dengan nilai konsumsi listrik per kapita yang diharapkan meningkat tiap tahunnya. Nilai konsumsi listrik per kapita menjadi indikator tingkat kemajuan ekonomi suatu daerah.

Tabel 9 : Jumlah pelanggan listrik menurut Kab/Kota Prov. Sulteng, 2018-2021

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Rayon Area	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten/Regency					
Banggai Kepulauan	Salakan	17 624	21 988	26 930	31 828
Banggai	Luwuk	48 072	51 072	54 004	57 094
	Toili	30 314	32 172	34 190	36 107
Morowali	Bungku	20 890	25 271	29 308	35 631
Poso	Poso	35 196	37 035	39 002	41 385
	Tentena	26 780	28 222	29 403	30 944
Donggala	Donggala	36 982	45 555	48 851	53 679
	Tambu	24 488	28 890	31 677	33 776
Tolitoli	Tolitoli Khusus	33 234	35 461	39 132	41 881
	Bangkir	15 730	16 658	17 583	18 836
Buol	Leok	24 074	26 394	28 062	30 179
Parigi Moutong	Parigi	49 140	52 427	54 390	57 830
	Moutong	15 122	16 331	17 751	19 130
	Kotaraya	19 494	20 877	22 316	24 319
Tojo Una-Una	Ampana	29 739	33 215	37 630	40 819
Sigi ¹		–	–	–	–
Banggai Laut	Banggai	16 994	18 658	14 928	18 013
Morowali Utara	Kolonodale	22 033	23 340	25 168	27 994
Kota/Municipality					
Palu	Kota	96 461	104 923	111 200	120 033
	Kamonji	52 368	57 735	61 790	65 069
	Tavaeli	19 141	22 816	24 961	26 355
Sulawesi Tengah		633 876	699 040	748 276	492 696

Sumber : BPS Prov.Sulteng, 2022

Persentasi kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya meningkat dari 13,4% di tahun 2020 menjadi 14,14% di tahun 2021. Peningkatan persentase ini pun diikuti dengan kenaikan nilai rupiah dari sektor pertambangan. Peningkatan nilai rupiah ini salah satunya dipengaruhi oleh nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor pertambangan. PDRB sektor pertambangan dan penggalian atas dasar harga berlaku (ADHB) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 sebesar 34.925,93 milyar rupiah dan harga konstan 2010 sebesar 24.755,92 milyar rupiah. Data runtun waktu dari PDRB sektor pertambangan dan penggalian ditunjukkan oleh tabel berikut.

Tabel 10 : PDRB Provinsi Sulawesi Tengah Sektor Pertambangan dan Penggalian atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2010 Tahun 2019 – 2021 (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Pertambangan dan Penggalian	24.863	26.456	34.926	19.972	22.040	24.756

Sumber: BPS Prov. Sulteng,2022

Dari tabel di atas, terlihat bahwa PDRB sektor pertambangan dan penggalian Provinsi Sulawesi Tengah mengalami trend naik dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Laju pertumbuhan rata-rata dari tahun 2019 hingga 2021 sebesar 19,21%. Hal ini menunjukkan kinerja yang baik dalam pelaksanaan program pendukung pencapaian peningkatan nilai PDRB sektor pertambangan dan penggalian. Pencapaian indikator kinerja ini, Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan 2 (dua) program yaitu Program Pengelolaan Aspek Kegeologian dan Program Pengelolaan Mineral dan Batubara.

Pencapaian sasaran strategis tersedianya berbagai infrastruktur yang merata dan memadai ini didukung oleh program sebagai berikut :

1. Program penyelenggaraan jalan
2. Program pengembangan jasa konstruksi
3. Program penyelenggaraan penataan ruang
4. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
5. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
6. Program pengelolaan sumber daya air (SDA)
7. Program pengembangan perumahan
8. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)
9. Program kawasan permukiman
10. Program pengelolaan aspek kegeologian
11. Program pengelolaan mineral dan batubara

Sasaran Strategis 4 : Menurunnya angka kemiskinan

Sasaran strategis menurunnya angka kemiskinan diukur ketercapaiannya dengan indikator persentase penduduk diatas garis kemiskinan. Capaian kinerja sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut :

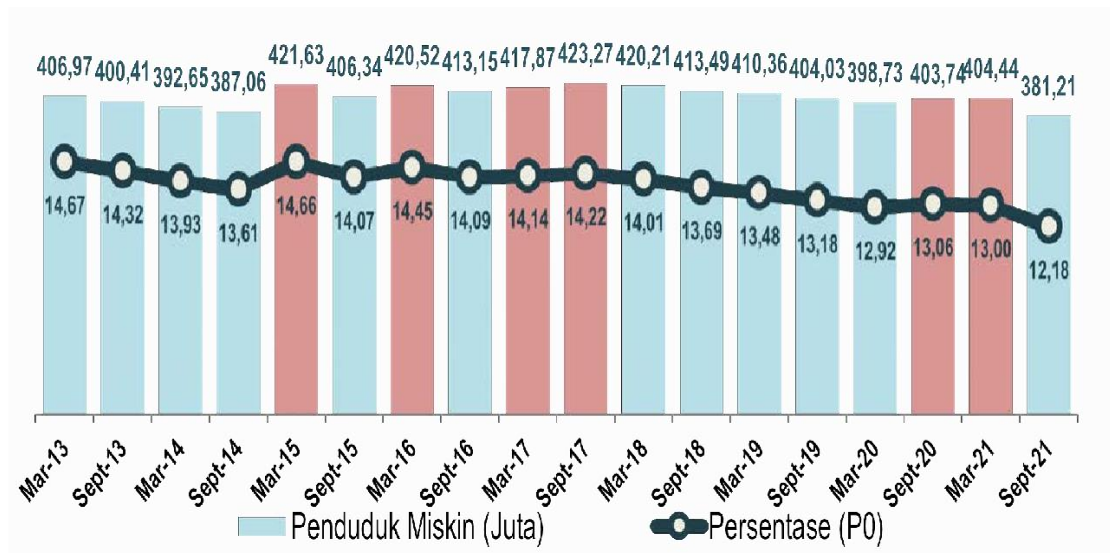
Tabel 11 : Capaian kinerja Sasaran Strategis 4

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD 2021	% Capaian Thd Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	85,40 - 85,60	101,4	81,3	101,4	81,3
<i>Rata-rata Capaian Sasaran Strategis</i>					81,3		81,3

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase penduduk diatas garis kemiskinan Sulawesi Tengah tahun 2021 mencapai 101,4% atau tingkat capaian sebesar 81,3% dengan kategori “tinggi” dari target yang ditentukan sebesar 85,40 - 85,60, capaian ini sama dengan capaian akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah Sulawesi Tengah.

Secara umum, pada periode Maret 2013-September 2021, tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya, namun sejak 2015 tingkat kemiskinan tersebut menunjukkan fluktuasi yang cenderung meningkat hingga 2017 sebelum akhirnya kembali menunjukkan tren penurunan hingga 2020. Pada September 2020, akibat adanya pandemi Covid-19, tingkat kemiskinan kembali meningkat.

Gambar 3 : Jumlah dan persentase penduduk miskin



Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2022

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Gambar 4 : Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Sulawesi Tengah Menurut Daerah, Sept 2020- Sept 2021

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁)			
September 2020	1,83	3,20	2,78
Maret 2021	1,55	2,82	2,43
September 2021	1,48	2,59	2,24
Indeks Keparahan Kemiskinan (P₂)			
September 2020	0,43	1,07	0,87
Maret 2021	0,41	0,75	0,64
September 2021	0,43	0,70	0,62

Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2022

Apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan perdesaan, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Pada September 2021, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk daerah perkotaan sebesar 1,48 sedangkan di daerah perdesaan mencapai 2,59. Sementara itu nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan adalah 0,43, sedangkan di daerah perdesaan mencapai 0,70.

Beberapa faktor yang terkait dengan tingkat kemiskinan selama periode September 2020 - Maret 2021 antara lain adalah:

1. NTP pada bulan September 2021 naik sebesar 4,95 poin menjadi 101,76 dari 96,81 pada Maret 2021.
2. Laju inflasi Maret-September 2021 turun sebesar 0,86 persen poin menjadi 0,52 dari 1,38 pada periode September 2020-Maret 2021.
3. Inflasi pada September 2021 sebesar -0,04, sedangkan pada Maret 2021 tercatat sebesar 0,2.
4. TPT Agustus 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,02 persen poin menjadi 3,75% dari 3,73% pada Februari 2021.

Penurunan angka kemiskinan kedepan merupakan peran dan komitmen pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta para *stakeholder* dalam upaya mengeroyok kemiskinan khususnya di Sulawesi Tengah. Pemerintah bersama instansi terkait akan mengambil langkah yang strategis melalui berbagai intervensi baik melalui program multi sasaran maupun melalui operasi pasar dan pengendalian harga. Tiga pilar penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Tengah yang harus dibangun terus-menerus yaitu :

1. Memperluas kesempatan kerja (*Promoting Opportunities for the Poor*);
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat (*Facilitating Empowerment*);
3. Memperkuat ketahanan sosial (*Enhancing Social Security*).

Diharapkan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka penurunan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah dapat berjalan dengan baik yang pada akhirnya dapat menekan angka kemiskinan.

Pencapaian sasaran strategis menurunnya angka kemiskinan ini didukung oleh program sebagai berikut :

1. Program pemberdayaan sosial
2. Program rehabilitasi sosial
3. Perlindungan dan jaminan sosial
4. Perlindungan sosial

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi

Sasaran strategis meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi diukur ketercapaiannya dengan indikator indeks Gini. Capaian kinerja sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut :

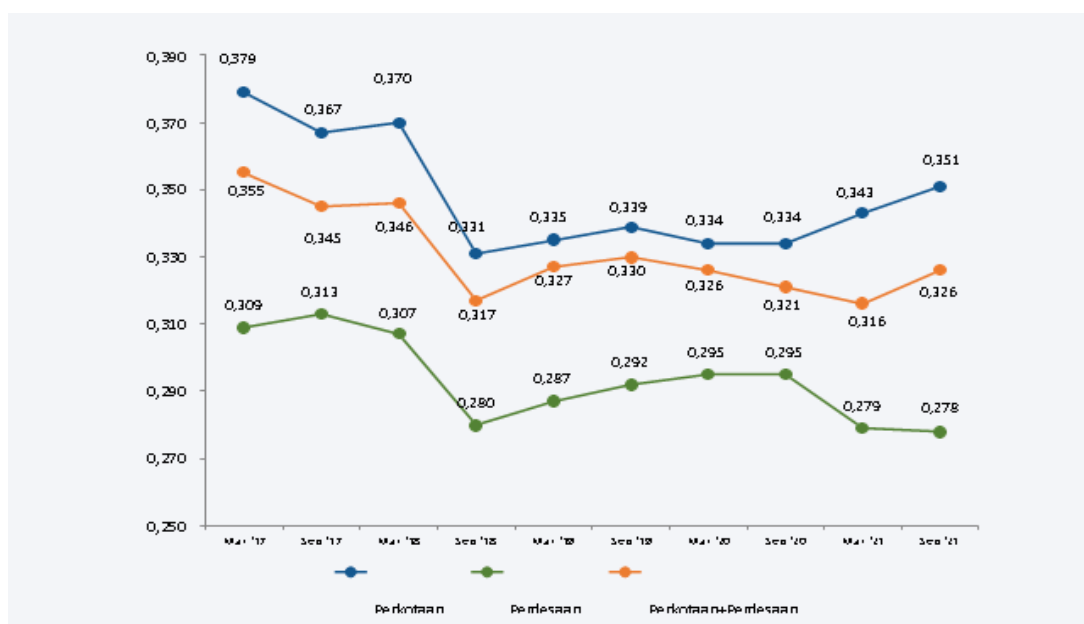
Tabel 12 : Capaian kinerja Sasaran Strategis 5

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD 2021	% Capaian Thd Target Akhir RPJMD
		Target	Real	% Capaian		
1	2	4	5	6	7	8
1.	Indeks Gini	0,31 - 0,35	0,326	93,14	0,31 - 0,35	93,14
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis				93,14		93,14

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa per September 2021 indeks gini Sulawesi Tengah mencapai 0,326 % atau tingkat capaian sebesar 93,14% dengan kategori “**sangat baik**” dari target yang ditentukan sebesar 0,31-0,35, capaian ini sama dengan capaian akhir periode Perencanaan pembangunan jangka menengah Sulawesi Tengah. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 0,00051 poin jika dibandingkan dengan Indeks gini September 2021 yang sebesar 0,321, semakin tinggi indeks gini, semakin tinggi juga ketimpangan ekonomi. Ini salah satu pekerjaan rumah menuntaskan kemiskinan.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2021 adalah sebesar 0,351 naik masing-masing sebesar 0,008 poin dibanding Maret 2021 yang sebesar 0,343, dan 0,017 poin dari September 2020 yang sebesar 0,334. Untuk daerah pedesaan, pada Maret 2021 Gini Ratio adalah sebesar 0,278 turun masing-masing sebesar 0,001 poin dibanding Maret 2021 yang sebesar 0,279, dan 0,017 poin dibanding September 2020 yang sebesar 0,295. Gambar berikut perkembangan Gini Ratio di Sulawesi Tengah.

Gambar 5 : Perkembangan Gini Ratio Sulawesi Tengah Maret 2017 – Sept 2021



Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2022

Selama periode September 2020 – September 2021, nilai Gini Ratio Sulawesi Tengah adalah yang terendah dibanding provinsi lain di Sulawesi. Pada September 2021, dengan nilai Gini Ratio sebesar 0,326 menempatkan Sulawesi Tengah pada urutan ke-14 terendah se-Indonesia. Demikian juga untuk wilayah perkotaan dan pedesaan, nilai Gini Ratio perkotaan dan pedesaan di Sulawesi Tengah selama periode tersebut selalu yang terendah. Dibanding dengan Gini Ratio nasional pada September 2021 yang sebesar 0,381, Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan memiliki nilai Gini Ratio lebih rendah, sedangkan Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo memiliki nilai Gini Ratio yang lebih tinggi. Kondisi ini masih sama jika dibandingkan dengan kondisi September 2020 maupun Maret 2021. Gini Ratio menurut provinsi Se-Sulawesi periode September 2020 – September 2021 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 13 : Indeks gini Provinsi Se-Sulawesi Periode Sep 2020 - Sep 2021

Kode	Provinsi	September 2020			Maret 2021			September 2021		
		Kota	Desa	K+D	Kota	Desa	K+D	Kota	Desa	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
71	Sulawesi Utara	0,367	0,346	0,368	0,365	0,352	0,365	0,359	0,347	0,359
72	Sulawesi Tengah	0,334	0,295	0,321	0,343	0,279	0,316	0,351	0,278	0,326
73	Sulawesi Selatan	0,384	0,352	0,382	0,392	0,338	0,382	0,387	0,334	0,377
74	Sulawesi Tenggara	0,403	0,348	0,388	0,411	0,347	0,390	0,402	0,353	0,394
75	Gorontalo	0,390	0,391	0,406	0,398	0,397	0,408	0,407	0,390	0,409
76	Sulawesi Barat	0,437	0,321	0,356	0,446	0,321	0,356	0,451	0,326	0,366
INDONESIA		0,399	0,319	0,385	0,401	0,315	0,384	0,398	0,314	0,381

Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2022

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi ini didukung oleh program sebagai berikut :

1. Program pemberdayaan sosial
2. Program rehabilitasi sosial

Sasaran Strategis 6 : Terwujudnya koperasi yang tangguh, berdaya saing, profesional dan mandiri

Sasaran strategis terwujudnya koperasi yang Tangguh, berdaya saing, professional dan mandiri diukur ketercapaiannya dengan indikator persentase koperasi aktif. Capaian kinerja sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 14 :Capaian kinerja Sasaran Strategis 6

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD 2021	% Capaian Thd Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2		4	5	6	7	8
1.	Persentase koperasi aktif	%	65,71	55,26	84,10	55,26	84,10
<i>Rata-rata Capaian Sasaran Strategis</i>					84,10		84,10

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase koperasi aktif tahun 2021 sebesar 55,26% atau tingkat capaian sebesar 84,10% dengan kategori “tinggi” dari target yang ditentukan sebesar 65,71%, capaian ini sama dengan capaian akhir periode Perencanaan pembangunan jangka menengah Sulawesi Tengah. Artinya kedepannya pemerintah Sulawesi Tengah melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terus menggerakkan sektor swasta dalam upaya

pemulihan ekonomi nasional khususnya Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang disebagian wilayah terdampak bencana diakibatkan oleh gempa Bumi, tsunami dan likuifaksi yang terdampak di 3 (tiga) Kabupaten yaitu Donggala, Sigi dan Parigi Moutong dan Kota Palu.

Indikator meningkatnya koperasi aktif dapat diukur dengan bertambahnya kelembagaan koperasi yang berkualitas. Koperasi merupakan soko guru perekonomian di Indonesia. Peranan koperasi dalam pembangunan perekonomian ialah menghimpun skala-skala usaha kecil dan menjadikannya lebih besar dengan segala aspeknya. Koperasi juga digunakan sebagai alat untuk memberantas para rentenir yang banyak terdapat didaerah. Kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat, khususnya masyarakat dipedesaan belum memiliki kekuatan ekonomi yang cukup untuk mengembangkan usahanya sendiri karena mereka memerlukan bantuan dan bimbingan dari pemerintah melalui Koperasi Unit Desa (KUD) dan koperasi lainnya yang dapat memberikan pelayanan kepada setiap anggotanya terutama dalam menyediakan pangan dan kebutuhan lainnya. Pada tahun 2021 jumlah koperasi bertambah sebesar 38 koperasi atau 1,73% dari jumlah koperasi tahun 2020, hal ini dikarenakan adanya pertumbuhan koperasi di beberapa daerah.

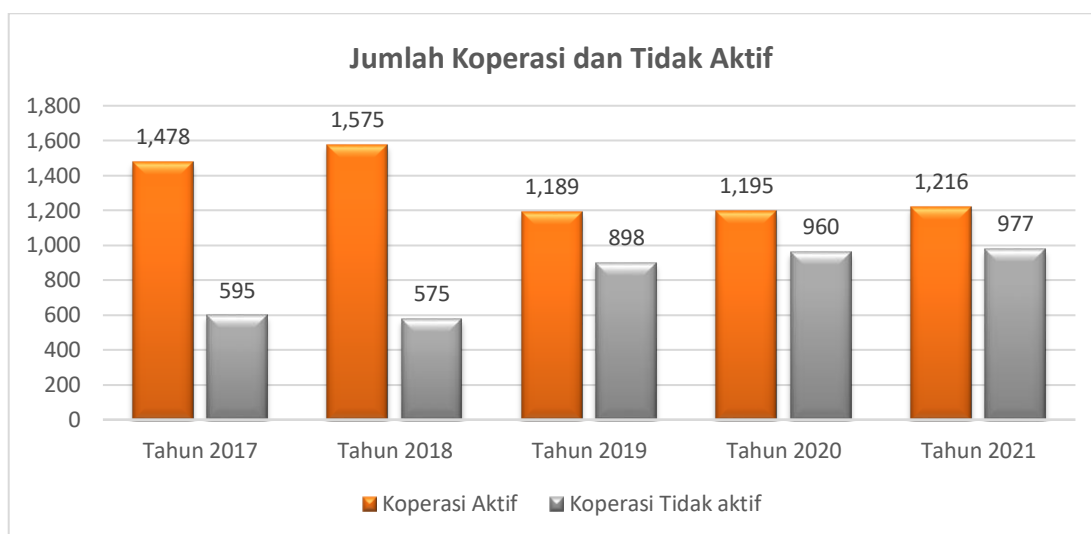
Tabel 15 : Koperasi Per Kabupaten Kota Tahun 2017 s/d Tahun 2021

No	Kab/Kota	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Palu	209	217	215	215	219
2	Donggala	131	131	130	132	136
3	Sigi Biromaru	68	73	75	83	80
4	Parigi moutong	230	231	231	231	231
5	Poso	346	352	359	359	359
6	Morowali	111	117	121	143	150
7	Touna	66	66	68	68	68
8	Banggai	235	243	160	172	179
9	Bangkep	95	95	96	96	97
10	Tolitoli	159	163	166	169	179
11	Buol	220	224	224	224	226
12	Banggai Laut	50	43	54	55	57
13	Morowali Utara	91	123	105	121	121
14	Provinsi	62	72	83	87	91
	Jumlah	2.073	2.150	2.087	2.155	2.193

Sumber : Dinas KUKM Prov.Sulteng, 2022

Jumlah koperasi aktif pada tahun 2021 mengalami Kenaikan sebesar 21 unit koperasi atau kenaikan 0,95% dari jumlah koperasi aktif tahun 2020, sedangkan jumlah koperasi tidak aktif tahun 2021 mengalami kenaikan sebanyak 17 unit koperasi atau 0.77% dari tahun 2020.

Tabel 16. Koperasi Aktif dan Tidak Aktif Tahun 2017 s/d Tahun 2021



Sumber : Dinas KUKM Prov.Sulteng, 2022

Pencapaian kinerja tersebut dipengaruhi beberapa faktor antara lain :

1. jumlah koperasi aktif secara keseluruhan kabupaten/Kota tahun 2021 bertambah sebesar 21 unit usaha menjadi 1.216 Unit dari tahun 2020 sebesar 1.195 Unit.
2. Selisih Hasil Usaha (SHU) di tahun 2021 mengalami Penurunan sebesar 168.911.000 menjadi 4.203.121.000 dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp. 4.372.032.000.
3. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas melalui Program Pelayanan Izin Usaha simpan Pinjam, Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dan Program Penilaian Kesehatan Koperasi berdampak pada aktifnya koperasi yang sebelumnya tidak aktif, kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Penilaian Kesehatan Koperasi berdampak pada peningkatan Unit Koperasi dengan setelah dilakukan tahap penilaian dapat dikualifikasikan menjadi koperasi sehat, Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Koperasi melalui kegiatan sosialisasi-sosialisasi yang berdampak pada kesadaran masyarakat untuk berkoperasi dan berhasil menumbuhkan koperasi baru. Akan tetapi dari dampak pandemi Covid –19 mengakibatkan pengurangan produksi sehingga menyebabkan turunnya angka produksi.
4. Komitmen dan kerjasama yang baik oleh para pejabat maupun para staf OPD untuk memaksimalkan sumber daya yang ada sehingga mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Pencapaian sasaran strategis terwujudnya koperasi yang Tangguh, berdaya saing, profesional dan mandiri ini didukung oleh program sebagai berikut :

1. Program Program Pelayanan Izin Usaha simpan Pinjam
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
3. Program Penilaian Kesehatan Koperasi

4. Program Pendidikan dan Latihan Koperasi
5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Sasaran Strategis 7 : Meningkatkan daya saing, efisiensi dan produktif perdagangan

Sasaran strategis meningkatnya daya saing, efisiensi dan produktif perdagangan diukur ketercapaiannya dengan dua indikator yaitu kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dan ekspor bersih perdagangan. Capaian kinerja sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 17 : Capaian kinerja Sasaran Strategis 7

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD 2021	% Capaian Thd Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	11,59	6,41	55,31	11,59	55,31
2.	Ekspor bersih perdagangan	Juta USD	1.200	4902,86	408,57	5.000	335,59
<i>Rata-rata Capaian Sasaran Strategis</i>					231,94		195,45

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 231,94% dengan kategori “**Sangat baik**”, begitu juga untuk capaian akhir periode Perencanaan pembangunan jangka menengah Sulawesi Tengah tercapai sebesar 195,45%. Untuk indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB terealisasi sebesar 6,41% atau tingkat capaian sebesar 55,31% dari target yang ditetapkan 11,59%. Data yang digunakan merupakan data Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah, yang dihitung berdasarkan komponen Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sehingga nilai kontribusi sektor perdagangan yang tercapai lebih rendah daripada tahun sebelumnya. Sedangkan untuk indikator ekspor bersih perdagangan terealisasi sebesar USD 4902,86 atau tingkat capaian sebesar 408,57% melebihi dari target yang telah ditetapkan USD 1.200 .

Selama tahun 2021 perekonomian di Sulawesi Tengah terus dibayang- bayangi kontraksi atau tekanan yang menyebabkan pelemahan akibat adanya pandemi COVID-19 yang telah lebih dulu meluluhlantahkan perekonomian sejumlah wilayah di Indonesia dan negara lainnya. Pandemi ini menyebabkan *supply demand* terganggu sebagai akibat adanya penerapan protokol kesehatan, dikarenakan beberapa negara pengimpor menerapkan sistem lockdown membuat pengiriman barang memakan waktu yang lama hingga biaya pengiriman logistik pun bertambah dan berpengaruh terhadap harga jual barang impor. Di tingkat nasional ketersediaan barang

pokok seperti minyak goreng lebih dipengaruhi oleh karena ada kenaikan dari sisi permintaan (demand) dan penurunan dari sisi penawaran (supply).

Beberapa faktor berikut menjadi penyebab penurunan supply antara lain :

1. Produsen mengalami penurunan dalam memasarkan minyak goreng di dalam negeri. CPO (Crude Palm Oil) merupakan salah satu jenis minyak nabati yang paling banyak diminati oleh masyarakat dunia. Saat ini harga CPO di pasar dunia sedang mengalami kenaikan harga. Kenaikan itu dari 1100 dolar AS menjadi 1340 dollar. Akibat kenaikan CPO, produsen minyak goreng lebih memilih menjual minyak goreng ke luar negeri dibandingkan ke dalam negeri.
2. kewajiban pemerintah terkait dengan program B30. Program B30 adalah program pemerintah untuk mewajibkan pencampuran 30 persen diesel dengan 70 persen bahan bakar minyak jenis solar.
3. kondisi pandemi Covid-19 yang belum selesai. Ada beberapa negara di belahan dunia lain yang sedang mengalami gelombang ketiga Covid-19. Konsumen luar negeri yang selama ini menggunakan minyak nabati juga mulai beralih ke CPO.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk menjaga stabilisasi perekonomian di Sulawesi Tengah seperti dengan mengeluarkan surat edaran terkait prioritas BAPOK pada saat pengiriman logistik sehingga ketersediaan BAPOK di Sulawesi Tengah relatif aman. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah sendiri selama tahun 2021 melakukan Pasar Murah dengan menerapkan protokol kesehatan guna menjaga stabilisasi harga BAPOK di Sulawesi Tengah.

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dipengaruhi juga oleh sektor Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan dan Asuransi, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa lainnya. Selama tahun 2021 tercatat 41 Jumlah penanganan sengketa konsumen (kasus), yang ditangani oleh 3 BPSK. Penanganan sengketa konsumen ini berkaitan erat dengan kewenangan tertib niaga. Selain itu selama tahun 2021 juga terdapat 77 komoditi yang diuji dan 207 alat yang dikalibrasi oleh UPT. PSMB.

Peningkatan hasil tambang/smelter mempengaruhi jumlah realisasi perdagangan bersih yang significant upaya untuk melahirkan eksportir baru di Sulawesi Tengah melalui klinik ekspor dengan fasilitasi pelaku usaha untuk memperoleh informasi coaching terkait ekspor dan pasar ekspor. Saat ini, beberapa hal yang menghambat kinerja ekspor adalah masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung ekspor seperti kontainer ekspor, kapal ekspor dan fasilitasi bongkar

muat (transportasi) serta permintaan ekspor dari Sulawesi Tengah yang menurun dari negara tujuan diakibatkan pandemi. Pada tahun 2021 nilai ekspor Provinsi Sulawesi Tengah, memiliki peningkatan yang significant tetapi hal ini dapat ditingkatkan lagi melalui peningkatan sarana ekspor, komitmen peningkatan produksi komoditi unggulan dan dengan menciptakan eksportir baru.

Selama Januari-Desember 2021, kelompok besi dan baja mendominasi pangsa ekspor senilai US\$10.735,29 juta atau 88,43% dari total ekspor dan bahan bakar mineral senilai US\$1.001,13 juta (8,25%). Sementara itu, kontribusi ekspor kelompok komoditas lainnya terhadap total ekspor masing-masing di bawah 3,00%.

Selama Januari-Desember 2021, Pelabuhan Kolonodale mendominasi layanan ekspor senilai US\$10.805,53 juta atau 89,01% dari total nilai ekspor, disusul Luwuk senilai US\$1.242,54 juta atau 10,24%, dan Pantoloan senilai US\$9,67 juta atau 0,08%. Sementara itu, ekspor melalui pelabuhan di provinsi lainnya tercatat US\$81.87 juta atau sebesar 0,67%. Peningkatan aktifitas ekspor, khususnya untuk komoditas besi dan baja, dimana kawasan industri morowali (KIM) Morowali memiliki sumbangsih paling besar dalam peningkatan ekspor Sulawesi Tengah tahun 2021, juga didukung oleh terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dimana Perusahaan Mineral dapat melakukan Ekspor Nikel kualitas rendah yang sebelumnya dilarang. Perkembangan nilai dan volume ekspor dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 18 : Kinerja Ekspor Daerah Tahun 2021 (US\$ Juta)

BULAN	BPS			SKA		
	NILAI EKSPOR (JUTA US\$)	IMPOR (JUTA US\$)	EKSPOR BERSIH (JUTA US\$)	NILAI EKSPOR (JUTA US\$)	FORM TERJUAL (SET)	NEGARA TUJUAN TERBANYAK
JANUARI	606,29	222,98	383,31	282,67	396	VIETNAM
FEBRUARI	792,65	339,11	453,54	175,51	221	CHINA
MARET	783,72	526,63	257,09	432,42	643	VIETNAM
APRIL	956,58	492,30	464,28	518,74	453	VIETNAM
MEI	941,65	818,44	123,21	433,73	430	VIETNAM
JUNI	1.109,11	698,79	410,32	425,31	505	VIETNAM
JULI	937,20	450,05	487,15	384,29	393	VIETNAM
AGUSTUS	1.131,13	664,67	466,46	550,61	653	INDIA
SEPTEMBER	1.189,46	489,22	700,24	639,15	726	INDIA
OKTOBER	1.190,04	606,85	583,19	565,93	527	VIETNAM
NOVEMBER	1.171,71	786,91	384,80	584,61	624	INDIA
DESEMBER	1.246,68	1.057,41	189,27	542,76	522	VIETNAM

DAB				668,39		
TOTAL	12.056,22	7.153,36	4.902,86	6.204,11	6093	

Sumber :Disperindag Prov. Sulteng, 2022

Selama Januari-Desember 2021, ekspor terbesar Sulawesi Tengah (melalui Sulawesi Tengah dan Provinsi lain) ditujukan ke Tiongkok senilai US\$5.130,06 juta, diikuti ke Taiwan senilai US\$2.932,11 juta, Korea Selatan senilai US\$761,29 juta, Italia senilai US\$686,32 juta, dan Vietnam senilai US\$545,15 juta. Berdasarkan kontribusinya, ekspor ke lima negara tujuan tersebut meliputi Tiongkok 42,26%, Taiwan 24,15%, Korea Selatan 6,27%, Italia 5,65 %, dan Vietnam 4,49%. Realisasi ekspor menurut negara tujuan berdasarkan Dokumen SKA Sulawesi Tengah tahun 2020, ekspor ke negara Vietnam mendominasi transaksi tahun 2021 dengan realisasi sebesar US\$ 3.585,84 Juta atau 57,80% dari total transaksi tahun 2021. Rekapitulasi ekspor menurut negara tujuan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 19 : Rekapitulasi Ekspor menurut Negara Tujuan Tahun 2021 (SKA)

NO.	NEGARA TUJUAN	PELABUHAN MUAT	VOLUME (TON)	REALISASI EKSPOR (US\$JUTA)
1	AUSTRALIA	TG. PRIOK	832,27	1,87
2	BRAZIL	POSO	14.880,33	43,31
3	CANADA	POSO	310,96	0,67
4	CHINA	PANTOLOAN, KOLONODALE, POSO, BAHUDOPI, SURABAYA, TG.PRIOK	1.197.371,59	3.374,89
5	INDIA	POSO, PANTOLOAN	76.314,58	337,32
6	ITALY	POSO	51,99	86,11
7	JAPAN	PALU, PANTOLOAN, POSO	1.290,77	5,53
8	KOREA	BAHUDOPI, POSO, PANTOLOAN, TG.PERAK	1.072,39	17,97
9	MALAYSIA	BAHUDOPI, POSO, PANTOLOAN	67.993,88	342,94
10	MEXICO	POSO	101,53	0,53
11	MYANMAR	BAHUDOPI	19,30	13,96
12	PAKISTAN	PANTOLOAN	4.277,06	28,84
13	PHILIPPINES	BAHUDOPI, PANTOLOAN	9.410,12	232,45

14	REUNION	INDONESIA BULK TERMINAL	664,95	2,32
15	RUSSIAN FEDERATION	BAHUDOPI, BONTAN BAY, INDONESIA BULK TERMINAL, POSO	15.359,43	39,66
16	SINGAPORE	BAHUDOPI, POSO	46,22	27,56
17	SOUTH AFRICA	BAHUDOPI	12,07	21,43
18	SRI LANKA	BAHUDOPI	58,00	30,13
19	TAIWAN	BAHUDOPI, POSO, TG.PRIOK	9.609,51	91,77
20	THAILAND	BAHUDOPI, POSO, TG.PRIOK	9.298,15	52,35
21	TURKEY	BONTAN BAY, INDONESIA BULK TERMINAL, POSO, TG.PRIOK	47.998,25	231,21
22	UNITED ARAB EMIRATES	POSO	128,76	0,53
23	UNITED KINGDOM	INDONESIA BULK TERMINAL, TG.PRIOK	228,80	0,50
24	UNITED STATES OF AMERICA	INDONESIA BULK TERMINAL, TG.PRIOK, POSO	8.955,16	32,39
25	VIET NAM	BOOM BARU, MUTIARA PALU, PANTOLOAN, POSO, TG.PERAK	124.396,00	519,47
26	DAB		126.364,51	668,39
TOTAL			1.717.046,58	6.204,11

Sumber :Disperindag Prov. Sulteng, 2022

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya daya saing, efisiensi dan produktif perdagangan ini didukung oleh program sebagai berikut :

1. Program Perdagangan Dalam Negeri
2. Program Perdagangan Dalam Negeri
3. Program dukungan manajemen

Sasaran Strategis 8 : Terwujudnya industri yang Tangguh, profesional dan mandiri

Sasaran strategis meningkatkan nilai dan realisasi investasi diukur ketercapaiannya dengan indikator pertumbuhan industri. Capaian kinerja sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 20 : Capaian kinerja Sasaran Strategis 8

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD 2021	% Capaian Thd Target Akhir RPJMD
			Target	Real	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pertumbuhan Industri	%	7,80 - 8,00	24,26	311,03	7,80 - 8,00	311,03
<i>Rata-rata Capaian Sasaran Strategis</i>					311,03		311,03

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan industri Sulawesi Tengah 2021 mencapai 24,26 % atau tingkat capaian sebesar 311,03% dengan kategori “**sangat baik**” dari target yang ditentukan sebesar 7,80-8,00, realisasi ini merupakan hasil pendataan pada Aplikasi SIINas dimana terdapat 10.929 unit usaha industri di Sulteng pada tahun 2021 dari sebelumnya di tahun 2020 terdapat 8.795 unit usaha industri. Capaian ini sama dengan capaian akhir periode Perencanaan pembangunan jangka menengah Sulawesi Tengah sebesar 311,03%.

Ada beberapa kabupaten yang pertumbuhan IKM nya meningkat karena adanya beberapa kawasan industri & industri besar yang dibangun seperti Kabupaten Morowali (PT. IMIP), Morut, Touna, Banggai (PT. Donggi Senoro LNG) sehingga memicu pertumbuhan disekitarnya. Industri kecil menengah yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan adalah industri : pangan, furnitur, alat angkut, sandang, barang dari kayu, logam, kimia, mesin, kerajinan, aneka kemasan / percetakan dan elektronika. Rekapitulasi unit usaha industri Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 21 : Jumlah Unit Usaha Industri Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

No	Kabupaten / Kota	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Palu	1167	1256	1363	1508	1878	1360
2	Donggala	502	532	572	631	350	374
3	Sigi	557	594	710	734	648	1430
4	Parigi Moutong	256	284	315	388	445	490
5	Poso	468	501	536	574	583	626
6	Tojo Una-Una	528	573	621	801	1040	1201
7	Morowali	594	643	694	719	632	990
8	Banggai	109	119	139	199	273	335
9	Banggai Kepulauan	471	509	549	823	308	532
10	Toli-Toli	310	407	621	656	858	887
11	Buol	550	597	645	814	815	1094
12	Morowali Utara	205	212	244	272	530	460
13	Banggai Laut	43	53	62	275	367	1072
Jumlah (Unit Usaha)		5760	6280	7071	8394	8727	10851

Sumber :Disperindag Prov. Sulteng, 2022

Pada Tahun 2021 Pertumbuhan Industri Besar dicapai dengan realisasi sebesar 14,71%. Realisasi pertumbuhan industri besar pada Tahun 2021 yakni sebesar 14,71%, jika dibandingkan dengan presentase pertumbuhan industri Tahun 2020 yang memiliki nilai sebesar 36,00%. Peningkatan akumulasi industri besar pada SIINas ini didukung dengan adanya Kawasan Industri yang berada pada Provinsi Sulawesi Tengah, pengembangan kawasan industri merupakan upaya dalam mendorong tumbuhnya industri nasional. Pembangunan kawasan industri merupakan salah satu sarana untuk mengembangkan industri yang berwawasan lingkungan serta memberikan kemudahan dan daya tarik untuk berinvestasi. Hal ini sejalan dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian bahwa upaya untuk mendorong pembangunan industri perlu dilakukan melalui pembangunan lokasi industri yaitu berupa Kawasan industri.

Tabel 22 : Pertumbuhan Industri Besar di Sulawesi Tengah

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
Industri Besar	-	37	43	50	68	78
Jumlah			6	7	18	10
%			16,22	16,28	36,00	14,71

Sumber :Disperindag Prov. Sulteng, 2022

Hasil capaian ini juga didukung dengan pencapaian 1 (Satu) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2038 yang akan menjadi acuan Penyusunan RPIK di

Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. Perda tersebut merupakan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permenperind Nomor 110 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan RPIP/RPIK bahwa Gubernur dan Bupati / Walikota yang wilayah administrasinya memiliki Urusan Pemerintahan Pilihan Perindustrian dan atau mempunyai potensi Urusan Pemerintahan Pilihan Perindustrian wajib menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) / Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK).

Keberhasilan capaian ini juga berkaitan erat dengan Kesiapan SDM Sulawesi Tengah menghadapi tantangan di era Industri 4.0, sebuah strategi Indonesia untuk mencapai 10 Besar Ekonomi Dunia di Tahun 2030. Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menghadapi tantangan di era Industri 4.0 antara lain :

- a) Meningkatkan Skill/SDM Para Pelaku IKM yang ada di daerah
- b) Memfasilitasi Para IKM berkaitan dengan Legal, Produk dan Pasar
- c) Memfasilitasi Para IKM untuk masuk ke marketplace
- d) Memberikan Pendampingan/Mentoring Kepada Para Pelaku IKM
- e) Melakukan Workshop/Pelatihan Kewirausahaan bagi para Alumni SMK / Perguruan Tinggi / Masyarakat Umum
- f) Mendirikan Pusat Inkubator Bisnis Teknologi Informasi

Pada tahun 2013, diinisiasi Oleh Kementerian Perindustrian Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, dan STMIK Bina Mulia Palu, melalui MoU Pengembangan IBTI di Sulawesi Tengah terbentuklah Lembaga Inkubator Binis Teknologi Informasi (IBTI) Sulawesi Tengah “Maleo Techno Center”. Pembentukan Lembaga IBTI adalah bagian dari upaya untuk mendorong pertumbuhan industri dan pengembangan industri kreatif di Sulawesi Tengah, dengan sasaran peningkatan wirausaha baru berbasis teknologi informasi dan peningkatan pelaku industri E-Commerce, Inkubator Bisnis TI menyediakan layanan untuk pendampingan pengembangan bisnis yang dibutuhkan oleh para tenant seperti :

- a. Konsultasi Bisnis dan Pelatihan
- b. Pembuatan Proposal Bisnis/Model Bisnis
- c. Pengembangan dan pembuatan prototype produk / teknologi ICT seperti: Pembuatan website, Animasi, Aplikasi dll
- d. Mentoring Bisnis
- e. Manajemen bisnis

- f. Promosi Produk
- g. Akses legalitas usaha dan sertifikasi produk
- h. Pengembangan sumberdaya manusia

Pada tahun 2021 tercatat 12 fasilitasi industri yang dilakukan oleh Bidang PPI. Selain itu, terdapat 268 layanan IKM yang dilakukan oleh UPT. P2IPK jika dibandingkan dengan tahun 2020 terdapat 220 jumlah layanan IKM. Hal ini didukung oleh semakin baiknya sarana prasarana penunjang kegiatan teknis yang ada pada UPT. P2IPK. Selain itu juga didukung oleh peningkatan kemampuan SDM aparatur pada UPT. P2IPK.

Pencapaian sasaran strategis terwujudnya industri yang Tangguh, profesional dan mandiri ini didukung oleh program sebagai berikut :

1. Program perencanaan dan pembangunan industri
2. Program pengendalian izin usaha industri
3. Program pengelolaan sistem informasi industri nasional

Sasaran Strategis 9 : Meningkatnya nilai dan realisasi investasi

Sasaran strategis meningkatnya nilai dan realisasi investasi diukur ketercapaiannya dengan indikator nilai realisasi investasi. Capaian kinerja sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 23 : Capaian kinerja Sasaran Strategis 9

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD 2021	% Capaian Thd Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nilai realisasi investasi						
	- PMDN	Rp	1.600.000.000.000	3.012.341.100.000	188,27	1.600.000.000.000	188,27
	- PMA	Rp	16.950.510.000.000	39.684.282.680.000	234,12	21.700.000.000.000	182,88
<i>Rata-rata Capaian Sasaran Strategis</i>					211,19		185,57

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian rata-rata nilai realisasi investasi tahun 2021 sebesar 211,19% dengan kategori “**sangat baik**” melebihi target yang telah ditetapkan, untuk capaian akhir periode Perencanaan pembangunan jangka menengah Sulawesi Tengah terealisasi sebesar 185,57%. Pada tahun 2021 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia menargetkan realisasi investasi untuk Provinsi Sulawesi Tengah sebesar yaitu Rp. 31,75 Triliun. Target tersebut dapat dicapai dengan baik oleh Pemerintah Daerah

Provinsi Sulawesi Tengah melalui DPMPTSP. Upaya peningkatan realisasi investasi di Sulawesi Tengah tetap dilakukan meskipun masih dalam situasi pandemi Covid-19, sehingga target tersebut dapat dicapai dengan baik bahkan melebihi target, dengan nilai total realisasi investasi sebesar Rp.42,69 Triliun atau 134,48% dari target realisasi BKPM RI. Jumlah investor yang berinvestasi juga mengalami peningkatan, dengan capaian 425 proyek baru dengan rincian 379 perusahaan PMDN dan 46 proyek PMA baru.

Selanjutnya untuk Prestasi dan Penghargaan di Tingkat Nasional Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui DPMPTSP juga mendapatkan penghargaan sebagai berikut :

1. Penghargaan Kepada Provinsi Sulawesi Tengah “Tanda Penghargaan bagi institusi yang berjasa dalam pembangunan bidang kesehatan” dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
2. Penghargaan sebagai Peringkat kedua (Terbaik II) Tingkat Nasional pada Lomba Anugrah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 berdasarkan hasil Monev Keterbukaan informasi Badan Publik Tahun 2021.

Beberapa hal yang menjadi faktor pendukung tercapainya nilai realisasi investasi di Sulawesi Tengah sebagai berikut:

- a. Semangat disiplin serta kerjasama yang baik serta komitmen bersama dalam melaksanakan kegiatan walaupun dalam masa pandemi Covid-19, sehingga program kerja dapat terlaksana sesuai rencana.
- b. Adanya semangat dedikasi dan kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan untuk memenuhi kelengkapan administrasi dan teknis sesuai prosedur yang berlaku.
- c. Terjalinnnya koordinasi dan konsolidasi yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Instansi teknis lainnya baik di daerah maupun di pusat dalam mendukung pelaksanaan program.
- d. Pembinaan dan pengarahan dari jajaran Pimpinan berjalan sangat baik dan berkesinambungan, sehingga tercipta situasi dan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan kegiatan dan program kerja.
- e. Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan kegiatan.

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya nilai dan realisasi investasi ini didukung oleh program sebagai berikut :

1. Program pembangunan iklim penanaman modal
2. Program promosi penanaman modal

3. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal
4. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal

Sasaran Strategis 10 : Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan ekonomi

Sasaran strategis meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan ekonomi diukur ketercapaiannya dengan dua indikator yaitu peningkatan indeks pembangunan gender (IPG) dan peningkatan indeks pemberdayaan gender (IDG). Capaian kinerja sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 24 : Capaian kinerja Sasaran Strategis 10

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD 2021	% Capaian Thd Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2		4	5	6	7	8
1.	Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	93	93,00	100,00	93	100,00
2.	Peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender	%	76,00 - 77,00	76,00	100,00	76,00 - 77,00	100,00
<i>Rata-rata Capaian Sasaran Strategis</i>					100,00		100,00

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori “**Sangat Baik**”, begitu juga untuk capaian akhir periode Perencanaan pembangunan jangka menengah Sulawesi Tengah tercapai sebesar 100%. Untuk indikator peningkatan indeks pembangunan gender (IPG) terealisasi sebesar 93% atau tingkat capaian sebesar 100% dari target dari target yang ditetapkan 93%, sedangkan untuk indikator peningkatan indeks pemberdayaan gender (IDG) terealisasi sebesar 76% atau tingkat capaian sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.

Meskipun keterlibatan perempuan di ranah politik sudah mulai kelihatan dan diakui eksistensinya, namun jika dibandingkan dengan keterlibatan laki-laki memang masih belum menunjukkan kesetaraan, khususnya pada beberapa aspek pembangunan. Disamping itu juga, pada tahun 2021 masih belum bergeser eksistensi perempuan dalam bidang legislatif, hal ini dapat dilihat dari pencapaian realisasi kinerja keuangan yang disebabkan karena dampak dari pandemi Covid-19 yang terjadi selama setahun, sehingga pelaksanaan program kegiatan, tidak maksimal hanya dilakukan secara daring (*Zoom Meeting*).

Upaya kedepan untuk meningkatkan partisipasi perempuan di legislatif perlunya melakukan peningkatan pemahaman melalui sosialisasi politik dan pelatihan politik bagi perempuan dan

penguatan politik perempuan yang berdaya saing, sehingga kuota 30% di parlemen dapat dioptimalkan dengan terwujudnya peningkatan partisipasi perempuan di Parlemen setiap tahunnya.

Berbagai hal telah dilakukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan gender yang antara lain melalui kegiatan-kegiatan seperti Pengembangan forum peningkatan produktifitas ekonomi perempuan (PPEP) dan pembinaan Industri Rumahan Perempuan, Fasilitasi Forum Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan sosialisasi percepatan pemberantasan buta aksara perempuan, Bimbingan teknis manajemen usaha dan keterampilan bagi perempuan dalam mengelola usaha dan Pencegahan dampak negatif lingkungan yang responsif gender.

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan ekonomi ini didukung oleh program sebagai berikut :

1. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
2. Program peningkatan kualitas keluarga

Sasaran Strategis 11 : Meningkatnya kunjungan wisatawan

Sasaran strategis meningkatnya kunjungan wisatawan diukur ketercapaiannya dengan dua indikator yaitu jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan jumlah kunjungan wisatawan nusantara. Capaian kinerja sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 25 : Capaian kinerja Sasaran Strategis 11

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD 2021	% Capaian Thd Target Akhir RPJMD
			Target	Real	% Capaian		
1	2		4	5	6	7	8
1.	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Orang	20.000	1.085	5,43	21.500	5,05
2.	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Orang	4.000.000	713.618	17,84	4.000.000	17,84
<i>Rata-rata Capaian Sasaran Strategis</i>					11,63		11,44

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 11,63 % dengan kategori **“Sangat Rendah”**, begitu juga untuk capaian akhir periode Perencanaan pembangunan jangka menengah Sulawesi Tengah hanya tercapai sebesar 11,44%. Menurunnya jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara disebabkan oleh penyebaran virus Covid 19 secara global di seluruh dunia. Untuk indikator jumlah kunjungan wisatawan mancanegara terealisasi sebesar 1.085 orang atau tingkat capaian sebesar 5,43% dari target 20.000 orang, sedangkan untuk indikator jumlah kunjungan

wisatawan nusantara terealisasi sebanyak 713.618 orang atau tingkat capaian sebesar 17,84% dari target 4.000.000 orang.

Perkembangan tingkat kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Sulawesi Tengah dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 secara umum mengalami peningkatan meskipun pada periode tertentu cukup berfluktuasi, yang mana salah satu sebab peningkatannya adalah karena adanya peristiwa Gerhana Matahari Total (Total Solar Eclypse). Selain itu juga penyebab menurunnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara disebabkan adanya bencana alam gempa bumi, tsunami dan likuifaksi yang melanda Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 adalah tahun dimana sektor pariwisata mengalami dampak yang sangat signifikan akibat merebak dan menyebarnya pandemi virus corona (covid-19), mobilitas masyarakat yang terbatas dengan diberlakukannya *lockdown* di mancanegara dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di dalam negeri serta penutupan berbagai tempat rekreasi dan wisata sebagai bentuk antisipasi penyebaran pandemi, berimbas besar terhadap perputaran roda ekonomi, termasuk juga pada pengurangan tenaga kerja di sektor pariwisata.

Perencanaan pembangunan pariwisata Sulawesi Tengah memerlukan sebuah analisis faktor lingkungan internal berupa kekuatan (*Strenght*) dan kelemahan (*weaknesses*) dan juga perlu memperhatikan faktor lingkungan eksternal yang meliputi peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threaths*). Untuk mengembangkan sektor pariwisata di Sulawesi Tengah, kedua faktor ini sangat diperlukan untuk mengetahui peluang serta kendala apa saja yang harus dipertimbangkan untuk selanjutnya dapat dijadikan acuan dalam tahap selanjutnya yaitu perencanaan.

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya kunjungan wisatawan ini didukung oleh program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
2. Program Pemasaran Pariwisata
3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sasaran Strategis 12 : Terciptanya kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja

Sasaran strategis terciptanya kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja diukur ketercapaiannya dengan dua indikator yaitu tingkat pengangguran terbuka (TP) dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Capaian kinerja sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut :

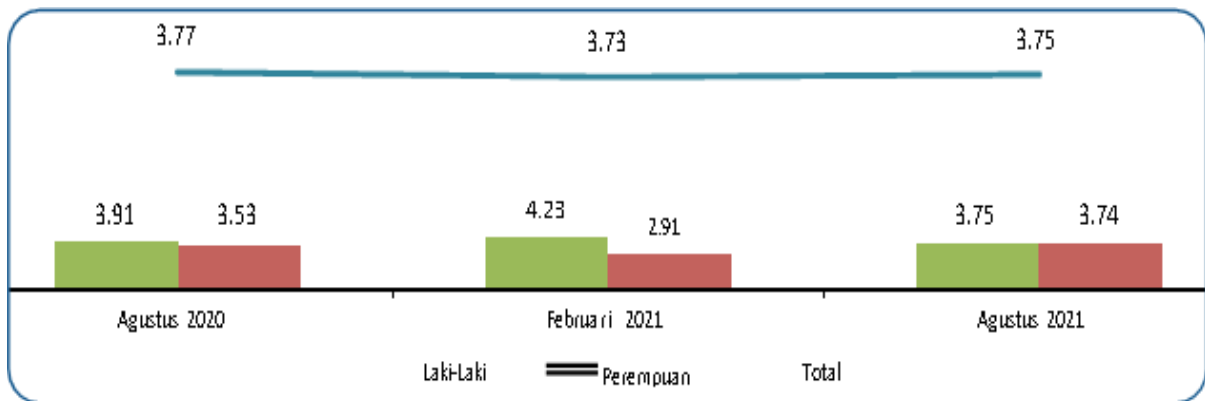
Tabel 26 : Capaian kinerja Sasaran Strategis 12

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD 2021	% Capaian Thd Target Akhir RPJMD
			Target	Real	% Capaian		
1	2		4	5	6	7	8
1.	Tingkat pengangguran terbuka	%	3,25 - 3,00	3,75	80	3,25 - 3,00	80
2.	-Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	70.01	68,73	98,17	70.01	98,17
<i>Rata-rata Capaian Sasaran Strategis</i>					89,09		89,09

Berdasarkan Tabel di atas sasaran strategis terciptanya kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja dengan dua indikator kinerja rata-rata tercapai sebesar 89,09% dengan kategori **“Tinggi”**, sama dengan capaian akhir periode Perencanaan pembangunan jangka menengah Sulawesi Tengah. Untuk indikator tingkat pengangguran terbuka per agustus 2021 sebesar 3,75% atau tingkat capaian sebesar 80% dari target sebesar 3,00. Untuk indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) capaian realisasi tahun 2021 sebesar 68,73% atau tingkat capaian sebesar 98,17% dari target yang ditetapkan sebesar 70,01%. Terdapat 217,62 ribu orang (14,27 persen penduduk usia kerja) yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (9,18 ribu orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (3,67 ribu orang), sementara tidak bekerja karena COVID-19 (12,60 ribu orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (192,17 ribu orang).

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2021 sebesar 3,75 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar empat orang penganggur. Pada Agustus 2021, TPT mengalami penurunan sebesar 0,02 persen poin dibandingkan Agustus 2020, namun mengalami kenaikan sebesar 0,02 persen poin dibandingkan dengan Februari 2021. Berikut gambaran trend tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurut jenis kelamin Agustus 2020 – Agustus 2021 Sulawesi Tengah.

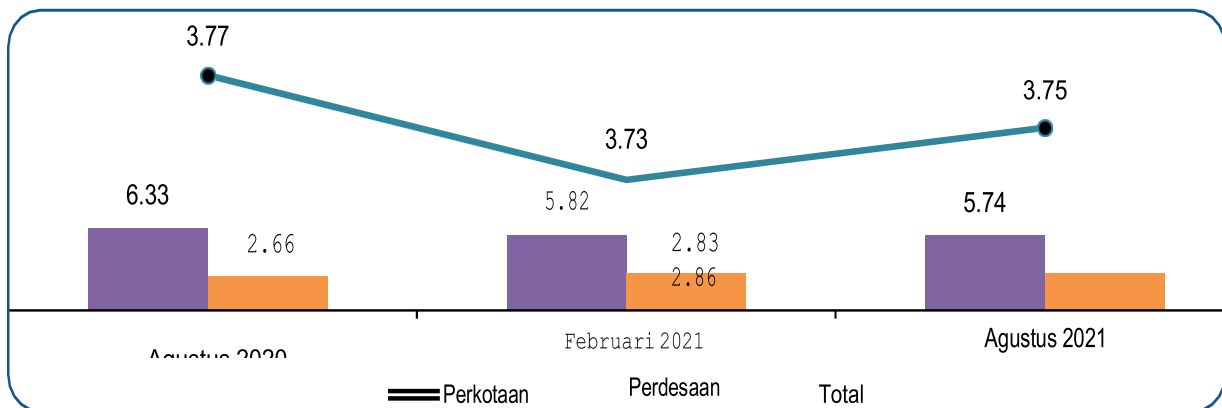
Gambar 6 : Trend TPT menurut jenis kelamin Agustus 2020 – Agustus 2021



Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2022

Pada Agustus 2021, TPT perkotaan (5,74%) lebih tinggi dua kali TPT di daerah perdesaan (2,86%). Dibandingkan Agustus 2020, TPT perkotaan turun sebesar 0,59% poin dan TPT perdesaan naik sebesar 0,20% poin. Jika dibandingkan dengan Februari 2021, TPT perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,08% poin sedangkan TPT perdesaan mengalami kenaikan sebesar 0,03 persen poin.

Gambar 7 : Trend TPT menurut daerah tempat tinggal Agustus 2020 – Agustus 2021



Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2022

Ada beberapa hal yang menyebabkan peningkatan atau penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya kemampuan SDM sehingga berdampak pada lemahnya pembagian tugas secara internal serta peningkatan mutu/kualitas.
- b. Masih kurangnya SDM tenaga fungsional instruktur/pengajar yang sudah melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan maupun *upgrading* sesuai dengan kompetensi yang dilaksanakannya.
- c. Masih terbatasnya peralatan, teknik dan metode terbaru dalam pelaksanaan pelatihan maupun pengelolaan usaha.
- d. Pandemi covid-19 telah memberikan dampak pada sektor ketengakerjaan dengan meningkatnya jumlah pengangguran di Sulawesi Tengah .

Beberapa alternatif solusi yang akan dilakukan antara lain :

- a. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan baik secara kualitas maupun kuantitasnya serta meningkatkan kemudahan memperoleh akses pengetahuan.
- b. Mengusulkan pengangkatan tenaga fungsional pengajar yang baru dan *upgrading* pengajar.
- c. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama internal maupun eksternal (lintas sektoral) dalam lingkup lembaga/instansi Pemerintah maupun non Pemerintah.
- d. Melakukan pengusulan penambahan alokasi dana untuk pengadaan peralatan baru, serta sosialisasi dan pengajaran untuk penerapan teknik dan metode terbaru.

Pencapaian sasaran strategis terciptanya kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja ini didukung oleh program sebagai berikut :

1. Program perencanaan tenaga kerja
2. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
3. Program penempatan tenaga kerja

Sasaran Strategis 13 : Terbukanya keterisolasian daerah-daerah terpencil

Sasaran strategis terbukanya keterisolasian daerah-daerah terpencil diukur ketercapaiannya dengan indikator Persentase kabupaten/kota tidak tertinggal. Capaian kinerja sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 27 : Capaian kinerja Sasaran Strategis 13

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD 2021	% Capaian Thd Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2		4	5	6	7	8
1.	Persentase Kabupaten/Kota Tidak Tertinggal	%	69,23	76,92	111,11	69,23	111,11

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase kabupaten/kota tidak tertinggal tahun 2021 terealisasi sebesar 76,92 % atau tingkat capaian sebesar 111,11% dengan kategori “**sangat baik**” dari target yang ditentukan sebesar 69,23%. Capaian ini juga telah melebihi target yang ditetapkan pada akhir perencanaan jangka menengah daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Pencapaian sasaran ini cukup maksimal dengan adanya kegiatan dan dukungan dari input maupun output, sehingga masyarakat di wilayah tertinggal dapat meningkatkan taraf hidup melalui pembangunan sarana dan prasarana yang baik, sumber daya manusia yang handal serta pertumbuhan ekonomi lokal.

Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menuntaskan kabupaten/kota yang tertinggal di Sulawesi Tengah antara lain :

1. Peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada di wilayah tertinggal dan peningkatan pelayanan kesehatan.
2. Adanya kebijakan mengenai daerah tertinggal seperti tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal Tahun 2020-2024.
3. Dilakukan identifikasi dan inventarisasi beberapa sarana dan prasarana yang kurang memadai serta ditingkatkan fungsinya di wilayah terpencil.
4. Telah dilakukan berbagai penyuluhan/pelatihan kepada warga untuk meningkatkan sumber daya manusia.

Sasaran Strategis 14 : Optimalnya tata Kelola hutan untuk pengendalian kerusakan DAS dan hutan lindung

Sasaran strategis optimalnya tata Kelola hutan untuk pengendalian kerusakan DAS dan hutan lindung diukur ketercapaiannya dengan indikator Persentase kerusakan kawasan hutan. Capaian kinerja sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 28 : Capaian kinerja Sasaran Strategis 14

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD 2021	% Capaian Thd Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase kerusakan kawasan hutan	%	0,14	0,15	92,86	0,15	92,86
<i>Rata-rata Capaian Sasaran Strategis</i>					92,86		92,86

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase kerusakan kawasan kehutanan tahun 2021 terealisasi sebesar 0,15% atau tingkat capaian sebesar 92,86% dengan kategori “**sangat baik**” dari target yang ditetapkan sebesar 0,14%. Capaian ini juga telah melebihi target yang ditetapkan pada akhir perencanaan jangka menengah daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Upaya bersama berbagai pihak Polisi kehutanan Dinas Kehutanan Prov.Sulawesi Tengah bersama Kepolisian dan GAKUM LHK Wilayah II Sulawesi serta kesadaran masyarakat yang meningkat, namun kerusakan kawasan hutan yang di akibatkan oleh perambahan hutan, pembukaan lahan dan perladangan liar yang dilaporkan masih terjadi dengan capaian seluas 6.439,69 Ha/tahun dengan persentase 0,15% yaitu perbandingan antara luas kerusakan Kawasan Hutan dengan luas total kawasan hutan di Sulawesi Tengah.

Gambar 8 : Kegiatan Operasi Pengamanan Hutan



Sumber : Dishut Prov. Sulteng, 2022

Pelaksanaan Operasi Gabungan Pengamanan Hutan dan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan dilaksanakan dengan skala prioritas dan pemilihan penanganan yang memberikan dampak/efek jera bagi para pelanggar, mampu memberikan pesan yang jelas dan tegas,

meskipun terdapat keterbatasan personil dan anggaran serta tingginya aktivitas illegal di dalam kawasan hutan untuk tambang dan perambahan. Kerjasama dengan Kepolisian dan GAKUM LHK dalam penegakan hukum memberikan hasil yang baik dengan terpenuhinya capaian kegiatan.

Pencapaian sasaran strategis optimalnya tata Kelola hutan untuk pengendalian kerusakan DAS dan hutan lindung ini didukung oleh program sebagai berikut :

1. Program pengelolaan hutan
2. Program peningkatan penyuluhan dan pengembangan SDM
3. Program pengelolaan daerah aliran sungai (DAS)

Sasaran Strategis 15 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Sasaran strategis kualitas lingkungan hidup diukur ketercapaiannya dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup. Capaian kinerja sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 29 : Capaian kinerja Sasaran Strategis 15

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD 2021	% Capaian Thd Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	71	77,78	109,54	71	109,54
<i>Rata-rata Capaian Sasaran Strategis</i>					109,54		109,54

Capaian sasaran strategis ini dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup Sulawesi Tengah tahun 2021 terealisasi sebesar 77,78% atau tingkat capaian 109,54% dengan kategori “sangat baik” dari target yang ditetapkan sebesar 71%. Capaian ini juga telah melebihi target yang ditetapkan pada akhir perencanaan jangka menengah daerah Provinsi Sulawesi Tengah. IKLH merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh provinsi di Indonesia, dimana IKLH Provinsi merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan terukur dari indeks kualitas hidup seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia merupakan perpaduan antara konsep IKL dan konsep EPI. IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. IKLH juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kriteria yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah : (1) Indeks Kualitas Air, yang diukur berdasarkan parameter-parameter : TSS, DO, BOD,COD, total fosfat, fecal coli, dan total coliform; (2) Indeks Kualitas Udara, yang diukur berdasarkan parameter-parameter : SO₂ dan NO₂; (3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Lahan; dan (4) Indeks Kualitas Air Laut, yang diukur berdasarkan parameter-parameter : TSS, DO, Minyak dan Lemak, Orto-Fosfat, Amonia Total.

Ketersediaan informasi kualitas air diperlukan untuk menentukan program prioritas dan kegiatan, selain sebagai informasi dini terhadap pencemaran yang terjadi di sumber air. Kualitas air diperoleh dengan melakukan pemantauan air sungai secara manual dan otomatis kontinu. Pemantauan kualitas air secara manual dapat dilakukan pada lebih banyak lokasi, sedangkan pemantauan menggunakan alat otomatis dapat dilakukan secara terus menerus, sesaat dan data yang diperoleh lebih banyak dalam satu titik pemantauan. Upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air. Sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum, maka pengawasan berada di hilir. Pengendalian pencemaran air merupakan kegiatan yang mencakup :

- a. Inventarisasi kualitas dan kuantitas air pada sumber air menurut sistem wilayah tata pengairan;
- b. Penetapan golongan air menurut peruntukannya, baku mutu air dan baku beban dari pencemaran air tersebut serta baku mutu limbah cair untuk setiap jenis kegiatan;
- c. penetapan mutu limbah cair yang boleh dibuang oleh setiap kegiatan kedalam air pada sumber air dan pemberian izin pembuangannya;
- d. pemantauan perubahan kualitas air pada sumber air dan mengevaluasi hasilnya;
- e. pengawasan terhadap penataan peraturan pengendalian pencemaran air, termasuk penataan mutu limbah.

Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh beberapa wilayah perkotaan di dunia dan tidak terkecuali di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2021 dalam upaya mengendalikan pencemaran udara melalui:

- (1) pemantauan kualitas udara ambien
- (2) pengukuran kualitas udara melalui AQMS sebanyak 1 unit
- (3) Pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang memiliki sumber emisi tak bergerak agar dapat memenuhi baku mutu emisi yang telah ditentukan.

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas lingkungan hidup ini didukung oleh program sebagai berikut :

1. Program pengelolaan daerah aliran sungai (DAS)
2. Program perencanaan lingkungan hidup
3. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Sasaran Strategis 16 : Meningkatnya kesejahteraan petani

Salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan kinerja pembangunan pertanian di Sulawesi Tengah dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani khususnya pembangunan sektor tanaman pangan dan hortikultura adalah **Nilai Tukar Petani (NTP)**, dimana NTP berperan sebagai indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan, merupakan persentase yang diperoleh dari perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). Pengukuran dan analisis capaian kinerja ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 30 : Capaian kinerja Sasaran Strategis 16

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD 2021	% Capaian Thd Target Akhir RPJMD
			Target	Real	% Capaian		
1	2		4	5	6	7	8
1.	Nilai tukar petani	%	104,99	103,51	98,59	104,99	98,59
<i>Rata-rata Capaian Sasaran Strategis</i>					98,59		98,59

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Nilai Tukar Petani (NTP) Sulawesi Tengah tahun 2021 sebesar 103,51% atau tingkat capaian sebesar 98,59% dengan kategori “**sangat baik**” dari target yang ditentukan sebesar 104,99%. Hal ini disebabkan perubahan indeks harga yang diterima petani (It) lebih besar dibandingkan dengan kenaikan perubahan indeks harga yang dibayar petani (Ib), yakni masing-masing sebesar 1,43 persen dan 0,81 persen. NTP menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian terhadap barang dan jasa baik yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun untuk keperluan produksi pertanian. Sehingga, semakin tinggi NTP secara relatif semakin kuat tingkat kemampuan atau daya beli petani.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) adalah sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan indeks yang diterima petani, upaya yang dilakukan adalah bagaimana harga jual produk hasil pertanian tanaman pangan dapat ditingkatkan melalui peningkatan mutu, kontrol pasokan produk di pasar produsen, distribusi produk pertanian ke pasar konsumen dan terjadinya tunda jual saat memasuki musim panen.
- (2) Stabilitas atau penurunan indeks yang dibayar petani, upaya yang dilakukan adalah menjaga stabilitas barang konsumsi meliputi bahan makanan, makanan jadi dan sandang, disamping itu bagaimana menekan biaya transportasi dari tingkat petani menuju pasar tingkat produsen.
- (3) Menekan biaya biaya produksi dan menekan penambahan biaya modal, upaya yang dilakukan adalah stabilitas biaya transportasi barang konsumsi dan bahan modal menuju ke pasar produsen, disamping itu terjaminnya ketersediaan benih dan bibit juga akan mengurangi naiknya indeks yang harus dibayar petani.
- (4) Peningkatan penggunaan pupuk kandang/organik sehingga meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk organik, dengan demikian volume penggunaan pupuk anorganik dapat ditekan sehingga kelangkaan pupuk ditingkat konsumen dapat dikurangi dan harga pupuk non subsidi tidak meningkat.
- (5) Penggunaan pestisida didasarkan pada hasil pengamatan perkembangan hama dan penyakit, keadaan ini akan menekan penggunaan pestisida.
- (6) Stabilitas dan penurunan harga BBM akan berdampak pada stabilitas dan penurunan biaya transport menuju pasar produsen.

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya kesejahteraan petani ini didukung oleh program sebagai berikut :

1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
2. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
3. Program perizinan usaha pertanian

Sasaran Strategis 17 : Meningkatnya produksi dan mutu tanaman hortikultura, tanaman pangan dan perkebunan

Sasaran strategis ini diukur ketercapaiannya melalui dua indikator yaitu Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dan Jumlah PDRB sub sektor perkebunan. Capaian kinerja sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 31 : Capaian kinerja Sasaran Strategis 17

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD 2021	% Capaian Thd Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2		4	5	6	7	8
1.	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	27,84	17,73	63,69	27,84	63,69
2.	Jumlah PDRB sub sektor perkebunan	Rp	Rp 13.497.176,00	Rp12.987.676,00	96,23	Rp 13.497.176,00	96,23
<i>Rata-rata Capaian Sasaran Strategis</i>					79,96		79,96

Berdasarkan Tabel di atas sasaran strategis meningkatnya produksi dan mutu tanaman hortikultura, tanaman pangan dan perkebunan, dengan dua indikator kinerja rata-rata tercapai sebesar 79,96 % dengan kategori **“Tinggi”**. Untuk indikator kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tahun 2021 terealisasi sebesar 17,73 % atau tingkat capaian sebesar 63,69% dari target sebesar 27,84%, hasil ini merupakan data sementara karena masih menunggu data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tengah. Untuk indikator jumlah PDRB sub sektor perkebunan capaian realisasi tahun 2021 sebesar Rp. 12.987.676,- atau tingkat capaian sebesar 96,23% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.13.497.176,-. PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut, menghitung PDRB bertujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah atau perencanaan, evaluasi hasil pembangunan, memberikan informasi yang menggambarkan kinerja perekonomian di Sulawesi Tengah.

Menurunnya kontribusi pertanian terhadap PDRB Sulawesi Tengah tahun 2021 disebabkan karena sub sektor pertambangan dan penggalian serta sub sektor industri pengolahan mengalami peningkatan. Berdasarkan Angka Sementara (ASEM) Tahun 2021 rata-rata capaian produksi komoditas tanaman pangan dan hortikultura masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan pencapaian produksi sesuai Angka Tetap (ATAP) pada tahun 2020, hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 sehingga secara tidak langsung berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan petani.

Adapun upaya untuk meningkatkan kontribusi pertanian terhadap PDRB Sulawesi Tengah pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah antara lain sebagai berikut :

- a. Perluasan dan pengembangan sistem pertanian tanaman pangan dan peningkatan bantuan Pemerintah untuk petani berupa sarana produksi benih, pupuk, pestisida dan alat dan mesin pra dan pasca panen.
- b. Untuk menjamin status kepemilikan lahan bagi petani dalam mendukung peningkatan kesejahteraan perlu dilaksanakan sertifikasi lahan bagi petani.
- c. Penyediaan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura dapat menggerakkan para penangkar benih/bibit serta mengoptimalkan fungsi balai benih tanaman pangan dan hortikultura.
- d. Penyediaan fasilitas dalam menjembatani petani ke sumber permodalan tanpa memerlukan administrasi yang berbelit-belit.
- e. Peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya petani dalam penerapan teknologi pengolahan dan manajemennya melalui gabungan kelompok tani maupun kelompok tani itu sendiri.
- f. Mengubah paradigma berpikir petani terhadap budidaya usaha taninya, dimana dalam mengusahakan budidaya pertanian sebaiknya terfokus pada satu jenis komoditi tanaman.

Golongan tanaman perkebunan merupakan pemberi sumbangan terbesar terhadap PDRB Sulawesi Tengah kategori pertanian yaitu 40,18% dari seluruh nilai tambah pertanian, hal ini didukung oleh meningkatnya produksi beberapa komoditas unggulan perkebunan Sulawesi Tengah. Dari 8 komoditas unggulan perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah terdapat 5 komoditas yang telah mencapai target yang telah ditetapkan tahun 2021, yaitu Kelapa Dalam, cengkeh, Pala, Lada, dan Karet. Sedangkan untuk komoditi Kopi, Kakao dan kelapa sawit belum mencapai target yang telah ditetapkan secara optimal.

Peningkatan produksi ke 5 komoditas unggulan tersebut sangat dipengaruhi oleh dukungan kesuburan tanah, adanya intensitas dan distribusi curah hujan yang cukup tinggi dan merata yang terjadi pada tahun 2019 – 2021. Keadaan ini sangat mendukung untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman, dimana tanaman mendapat cukup banyak air yang diperlukan pada proses penyerapan hara dan proses fotosintesis sehingga proses pembentukan bunga dan buah lebih maksimal.

Tabel 32 : Jumlah produksi komoditas unggulan Prov. Sulteng Tahun 2021

No.	Komoditas	Jumlah produksi (ToN)
1.	Kelapa dalam	194.082
2.	Cengkeh	19.798
3.	Kopi	2.740
4.	Kakao	128.617
5.	Pala	777
6.	Lada	307
7.	Kelapa sawit	286.947
8.	Karet	4.975

Sumber: Disbunak Prov.Sulteng, 2022

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya produksi dan mutu tanaman hortikultura, tanaman pangan dan perkebunan ini didukung oleh program sebagai berikut :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
4. Program Penyuluhan Pertanian

Sasaran Strategis 18 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat nelayan dan perikanan budidaya

Sasaran strategis ini diukur ketercapaiannya melalui dua indikator yaitu nilai tukar nelayan dan nilai ekspor hasil perikanan. Capaian kinerja sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 33 : Capaian kinerja Sasaran Strategis 18

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD 2021	% Capaian Thd Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2		4	5	6	7	8
1.	Nilai tukar nelayan	%	108,76	103,27	94,95	108,76	94,95
2.	Nilai ekspor hasil perikanan	USD	3.784.000,00	1.132.001,29	29,92	3.784.000	29,92
<i>Rata-rata Capaian Sasaran Strategis</i>					62,43		62,43

Berdasarkan Tabel di atas sasaran strategis meningkatnya kesejahteraan masyarakat nelayan dan perikanan budidaya, dengan dua indikator kinerja rata-rata tercapai sebesar 62,43 % dengan kategori "**Rendah**". Untuk indikator nilai tukar nelayan tahun 2021 terealisasi sebesar 103,27% atau tingkat capaian sebesar 94,95% dari target sebesar 108,76%, NTN cenderung stabil diangka 100 setiap bulannya dan mencapai puncak tertingginya pada bulan Mei 2021. Untuk indikator jumlah ekspor hasil perikanan realisasi tahun 2021 sebesar USD. 1.132.001,29,- atau tingkat capaian sebesar 96,23% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.13.497.176,-, nilai ekspor tidak tercapai karena ada pembatasan kegiatan perikanan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.

Nilai tukar nelayan merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli nelayan. Juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produksi budidaya ikan dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. NTN sama dengan 100 berarti nelayan mengalami titik impas (tingkat pertumbuhan pendapatan usaha sama dengan pengeluaran rumah tangga) dan NTN di bawah 100 berarti nelayan mengalami defisit (tingkat pertumbuhan pendapatan usaha di bawah pertumbuhan pengeluaran rumah tangga). Secara sederhana angka NTN diperoleh dari hasil perbandingan indeks harga yang diterima petani/nelayan/pembudidaya (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani /nelayan/pembudidaya (Ib).

Tabel 34 : Capaian NTN Sulawesi Tengah Tahun 2021

Bulan	Indeks harga yang diterima Nelayan (It)	Indeks harga yang dibayarkan Nelayan (Ib)	NTN
Januari	109,19	108,37	100,75
Februari	107,44	108,24	99,26
Maret	109,85	108,58	101,17
April	112,71	108,86	103,53
Mei	115,87	108,87	106,43
Juni	113,68	108,94	104,35
Juli	114,00	109,20	104,39
Agustus	115,00	109,41	105,10
September	114,31	109,27	104,61
Oktober	111,53	109,20	102,14
November	112,60	109,35	102,97
Desember	115,23	110,20	104,56
Rata-rata	112,62	109,04	103,27

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Sulteng, 2022

NTN berfluktuasi sepanjang 2021, hal ini dipengaruhi oleh indeks harga yang diterima nelayan (It) dengan indeks harga yang dibayar nelayan (Ib). Banyak hal yang diduga turut andil pada fluktuatif NTN sepanjang 2021 diantaranya (1) keterbatasan ketersediaan BBM bersubsidi pada depot SPBU dan SPDN sehingga berpengaruh pada hari operasi; (2) Kondisi cuaca yang ekstrim yang menimpa Sulawesi Tengah berpengaruh pada usaha-usaha perikanan; (3) keterbatasan es balok dan sarana perbekalan.

Menghadapi hal-hal diatas, kemudian dilakukan berbagai upaya untuk mengatasinya diantaranya dengan peningkatan dan pengembangan Fasilitas di Pelabuhan Perikanan provinsi sebagai sentra nelayan, peningkatan sarana produksi perikanan tangkap bagi pelaku usaha dan pola fasilitasi penyediaan BBM, es balok dan sarana perbekalan antara lain air bersih.

Selama tahun 2021 jenis komoditi perikanan yang diekspor dari Sulawesi Tengah antara lain: Gurita beku, fillet ikan beku dan sotong beku, dengan negara tujuan Reunion, Vietnam, USA, Japan, Malta, Korea Selatan, Hongkong dan Singapore. Komoditas dan nilai ekspor hasil perikanan tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 35 : Nilai ekspor hasil perikanan

No	Komoditas	Volume	Nilai Ekspor (USD)
1	Gurita Beku	201.025,83 kg	1.016.152,35
2	Fillet Ikan beku	14.588,60 kg	81.162,92
3	Sotong Beku	2.410,00 kg	7.160,81
4	Kerapu Hidup	917 ekor	20.941,13
5	Kerang Darah	534 kg	298,60
6	Kepiting Bakau	3.397 ekor	6.285,48
	T O T A L		1.132.001,29

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Sulteng, 2022

Pada tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga mengembangkan beberapa inovasi dibidang kelautan perikanan yang bertujuan untuk peningkatan dan pengelolaan produksi perikanan. Inovasi-inovasi yang dikembangkan tersebut adalah :

a. Bandeng bebas duri (BABERI)

Sebagai ikan komoditas pangan, bandeng menempati urutan pertama dalam pemenuhan omega 3 sebesar 14,20% diatas Sarden, Salmon dan Tuna. Energi yang dihasilkan Bandeng adalah sebesar 129 kkal, protein sebesar 20 gr, lemak 4,8 gr, kalsium 20 mg, fosfor 150 mg, zat besi 2 mg serta mengandung vitamin A dan B1.

Bandeng bebas duri merupakan salah satu diversifikasi produk olahan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah. Produk ini cukup diminati yang dapat dilihat dari permintaan pasar yang besar terutama pada bandeng dengan ukuran 500-600 gram perekornya. Proses pengolahan bandeng bebas duri tidak hanya dilakukan oleh karyawan dinas kelautan dan perikanan provinsi Sulawesi tengah, namun juga ditularkan kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan pelatihan.

Gambar 9 : Bandeng Bebas Duri



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Sulteng, 2022

b. Pengembangan Rumput Laut Sistem Kultur Jaringan

Sistem kultur jaringan merupakan salah satu solusi dalam menyediakan bibit rumput laut berkualitas. Inovasi ini telah dimulai sejak tahun 2018 melalui MoU dengan BIOTROP, pelatihan aparatur serta ujicoba pengembangan RL bibit kultur jaringan.

Gambar 10 : Pengembangan rumput laut sistem kultur jaringan



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Sulteng, 2022

c. Kolam Percontohan Budidaya Udang Vaname Skala Rakyat (Kolam Terpal Bulat Diameter 10 Meter)

Budidaya udang vaname skala rakyat mulai dikembangkan pada Tahun 2021. Konstruksi yang digunakan adalah terpal dengan diameter 10 m dan tinggi 2 m. Padat tebar 300 ekor per m³ dan padat tebar per kolamnya 35.000 ekor. Produksi sekali panen 650 kilogram per kolam dengan masa budidaya 4 bulan. Investasi untuk pembuatan kolam ini 43 juta per kolamnya. Keunggulan menerapkan sistem budidaya ini adalah konstruksi lebih mudah didapat, tidak memerlukan lahan luas, biaya investasi dan operasional kecil dan pengontrolan mudah.

Gambar 11 : Budidaya Udang Vaname Kolam Bundar Skala Rakyat



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Sulteng, 2022

d. Budidaya Sistem Bioflok

Teknologi bioflok adalah teknik manajemen kualitas air yang didasarkan pada pertumbuhan dan pengendalian bakteri Heterotrof di dalam sistem budidaya dengan zero water exchange (sistem pemeliharaan tanpa adanya pergantian air). Penerapan sistem bioflok dalam budidaya ikan memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan budidaya ikan sistem konvensional diantaranya: (1) Mengurangi beban limbah yang berada pada media budidaya, (2)

Hemat air (Efisiensi penggunaan Air), (3) Padat tebar tinggi hingga 250 ekor/m³ pada Ikan Nila, (4) Produktivitas tinggi, (5) Meningkatkan efisiensi pakan/*Food Conversion Ratio* (FCR) hingga 0.7–0.9, (6) Pemanfaatan lahan lebih efisien (pemanfaatan lahan sempit), (7) Produksi dan hasil limbah yang lebih sedikit dan (8) Ramah lingkungan.

Gambar 12 : Kolam Sistem Bioflok



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Sulteng, 2022

Pada tahun 2021 terdapat pencapaian-pencapaian lain yang diperoleh DKP Sulteng di bidang Kelautan dan Perikanan:

1. Surat Laik Operasi Kapal Perikanan (SLO) adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pengawas perikanan dibawah kewenangan Direktorat Jenderal PSDKP KKP RI yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan perikanan. Target penerbitan SLO tahun 2021 adalah 1.477 buah dan terealisasi 3.558 buah atau sebesar 240,90%. Penerbitan SLO (Sertifikat Laik Operasi) pada tahun 2021 meningkat 22,60% dari tahun 2020 yang berjumlah 2.902 buah.
2. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) adalah sertifikat yang diberikan kepada UPI yang telah menerapkan Cara Pengolahan yang Baik (*Good Manufacturing Practices/GMP*) dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasional Sanitasi Standar (*Standard Sanitation Operating Procedure/SSOP*) yang masa berlakunya adalah 2 (dua) tahun. Target Sulawesi Tengah pada tahun 2021 adalah bertambahnya 6 SKP yang diterbitkan dan terealisasi 19 SKP atau sebesar 316,67% sehingga total seluruh SKP yang ada di Sulawesi Tengah berjumlah 67 SKP. Jumlah ini meningkat dari tahun 2020 dimana SKP berjumlah 54. Peningkatan ini terkait dengan kegiatan pembinaan mengenai SKP pada UPI (Unit Pengolahan Ikan) dan UKM (Usaha Kelompok Masyarakat).
3. Pendistribusian benih, udang dan ikan konsumsi sebagai berikut:
 - a. Benih ikan mas : 147.433 ekor
 - b. Benih ikan nila : 537.000 ekor

c. Ikan Nila Konsumsi (tawar): 852 Kg

d. Benih ikan lele : 1.714 ekor

e. Udang Konsumsi : 25.249 Kg

Tahun 2021, produksi budidaya ikan/udang konsumsi maupun benih cenderung meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena unit-unit perbenihan yang rusak pada saat bencana alam yang terjadi pada wilayah Palu, Sigi, Donggala pada tahun 2018 sudah beroperasi dengan baik dan normal.

4. Target PAD DKP Sulteng tahun 2021 adalah Rp12.458.228.000,- dan terealisasi sebesar Rp12.975.954.500,- (104,16%). Jumlah ini naik 46,09% bila dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai Rp8.882.146.900,- dimana sebagian besar berasal dari ijin usaha perikanan.

5. Meningkatkan kemampuan aparatur dan masyarakat pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan, dengan indikator kinerja :

a. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha perikanan. Kegiatan ini mencakup semua aktivitas dinas maupun UPTD baik berupa bimtek maupun pelatihan yang diikuti oleh pelaku usaha kelautan dan perikanan.

b. Lulusan STPL (Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan) Palu, target yang ditetapkan 30 orang dengan realisasi 28 orang sedangkan pada tahun 2020 lulusan sebanyak 25 orang.

Tabel 36 : Pencapaian-pencapaian lain DKP Sulteng tahun 2017-2021

Uraian	Capaian				
	2017	2018	2019	2020	2021
PAD Sektor Kelautan Perikanan	3.986.985.827	4.071.548.500	4.955.319.850	8.882.146.900	12.458.228.000
RTP Perikanan Tangkap (unit)	23.531	23.531	47.554	54.609	54.609
RTP Perikanan Budidaya (unit)	26.401	26.401	23.467	23.467	23.467
Jumlah SLO (Sertifikat Laik Operasi) yang dikeluarkan	1.528	1.324	1.994	2.902	3.558
<i>Jumlah Pengolah dan Pemasar</i>					
- Pengolah	971	971	971	377	659
- Pemasar	5.864	5.864	5.864	701	1.013
<i>Perbenihan Air Tawar</i>					
- Benih ikan mas (ekor)	129.790	151.920	63.200	88.300	147.433
- Benih ikan nila (ekor)	261.825	294.750	268.500	400.550	537.000
- Benih ikan lele (ekor)	23.420	2.500	1.000	3.700	1.714
- Ikan mas konsumsi (kg)	170	12	-	40	-
- Ikan nila konsumsi (kg)	2.829	867	197	1.091	852
- Ikan lele konsumsi (kg)	116	124	-	20	-
<i>Perbenihan Air Payau</i>					
- Udang konsumsi (kg)	37.663	22.883	36.888	8.550	25.249

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Sulteng, 2022

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya kesejahteraan masyarakat nelayan dan perikanan budidaya ini didukung oleh program sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
2. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Sasaran Strategis 19 : Tuntasnya angka melek aksara

Sasaran strategis tuntasnya angka melek aksara diukur ketercapaiannya dengan indikator persentase melek aksara. Capaian kinerja sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 37 : Capaian kinerja Sasaran Strategis 19

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD 2021	% Capaian Thd Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase melek aksara	%	97,26 - 97,50	98,28	100,80	97,26 - 97,50	100,80
<i>Rata-rata Capaian Sasaran Strategis</i>					100,80		100,80

Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase melek aksara di Sulawesi Tengah tahun 2021 mencapai 98,28% atau tingkat capaian sebesar 100,80% dengan kategori “**sangat baik**” dari target yang ditetapkan sebesar 97,26 - 97,50%. Capaian ini juga telah melebihi target yang ditetapkan pada akhir perencanaan jangka menengah daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Artinya semakin banyak penduduk Sulawesi Tengah usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis. Dalam perencanaan pembangunan wilayah, angka melek aksara digunakan untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah.

Target penuntasan melek aksara merupakan bagian dari fokus pembangunan di Sulawesi Tengah, mengingat peran sentral pendidikan baik sebagai bagian dari pemenuhan hak warga negara, maupun karena daya ungkit pendidikan terhadap tujuan pembangunan seperti pembangunan pemerataan ekonomi dan sosial.

Tabel 38 : Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang melek huruf

Kelompok Umur Age Group	Perkotaan Urban		Perdesaan Rural		Perkotaan+Perdesaan Urban+Rural	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15-19	99,81	99,72	99,78	99,92	99,79	99,86
20-24	99,92	100,00	99,75	99,65	99,81	99,78
25-29	100,00	99,81	99,61	99,68	99,73	99,72
30-34	99,88	100,00	98,44	99,08	98,87	99,38
35-39	99,95	100,00	98,16	98,58	98,68	98,99
40-44	99,98	100,00	98,18	97,20	98,71	98,08
45-49	99,50	100,00	100,00	100,00	99,85	100,00
50+	98,73	98,77	93,39	93,59	94,91	95,12
Jumlah/Total	99,60	99,64	97,65	97,66	98,24	98,28

Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2022

Strategi yang digunakan dalam rangka mengurangi melek aksara di Sulawesi Tengah adalah melalui program Keaksaraan Fungsional (KF) berdasarkan data by name by address. Dalam pemberantasan buta aksara harus jelas sasarannya, siapa orangnya dan dimana tempat tinggalnya. Program ini akan fokus dilaksanakan di wilayah-wilayah khusus atau wilayah yang sulit dijangkau, karena sebagian besar penduduk buta aksara pada umumnya tinggal di wilayah-wilayah terpencil dan sulit dijangkau seperti pada beberapa daerah di Kabupaten Sigi, Donggala, Parigi Moutong dan Tojo Una-una. Kendala yang menjadi tantangan dalam program ini selain wilayahnya yang terpencil, juga adalah faktor kemauan warga belajar, karena itu perlu pendekatan khusus yang menggunakan bahasa lokal (daerah) dari para tutor untuk bagaimana memotivasi warga sasaran untuk mau menjadi warga belajar.

Pencapaian sasaran strategis tuntasnya angka melek aksara ini didukung oleh program sebagai berikut :

1. Program pengelolaan Pendidikan
2. Program pengembangan kurikulum

Sasaran Strategis 20 : Meningkatkan akses dan mutu Pendidikan untuk meningkatkan Pendidikan dasar dan pengembangan Pendidikan menengah

Sasaran strategis ini diukur ketercapaiannya melalui dua indikator yaitu angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM). Capaian kinerja sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 39 : Capaian kinerja Sasaran Strategis 20

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD 2021	% Capaian Thd Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Angka Partisipasi Kasar (APK)						
	* SD/MI/Paket A	%	102,75 - 103,75	103,68	99,93	102,75 - 103,75	99,93
	* SMP/MTs/Paket B	%	93,00 - 93,75	93,17	99,38	93,00 - 93,75	99,38
	* SMA/MA/SMK/Paket C	%	85,00 - 85,75	85,00	99,13	85,00 - 85,75	99,13
2.	Angka Partisipasi Murni (APM)						
	* SD/MI/Paket A	%	94,50 - 96,25	93,33	96,97	94,50 - 96,25	96,97
	* SMP/MTs/Paket B	%	74,50 - 75,25	74,99	99,65	74,50 - 75,25	99,65
	* SMA/MA/SMK/Paket C	%	66,00 - 70,00	65,02	92,89	66,00 - 70,00	92,89
<i>Rata-rata Capaian Sasaran Strategis</i>					97,99		97,99

Berdasarkan Tabel di atas sasaran strategis meningkatnya akses dan mutu Pendidikan untuk meningkatkan Pendidikan dasar dan pengembangan Pendidikan menengah dengan dua indikator kinerja rata-rata tercapai sebesar 97,99 % dengan kategori “**sangat Baik**”, capaian ini juga sama dengan capaian akhir periode Perencanaan pembangunan jangka menengah Sulawesi Tengah Tahun 2021. Artinya semakin banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan menurut partisipasi sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Tengah.

Tabel 40 : APK dan APM menurut jenjang pendidikan, 2020-2021

Jenjang Pendidikan Educational Level	Angka Partisipasi Murni (APM) Net Enrollment Rate		Angka Partisipasi Kasar (APK) Gross Enrollment Ratio	
	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD/MI/Sederajat Primary School	93,24	93,33	103,95	103,68
SMP/MTs/ Sederajat Lower Secondary School	74,42	74,99	91,98	93,17
SMA/SMK/MA/Sederajat Upper Secondary School	65,02	65,44	88,42	88,06

Sumber : BPS Prov. Sulteng,2022

Pencapaian kinerja ini didukung oleh kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang memasukan kurikulum muatan lokal agar selaras dengan kebutuhan hidup sehari-hari sehingga dapat meningkatkan akses keterampilan hidup bagi peserta didik. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui pengembangan dan pencapaian pelaksanaan pendidikan ditingkat sekolah terutama dalam rangka mengatasi pengaruh krisis ekonomi di era globalisasi.

Dalam rangka perluasan akses pendidikan, upaya yang dilakukan adalah menambah ketersediaan sekolah yakni ketersediaan sarana pendidikan yang memadai. Selain keberadaan gedung sekolah yang memadai, ketersediaan guru terhadap murid akan berkorelasi terhadap peningkatan mutu dan pemenuhan hak warga atas pendidikan. Pada Tahun 2020, rasio guru terhadap murid (SD/MI) perkelas rata-rata 27 siswa/guru, rasio guru terhadap murid pada tingkat SMP/MTs perkelas rata-rata 27 siswa/guru dan rasio guru terhadap murid pada tingkat SMA/MA/SMK perkelas rata-rata juga mencapai 27 siswa/guru.

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya akses dan mutu Pendidikan untuk meningkatkan pendidikan dasar dan pengembangan pendidikan menengah ini didukung oleh program sebagai berikut :

1. Program pendidik dan tenaga pendidikan
2. Program pengendalian perizinan pendidikan

Sasaran Strategis 21 : Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan⁹⁺

Sasaran strategis meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dengan indikator angka usia harapan hidup. Capaian kinerja sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 41 : Capaian kinerja Sasaran Strategis 21

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD 2021	% Capaian Thd Target Akhir RPJMD
			Target	Real	% Capaian		
1	2		4	5	6	7	8
1.	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	68,25 - 68,50	68,83	100,48	68,83	100,48
<i>Rata-rata Capaian Sasaran Strategis</i>					100,48		100,48

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi angka usia harapan hidup Sulawesi Tengah tahun 2021 mencapai 68,83 Tahun atau tingkat capaian sebesar 100,48% dengan kategori “**sangat baik**” dari target yang ditetapkan sebesar 68,25 - 68,50%. Capaian ini juga telah melebihi target yang ditetapkan pada akhir perencanaan jangka menengah daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Interpretasi dari angka kelahiran hidup ini adalah seorang bayi yang di lahirkan di Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2021 mempunyai harapan untuk hidup selama 68,69 tahun kedepan. Meningkatnya umur harapan hidup adalah salah satu indikator utama tingkat Kesehatan masyarakat.

Indikator usia harapan hidup Ini merupakan keberhasilan program bidang Kesehatan, yang mana bukan semata-mata menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan dalam pencapaiannya melainkan menjadi tanggung jawab kita bersama antara unsur pemerintah, swasta, akademisi serta masyarakat secara keseluruhan. Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam pencapaian kinerja ini antara lain :

1. Melakukan pencegahan penyakit memular dan tidak menular melalui berbagai kegiatan dan penyuluhan.
2. Distribusi tenaga kesehatan yang berkompeten dalam penanganan kasus penyakit sudah terdistribusi di fasilitas kesehatan.
3. Pengetahuan di masyarakat mulai meningkat mengenai upaya-upaya preventif dan promotif dibidang kesehatan.
4. Penguatan kemitraan dengan kelompok masyarakat dalam hal pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan.

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan ini didukung oleh program sebagai berikut :

1. Program pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat
2. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan

Sasaran Strategis 22 : Suksesnya keluarga berencana dan terciptanya keluarga berkualitas

Sasaran strategis suksesnya keluarga berencana dan terciptanya keluarga berkualitas diukur ketercapaiannya melalui dua indikator yaitu cakupan peserta KB aktif dan persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera I. Capaian kinerja sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 42 : Capaian kinerja Sasaran Strategis 22

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD 2021	% Capaian Thd Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Cakupan Peserta KB Aktif	%	87,01	53,31	61,27	87,01	61,27
2.	Persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera I	%	35	45,37	70,37	35	70,37
<i>Rata-rata Capaian Sasaran Strategis</i>					65,82		65,82

Berdasarkan Tabel di atas sasaran strategis suksesnya keluarga berencana dan terciptanya keluarga berkualitas dengan dua indikator kinerja rata-rata tercapai sebesar 65,82% dengan kategori “rendah”, capaian ini juga sama dengan capaian akhir periode Perencanaan pembangunan jangka menengah Sulawesi Tengah Tahun 2021. Capaian ini masih rendah disebabkan karena masih adanya pasangan usia subur (PUS) yang belum melaksanakan program keluarga berencana (KB) sehingga cakupan peserta KB aktif hanya terealisasi sebesar 53,31% atau tingkat capaian sebesar 61,27% dari target yang ditetapkan 87,01%. Selanjutnya untuk indikator presentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera I tahun 2021 terealisasi sebesar 45,37% atau tingkat capaian sebesar 70,37% dari target yang ditetapkan sebesar 35%. Jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera Sulawesi Tengah tahun 2021 sebanyak 332.882 keluarga dari total jumlah keluarga 733.776.

Tabel 43 : Peserta KB Aktif Menurut Alat Kontrasepsi Tahun 2021

NO	KABUPATEN/KOTA	PUS	PESERTA AKTIF KB								
			IUD	MOW	MOP	KDM	IMP	SUNTIK	PIL	MAL	JUMLAH
1	Banggai	55.648	1.795	698	45	216	4.841	16.296	9.064	15	32.970
2	Poso	33.844	2.526	1.605	57	92	2.568	8.226	5.155	20	20.249
3	Donggala	48.023	743	778	83	88	2.969	10.979	6.008	11	21.659
4	Toli-Toli	34.570	745	385	31	44	3.002	8.196	5.832	2	18.237
5	Buol	23.715	730	599	52	51	1.902	6.004	4.636	2	13.976
6	Morowali	23.217	1.042	329	10	69	2.310	7.596	1.913	1	13.270
7	Banggai Kepulauan	19.416	435	169	4	16	1.359	5.578	3.551	1	11.113
8	Parigi Moutong	73.024	1.796	2.187	100	136	4.091	19.774	12.291	10	40.385
9	Tojo Una-Una	24.399	811	299	7	46	2.496	6.848	2.855	6	13.368
10	Sigi	39.687	1.637	830	42	80	2.232	9.025	5.555	19	19.420
11	Banggai Laut	11.797	215	81	6	19	1.229	3.038	1.921	1	6.510
12	Morowali Utara	19.607	688	359	12	22	2.649	5.288	2.096	2	11.116
13	Kota Palu	38.217	2.244	927	39	90	1.502	6.609	3.616	8	15.035
SULAWESI TENGAH		445.164	15.407	9.246	488	969	33.150	113.457	64.493	98	237.308

Sumber : BKKBN Prov. Sulteng, 2022

Adapun Kendala/permasalahan ketidakefektifan capaian indikator kinerja ini disebabkan adanya faktor lain seperti :

1. Kegiatan pembinaan dan koordinasi pelayanan KB dan kesehatan reproduksi belum maksimal
2. Pasangan usia subur yang menjadi akseptor KB baru selain dilayani pada klinik KB dan tenaga kesehatan, mereka juga adalah peserta KB mandiri yang secara mandiri membeli pil KB, kondom pada apotik sehingga tidak tercatat sebagai peserta KB baru.
3. Meningkatnya pasangan usia subur yang menggunakan KB alami seperti pantang berkala maupun unmednet, dimana mereka tidak terlayani oleh pelayanan KB karena berada di wilayah kepulauan dan perbatasan;
4. Adanya keterbatasan kuantitas dan kualitas sumberdaya tenaga pengendalian penduduk dan KB dilapangan, dimana saat ini rasio tenaga PLKB di Sulteng sebagai ujung tombak di lapangan di sekitar 1 : 6 yang seharusnya 1 : 2. Selain itu kompetensi dan kemampuan tenaga PPKBD dilapangan yang masih terbatas;
5. Belum optimalnya penyuluhan para pelayanan kontrasepsi yang dilakukan tenaga kesehatan dan PLBK sehingga pasangan usia subur belum mendapatkan informasi yang akurat tentang jenis dan alat kontrasepsi yang sesuai untuk mereka.

Keberhasilan program Keluarga Berencana akan sangat berkorelasi dengan Laju Pertumbuhan Penduduk. Penurunan laju pertumbuhan penduduk mengindikasikan keberhasilan program Keluarga Berencana yang didukung oleh perbaikan ekonomi secara umum. Upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk ini untuk mencegah terjadinya ledakan penduduk

yang akan mempengaruhi kualitas dan kesejahteraan penduduk itu sendiri. Program KB dirancang untuk menekan angka kelahiran, menciptakan norma keluarga kecil yang bahagia sehingga terbuka peluang bagi suatu keluarga untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Tabel 44 : Rekapitulasi Tahapan Keluarga Sejahtera Tahun 2021

NO	KABUPATEN/KOTA	PRA SEJAHTERA		KELUARGA SEJAHTERA						JUMLAH
				I		II		III		
		JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	
1	BANGGAI	14.697	15,21	24.014	24,86	31.646	32,75	26.258	27,18	96.615
2	POSO	7.667	13,35	13.843	24,11	20.829	36,27	15.082	26,27	57.421
3	DONGGALA	13.998	18,44	31.904	42,03	19.150	25,23	10.847	14,29	75.899
4	TOLITOLI	6.163	11,42	20.486	37,97	14.318	26,53	12.993	24,08	53.960
5	BUOL	5.722	15,78	9.965	27,48	12.712	35,05	7.870	21,70	36.269
6	MOROWALI	6.076	15,45	10.489	26,68	11.615	29,54	11.139	28,33	39.319
7	BANGGAI KEPULAUAN	6.326	18,40	12.011	34,93	10.596	30,81	5.453	15,86	34.386
8	PARIGI MOUTONG	15.322	13,22	39.153	33,79	32.615	28,14	28.794	24,85	115.884
9	TOJO UNAUNA	6.751	16,80	10.161	25,28	14.215	35,37	9.061	22,55	40.188
10	SIGI	11.996	18,37	19.195	29,40	22.592	34,60	11.508	17,63	65.291
11	BANGGAI LAUT	3.199	17,25	9.531	51,39	3.469	18,70	2.349	12,66	18.548
12	MOROWALI UTARA	4.268	12,44	7.681	22,39	11.495	33,51	10.855	31,65	34.299
13	KOTA PALU	7.276	11,08	14.988	22,81	27.947	42,54	15.486	23,57	65.697
SULAWESI TENGAH		109.461	14,92	223.421	30,45	233.199	37,78	167.695	22,85	733.776

Sumber : BKKBN Prov. Sulteng, 2022

Kesejahteraan keluarga banyak dipengaruhi oleh faktor internal, eksternal dan unsur manajemen keluarga. Faktor internal keluarga yang mempengaruhi kesejahteraan meliputi: pendapatan, pendidikan, pekerjaan, jumlah anggota keluarga, umur, kepemilikan aset dan tabungan; sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kesejahteraan adalah kemudahan akses finansial pada lembaga keuangan, akses bantuan pemerintah, kemudahan akses dalam kredit barang/peralatan dan lokasi tempat tinggal. Sementara itu, unsur manajemen sumber daya keluarga yang mempengaruhi kesejahteraan adalah perencanaan, pembagian tugas dan pengontrolan kegiatan.

Pencapaian sasaran strategis suksesnya keluarga berencana dan terciptanya keluarga berkualitas ini didukung oleh program sebagai berikut :

1. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam ber KB
2. Program pelayanan kontrasepsi
3. Program keluarga berencana

A. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Berikut disampaikan analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya untuk Tahun Anggaran 2021.

Tabel 45 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5	7
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik yang efektif dan efisien	- Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	96,75%	95%	1,75%
2	Meningkatnya pengawasan, akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	- Opini BPK	100%	94%	6,00%
		- Nilai akuntabilitas kinerja	99,08%	90%	9,08%
		- Indeks Reformasi Birokrasi	101,39%	90%	11,39%
3	Tersedianya berbagai infrastruktur yang merata dan memadai.	- Persentase kemandapan jaringan jalan dalam kondisi mantap	100%	97%	3,00%
		- Persentase rumah tangga pengguna listrik	100,05%	100%	0,05%
		- Persentase rumah tangga pengguna air bersih	122,93%	91%	31,93%
		- Persentase rumah layak huni	102,03%	83%	19,03%
		- Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	91,52%	96%	-4,48%
4	Menurunnya angka kemiskinan	- Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	81,3%	93%	-11,70%
5	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi	- Indeks gini	93,14%	99%	-5,86%
6	Terwujudnya koperasi yang tangguh, berdaya saing, professional dan mandiri	- Persentase koperasi aktif	84,10%	92%	-7,90%
7	Meningkatnya daya saing, efisiensi dan produktifitas perdagangan.	- Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	55,31%	96%	-40,69%
		- Ekspor bersih perdagangan	408,57%	99%	309,57%

8	Terwujudnya industri yang tangguh, professional dan mandiri	- Pertumbuhan industri	311,03%	90%	221,03%
9	Meningkatnya nilai dan realisasi investasi.	- Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN	211,12%	91%	120,12%
10	Meningkatnya kesejahteraan gender dalam pembangunan ekonomi	- Peningkatan indeks pembangunan Gender (IPG) - Peningkatan indeks pemberdayaan Gender (IDG)	100%	96.62%	3,38%
11	Meningkatnya jumlah wisatawan	- Jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara - Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	5,43%	98%	-92,57%
12	Terciptanya kesempatan kerjadan penempatan tenaga kerja.	- Tingkat pengangguran terbuka - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	80%	99%	-19,00%
13	Terbukanya keterisolasiandaerah-daerah terpencil	- Persentase kabupaten/kota tidak tertinggal	98,17%	99,19%	-1,02%
14	Optimalnya tata kelola hutan untuk pengendalian kerusakan DAS dan hutan lindung	- Persentase kerusakan kawasan hutan	111,11%	99,84%	11,27%
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Indeks kualitas lingkungan hidup	92,86%	99%	-6,14%
16	Meningkatnya kesejahteraan petani	- Nilai tukar petani	109,54%	98%	11,54%
17	Meningkatnya produksi dan mutu tanaman hortikultura, tanaman pangan dan perkebunan	- Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB - Jumlah PDRB sub sektor perkebunan	98,59%	96%	2,59%
18	Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat nelayan dan perikanan budidaya	- Nilai tukar nelayan - Nilai ekspor hasil perikanan (USD)	63,69%	96%	-32,31%
			96,23%	93%	3,23%
			94,95%	96%	-1,05%
			29,92%	90%	-60,08%

19	Tuntasnya angka melek aksara	- Persentase angka melek aksara	100,80%	64%	36,80%
20	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan untuk menuntaskan pendidikan dasar dan pengembangan pendidikan menengah	- Angka Partisipasi Kasar (APK) :			
		SD/MI/Paket A	99,93%	93%	6,93%
		SMP/MTs/Paket B	99,38%	93%	6,38%
		SMA/MA/SMK/Paket C	99,13%	93%	6,13%
		- Angka Partisipasi Murni (APM):			
		SD/MI/Paket A	96,97%	93%	3,97%
		SMP/MTs/Paket B	99,65%	93%	6,65%
	SMA/MA/SMK/Paket C	92,89%	93%	-0,11%	
21	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	- Angka usia harapan hidup	100,48%	87%	13,48%
22	Suksesnya Keluarga Berencana dan terciptanya keluarga berkualitas	- Cakupan peserta KB aktif	61,27%	98%	-36,73%
		- Persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera I	70,37%	99%	-28,63%
		Rata-Rata	97%	94%	11%

KET :

1. Capaian kinerja : realisasi indikator / target x 100%
2. Penyerapan anggaran : realisasi keuangan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung Indikator
3. Tingkat efisiensi : capaian kinerja – penyerapan anggaran

Berdasarkan tabel 45 di atas, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang tahun 2021 telah melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan capaian sangat baik yang terlihat dari rata-rata capaian kinerja sebesar 97%, rata-rata capaian serapan anggaran sebesar 94% dan rata-rata tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 11%. Terdapat tiga indikator yang menunjukkan efisiensi anggaran sangat tinggi, yaitu indikator ekspor bersih perdagangan sebesar 309,57%, indikator pertumbuhan industri sebesar 221,03% dan indikator nilai realisasi investasi sebesar 120,12%. Hal ini terjadi karena capaian kinerja ketiga indikator tersebut melebihi target yang telah ditetapkan dengan rata-rata serapan anggaran sebesar 93%. Dari sisi efektivitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi alokasi anggaran terdapat 16 indikator

yang dianggap tidak optimal dalam pencapaian indikator kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dimana dari pencapaian kinerja tidak memenuhi target yang telah ditetapkan sedangkan dari sisi alokasi anggaran yang disediakan rata-rata serapan anggaran mencapai 96%.

B. REALISASI ANGGARAN

Manajemen pembangunan berbasis kinerja dimaksudkan bahwa focus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan, akan tetapi orientasi untuk mendorong perubahan dimana program/kegiatan dan sumber dana/anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2016-2021 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu pelayanan publik dan pelaksanaan pemerintah daerah. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Dalam Sistem akuntabilitas kinerja menginformasikan seberapa besar dampak dan hasil dari program dan kegiatan yang dibiayai dengan anggaran APBD maupun APBN. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 memaparkan capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggung jawabkan.

Tabel 45 : Realisasi anggaran terhadap pencapaian indikator sasaran

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi kinerja	Program	Anggaran (rp)	Realisasi (Rp)	capaian realisasi anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien.	- Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	81,26% - 100%	96,75%	• Prog. Pelayanan Penanaman Modal	775.746.250	738.965.114	95,26%
2.	Meningkatnya pengawasan, akuntabilitas dan reformasi birokrasi.	- Opini BPK.	WTP	WTP	• Program Peningkatan dan Pengembangan Anggaran Daerah	4.339.226.000	4.288.789.254	98,8%
					• Program Peningkatan dan Pengembangan Perbendaharaan Daerah	2.423.610.000	2.419.744.600	99,8%
					• Program Peningkatan dan Pengembangan Akuntansi Daerah	2.792.028.642	2.603.658.095	93,2%
					• Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	2.737.680.300	2.691.956.200	98,3%
		- Nilai akuntabilitas Kinerja	BB	B	• Prog. Penataan Organisasi	2.042.602.861	1.843.247.370	90,24%
- Indeks Reformasi Birokrasi	62	62.86						

3.	Tersedianya berbagai infrastruktur yang memadai.	- Persentase kemandapan jaringan jalan.	62%	62,31%	<ul style="list-style-type: none"> • Prog. Penyelenggaraan jalan. 	180.102.000.000	175.321.000.000	97,35%
					<ul style="list-style-type: none"> • Prog. Pengembangan jasa konstruksi. 	1.765.000.000	1.627.000.000	92,18%
					<ul style="list-style-type: none"> • Prog. Penyelenggaraan Penataan Ruang. 	2.947.000.000	2.659.000.000	90,23%
		- Persentase rumah tangga pengguna listrik	98%	98,05 %	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Ketenagalistrikan 	525.641.958	523.726.733	99,64%
		- Persentase rumah tangga pengguna air bersih.	72%	88,51 %	<ul style="list-style-type: none"> • Prog. Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 	46.154.710.799	41.532.770.034	89,99 %
					<ul style="list-style-type: none"> • Prog. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 	11.477.583.804	10.768.158.767	93,82%
					<ul style="list-style-type: none"> • Prog. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 	1.375.860.550	1.307.532.490	95,03%
		- Persentase rumah layak huni.	74,55%	76,06%	<ul style="list-style-type: none"> • Prog. Pengembangan Perumahan 	7.367.272.846	6.786.078.556	92,11%
					<ul style="list-style-type: none"> • Prog. Kawasan Permukiman 	24.051.605.070	21.217.010.002	88,21%
					<ul style="list-style-type: none"> • Prog. Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum 	18.403.331.387	13.285.777.038	72,19%
		- Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB.	15,45%	14,14 %	<ul style="list-style-type: none"> • Prog. Pengelolaan Aspek Geologi 	2.006.681.006	1.953.868.400	97,37%
					<ul style="list-style-type: none"> • Prog. Pengelolaan Mineral dan Batubara 	825.264.300	766.169.979	92,84%

4.	Menurunnya angka kemiskinan.	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan.	85,40-85,60%	101,4 %	• Prog. Pemberdayaan Sosial.	418.714.575	415.685.978	99,28%
					• Prog. Perlindungan dan Jaminan Sosial	3.301.067.600	2.750.482.440	83,32%
					• Prog. Perlindungan Sosial	5.036.544.000	4.995.967.500	99,19%
5.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi.	- Indeks gini	0,31-0,35	0,326%	• Prog. Rehabilitasi Sosial	3.296.817.408	3.262.725.034	98,96%
6.	Terwujudnya koperasi daya saing, dan UKM yang tangguh, berdaya saing, profesional dan mandiri.	Persentase koperasi aktif	65,71%	55,26%	• Prog. Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	483.267.525	477.866.675	98,88%
					• Prog. Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	379.149.350	361.811.150	95,43%
					• Prog. Pendidikan Latihan Koperasi	323.508.050	278.374.850	86,05%
					• Prog. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	552.777.725	490.277.700	88,69%
					• Prog. Pemberdayaan UMKM	507.267.025	459.613.001	90,61%
7.	Meningkatnya daya saing, efisiensi dan produktifitas perdagangan	Kontribusi Sektor perdagangan terhadap PDRB	11,59 %	6,41 %	• Prog. Perdagangan Dalam Negeri	665.988.000	638.717.896	95,91%
					• Prog. perdagangan luar negeri.	188.699.000	186.335.200	98,75%
8.	Terwujudnya industri yang tangguh, profesional dan mandiri.	Pertumbuhan industri	7,80-8,00%	24,26%	• Prog. Nilai Tambah dan Daya Saing Industri.	1.093.591.000	1.093.591.000	100%
					• Prog.	4.024.276.550	3.607.463.717	89,64%

					Perencanaan dan Pembangunan Industri			
					<ul style="list-style-type: none"> • Prog. Pengendalian Izin Usaha Industri 	397.220.250	314.993.100	79,30%
					<ul style="list-style-type: none"> • Prog. Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 	613.583.250	523.312.857	85,29%
9.	Meningkatnya nilai dan realisasi investasi	Nilai realisasi Investasi : <ul style="list-style-type: none"> ➤ PMDN (Rp) ➤ PMA (Rp) 	1.600.000.000 16.950.510.000.00	3.012.341.100.000 39.684.282.680.00	<ul style="list-style-type: none"> • Prog. Pengembangan Iklim Penanaman Modal • Prog. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. 	467.177.125 668.203.075	443.093.050 588.033.625	94,84% 88,00%
10.	Meningkatnya kesejahteraan gender dalam pembangunan ekonomi.	Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	93 % 76,00-77,00 %	92,3% 75,68%	<ul style="list-style-type: none"> • Prog. Pengarusutamaan gender dalam pembangunan • Program peningkatan kualitas keluarga 	1.063.823.525 480.684.975	1.033.952.219 458.415.150	97,19% 95,37%
11.	Meningkatnya jumlah wisatawan.	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	20.000 Org 4.000.000 Org	1.085 Org 713.618 org	<ul style="list-style-type: none"> • Prog. Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata • Prog. Pemasaran pariwisata • Prog. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 	1.958.692.455 1.726.644.500 1.429.680.100	1.911.118.804 1.589.301.144 1.353.022.276	97,57% 92,05% 96,64%
12.	Terciptanya kesempatan kerja dan	Tingkat pengangguran terbuka	3,25-3,00%	3,75%	• Prog. Pelatihan Kerja dan Produktivitas	10.338.187.975	10.235.673.779	99,01%

	penempatan tenaga kerja serta hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat.	Tingkat partisipasi angkatan.	70,01%	68,73%	Tenaga Kerja • Prog. Pengawasan Ketenagakerjaan	913.679.625	906.280.600	99,19 %
13.	Terbukanya keterisolasian daerah-daerah terpencil.	Persentase kabupaten/kot a tidak tertinggal	69,23%	76,92%	• Prog. Pembangunan daerah tertinggal.	184.896.000	184.596.000	99,84 %
14.	Optimalnya tata kelola hutan untuk pengendalian kerusakan DAS dan hutan lindung.	- Persentase Kerusakan kawasan hutan	0,14%	0,15%	• Prog. Pengelolaan Hutan. • Prog. Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	20.124.625.678 3.889.963.746	19.962.587.912 3.778.928.020	99,19% 97,15%
15.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	Indeks kualitas lingkungan hidup.	71 poin	77,53 poin	• Prog. Perencanaan Lingkungan Hidup Prog. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	478.201.000 1.084.604.550	453.724.974 1.072.240.550	94,88% 98,86%
16.	Meningkatnya kesejahteraan petani.	- Nilai tukar petani	104,99%	103,51%	• Prog. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura)	20.779.087.900	20.002.440.884	96,26%
17.	Meningkatnya produksi dan mutu tanaman holtikultura, tanaman pangan dan perkebunan.	- Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB. - Jumlah PDRB sub sektor perkebunan	27,84% Rp. 13.497.176,-	17,73% Rp. 12.987.676,00	• Prog. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (Dinas Perkebunan dan Peternakan) • Prog. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana	27.998.777.962 26.047.200.311	26.965.339.775 23.789.949.990	96,31% 91,33%

					Pertanian (Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura)			
					• Prog. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (Dinas Perkebunan dan Peternakan)	13.349.674.225	12.780.548.846	95,74%
					• Program Perizinan Usaha Pertanian	796.604.950	783.786.435	98,39%
					• Program Penyuluhan Pertanian (Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura)	5.736.705.134	5.128.402.643	89,40%
					• Program Penyuluhan Pertanian (Dinas Perkebunan dan Peternakan)	310.105.025	286.075.450	92,25%
					• Prog. Pengendalian dan Penanggulanga n Bencana Pertanian Provinsi (Dinas Perkebunan dan Peternakan)	2.718.640.625	2.625.355.673	96,57%
					• Prog. Pengendalian dan Penanggulanga n Bencana Pertanian Provinsi (Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura)	764.764.800	756.488.600	98,92%

18.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat nelayan dan perikanan budidaya.	- Nilai tukar nelayan	108,76%	103,27	• Prog. Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.	4.413.569.660	4.258.403.399	96,48%
		- Nilai ekspor hasil Perikanan (USD)	3.784.000	1.132.001,29	• Prog. Pengelolaan perikanan tangkap.	16.415.870.434	13.882.195.318	84,57%
					• Prog. Pengelolaan perikanan budidaya.	6.801.827.683	6.363.062.235	93,55%
					• Prog. Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.	7.752.489.155	7.328.024.404	94,52%
					• Prog. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.	6.221.266.893	6.041.310.766	97,11%
19.	Tuntasnya angka melek aksara.	Persentase angka melek aksara	97,26-97,50	98,28	• Prog. Pengelolaan Pendidikan	400.497.213.146	255.265.325.275	63,74%
				• Prog. Pengembangan Kurikulum	2.169.773.525	2.011.560.300	92,71%	
20.	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan untuk menuntaskan pendidikan dasar dan pengembangan pendidikan menengah	- APK			• Prog. Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.060.824.925	980.831.161	92,46%
		➤ SD/MI/ Paket A	102,75-103,75%	103,68%				
		➤ SMP/MTs/Pkt B	93,00-93,75%	93,17%	• Prog. Pengendalian Perizinan Pendidikan	45.394.000	44.794.000	98,68%
		➤ SMA/MA/SMK/ Paket C	85,00-85,75%	85,00%				
		- APM						
		➤ SD/MI/ Paket A	94,50-96,25%	93,33%				
		➤ SMP/MTs/Pkt B	74,50-75,25%	74,99%				
➤ SMA/MA/SMK/ Paket C	66,00-70,00%	65,02%						

21.	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan.	Angka usia harapan hidup.	68,25 – 68,50 Tahun	68,83 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Prog. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 	98.538.164.329	94.741.959.952	96,15%
					<ul style="list-style-type: none"> • Prog. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 	366.480.000	361.162.300	98,55%
					<ul style="list-style-type: none"> • Prog. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 	38.939.721.964	24.962.298.725	64,10%
22.	Suksesnya Keluarga Berencana dan terciptanya keluarga berkualitas.	- Cakupan peserta KB aktif.	87,01%	53,31%	<ul style="list-style-type: none"> • Prog. Pembinaan Keluarga Berencana 	279.362.425	274.982.450	98%
		- Persentase keluarga Pra sejahtera dan Sejahtera I.	35%	64,30%	<ul style="list-style-type: none"> • Prog. Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera 	1.163.551.475	1.160.306.475	99,72 %
				<ul style="list-style-type: none"> • Prog. Pengendalian Penduduk. 	226.431.200	224.156.200	99%	

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1 Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Tugas Pembantuan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan dari Pemerintah Pusat tersebut, Kepala Daerah bertugas untuk melakukan sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, penyiapan perangkat daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan tugas pembantuan, serta koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.

3.2 Gambaran Umum Pelaksanaa Tugas Pembantuan (TP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, Pemerintah Provinsi juga menyampaikan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan

serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Peran dan Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah.

3.3 Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga memberikan Dana Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom Provinsi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tugas Pembantuan Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 dialokasikan oleh 5 (lima) Kementerian yang tersebar pada 5 (lima) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Provinsi yaitu :

- 1) Kementerian Pertanian terdiri dari 2 (dua) OPD yaitu Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Dinas Perkebunan dan Peternakan;
- 2) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah;
- 3) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dikelola oleh Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah;
- 4) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah.

3.1.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan Oleh Daerah Provinsi

1. Target Kinerja

Pada Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan alokasi Tugas Pembantuan sebesar **Rp. 153,632,980,000,-**

dengan realisasi penyerapan sebesar **Rp. 151.256.511.107.-** atau sebesar **98.45** persen dengan realisasi fisik mencapai **100** persen dengan sisa dana yang tidak terserap sebesar **Rp. 2.376.468.893.-** atau sebesar **1,55** persen sebagaimana di sajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1

**Rekapitulasi APBN Tugas Pembantuan Lingkup Provinsi
Tahun Anggaran 2021**

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi Keuangan		Fisik (%)	Sisa Dana
			(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Tugas Pembantuan Lingkup Provinsi	153,632,980,000	151,256,511,107	98.45	100.00	2.376.468.893
	JUMLAH TOTAL	153,632,980,000	151,256,511,107	98.45	100.00	2.376.468.893

Sumber Data : Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

Alokasi anggaran tersebut diatas terdiri dari 2 Fungsi 3 Sub Fungsi dan 11 Program serta 33 Kegiatan, adapun Perangkat Daerah yang melaksanakan program dan kegiatan Tugas Pembantuan pada Tahun Anggaran 2021 sebanyak 5 (lima) Perangkat daerah dengan rincian sebagai berikut :

a. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Alokasi anggaran sebesar Rp. 103.838.963.000,- penyerapan keuangan sebesar Rp. 102.158.287.198,- atau 98,38 persen dengan realisasi fisik mencapai 100 persen dengan dana blokir sebesar Rp. 42.946.000.- yang terdiri dari 3 program dan 15 kegiatan sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2

**Rekapitulasi Program/Kegiatan Sumber Dana APBN
Tugas Pembantuan (TP) pada Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun Anggaran 2021**

Fungsi/Sub Fungsi/Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi		Fisik (%)	Lokasi
		(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6
Fungsi : Ekonomi	103.838.963.000	102.158.287.198	98,38	100.00	
Sub Fungsi : Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan	103.838.963.000	102.158.287.198	98,38	100.00	
Program : Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	6.334.980.000	6.314.374.526	99,67	100.00	Prov. Sulawesi Tengah
Kegiatan : Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	5.791.146.000	5.779.302.526	99,80	100.00	
Kegiatan : Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	543.834.000	535.072.000	98,39	100.00	
Program : Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	4.471.718.000	92.816.812.072	98,25	100.00	Prov. Sulawesi Tengah
Kegiatan : Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi	18.505.346.000	18.418.308.900	99,53	100.00	
Kegiatan : Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia	6.097.260.000	5.897.947.062	96,73	100.00	
Kegiatan : Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	44.677.107.000	43.344.788.000	97,02	100.00	
Kegiatan : Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	17.330.000.000	17.330.000.000	100,00	100.00	
Kegiatan : Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	1.452.650.000	1.452.167.112	99,97	100.00	
Kegiatan : Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	215.000.000	214.650.000	99,84	100.00	
Kegiatan : Fasilitas Pupuk dan Pestisida	3.525.075.000	3.503.530.100	99,39	100.00	
Kegiatan : Fasilitas Pembiayaan Pertanian	224.280.000	224.280.000	100,00	100.00	
Kegiatan : Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	1.185.000.000	1.174.049.220	99,08	100.00	
Kegiatan : Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	1.260.000.000	1.257.091.678	99,77	100.00	
Program : Dukungan Manajemen	3.032.265.000	3.027.100.600	99,83	100.00	Prov. Sulawesi
Kegiatan : Dukungan Manajemen					

Kegiatan	dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	1.459.145.000	1.454.580.600	99,69	100,00	Tengah
Kegiatan	: Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	1.453.120.000	1.453.120.000	100,00	100,00	
Kegiatan	: Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	120.000.000	119.400.000	99,50	100,00	
Total		103.838.963.000	102.158.287.198	98,38	100,00	

Sumber Data : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (di olah kembali)

a. Dinas Perkebunan dan Peternakan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Alokasi anggaran pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 22.537.627.000,- dengan penyerapan keuangan sebesar Rp. 21.972.170.760,- atau 97,49 persen dengan realisasi fisik mencapai 100 persen yang terdiri dari 3 program dan 13 kegiatan sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3

Rekapitulasi Program/Kegiatan Sumber Dana APBN Tugas Pembantuan (TP) pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021

Fungsi/Sub Fungsi/Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi		Fisik (%)	Lokasi
		(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6
Fungsi : Ekonomi	22.537.627.000	21.972.170.760	97.49	100.00	Prov. Sulawesi Tengah
Sub Fungsi : Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan	22.537.627.000	21.972.170.760	97.49	100.00	
Program : Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	12.646.726.000	12.540.194.360	99.16	100.00	
Kegiatan : Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar	6.515.173.000	6.513.775.400	99.98	100.00	

Kegiatan	: Penguatan Perlindungan Perkebunan	531.519.000	531.331.000	99.96	100.00	
Kegiatan	: Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	1.644.850.000	1.567.706.100	91.06	100.00	
Kegiatan	: Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	974.359.000	959.096.860	98.43	100.00	
Kegiatan	: Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	2.980.825.000	2.968.285.000	99.58	100.00	
Program	: Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	9.603.949.000	9.149.287.900	95.27	100.00	Prov. Sulawesi Tengah
Kegiatan	: Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	4.370.000.000	4.369.717.000	99.99	100.00	
Kegiatan	: Fasilitas Pembiayaan Pertanian	370.900.000	370.484.100	99.89	100.00	
Kegiatan	: Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	881.159.000	880.010.100	99.87	100.00	
Kegiatan	: Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	366.570.000	366.505.000	99.98	100.00	Sigi, Donggala Poso dan Banggai
Kegiatan	: Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	3.272.720.000	2.827.161.400	86.39	100.00	13 Kab/ Kota
Kegiatan	: Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	342.600.000	335.410.300	97.90	100.00	Kota Palu
Program	: Dukungan Manajemen	286.952.000	282.688.500	98.51	100.00	Disbunak Provinsi
Kegiatan	: Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	259.952.000	255.688.500	98.36	100.00	
Kegiatan	: Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	27.000.000	27.000.000	100.00	100.00	Kota Palu
Total		22.537.627.000	21.972.170.760	97,49	100.00	

Sumber Data : Dinas Perkebunan dan Peternakan (di olah kembali)

b. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Alokasi anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 161.220.000,- dengan penyerapan keuangan sebesar Rp. 161.050.000,- atau 99,89,- persen

dan realisasi fisik mencapai 100 persen yang terdiri dari 1 program dan 1 kegiatan sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Rekapitulasi Program/Kegiatan Sumber Dana APBN
Tugas Pembantuan (TP) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021

Fungsi/Sub Fungsi/Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi		Fisik (%)	Lokasi
		(Rp)	(%)		
1	2	3	4		5
Fungsi : Ekonomi	161.220.000.-	161.050.000.-	99.89	100.00	Prov. Sulawesi Tengah
Sub Fungsi : Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan	161.220.000.-	161.050.000.-	99.89	100.00	
Program : Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	161.220.000.-	161.050.000.-	99.89	100.00	
Kegiatan : Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	161.220.000.-	161.050.000.-	99.89	100.00	
Total	161.220.000.-	161.050.000.-	99.89	100.00	

Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan (di olah kembali)

a. Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Alokasi anggaran pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 24.178.640.000,- penyerapan keuangan sebesar Rp. 24.048.777.149,- atau 99,46,- persen dengan realisasi fisik sebesar 100 persen yang terdiri dari 2 program dan 2 kegiatan sebagaimana disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 3.5

**Rekapitulasi Program/Kegiatan Sumber Dana APBN
Tugas Pembantuan (TP) pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021**

Fungsi/Sub Fungsi/Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi		Fisik (%)	Lokasi
		(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6
Fungsi : Ekonomi	24.178.640.000.-	24.048.777.149.-	99.46	100.00	
Sub Fungsi : Pengairan	24.178.640.000.-	24.048.777.149.-	99.60	100.00	
Program : Ketanahan sumber Daya Air	23.621.606.000.-	24.048.777.149.-	99.60	100.00	
Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana	23.621.606.000.-	24.048.777.149.-	99.60	100.00	Sulawesi Tengah
Program : Dukungan Manajemen	557.034.000.-	521.931.649.-	93.70	100.00	Sulawesi Tengah
Kegiatan : Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air	557.034.000.-	521.931.649.-	93.70	100.00	
TOTAL ANGGARAN	24.178.640.000.-	24.048.777.149.-	99.46	100.00	

Sumber Data : Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air (di olah kembali)

c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Alokasi anggaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 2.916.530.000,- sedangkan penyerapan keuangan sebesar Rp. 2.916.226.000,- atau 99,98 persen dengan realisasi fisik sebesar 100 persen yang terdiri dari 2 program dan 2 kegiatan sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6

**Rekapitulasi Program/Kegiatan Sumber Dana APBN
Tugas Pembantuan (TP) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021**

Fungsi/Sub Fungsi/Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi		Fisik (%)	Lokasi
		(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6
Fungsi : Perumahan dan Fasilitas Umum	2.916.530.000.-	2.916.226.000.-	99.98	100.00	Prov. Sulawesi Tengah
Sub Fungsi : Perumahan dan Fasilitas Umum Lainnya	2.916.530.000.-	2.916.226.000.-	99.60	100.00	
Program : Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan an Transmigrasi	2.717.006.000.-	2.716.972.000.-	99.99	100.00	
Kegiatan : Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	2.717.006.000.-	2.716.972.000.-	99.99	100.00	
Program : Dukungan Manajemen	199.524.000.-	199.254.000.-	99.86	100.00	
Kegiatan : Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	199.524.000.-	199.254.000.-	99.86	100.00	Prov. Sulawesi Tengah
TOTAL ANGGARAN	2.916.530.000.-	2.916.226.000.-	99.98	100.00	

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (di olah kembali)

3.2 Permasalahan dan Kendala

Berdasarkan uraian diatas bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2021 yang terdapat pada 5 (lima) perangkat daerah yang menerima alokasi dana Tugas Pembantuan secara keseluruhan telah mencapai target yang telah direncanakan, baik penyerapan keuangan maupun realisasi fisik atau pencapaian output kegiatannya. Namun

ada beberapa kegiatan yang tidak tercapai target fisiknya karena mengalami kendala dan hambatan di lapangan diantaranya :

a. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

Kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah adalah tidak terlaksananya kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan yaitu pengadaan kapal sebanyak 8 (delapan) unit namun akibat adanya *Refocusing* Anggaran pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Output pelaksanaan pengadaan kapal dimaksud tidak dapat dilaksanakan sehingga output yang dihasilkan adalah berupa dokumen perencanaan pembangunan kapal.

b. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah

Kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah terdapat pada Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan berupa Pengadaan kontainer Depo sebanyak 16 Unit tidak dapat terlaksana karena kendala transportasi barang dari luar negeri sehingga tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena terkendala dengan lamanya pengiriman barang dari luar negeri.

Selain dari 2 (dua) dinas diatas perangkat daerah yang lainnya tidak mengalami kendala dan hambatan yang cukup berarti. Sebagian besar penyebab dari penyerapan yang tidak mencapai target yang ada pada perangkat daerah adalah kondisi pandemi Covid 19 yang belum terkendali dan adanya kebijakan pengalihan alokasi anggaran (*refocusing*) untuk penanganan Covid-19, sehingga sangat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan

khususnya kegiatan fisik yang berlokasi di Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, sehingga menyebabkan kegiatan – kegiatan fisik tertunda bahkan tidak terlaksana, bahkan beberapa perangkat daerah tidak dapat melaksanakan kegiatannya akibat *refocusing* tersebut.

3.3 Saran dan Tindakan lanjut

Terkait upaya penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah khususnya penerima dana yang bersumber dari APBN - Tugas Pembantuan (TP) lingkup Provinsi Sulawesi Tengah dapat kami sampaikan sebagai berikut :

a. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

Terkait dengan upaya yang di lakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah adalah melakukan koordinasi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk dapat menganggarkan kembali Kapal bantuan tersebut di Tahun Anggaran berikutnya dan melakukan koordinasi ke kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengalokasikan bantuan kapal yang rencananya akan disalurkan kepada masyarakat nelayan.

b. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah

Terkait dengan upaya yang di lakukan oleh Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah adalah agar melakukan koordinasi dan konsultasi ke Biro Pengadaan terkait teknik perencanaan untuk pengadaan kontainer dan pengadaan barang lainnya di tahun-tahun berikutnya khususnya pengadaan barang yang berasal dari luar negeri.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

4.1.3 Realisasi

4.1.4 Anggaran

4.1.5 Dukungan Personil

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

4.2 Urusan Kesehatan

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.6 Urusan Sosial

4.7 Program dan Kegiatan

4.1 URUSAN PENDIDIKAN

Penerapan dan Pencapaian SPM

Dalam rangka memberikan pelayanan dasar yang wajib diterima masyarakat, maka sesuai dengan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menerapkan 6 (enam) bidang urusan SPM, salah satunya Bidang Urusan Pendidikan, yang diuraikan sebagai berikut :

A. Jenis Pelayanan Dasar

Perangkat Daerah Pengampu SPM Bidang Urusan Pendidikan :

- Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah

Dasar Hukum Bidang Urusan Pendidikan saat ini diatur dalam :

- 1) **Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;**
- 2) **Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM;**
- 3) **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 .**

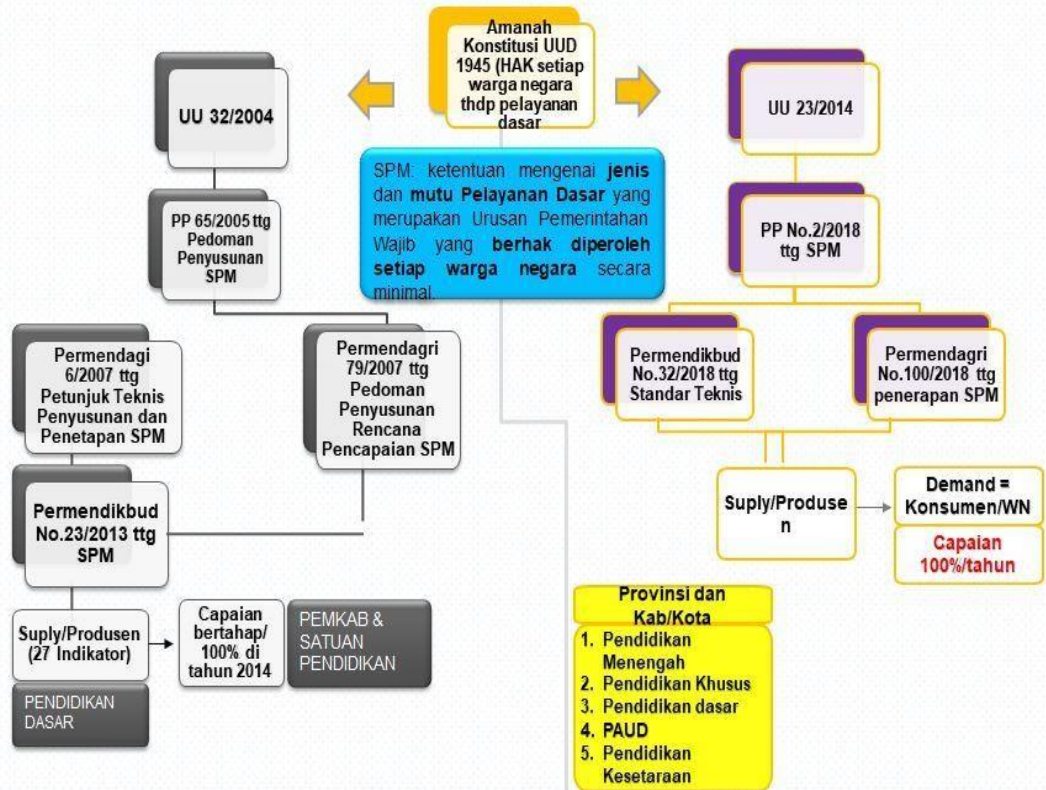
Berikut penjelasan terhadap Pelaksanaan SPM megacu terhadap ketiga aturan tersebut :

Dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018**
tentang Standar Pelayanan Minimal Perubahan Konsep
 Standar Pelayanan Minimal (SPM) :

UU 32 Tahun 2014	UU 23 Tahun 2014
Standar Pelayanan Minimal adalah standar suatu pelayanan yang memenuhi persyaratan minimal kelayakan	Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal
15 Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar	6 Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar
Ditetapkan dengan Peraturan Menteri oleh masing-masing Menteri/Pimpinan LPND dengan konsultasi yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri	Ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah
Dominasi pengaturan terkait Produsen Pelayanan	Pengaturan terkait pemenuhan kebutuhan dasar konsumen pelayanan

Secara bagan Perubahan Konsep Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat digambarkan sebagai berikut :

PERUBAHAN TATANAN KEBIJAKAN SPM



Dalam Pasal 4 Ayat 2 PP No.2 Tahun 2018 dijelaskan bahwa mater SPM yaitu : (1) Jenis Pelayanan Dasar, (2) Penerima Pelayanan Dasar, (3) Mutu Pelayanan Dasar. Untuk Bidang Urusan Pendidikan Materi SPM adalah :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	
KEWENANGAN PROVINSI				
1	Pendidikan menengah	Warga negara usia 16 s.d. 18 tahun	a.	Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
			b.	Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
			c.	Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar
2	Pendidikan khusus	Warga negara usia 4 s.d. 18 tahun yang berkebutuhan khusus	a.	Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
			b.	Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
			c.	Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar
KEWENANGAN KABUPATEN				
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Warga negara usia 5 s.d. 6 tahun	a.	Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
			b.	Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
			c.	Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar
			a.	Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;

2	Pendidikan Dasar	Warga negara usia 7 s.d. 15 tahun	b.	Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
			c.	Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar
3	Pendidikan Kesetaraan	Warga negara usia 7 s.d. 18 tahun	a.	Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
			b.	Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
			c.	Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap jenis Pelayanan Dasar

SPM Pendidikan mencakup:

1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa

a. Standar satuan pendidikan

(1) Standar kompetensi lulusan

(2) Standar isi

(3) Standar proses

(4) Standar sarana dan prasarana

(5) Standar pengelolaan

(6) Standar pembiayaan

(7) Standar penilaian

b. Standar biaya pribadi Peserta Didik
Perlengkapan dasar Peserta Didik

No	Penerima Pelayanan Dasar	Perlengkapan Dasar	Jumlah	Kualitas
1	PAUD	Buku gambar	6 buah per peserta didik per semester	Dalam kondisi baru
		Alat mewarnai	1 set paling sedikit 12 warna per peserta didik per semester	
2	SD dan SMP	Buku teks pelajaran	1 paket per peserta didik per tahun	Sesuai dengan kurikulum
		Perlengkapan belajar (alat dan buku tulis)	1 set per peserta didik per semester	Dalam kondisi baru
3	Pendidikan Kesetaraan	Modul belajar	1 paket per peserta didik per tahun	Sesuai dengan kurikulum
		Perlengkapan belajar (alat dan buku tulis)	1 set per peserta didik per semester	Dalam kondisi baru
4	SMA dan SMK	Buku teks pelajaran	1 paket per peserta didik per tahun	Sesuai dengan kurikulum
		Perlengkapan belajar (alat dan buku tulis)	1 set per peserta didik per semester	Dalam kondisi baru

(2) Pembiayaan pendidikan

- Pembiayaan pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemda dibebankan kepada Pemda untuk:
 - pendidikan dasar; dan
 - pendidikan Menengah bagi daerah yang telah melaksanakan wajib belajar 12 tahun
- Dalam hal daerah yang belum melaksanakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, maka pembiayaan pendidikan menengah bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemda **dibebankan kepada Peserta Didik atau orangtua/wali**
- **Besaran nilai** pembiayaan pendidikan yang dibebankan kepada Peserta Didik atau orangtua/wali **untuk pendidikan menengah** bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemda **ditetapkan oleh Gubernur** sesuai dengan standar biaya yang berlaku di daerah setempat
- Kepala Satuan Pendidikan yang

diselenggarakan oleh masyarakat menetapkan besaran pembiayaan pendidikan setelah mendapatkan pertimbangan dari komite sekolah

2) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

PAUD

No	Jenis pendidik dan tenaga kependidikan	Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.
1.	Guru PAUD	1. paling rendah memiliki ijazah D-IV / S1 bidang PAUD, kependidikan lain atau psikologi; dan 2. memiliki sertifikat profesi guru PAUD.
2.	Kepala Satuan PAUD	1. paling rendah memiliki ijazah D-IV/ S1; 2. memiliki sertifikat pendidik; dan 3. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD nonformal dari lembaga pemerintah yang berwenang.

SD/SMP/SMA/SMK/PENDIDIKAN KHUSUS

No	Jenis pendidik dan tenaga kependidikan	Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
1.	<u>Guru Kelas</u> (KHUSUS SD)	1. paling rendah memiliki ijazah D-IV /S1; dan 2. memiliki sertifikat pendidik.
2.	Guru Mata Pelajaran	1. paling rendah memiliki ijazah D-IV /S1; dan 2. memiliki sertifikat pendidik.
3.	<u>Kepala Sekolah</u>	1. paling rendah memiliki ijazah D-IV/S1; 2. memiliki sertifikat pendidik; dan 3. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon
4.	<u>Tenaga laboratorium</u> (KHUSUS SMA)	1. paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat
5.	<u>Tenaga laboratorium/bengkel/workshop</u> (KHUSUS SMK)	1. paling rendah memiliki ijazah SMA/SMK/ sederajat Keterangan : <u>kualitas tenaga kependidikan yang memiliki ijazah kebutuhan laboratorium/ bengkel/ workshop</u>
6.	Tenaga penunjang lainnya.	1. paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat.

PENDIDIKAN KESETARAAN

No	Jenis pendidik dan tenaga kependidikan	Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.
1.	Tutor pendidikan kesetaraan	1. paling rendah memiliki ijazah D-IV/S1
2.	<u>Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan</u>	1. paling rendah memiliki ijazah D-IV/S1
3.	Tenaga penunjang lainnya.	1. paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat

Dalam hal guru kelas dan guru mata pelajaran belum memiliki sertifikat pendidik, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat pendidik yang belum memiliki sertifikat pendidik kepada Mendagri dengan tembusan kepada Mendikbud

Dalam hal kepala satuan pendidikan **belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah**, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan pendukung yang menyatakan masih terdapat kepala satuan pendidikan yang belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah kepada Mendagri dengan tembusan kepada Mendikbud

Surat keterangan **dilampirkan sebagai bagian dari laporan penerapan dan pencapaian SPM kepada Mendagri dengan tembusan kepada Mendikbud**

3) Tata cara pemenuhan standar

a. Provinsi

Pemenuhan Standar Perlengkapan Dasar **diperuntukkan bagi Peserta Didik yang belum terlayani perlengkapan dasar Peserta Didik:**

- **Buku teks pelajaran pada SMA dan SMK**
- **Materi ajar pada Pendidikan Khusus**
- **Buku Tulis dan Alat Tulis pada SMA dan SMK dan pendidikan khusus**

Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada SMA, SMK, dan pendidikan khusus diberikan pada setiap awal tahun

Biaya satuan **Buku Teks Pelajaran/Materi Ajar Dan Biaya Satuan Buku Tulis Dan Alat Tulis** sesuai dengan standar biaya masing- masing daerah

b. Kabupaten/ Kota

Pemenuhan Standar Perlengkapan Dasar
**diperuntukkan bagi Peserta Didik yang belum
terlayani perlengkapan dasar Peserta Didik:**

- **Buku Gambar dan Alat Mewarnai Pada PAUD**
- **Buku teks pelajaran pada SD dan SMP**
- **Modul Belajar pada Pendidikan Kesetaraan**
- **Buku Tulis dan Alat Tulis pada SD
dan SMP dan Pendidikan Kesetaraan**

Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik
pada PAUD, SD, SMP, dan Pendidikan Kesetaraan
diberikan pada setiap awal tahun Biaya

satuan **Buku Gambar, Alat
Mewarnai, Buku Teks
Pelajaran/Materi Ajar Dan Biaya Satuan
Buku Tulis Dan Alat Tulis** sesuai dengan
standar biaya masing-masing daerah

Penerapan SPM tersebut dilakukan dengan tahapan :

1) Pengumpulan data;

Dalam pasal 5 menjelaskan Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Bidang Pendidikan sesuai kewenangannya, melakukan **PENGUMPULAN DAN PENDATAAN** secara berkala atas :

1) Data jumlah dan identitas Warga Negara yang berhak menerima kebutuhan dasar sesuai dengan Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan;

a. Data jumlah total anak usia pendidikan

di semua jenjang pendidikan :

(1) 5 - 6 tahun pendidikan pra sekolah / PAUD

(2) 7 - 15 tahun pendidikan dasar

(3) 16 - 18 tahun pendidikan menengah

(4) 7 - 18 tahun pendidikan kesetaraan

(5) 4 - 18 tahun pendidikan khusus

b. Data jumlah anak yang sekolah dan tidak sekolah berdasarkan usia pendidikan

c. Data jumlah anak usia pendidikan di semua jenjang pendidikan dari keluarga miskin

d. Data jumlah anak yang sekolah dan tidak

sekolah berdasarkan usia pendidikan dari

warga miskin / kurang mampu

e. Data anak putus sekolah pada tiap tiap jenjang pendidikan

f. Data Penerima yg berhak & dipenuhi oleh Pemda
ditetapkan oleh KDH

2) *Data jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia
untuk pemenuhan kebutuhan dasar Bidang
Pendidikan ;*

a. Data ketersediaan sarana / prasarana pendidikan
di tiap tiap jenjang pendidikan (Kemendikbud,
Kemenag, dan Swasta)

- b. Data pendidik dan tenaga kependidikan
(Kemendikbud, Kemenag, dan Swasta)
 - c. Data Perlengkapan Dasar Peserta Didik
 - d. Dan data lainnya sesuai dengan standar teknis
- 3) *Data jumlah barang dan/atau jasa yang masih dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar Bidang Pendidikan;*
- 4) *Data jumlah sarana, prasarana, dan sumber daya lainnya yang tersedia di daerah untuk pemenuhan kebutuhan dasar Bidang Pendidikan; dan/atau*
- 5) *Data jumlah sarana, prasarana, dan sumber daya lainnya yang masih dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar Bidang Pendidikan:*

2) Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;

Perangkat Daerah menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis SPM.(Pasal 6)

Perangkat Daerah menghitung Warga Negara penerima pelayanan dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa yang telah tersedia (Pasal 7)

Berikut adalah rumus perhitungan Kebutuhan Pemenuhan **Perlengkapan Dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu :**

a. SMA dan SMK

- **Jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu x 1 (satu) paket buku teks pelajaran x biaya satuan buku teks pelajaran**
- **Jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu x 2 (dua) set buku tulis dan alat tulis x biaya satuan buku tulis dan alat tulis**

b. Pendidikan Khusus

- **Jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu x 1 (satu) paket materi ajar sesuai dengan ragam disabilitas x biaya satuan materi ajar**

- **Jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu x 2 (dua) set buku tulis dan alat tulis x biaya satuan buku tulis dan alat tulis**

c. PAUD

- **Jumlah Peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu x 12 (dua belas) buah buku gambar x biaya satuan buku gambar.**
- **Jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu x 2 (dua) set alat mewarnai x biaya satuan alat mewarnai**

d. SD dan SMP

- **Jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu x 1 (satu) paket buku teks pelajaran x biaya satuan buku teks pelajaran.**
- **Jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu x 2 (dua) set buku tulis dan alat tulis x biaya satuan buku tulis dan alat tulis**

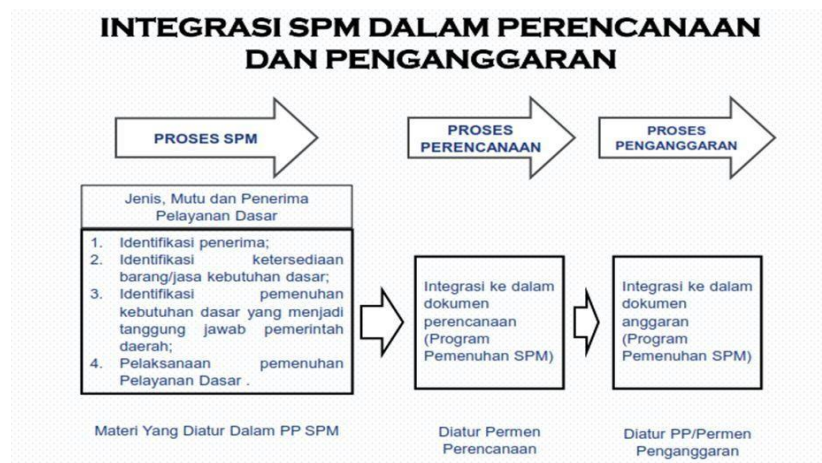
e. Pendidikan Kesetaraan

- **Jumlah Peserta Didik yang berasal dari**

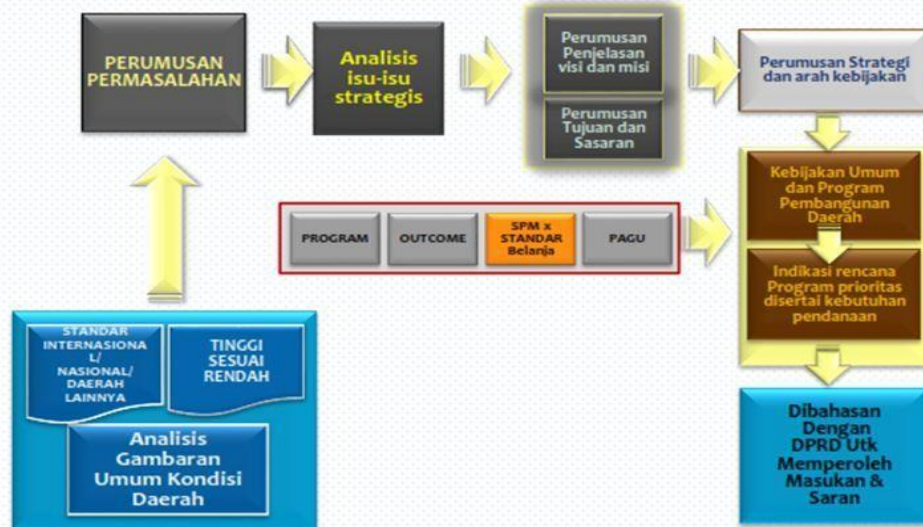
**keluarga miskin atau tidak mampu x 1
(satu) paket modul belajar x biaya satuan
modul belajar.**

- **Jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu x 2
(dua) set buku tulis dan alat tulis x biaya satuan buku tulis dan alat tulis**

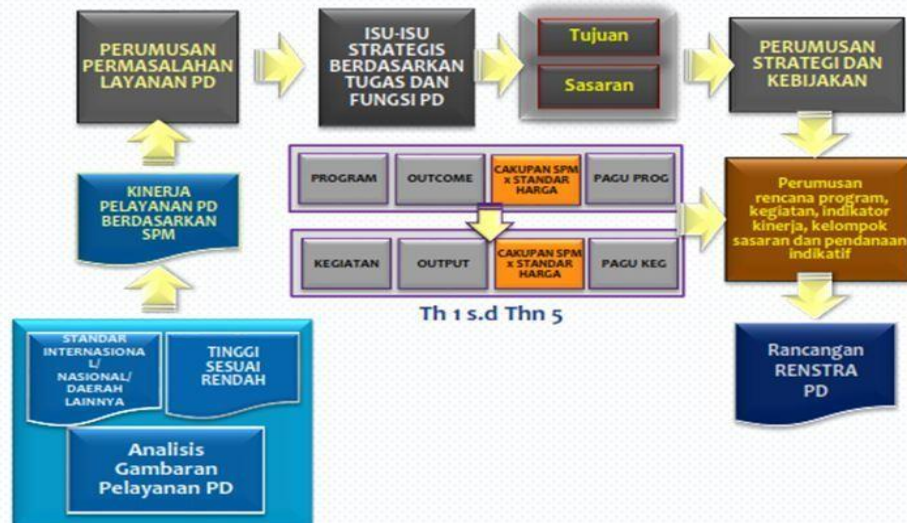
3) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan



PENCAPAIAN SPM DALAM RPJMD



PENERAPAN SPM DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA PD



4) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar

Dalam Pasal 15 ayat 1 Permendagri 100 Tahun 2018 menerangkan dalam pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, Pemerintah Daerah dapat :

- a. **Membebaskan biaya** untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi **masyarakat miskin atau tidak mampu** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. **Memberikan bantuan** pemenuhan barang dan/jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh Warga Negara secara minimal, dengan

memprioritaskan bagi **masyarakat miskin atau tidak mampu** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai **penerapan SPM** di atur dengan **Peraturan Menteri** yang menyelenggarakan urusan **pemerintahan dalam negeri** yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait

A. Indikator, Nilai SPM, Batas Waktu Pencapaian

SPM

*Secara Nasional Serta
Realisasi*

Indikator SPM Bidang Pendidikan di Daerah Provinsi

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	TARGET CAPAIAN PER TAHUN	TARGET PENCAPAIAN
1	Pendidikan Menengah	Jumlah Anak Usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	100%	Setiap Tahun
2	Pendidikan Khusus	Jumlah Anak Usia 4 - 18 tahun yang termasuk dalam anak berkebutuhan khusus yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	100%	Setiap Tahun

Indikator SPM Bidang Pendidikan di Daerah Kabupaten / Kota

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	TARGET CAPAIAN PER TAHUN	TARGET PENCAPAIAN
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Anak Usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) / Pendidikan Pra Sekolah	100%	Setiap Tahun
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia 7 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, dan SMP/MTs, atau yang Sederajat)	100%	Setiap Tahun
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Anak Usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan formalnya yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A, Paket B, dan Paket C)	100%	Setiap Tahun

B. Data Dasar SPM Dinas Pendidikan Dan

K

ebudayaan

Provinsi

Sulawesi

Tengah

I. GAMBARAN DATA KONDISI GEOGRAFIS DAN KLIMATOLOGI PROVINSI SULAWESI TENGAH

1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Sulawesi Tengah merupakan provinsi yang memiliki luas wilayah terbesar di Pulau Sulawesi, dan terletak di bagian tengah Pulau Sulawesi. Luas wilayah daratan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tengah, yakni mencapai 65.526,72 Km² atau 6.552.672 Ha. Secara rinci luas wilayah daratan Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Pola Ruang Provinsi Sulawesi Tengah

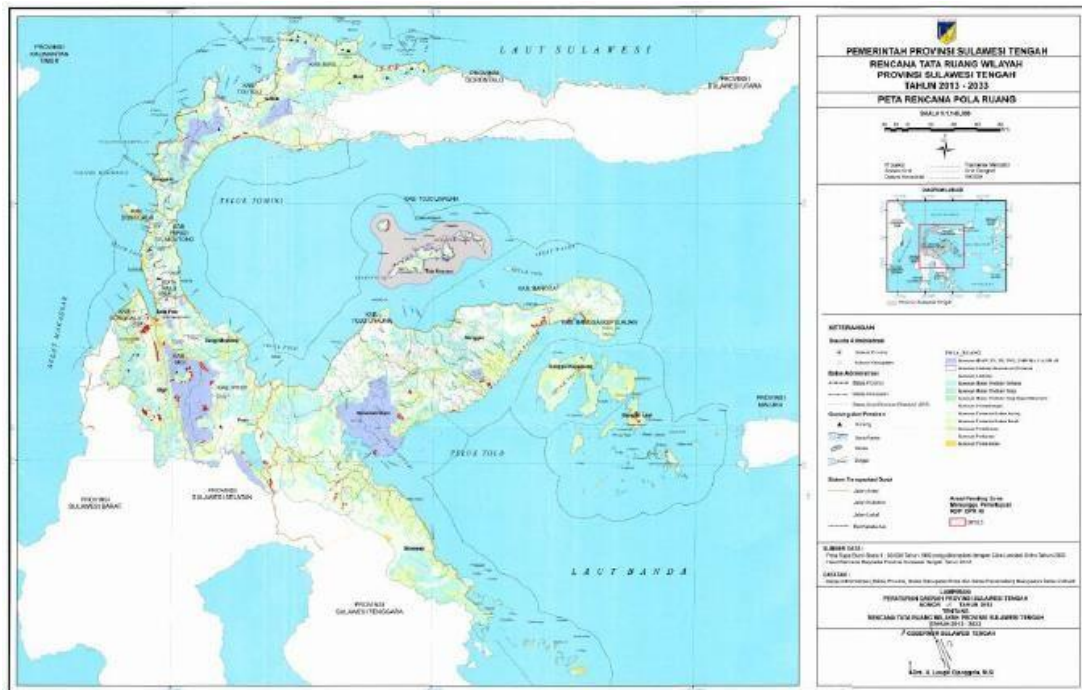
NO.	FUNGSI KAWASAN	LUAS		KETERANGAN
		(Ha)	%	
I	Kawasan Lindung	2.329.745	35,55	
	Kawasan Konservasi Suaka Alamdan Pelestarian Alam	656.270*	10	* Termasuk DPCLS seluas 5.510 Ha. Dalam Proses Persetujuan D PRRI
	Kawasan Konservasi Suaka Alamdan Pelestarian Alam Air	340.120	5,19	
	Hutan Lindung	1.333.355*	21	*Termasuk DPCLS seluas 9.802Ha. DalamProses Persetujuan DPR RI
II	Kawasan BudidayaHutan	2.078.858	31,73	
	Hutan Produksi Tetap(HPT)	1.442.649	22,02	
	Hutan Produksi (HP)	412.746	6,3	
	Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK)	223.463	3,41	
III.	Areal Penggunaan Lain (APL)	2.083.765	32	
	APL	2.083.765	32	
IV.	Perairan(Danau dan Sungai)	60.304	0,92	
	Jumlah III& IV	2.144.069	32,72	
	Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah (I+II+III+IV)	6.552.672	100	

Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2013-2033.

Sedang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan bahwa luas Wilayah Daratan Provinsi Sulawesi Tengah adalah 61.841,29 Km².

Selanjutnya pola ruang Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 4.1
Peta Pola Ruang Provinsi Sulawesi Tengah



Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Tengah,

Tahun 2013-2033.

Luas perairan laut Provinsi Sulawesi Tengah mencapai 193.923,75 Km² dengan jumlah pulau sebanyak 1.140 pulau, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar dan Provinsi Sulawesi Barat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan, hingga Tahun 2015 Provinsi Sulawesi Tengah telah memiliki 12 Kabupaten dan 1 Kota, yang meliputi 174 Kecamatan, 168 Kelurahan dan 1.839 Desa. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2. Administrasi Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2015.

NO.	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	KELURAHAN
1	Banggai Kepulauan	12	3	141
2	Banggai	23	46	291
3	Morowali	9	7	126
4	Poso	19	23	143
5	Donggala	16	9	158
6	Tolitoli	10	5	99
7	Buol	11	7	108
8	Parigi Moutong	23	5	278
9	Tojo Una-Una	12	12	134
10	Sigi	15	-	176
11	Banggai Laut	7	3	63
12	Morowali Utara	9	3	122
13	Palu	8	45	-
	Sulawesi Tengah	174	168	1.839

Sumber: Permendagri Nomor 39 Tahun 2015.

b. Letak dan Kondisi Geografis

Posisi astronomi Sulawesi Tengah terletak antara 2°22' Lintang Utara dan 3°48' Lintang Selatan serta 119°22' dan 124°22' Bujur Timur. Posisi geostrategis Sulawesi Tengah berada di tengah Wilayah Nusantara dan di tengah Pulau Sulawesi, berada di lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan ALKI III.

c. Topografi

Berdasarkan Kemiringan lahan, dataran Sulawesi Tengah dirinci sebagai berikut:

- Kemiringan 0 - 3 derajat sekitar 11,8persen;
- Kemiringan 3 - 15 derajat sekitar 8,9persen;
- Kemiringan 15 - 40 derajat sekitar 19,9persen;
- Kemiringan di atas 40 derajat sekitar 59,9persen.

Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), dataran wilayah Sulawesi Tengah terbagi atas:

- Ketinggian 0 m - 100 m sekitar 20,2 persen;
- Ketinggian 101 m - 500 m sekitar 27,2 persen;
- Ketinggian 501 m - 1.000 m sekitar 26,7 persen; dan
- Ketinggian 1.001 m ke atas sekitar 25,9 persen

d. Geologi

Struktur dan karakteristik geologi wilayah Sulawesi Tengah didominasi oleh bentangan pegunungan dan dataran tinggi, yakni mulai dari wilayah Kabupaten Buol dan Tolitoli, terdapat deretan pegunungan yang berangkai ke jajaran pegunungan di Provinsi Sulawesi Utara. Di tengah wilayah Sulawesi Tengah yaitu Kabupaten Donggala dan Parigi Moutong terdapat tanah genting yang diapit oleh Selat Makassar dan Teluk Tomini, selain itu sebagian besar merupakan daerah pegunungan dan perbukitan. Di selatan dan timur yang mencakup wilayah Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Unauna, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai, berjejer deretan pegunungan yang sangat rapat seperti Pegunungan Tokolekayu, Verbeek, Tineba, Pampangeo, Fennema, Balingara, dan Batui.

Sebagian besar dari daerah pegunungan itu mempunyai lereng yang terjal dengan kemiringan di atas 45 derajat.

e. Hidrologi

Di sepanjang wilayah Sulawesi Tengah terdapat Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengalir di wilayah kabupaten/kota. Selain daerah aliran sungai juga terdapat beberapa danau yang hampir seluruhnya berada di kawasan lindung.

Tabel 4.3.
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan
Pengolahan SDA Wilayah Sungai Lintas
Provinsi Di Sulawesi Tengah
(WS Palu-Lariang)

No	Provinsi / Kabupaten	Kecamatan	Luas Kecamatan dalam WS (Km ²)	Persentase Kecamatan dalam WS (%)
A.	Provinsi Sulawesi Tengah			
1	Kabupaten Donggala	Balaesang	169,18	1,16
		Balaesang Tanjung	189,49	1,30



No	Provinsi / Kabupaten	Kecamatan	Luas Kecamatan dalam WS	Persentase Kecamatan dalam WS
			(Km ²)	(%)
		Banawa	100,32	0,69
		Banawa Selatan	313,93	2,15
		Banawa Tengah	79,95	0,55
		Labuan	169,18	1,16
		Pinembani	447,77	3,07
		Rio Pakawa	881,47	6,05
		Sindue	138,67	0,95
		Sindue Tobata	260,59	1,79
		Sirenja	183,20	1,26
		Tanantovea	245,02	1,68
		Sindue Tombusabora	201,97	1,39
		Total Luas	3.380,73	23,21
		2	Kota Palu	Mantikulore
Palu Barat	22,99			0,16
Palu Utara	37,01			0,25
Tawaeli	53,02			0,36
Ulujadi	53,22			0,37
Palu Selatan	29,06			0,20
Palu Timur	10,76			0,07
Tatanga	14,18			0,10
Total Luas	421,68			2,89
3	Kabupaten Sigi	Dolo	40,84	0,28
		Dolo Barat	128,29	0,88
		Dolo Selatan	397,31	2,73
		Kinovaro	34,19	0,23
		Kulawi	1.139,97	7,82
		Kulawi Selatan	406,90	2,79
		Lindu	576,90	3,96
		Marawola	40,90	0,28
		Marawola Barat	157,31	1,08
		Nokilalaki	80,37	0,55
		Palolo	592,18	4,06
		Pipikoro	991,72	6,81
		Sigi Biromaru	324,29	2,23
		Sumbasa	162,43	1,11
		Tanam Bulava	57,73	0,40
Total Luas	5.131,34	35,22		

4	Kabupaten Poso	Lore Barat	322,08	2,21
		Lore Peore	577,26	3,96
		Lore Selatan	483,08	3,32
		Lore Tengah	696,04	4,78
		Lore Timur	149,75	1,03
		Lore Utara	333,30	2,29
		Total Luas	2.561,50	17,58

Sumber: RTRWProvinsiSulawesi Tengah,
Tahun 2013-2033.

Secara rinci pembagian DAS di WS Palu Lariang
disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Pembagian DAS di WS Palu Lariang

Kode DAS	Nama DAS	Luas (Km ²)	Persentase DAS Dalam WS (%)	Kode DAS	Nama DAS	Luas(K m ²)	Persentase DAS Dalam WS (%)
001	Lariang	7.264,97	49,87	027	Watutela	30,18	0,21
002	Minti	326,28	2,24	028	Watutailo	15,28	0,10
003	Sulung	970,3	6,66	029	Biuluniongga	30,05	0,21
004	Pangian	140,39	0,96	030	Taipa	88,29	0,61
005	Sawi	52,97	0,36	031	Tabeo	16,07	0,11
006	Randomayang	94,52	0,65	032	Taweli	104,27	0,72
007	Kasuloang	138,76	0,95	033	Lambagu	92,54	0,64
008	Bambaira	6,49	0,04	034	Labuan	158,67	1,09
009	Tampaore	16,45	0,11	035	Toaya	77,41	0,53
010	Kumboki	26,6	0,18	036	Masaengi	93,66	0,64
011	Surumana	304,08	2,09	037	Tibo	143,97	0,99
012	Bambalalombi	35,39	0,24	038	Batusuya	93,49	0,64
013	Mamara	119,86	0,82	039	Aliandu	110,49	0,76
014	Tolongano	12,86	0,09	040	Loro	29,48	0,20
015	Kangando	17,68	0,12	041	Sinapa	4,79	0,03
016	Towale	37,93	0,26	042	Sikara	6,23	0,04
017	Tomaku	10,74	0,07	043	Omba	20,77	0,14
018	Donggala	56,3	0,39	044	Tondo	26,18	0,18
019	Uwemole	6,03	0,04	045	Lente	105,83	0,73
020	Lottu	3,8	0,03	046	Tompo	95,86	0,66
021	Nggoji	19,19	0,13	047	Lende	30,01	0,21
022	Watusampu	20,64	0,14	048	Airmakuni	96,52	0,66
023	Buluri	37,17	0,26	049	Kusu	46,96	0,32
024	Owenumpu	22,86	0,16	050	Kamonji	46,32	0,32
025	Palu	3.063,96	21,03	051	Tompe	50,08	0,34
026	Lepata	77,5	0,53	052	Maruri	71,65	0,49

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 4/PRT/M/2015

Sedangkan wilayah sungai strategis nasional yang terdapat di Sulawesi Tengah sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5.
Wilayah Sungai Strategis Nasional Di Provinsi Sulawesi Tengah (WS Parigi - Poso)

No	Provinsi / Kabupaten	Kecamatan	Luas Total Kecamatan (Km ²)	Luas Kecamatan dalam WS (Km ²)	Persentase Kecamatan dalam WS (%)
A.	Provinsi Sulawesi Tengah				
1.	Kabupaten Morowali Utara	Mori Atas	768,89	13,02	1,70
		Mori Utara	699,82	140,94	20,10
		Soyo Jaya	1.221,09	39,51	3,20
Sub Total Kabupaten Morowali Utara				193,47	2,25

No	Provinsi / Kabupaten	Kecamatan	Luas Total Kecamatan (Km ²)	Luas Kecamatan dalam WS (Km ²)	Persentase Kecamatan dalam WS (%)
2.	Kabupaten Parigi Moutong	Ampibabo	279,61	279,61	100,00
		Balinggi	119,64	119,64	100,00
		Kasimbar	271,56	194,76	71,70
		Parigi	104,65	104,65	100,00
		Parigi Barat	78,72	78,72	100,00
		Parigi Selatan	439,97	356,92	81,10
		Parigi Tengah	64,41	64,41	100,00
		Parigi Utara	29,65	29,65	100,00
		Sausu	291,61	291,61	100,00
		Sinju	111,94	111,94	100,00
		Toribulu	97,57	97,51	99,90
		Torue	575,29	399,35	69,40
		Sub Total Kabupaten Parigi Moutong			
3.	Kabupaten Poso	Danau Poso	366,95	366,95	100,00
		Lage	411,13	411,13	100,00
		Lore Piore	506,89	42,70	8,40
		Lore Selatan	510,77	80,80	15,80
		Lore Tengah	594,25	29,26	4,90
		Lore Utara	484,69	31,96	6,60
		Pamona Barat	227,55	227,55	100,00
		Pamona Pusalemba	486,81	486,81	100,00
		Pamona Selatan	381,89	312,06	81,70
		Pamona Tenggara	312,08	184,64	59,20
		Pamona Timur	713,97	166,78	23,40
		Pamona Utara	685,47	598,76	87,30
		Poso Kota	35,95	35,95	100,00
		Poso Kota Selatan	41,42	41,42	100,00

		Poso Kota Utara	37,68	37,68	100,00
		Poso Pesisir	334,64	252,97	75,60
		Poso Pesisir Selatan	430,92	418,00	97,0
		Poso Pesisir Utara	555,24	470,02	84,70
		Sub Total Kabupaten Poso		4.195,44	48,72
4.	Kabupaten Tojo Una-Una	Tojo	422,81	422,81	100,00
		Tojo Timur	1.318,41	1.255,53	95,20
		Ulu Bongka	1.538,42	17,82	1,20
		Sub Total Kabupaten Tojo Una-Una		1.696,16	19,70
Total Luas WS Parigi Poso			8.610,57		

Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033.

Secara rinci pembagian DAS di WS Parigi Poso disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Pembagian DAS di WS Parigi Poso

No.	Nama DAS	Luas DAS (Km ²)	Persentase DAS Dalam WS (%)	No.	Nama DAS	Luas DAS (Km ²)	Persentase DAS Dalam WS (%)
1	Tompis	118,04	1,37	26	Tiwa'a	31,13	0,36
2	Kasimbar	104,87	1,22	27	Masani	38,61	0,45
3	Toribulu	154,46	1,79	28	Lape	26,95	0,31
4	Tapoya	223,74	2,60	29	Puna	778,30	9,04
5	Silangga	68,40	0,79	30	Mapane	59,42	0,69
6	Marantale	41,50	0,48	31	Poso	2.674,85	31,07
7	Salumbia	31,80	0,37	32	Tongko	297,21	3,45
8	Toboli	29,55	0,34	33	Malei	203,31	2,36
9	Pelawa	50,43	0,59	34	Bambalo	45,24	0,53
10	Baliara	87,93	1,02	35	Toliba	200,26	2,33
11	Olaya	53,09	0,62	36	Tambiano	51,86	0,60
12	Korontua	35,32	0,41	37	Mawomba	64,66	0,75
13	Dolago	175,11	2,03	38	Kabalo	134,46	1,56
14	Tindaki	146,50	1,70	39	Tayawa	81,62	0,95
15	Sampaloe	60,05	0,70	40	Ue Kuli	44,66	0,52
16	Torue	62,60	0,73	41	Betaue	218,53	2,54
17	Tolai	61,26	0,71	42	Ue Dele	17,02	0,20
18	Topeau	54,00	0,63	43	Sandada	43,20	0,50
19	Suli	150,82	1,75	44	Tojo	216,48	2,51
20	Sausu	568,64	6,60	45	Masalongi	245,65	2,85
21	Tambarana	246,52	2,86	46	Pancuma	80,71	0,94
22	Kalora	8,47	0,10	47	Tongku	122,17	1,42

23	Samalera	17,65	0,20	48	Ue Podi	142,77	1,66
24	Kilo	129,64	1,51	49	Padapu	27,83	0,32
25	Kameasi	45,48	0,53	50	Kayunyole	37,76	0,44

Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033.

Selanjutnya Wilayah Danau Kawasan Lindung di Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7.
Wilayah
Danau
Kawasan
Lindung Di
Provinsi
Sulawesi
Tengah

No.	Nama Danau	Kabupaten/Kota	Luas (Km ²)
1	Tatawu	Donggala	0,625
2	Padang	Donggala	0,02875

No.	Nama Danau	Kabupaten/Kota	Luas (Km ²)
3	Kalimpaa	Donggala	0,055
4	Wanga	Donggala	0,245
5	Dampelas	Donggala	4,9375
6	Rano	Donggala	2,50
7	Lindu	Sigi	33,925
8	Bolano Toga	Parigi Moutong	0,2575
9	Batu Dako	Parigi Moutong	0,1775
10	Bolanosau	Parigi Moutong	0,9375
11	Dedei	Parigi Moutong	0,2125
12	Laut Kecil	Parigi Moutong	2,4375
13	Bolano Molosifat	Parigi Moutong	0,1250
14	Poso	Poso	369,385
15	Tanah Morambo	Poso	0,0625
16	Limbo Kasimpo	Poso	0,825
17	Telaga Toju	Poso	0,295
18	Tiu	Morowali	1,3125
19	Bae	Morowali	4,125
20	Kodi	Morowali	2,5625
21	Laindungan	Banggai	0,14
22	Petinding	Banggai	0,0325
23	Bakalan	Banggai	0,0625
24	Kobit	Banggai	0,03
25	Lamotong	Banggai	0,02
26	Tendetung	Banggai	1,4375
27	Alan	Banggai	0,09
28	Makapa B	Banggai	0,23

Sumber: RTRW Provinsi Sulteng, Tahun 2013-2033

f. Klimatologi

Kota Palu memiliki dua musim, yaitu musim

panas dan musim hujan. Berbeda dengan tahun sebelumnya, sepanjang tahun 2015 terjadi musim hujan di Kota Palu. Curah hujan tertinggi terjadi pada Juni sekitar 112,5 mm, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Desember sekitar 0,0 mm.

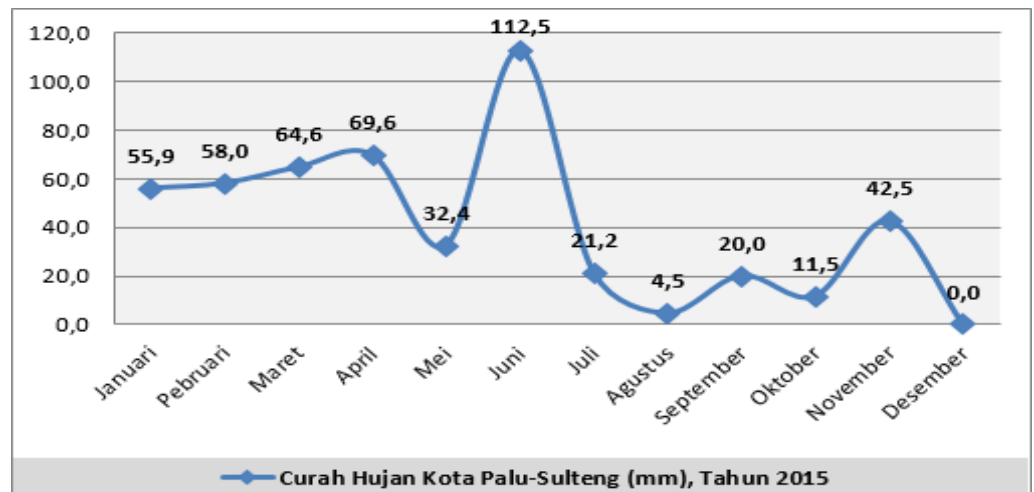
Gambar 4.2. Kondisi Curah Hujan di Kota Palu Menurut Bulan, Tahun 2015



Sumber: BPS, Sulteng Dalam Angka 2016.

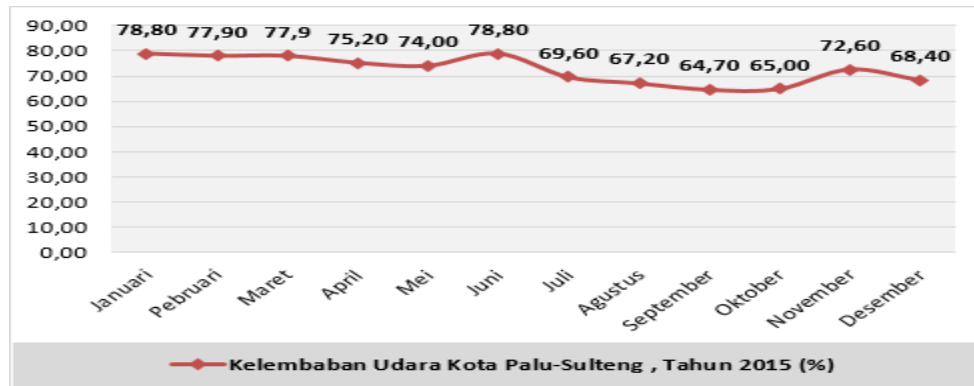
Sepanjang Tahun 2015, suhu udara rata-rata terendah yaitu 24,4°C terjadi pada bulan Pebruari, sementara tertinggi sebesar 29,5°C terjadi pada Bulan Oktober dan Desember. Arah angin terbanyak selama tahun 2015 yaitu dari posisi Barat Laut, dengan kecepatan rata-rata 4,5 knots.

Gambar 4.3. Suhu Udara Rata-Rata Kota Palu Menurut Bulan, Tahun 2015



Sumber: BPS, Sulteng Dalam Angka 2016.
Selama tahun 2015 kelembaban udara di Kota Palu tertinggi terjadi pada bulan Januari sebesar 84,0 persen dan terendah 74,1 persen pada bulan Maret.

Gambar 4.4. Kelembaban Udara Rata-Rata Kota Palu Menurut Bulan, Tahun 2015



Sumber: BPS, Sulteng Dalam Angka 2016.

Sementara penyinaran matahari pada tahun 2015 rata-rata mencapai 73,43 persen, penyinaran matahari terbanyak terjadi pada Bulan Juli yaitu 92,30 persen dan terendah terjadi pada Januari sebesar 54,20 persen.

Gambar 4.5. Rata-Rata Penyinaran Matahari Rata-Rata Kota Palu Menurut Bulan,



Tahun 2015

Sumber: BPS, Sulteng Dalam Angka 2016.

Selanjutnya perkembangan kondisi iklim tahunan di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8.
Rata-rata Parameter Cuaca pada
Stasiun Meteorologi Mutiara Palu,
Tahun 2011-2015

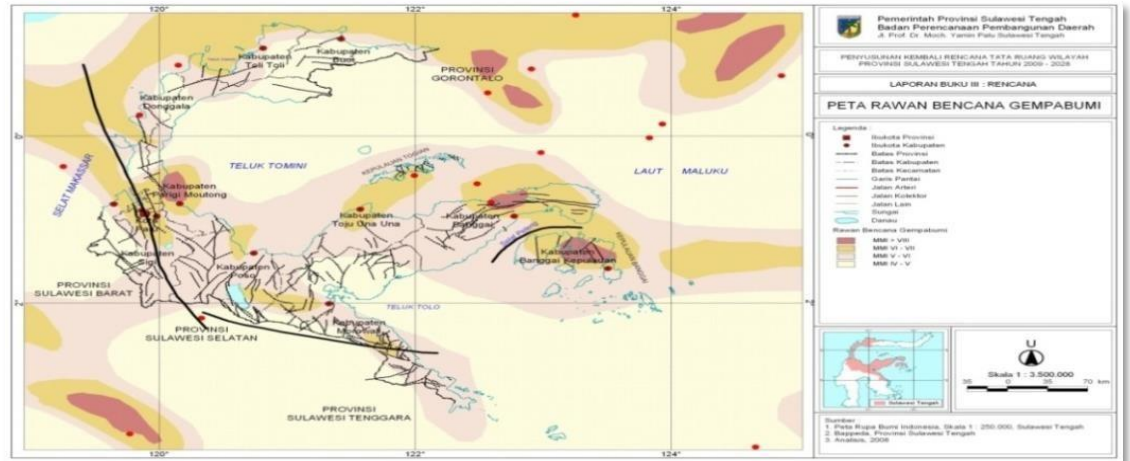
Kondisi Iklim	2011	2012	2013	2014	2015
Suhu (°C)	27,7	27,7	27,7	26,7	28,40
Kelembaban Udara (%)	76,70	76,00	76,40	77,60	72,49
Tekanan Udara (mb)	1.009,9	1.010,3	1.010,2	1.011,1	1.011,02
Arah Angin Terbanyak	Utara	Barat Laut	Barat Laut	Barat Laut	Barat Laut
Kecepatan Angin (Knots)	3,7	3,8	3,6	3,9	4,50
Curah Hujan (mm)	71,98	63,38	62,33	58,76	41,10

Tengah

Sumber: Badan Informasi Geospasial (BIG) Republik Indonesia.

Kawasan tanah longsor di Kabupaten Parigi Moutong, Sigi, Donggala, Poso dan Morowali, sedangkan kawasan rawan banjir di Kabupaten Sigi, Morowali, Banggai dan Kota Palu.

Gambar 4.7.
Peta Rawan
Bencana
Longsor
Provinsi
Sulawesi
Tengah



Sumber: Badan Informasi Geospasial (BIG) Republik Indonesia

3. Demografi

Penduduk merupakan faktor penting dalam proses pembangunan karena bukan hanya berperan sebagai pelaksana pembangunan, namun juga menjadi sasaran pembangunan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk, pembangunan harus diarahkan pada

pengendalian jumlah penduduk, peningkatan kualitas, serta pengerahan mobilitas sehingga mempunyai ciri dan karakteristik yang bersinergi dengan tujuan pembangunan.

Berdasarkan data BPS dan Permendagri No. 39 Tahun 2015, jumlah penduduk Sulawesi Tengah sejak periode 2011-2015 cenderung meningkat, yakni dari 2.683.722 jiwa (634.776 KK) pada Tahun 2011 menjadi 2.808.818 jiwa (702.205 KK) pada Tahun 2015. Tingkat laju pertumbuhan penduduk pada Tahun 2011 sebesar 1,71 persen berhasil ditekan hingga menjadi 1,6 persen pada tahun 2015. Sementara tingkat kepadatan penduduk Sulawesi Tengah cenderung meningkat sejak periode Tahun 2011-2015 yakni dari 39 jiwa/km² pada tahun 2011 menjadi 45 jiwa/km² pada Tahun 2015.

Tabel 4.9
Perkembangan Jumlah Penduduk, Laju
Pertumbuhan Penduduk dan Tingkat
Kepadatan Penduduk Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun 2011 - 2015

NO.	INDIKATOR KEPENDUDUKAN	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah Penduduk (Jiwa)	2.683.72 2	2.729.22 7	2.785.48 8	2.831.28 3
	- Laki-Laki (Jiwa)	1.375.81 7	1.399.22 0	1.423.93 8	1.446.89 0
	- Perempuan (Jiwa)	1.307.90 5	1.330.00 7	1.361.55 0	1.384.39 3
2.	Jumlah Rumah Tangga (KK)	634.776	639.248	652.951	666.833
3.	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,71	1,71	1,95	1,64
4.	Tingkat Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	39	40	45	46

Sumber: BPS, Sulteng Dalam Angka 2016 dan *) Permendagri 39 Tahun 2015.



Dilihat dari spasial wilayah Tahun 2015, penduduk terbanyak berdomisili di Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 439.799 jiwa atau sebesar 15,66 persen dari total penduduk Sulawesi Tengah, menyusul terbesar kedua dan ketiga masing-masing adalah Kota Palu dengan domisili penduduk sebanyak 359.350 jiwa (12,79 persen) dan Kabupaten Banggai dengan domisili penduduk sebanyak 355.415 jiwa (12,65 persen). Sedangkan domisili penduduk terendah berada di Kabupaten Banggai Laut yakni sebanyak 66.020 jiwa (2,35 persen). Secara rinci sebaran jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.10
Jumlah dan Distribusi Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015

No.	Kabupaten/Kota	Tahun 2015	
		Jumlah (Jiwa)	Pangsa (%)
1	Banggai Kepulauan	111.412	3,97
2	Banggai	355.415	12,65
3	Morowali	119.607	4,26
4	Poso	238.400	8,49
5	Donggala	288.686	10,28
6	Tolitoli	208.489	7,42
7	Buol	122.551	4,36
8	Parigi Moutong	439.799	15,66
9	Tojo Una-Una	150.464	5,36
10	Sigi	241.173	8,59
11	Banggai Laut	66.020	2,35
12	Morowali Utara	107.452	3,83
13	Palu	359.350	12,79

Sulawesi Tengah	2.808.818	100,00
------------------------	------------------	---------------

Sumber: Permendagri RI Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Kode dan

Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

II. KONDISI KEADAAN PENDIDIKAN DI PROVINSI SULAWESI

TENGAH Layanan satuan pendidikan SMA tidak dapat dilepaskan dari kondisi yang melatarbelakanginya. Baik kondisi global yang membawa pengaruh pada kehidupan manusia, maupun lingkungan yang mempengaruhinya. Berdasarkan hal tersebut, sebelum memotret kondisi SMA pada saat ini, maka perlu diketahui secara mendasar kondisi global dan kondisi lingkungan strate-gisnya. Berikut kondisi global dan kondisi lingkungan strategis pada saat ini serta arah perubahannya ke depan

1. Kondisi Global

Kondisi global saat ini diwarnai dengan berbagai isu penting yang menjadi pemicu perubahan dunia dan kehidupan manusia. Kondisi tersebut menjadi fokus perhatian dan menjadi bahasan dalam berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Berikut beberapa isu penting dalam kondisi global.

a. Pemanasan Global dan Perubahan Iklim

Pemanasan global merupakan fenomena alam yang kini tengah kita hadapi dan menjadi persoalan yang serius. Data United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) menunjukkan betapa pemanasan global terkait erat dengan perubahan iklim dan menjadi persoalan yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia.

Sejumlah fakta penting terkait pemanasan global makin menguat akhir-akhir ini. Tingkat pemanasan rata-rata selama lima puluh tahun terakhir hampir dua kali lipat dari rata-rata seratus tahun terakhir. Konsentrasi karbondioksida di atmosfer telah naik dari 278 ppm di masa pra-industri menjadi 379 ppm pada tahun 2005. Air di bumi lebih banyak, tapi penyebarannya tidak merata. Peningkatan volume air terkait dengan tutupan salju yang berkurang serta mencairnya es yang lebih cepat. Permukaan laut juga dari waktu ke waktu menunjukkan kenaikan.

Fakta-fakta tersebut membawa dampak langsung terhadap perubahan iklim dan tananan kehidupan makluk hidup di bumi.

Temperatur global yang lebih panas menyebabkan perubahan pada sistem alami bumi. Sekitar 20%-30% spesies tumbuhan dan hewan terancam punah jika peningkatan temperatur rata-rata global melebihi 1,5-2 derajat C. Kenaikan temperatur pada abad ini memberikan dampak negatif bagi keanekaragaman ekosistem (*biodiversity*) yang berperan dalam kehidupan manusia seperti penyediaan makanan dan air.

Hal tersebut, merupakan isu penting bagi kehidupan manusia. Dengan kondisi demikian, dunia pendidikan perlu memberi perhatian agar peserta didik memiliki kompetensi untuk menjaga kelestarian alam serta mencegah kerusakan yang terjadi. Kompetensi tersebut harus menjadi perhatian dunia pendidikan secara serius.

b. Perubahan Industri

Perkembangan teknologi dan informasi telah membawa perubahan pada berbagai aktivitas berproduksi. Di abad ke-18 aktivitas manusia didominasi dengan aktivitas pertanian, sehingga dikenal sebagai era agrikultur. Era pertanian saat itu menjadi penopang kehidupan manusia.

Pada abad berikutnya, sejalan dengan perkembangan teknologi, aktivitas produksi manusia diwarnai dengan aktivitas berproduksi secara besar dalam bentuk industri, sehingga dikenal sebagai era industri. Di era ini produksi dapat dilakukan secara besar-besaran dalam waktu yang lebih cepat, kualitas yang terstandar, variasi produk yang banyak, serta melibatkan banyak orang.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, tren industri berubah ke era informasi di abad 20 dengan karakteristik yang berbeda. Era industri dengan karakteristik produksi massal, mulai ditinggalkan dan bergeser ke pola desentralisasi di mana produksi didekatkan ke konsumennya. Semua itu bisa terjadi dengan penyebaran informasi dan teknologi komunikasi yang makin mudah.

Di abad 21, era informasi kembali berganti. Daniel Pink dalam bukunya *A Whole New Mind* (2006), menyebut zaman kini dan ke depan sebagai Era Konseptual. Pada era itu, yang akan sukses adalah para “pencipta” dan “pesimpati”. Secara lebih rinci, Pink mengemukakan bahwa manusia yang akan menjadi

pemimpin dalam era ini harus memiliki apa yang ia sebut sebagai *Six High-Concept And High-Tought Senses In The Conceptual Age*. Inilah konsep yang berperan penting untuk kesuksesan hidup di masa datang.

Keenam konsep yang diungkap Pink adalah sebagai berikut:

1. Bukan hanya fungsi, di era konseptual “Desain” akan memiliki peran yang penting;
2. Bukan hanya argumentasi, “Kisah” akan menjadi sesuatu yang bernilai;
3. Bukan hanya fokus, tetapi juga diperlukan “Simfoni”;
4. Tidak hanya logis, tetapi diperlukan “Empati”;
5. Bukan hanya serius, tapi lebih dari itu harus “Melakukan secara langsung”;
dan
6. Bukan hanya akumulasi, melainkan yang penting adalah memiliki “Makna”.

Pada Era Konseptual tersebut, menurut Wagner dalam bukunya *Global Achievement Gap* (2008) akan terjadi kesenjangan antara apa yang dibelajarkan di sekolah-sekolah dengan kompetensi yang dibutuhkan di dunia nyata. Sekolah-sekolah yang tidak menyadari hal ini, hanya akan melahirkan lulusan yang tidak bisa hidup optimal di zamannya. Oleh karena itu, lanjut Wagner, siswa di Amerika Serikat, sangat berkepentingan untuk menguasai keterampilan utama agar bertahan hidup dan beradaptasi dengan perubahan.

Terdapat tujuh jenis keterampilan, menurut Wagner, yang diperlukan, yakni: (1) terampil berpikir kritis dan memecahkan masalah; (2) kolaborasi berbasis jaringan dan memimpin dengan pengaruh; (3) mampu mengubah arah serta bergerak secara cepat dan efektif dan beradaptasi; (4) memiliki daya inisiatif dan berke-wirausahaan; (5) bicara dan memiliki kemampuan menulis secara efektif; (6) mengakses dan menganalisis informasi; dan (7) bersikap selalu ingin tahu dan berimajinasi.

c. Konektivitas Semua Unsur/ Dokumen Dunia

Perubahan teknologi membawa dampak pada segala aspek kehidupan manusia. Informasi tersedia secara luas dan mudah diakses dari manapun dan kapanpun. Hal ini memicu keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh siapapun di manapun berada. Akses yang timbul adalah kualitas informasi

yang sangat beragam dan menyebarnya berita hoax menjadi sebuah tantangan yang sangat kuat bagi dunia pendidikan. Perlu kompetensi khusus untuk mampu memilih dan memilah informasi yang benar dan bermanfaat. Semua individu, data dan dokumen terkoneksi satu sama lain. Hubungan sosial, ekonomi, dan budaya manusia mengalami perubahan yang drastis. Komunikasi antarindividu dapat terjadi tanpa sekat jarak, sehingga komunikasi dapat dilakukan di manapun dan kapanpun secara realtime, individu ke individu. Demikian pula halnya dengan konektivitas data dan dokumen antarindividu juga terhubung satu sama lain melalui jaringan yang tersambung secara langsung. Kehidupan sosial masyarakat lambat laun mengglobal tanpa pembatas sekat ruang. Nilai-nilai yang kurang baik dapat dengan mudah masuk dan menggerus

nilai-nilai yang dianut masyarakat. Hal ini dapat mempengaruhi tata nilai yang berlaku di masyarakat, termasuk di Indonesia. Ini menjadi tantangan yang tidak ringan bagi dunia pendidikan. Koneksi data dan informasi individu memicu perubahan di bidang transaksi ekonomi. Peran lembaga-lembaga ekonomi mulai bergeser setelah terjadi transaksi langsung. Bentuk toko secara fisik berubah menjadi online. Demikian pula perbankan yang mulai mengalami transformasi karena makin menguatnya financial technology dan mulai tampilnya model blockchain yang diperkenalkan oleh sosok dengan nama Satoshi Nakamoto. Perubahan demi perubahan yang dramatis itu, tidak akan lama lagi mewarnai kehidupan manusia. Semua itu membutuhkan kompetensi baru yang dikuatkan melalui proses pendidikan.

2. Kondisi Lingkungan

Kondisi lingkungan strategis dapat diidentifikasi sebagai potensi, yang selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan penting dalam penyusunan program. Kondisi lingkungan strategis yang menggambarkan kecenderungan masa depan mendapat perhatian khusus. Berikut diuraikan beberapa aspek lingkungan strategis dimaksud

a. Politik

Dinamika politik memberi pengaruh yang signifikan terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Pola rekrutmen pimpinan daerah kerap membawa pengaruh pada kebijakan daerah

terhadap pendidikan. Di satu sisi ada yang membawa pengaruh positif, tapi tidak sedikit yang justru sebaliknya. Kebijakan sekolah gratis, sering kali tidak dilandasi dengan dukungan yang memadai, sehingga pada gilirannya sekolah menghadapi kesulitan. Variasi kebijakan dalam konteks pengelolaan pendidikan di daerah, kerap kali menyulitkan dalam pencapaian target sesuai yang direncanakan.

Belum lagi perubahan aturan yang terkait dengan pemerintahan daerah. Terakhir, dengan disahkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa pengaruh pada pengelolaan dan pembinaan sekolah menengah yang selama ini dikelola pemerintah Kabupaten/Kota, yang kini dipindahkan ke Pemerintah Provinsi. Hal ini menimbulkan konsekuensi yang cukup luas dan perlu penyesuaian di berbagai bidang.

Intervensi politik yang terlalu dalam ke dunia pendidikan, selama ini juga menjadi salah satu tantangan yang tidak ringan. Satuan pendidikan, baik yang dikelola pemerintah maupun masyarakat, mengalami degradasi perannya sebagai pembangun sumberdaya manusia yang merdeka, berdaya, dan berbudaya. Kreativitas dan kemandirian dalam pengelolaan satuan pendidikan yang mengutamakan keunggulan dan kearifan lokal, semakin memudar. Posisi satuan pendidikan lebih sebagai institusi formal yang berjalan sesuai aturan administratif yang berlaku. Kondisi demikian menjadi sebuah tantangan berat untuk membangun pendidikan ke depan.

3. Kondisi Pendidikan Provinsi Sulteng Saat Ini

Pembangunan di sektor pendidikan, diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan dengan memanfaatkan secara optimal fasilitas pendidikan yang ada. Keberhasilan pembangunan di sektor pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain yaitu: Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Dari sisi angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS), sepanjang tahun 2014-2017 angka RLS di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan, yakni dari 7,89 tahun pada Tahun 2014 menjadi 8,29 tahun pada Tahun 2017. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata lama sekolah bagi penduduk usia sekolah di Sulawesi Tengah telah

mencapai kelas 2 (dua) pada jenjang pendidikan tingkat pertama (SLTP).

Tabel 4.11
Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014-2017

Uraian	2014	2015	2016	2017
Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	7,89	7,97	8,12	8,29
Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,71	12,72	12,92	13,04
Angka Melek Huruf (%)	97,24	97,24	97,34	97,69

Sumber: BPS, Tahun 2018

a. Akses Pendidikan

Pemerintah telah menjalankan Program Pendidikan Menengah Universal (PMU) sebagai upaya meningkatkan perluasan layanan pendidikan menengah. Perkembangan partisipasi masyarakat dalam menunjang program tersebut, dapat dilihat pada peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

1) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Salah satu indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan, yakni melalui Angka Partisipasi Kasar (APK). APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK ini menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan.

Perkembangan APK pada setiap jenjang pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.12
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut
Jenjang Pendidikan di Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun 2014-2017

Angka Partisipasi Kasar	2014	2015	2016	2017
APK SD/MI/Paket A Sulteng (%)	99,17	107,28	104,19	104,19
APK SMP/MTs/Paket B Sulteng (%)	82,14	90,73	91,86	91,86
APK SMA/SMK/MA/Paket C Sulteng (%)	63,42	82,87	84,85	84,85

Sumber: BPS, Tahun 2018

2) *Angka Partisipasi Murni (APM)*

Sama halnya APK, Angka Partisipasi Murni (APM) juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM ini melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut, atau dengan perkataan lain APM adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah

pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk

berusia 7 hingga 18 tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.

Perkembangan APM pada seluruh jenjang pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2014-2017 sebagai berikut:

Tabel 4.13
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014-2017

Angka Partisipasi Murni (APM)	2014	2015	2016	2017
APM SD/MI Sulteng (%)	88,19	92,35	92,74	92,66
APM SMP/MTs Sulteng (%)	63,62	71,10	72,16	74,91
APM SMA/SMK/MA Sulteng (%)	48,92	63,32	63,80	67,79

Sumber: BPS, Tahun 2018

Capaian indikator kinerja bidang pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2013-2016, dapat dilihat pada tabel 3.7.

Tabel 4.14
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2016

No.	INDIKATOR KINERJA PENDIDIKAN	2013	2014	2015	2016
1.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) (%) :				

	- APS SD/MI	84,73	97,67	97,50	98,02
	- APS SMA/MA/SMK	59,60	64,80	70,53	73,80
2.	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah (per 1000 penduduk)				
	- SD/MI	9,28	11,77	10,30	11,19
	- SMP/MTs	3,37	4,13	3,02	4,47
	- SMA/MA/SMK	1,75	1,79	1,32	1,85
3.	Rasio Guru Terhadap Murid (per 1000 penduduk)				
	- SD/MI	70,56	74,93	73,72	68,39
	- SMP/MTs	103,06	94,63	93,23	78,16
	- SMA/MA/SMK	103,19	61,63	49,17	79,55

Sumber: BPS, Sulteng Dalam Angka Tahun 2017

3) *Angka Partisipasi Sekolah (APS)*

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Sulawesi Tengah selama periode 2011-2016 sebagai berikut:

- Pada Tingkat Sekolah Dasar (SD/MI), APS cenderung meningkat, yakni dari 96,58 persen pada Tahun 2011 menjadi 98,02 persen pada Tahun 2016, atau meningkat sebesar 1,44 persen poin selama periode 2011- 2016.
- Pada jenjang SMP/MTs, APS cenderung meningkat,yakni dari 84,14 persen pada Tahun 2011 menjadi 91,80 persen pada Tahun 2016, atau meningkat sebesar 7,66 persen poin selama periode 2011-2016.

Pada tingkat SMA/MA/SMK, APS cenderung meningkat,yakni dari 57,59 persen pada Tahun 2011 menjadi 73,80 persen pada Tahun 2016, atau meningkat sebesar 16,21 persen poin selama periode 2011-2016.

4) *Angka Putus Sekolah*

Perkembangan Angka Putus Sekolah di Sulawesi Tengah selama periode 2011- 2014 sebagai berikut:

- Pada jenjang SD, Angka Putus Sekolah cenderung menurun,yakni dari 1,8 persen pada tahun 2011 menjadi 1,59 persen pada tahun 2014, atau menurun sebesar 1,12 persen poin selama periode 2011-2014.

- Pada tingkat SMP, Angka Putus Sekolah cenderung menurun, yakni dari 7,07 persen pada tahun 2011 menjadi 2,36 persen pada tahun 2014, atau menurun sebesar 4,71 persen poin selama periode 2011-2014.
- Pada tingkat SMA/SMK angka putus sekolah cenderung meningkat, yakni dari 2,62 persen pada tahun 2011 menjadi 3,03 persen pada tahun 2014, atau meningkat sebesar 0,41 persen poin selama periode 2011-2014

5) *Angka Kelulusan*

Perkembangan Angka Kelulusan di Sulawesi Tengah selama periode 2011- 2015 sebagai berikut:

- Pada jenjang SD/MI, selama lima tahun terakhir angka kelulusan mencapai 100 persen.

- Pada jenjang SMP/MTs, angka kelulusan cenderung meningkat, yakni dari 94,69 persen pada tahun 2011 menjadi 99,90 persen pada tahun 2015, atau Angka Kelulusan meningkat sebesar 5,3 persen poin selama periode Tahun 2011-2015.
- Pada jenjang SMA/SMK, Angka Kelulusan cenderung meningkat, yakni dari 96,88 persen pada Tahun 2011 menjadi 99,08 persen pada Tahun 2015, atau angka kelulusan meningkat sebesar 2,2 persen selama periode Tahun 2011-2015

6) *Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah*

Perkembangan rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah di Sulawesi Tengah selama periode 2011-2016 sebagai berikut:

- Pada jenjang SD/MI, rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk usia sekolah SD/MI cenderung meningkat, yakni dari 9,07 per 1000 penduduk usia sekolah pada Tahun 2011 meningkat menjadi 11,19 per 1000 penduduk usia sekolah pada tahun 2016, atau rasionya meningkat sebesar 2,12 poin selama periode Tahun 2011-2016.
- Pada jenjang SMP/MTs, rasionya cenderung fluktuatif, yakni dari 3,21 per 1000 penduduk usia sekolah pada Tahun 2011 meningkat menjadi 4,47 per 1000

penduduk usia sekolah pada tahun 2016, atau rasionya meningkat sebesar 1,26 poin selama periode Tahun 2011-2016.

- Pada jenjang SMA/MA/SMK, rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK cenderung meningkat, yakni dari 1,63 per 1000 penduduk usia sekolah pada tahun 2011 meningkat menjadi 1,85 per 1000 penduduk usia sekolah pada tahun 2016, atau rasionya meningkat sebesar 0,22 poin selama periode Tahun 2011-2016.

7) Rasio Guru Terhadap Murid

Perkembangan rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan di Sulawesi Tengah selama periode 2011-2016 sebagai berikut:

- Pada jenjang pendidikan SD/MI, rasio guru terhadap murid cenderung fluktuatif, yakni dari 67,97 per 1000 murid pada Tahun 2011 meningkat

menjadi 74,93 per 1000 murid pada Tahun 2014, rasionya menurun menjadi 73,72 per 1000 murid pada Tahun 2015, dan pada Tahun 2016 menurun menjadi 68,39 per 1000 murid.

- Pada tingkat SMP/MTs, rasio guru terhadap murid cenderung fluktuatif, yakni pada Tahun 2011 sebesar 97,07 per 1000 murid meningkat menjadi 103,06 per 1000 murid pada Tahun 2012, pada Tahun 2013 rasionya menurun menjadi 94,63 per 1000 murid, selanjutnya rasio tersebut mengalami penurunan setiap tahun hingga menjadi 78,16 per 1000 murid di Tahun 2016.

Pada tingkat SMA/SMK/MA, rasio guru terhadap murid cenderung fluktuatif, yakni dari 92,72 per 1000 murid pada Tahun 2011 meningkat menjadi 103,19 per 1000 murid pada Tahun 2012, selanjutnya pada rasionya menurun yaitu sebesar 61,63 per 1000 murid pada Tahun 2014 dan sebesar 49,17 per 1000 murid pada Tahun 2015, dan pada Tahun 2016 rasio tersebut meningkat hingga menjadi 79,55 per 1000 murid.

b. Mutu Pendidikan

Tujuan utama pendidikan adalah tercapainya mutu lulusan sesuai tujuan pendidikan. Secara lebih rinci tercapainya mutu pendidikan minimal tertuang dalam standar kompetensi

lulusan. Seluruh satuan pendidikan di Indonesia harus mencapai, minimal, standar kompetensi lulusan. Inilah yang menjadi kunci tercapainya mutu pendidikan.

Akan tetapi, tentu tidak mudah untuk mengukur ketercapaian kompetensi sesuai standar kompetensi lulusan tersebut, mengingat di dalamnya bukan hanya terdapat aspek pengetahuan, melainkan juga sikap dan keterampilan. Namun demikian, untuk memotret sampai sejauh mana SKL tersebut tercapai dapat dilihat dari pencapaian kompetensi pengetahuan yang dikuasai peserta didik. Untuk memotret mutu, maka setidaknya dapat dilihat dari Akreditasi Sekolah, Hasil Ujian Nasional, Kualifikasi guru serta kompetensi guru yang dilihat dari Hasil Uji Kompetensi Guru dan indikator lain yang secara rinci sebagai berikut :

1) Akreditasi Sekolah

Indikator lain dalam capaian mutu pendidikan menengah adalah hasil akreditasi. Makin banyak sekolah yang terakreditasi, maka semakin meningkat layanan pendidikan yang baik oleh sekolah.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah terus mendorong peningkatan jumlah sekolah yang diakreditasi. Target jumlah SM yang terakreditasi adalah 85% dengan capaian hasil akreditasi minimal B

PROVIN SI	Jumlah Sekolah	A	AKR E B	DITA SI C	B lum e
DKI Jakarta	502	371	78	4	49
Jawa Barat	1584	906	341	23	313
Jawa Tengah	858	526	222	57	52
DI Yogyakarta	165	120	28	9	8
Jawa Timur	1524	667	467	95	296
Aceh	516	182	209	41	84
Sumatera Utara	1064	396	441	106	122
Sumatera Barat	322	148	94	32	48
Riau	440	208	121	31	80
Jambi	223	89	79	20	35
Sumatera Selatan	594	199	203	88	104
Lampung	484	90	184	119	91
Kalimantan Barat	418	90	149	64	116
Kalimantan Tengah	239	49	94	45	52
Kalimantan Selatan	186	68	70	17	31
Kalimantan Timur	215	95	63	22	36
Sulawesi Utara	225	78	75	28	44
Sulawesi Tengah	211	40	88	29	53
Sulawesi Selatan	582	228	179	83	91
Sulawesi Tenggara	286	54	100	50	83
Maluku	275	37	100	50	87
Bali	159	125	21	1	12
Nusa Tenggara Barat	313	100	111	43	59

Nusa Tenggara Timur	509	59	146	95	209
Papua	225	49	62	34	80
Bengkulu	136	63	33	23	17
Maluku Utara	193	31	76	35	51
Banten	529	162	174	95	98
Kepulauan Bangka Belitung	67	36	22	1	8
Gorontalo	61	35	11	4	11
Kepulauan Riau	125	45	40	9	31
Papua Barat	118	22	43	16	37
Sulawesi Barat	88	12	24	26	27

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah

PROVIN SI	Jumlah Sekolah	AKREDIT ASI			
		A	B	C	Belum
Kalimantan Utara	59	20	15	9	15
JUMLAH	13.495	5.384	4.166	1.406	2.539

2) Ujian Nasional

Terdapat dua hal yang dapat dilihat dari nilai Ujian Nasional, yakni capaian nilai dan Indeks Integritas dalam penyelenggaraan UN.

Nilai hasil UN merupakan salah satu potret dari pencapaian mutu pendidikan menengah. Makin tinggi nilai rata-rata yang dicapai, maka dapat diasumsikan bahwa makin tinggi pula mutu pendidikan menengah tersebut.

Mulai tahun 2014/2015 juga diluncurkan indeks mutu pendidikan yakni IIUN (Indeks Integritas Ujian Nasional) tingkat sekolah. Indeks ini merupakan tingkat persentase jawaban siswa yang tidak menunjukkan pola kecurangan. Kecurangan yang diukur adalah gabungan persentase contek-menyontek antar siswa (kecurangan antar individu) dan persentase keseragaman pola jawaban soal Ujian Nasional (kecurangan sistemik/terorganisir) dalam suatu sekolah.

Rata-rata capaian nilai UN-SM tingkat nasional pada tahun 2017/2018 adalah 50,70 untuk SMA dan 52,28 untuk SMK. Capaian nilai ini masih tergolong rendah, masih jauh dari target capaian 75,00.

Demikian pula, IIUN tingkat nasional dengan rata-rata 64,32 juga

masih tergolong rendah. Permasalahan mutu pendidikan menjadi tantangan tersendiri mengingat upaya peningkatan akses menjadi lebih berat. Pasalnya, peningkatan akses biasanya lebih bermuara pada kuantitas siswa tanpa secara bersamaan meningkatkan kualitas siswa.

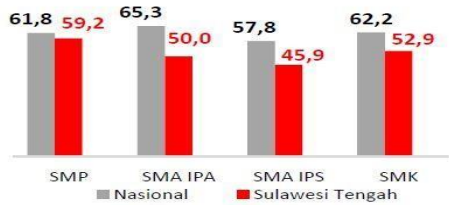
Sementara hal tersebut menjadi dilematis karena Indonesia tidak hanya membutuhkan lebih banyak calon tenaga kerja dengan kualifikasi lebih baik namun dengan kemampuan dan kompetensi yang lebih pula. Oleh karena itu, di daerah dengan angka partisipasi masih rendah, fokus layanan ditujukan pada perluasan akses. Sementara di daerah dengan angka partisipasi yang sudah tinggi fokus layanan kepada mutu



Gambar

KONDISI UN DAN IIUN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Tahun 2015-2018

Rerata Ujian Nasional 2015



Rerata Indeks Integritas Ujian Nasional 2015



Sumber : Puspendik 2015

UN UJIAN NASIONAL



Sumber: Puspendik 2016

INDEKS INTEGRITAS UJIAN NASIONAL



HASIL UN



Sumber: Puspendik, November 2017

SKOR IIUN



Sumber: Puspendik, November 2017

HASIL UJIAN NASIONAL



INDEKS INTEGRITAS UJIAN NASIONAL



3) Kondisi Guru

Jumlah dan Kualifikasi Salah satu indikator mutu yang penting adalah kualifikasi pendidik. Makin banyak pendidik yang memenuhi syarat kualifikasi, maka layanan pembelajaran akan lebih bermutu. Kualitas pendidik juga akan menentukan kualitas lulusan dalam menghasilkan lulusan yang bermutu dan kompeten.

JENJANG	TOTAL GURU	KUALIFIKASI		SERTIFIKASI	
		<S1	>=S1	SUDAH	BELUM

	U				
SMA	4.937	98	4.839	1.960	2.977
		1,99%	98,01 %	39,70 %	60,30 %
SMK	3.591	174	3.417	1.185	2.406
		4,85%	95,15 %	33,00 %	67,00 %
TOTAL	8.528	272	8.256	3.145	5.383
		3,19%	96,81 %	36,88 %	63,12 %

Permasalahan dalam guru antara lain sebaran guru yang tidak merata. Sebaran pendidik dengan kualifikasi yang tidak memenuhi S-1/D-4 tidak menyisakan pekerjaan yang terlalu berat.

Provinsi Sulawesi Tengah telah memiliki pendidik dengan kualifikasi S-1/D-4 lebih dari 96,81%. Hal yang perlu dicermati adalah dampak dari PMU yang meningkatkan angka partisipasi, yang pada gilirannya akan berpengaruh pada jumlah dan kualifikasi pendidik.

Selain itu, disparitas yang masih terjadi dalam akses dan kondisi geografis menyebabkan distribusi pendidik tidak merata. Hal ini merupakan tantangan yang tidak ringan. Di samping itu, perluasan akses dengan penambahan sarana dan prasarana harus mempertimbangkan dengan cermat ketersediaan pendidik yang memenuhi kualifikasi.

4) *Kondisi Sarana Prasarana*

Kondisi sarana prasarana pendukung mutu pembelajaran masih belum memenuhi kebutuhan. Hal ini nampak dari jumlah prasarana dan sarana pendukung mutu yang masih belum optimal

5) *Pembiayaan Pendidikan*

Pembiayaan pendidikan selama ini masih belum variatif. Sumber dana hanya mengandalkan orangtua siswa dan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Bahkan sebagian besar sekolah hanya mengandalkan bantuan pemerintah. Hal ini menyebabkan ketergantungan sekolah terhadap bantuan pemerintah sangat tinggi

6) *Tata Kelola Satuan Pendidikan*

Tata kelola satuan pendidikan dirasakan belum optimal. Tata kelola satuan pendidikan masih bersifat formalistik. Efektivitas tata kelola satuan belum merata,]mandiri, dan kuat

7) *Penjaminan Mutu Pendidikan*

Jika dalam akses ada disparitas akses yang ditanggulangi

dengan intervensi terhadap daerah dengan APK rendah, maka hal sama pula perlu dilakukan dalam upaya mengurangi kesenjangan mutu. Akan tetapi hal ini belum dilakukan secara optimal. Terdapat dua pendekatan penjaminan mutu, yakni penjaminan mutu oleh LPMP dan penjaminan mutu oleh pengawas

8) *Pengembangan Ekosistem Sekolah dan Pelibatan Publik*

Belum nampak upaya untuk pelibatan publik dalam pengembangan satuan pendidikan, baik dalam peningkatan akses, mutu maupun dukungan pembiayaan dan sarana prasarana. Sekolah masih mengandalkan pemerintah dan orangtua siswa

Perkembangan Angka Kelulusan di Sulawesi Tengah selama periode 2011- 2015 sebagai berikut:

- Pada jenjang SD/MI, selama lima tahun terakhir angka kelulusan mencapai 100 persen.
- Pada jenjang SMP/MTs, angka kelulusan cenderung meningkat, yakni dari 94,69 persen pada tahun 2011 menjadi 99,90 persen pada tahun 2015, atau Angka Kelulusan meningkat sebesar 5,3 persen poin selama periode Tahun 2011-2015.
- Pada jenjang SMA/SMK, Angka Kelulusan cenderung meningkat, yakni dari 96,88 persen pada Tahun 2011 menjadi 99,08 persen pada Tahun 2015, atau angka kelulusan meningkat sebesar 2,2 persen selama periode Tahun 2011-2015.

Tabel 4.14
Perkembangan Angka Putus Sekolah dan
Angka Kelulusan Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2013-2016

NO.	INDIKATOR KINERJA PENDIDIKAN	2013	2014	2015	2016
1.	Angka Putus Sekolah (%):				
	Angka Putus Sekolah SD/MI	1,57	1,59	1,22	1,0
	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	10,0	10,1	9,45	9,0
	Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK	3,25	3,03	2,65	2,0
2.	Angka Kelulusan (%):				
	Angka Kelulusan (AL) SD	100,00	100,00	100,00	100,00
	Angka Kelulusan (AL) SMP	97,06	97,92	99,90	100,0
	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK	98,25	99,89	99,08	99,90

Sumber: BPS, Sulteng Dalam Angka Tahun 2017

c. Permasalahan Dalam Pencapaian SNP

Masih banyak permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pendidikan, khususnya dalam pemenuhan standar nasional pendidikan sebagai langkah menuju pencapaian Pendidikan yang bermutu. Berikut ini masalah yang terungkap dalam berbagai standar:

- 1) Optimalisasi Implementasi Kurikulum*
- 2) Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) dalam mendukung peningkatan kualitas pembelajaran*
- 3) Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana*
- 4) Pengelolaan sekolah untuk Mencapai SNP*

5) Pemenuhan kebutuhan pembiayaan sekolah untuk mendukung kualitas hasil pembelajaran

C. Alokasi Anggaran

Pada Tahun 2021 Alokasi Khusus Pendanaan Pelaksanaan Pemenuhan SPM belum dianggarkan. Pada tahun tersebut masih dalam pembentukan perencanaan. Tetapi secara benang merah Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah mendukung Pemenuhan SPM dalam pemenuhan **Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa (8 Standar Pendidikan)**, walaupun masih terbatas jumlahnya.

Berikut gambaran alokasi anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021 :

RINCIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5
BELANJA LANGSUNG	394.915.148.959,98	348.925.017.468,00	(45.990.131.491,98)	88,35
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	669.235.800,50	653.241.180,00	(15.994.620,50)	97,61
<i>Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah</i>	3.504.453.275,00	3.418.387.210,00	(86.066.065,00)	97,54
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran</i>	5.360.035.637,00	4.968.176.806,00	(391.858.831,00)	92,69
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	784.923.000,00	722.318.000,00	(62.605.000,00)	92,02
<i>Pengadaan Mebeleur</i>	3.618.531.149,00	3.305.777.146,00	(312.754.003,00)	91,36
<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	442.315.000,00	435.757.500,00	(6.557.500,00)	98,52
<i>Pemeliharaan Sarana & Prasarana Aparatur</i>	85.820.000,00	80.787.500,00	(5.032.500,00)	94,14
<i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	356.495.000,00	354.970.000,00	(1.525.000,00)	99,57
<i>Peningkatan Kemampuan Teknis Kelembagaan</i>	1.920.048.540,00	1.879.407.243,00	(40.641.297,00)	97,88
<i>Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga</i>	1.920.048.540,00	1.879.407.243,00	(40.641.297,00)	97,88

RINCIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5
<i>Khusus</i>				
<i>Pengembangan dan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Pada Tugas Pembantuan</i>	3.081.726.408,00	2.710.433.508,00	(371.292.900,00)	87,95
Program Pembinaan Pendidikan Menengah Atas	67.709.605.439,50	66.951.196.643,00	(758.408.796,50)	98,88
<i>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMA</i>	3.263.800.310,70	3.195.694.750,00	(68.105.560,70)	97,91
<i>Peningkatan Sarana dan Prasarana SMA</i>	5.275.939.454,00	5.215.279.051,00	(60.660.403,00)	98,85
<i>Peningkatan Sarana Pembelajaran TIK dan Laboratorium SMA</i>	3.716.630.790,00	3.683.073.000,00	(33.557.790,00)	99,10
<i>DAK SMA</i>	53.454.233.000,00	52.907.016.842,00	(547.216.158,00)	98,98
<i>Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum pada Tingkat Pendidikan Menengah Atas</i>	1.678.181.658,85	1.668.937.050,00	(9.244.608,85)	99,45
<i>Pembinaan dan Pengembangan Manajemen Pengelolaan SMA</i>	320.820.225,95	281.195.950,00	(39.624.275,95)	87,65
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5.740.596.166,00	5.688.338.561,00	(52.257.605,00)	99,09
<i>Peningkatan dan Pengembangan Mutu PTK DIKMEN SMA</i>	763.213.590,00	746.538.000,00	(16.675.590,00)	97,82
<i>Peningkatan dan Pengembangan Mutu PTK DIKMEN SMK</i>	2.813.758.845,00	2.813.052.216,00	(706.629,00)	99,97
<i>Peningkatan Kualifikasi PTK DIKMEN Kejuruan</i>	459.975.500,00	452.450.400,00	(7.525.100,00)	98,36
<i>Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi</i>	1.498.060.731,00	1.481.731.145,00	(16.329.586,00)	98,91
<i>Pengelolaan Manajemen Tunjangan Sertifikasi Guru</i>	205.587.500,00	194.566.800,00	(11.020.700,00)	94,64
Program Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan	97.787.214.793,00	89.715.558.494,00	(8.071.656.299,00)	91,75
<i>Peningkatan Kerjasama Dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)</i>	542.526.646,00	488.744.552,00	(53.782.094,00)	90,09
<i>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMK</i>	1.140.062.800,00	1.111.476.700,00	(28.586.100,00)	97,49

		<i>Pelayanan administrasi dan pemeliharaan sekolah SMK</i>	1.443.975.900,00	1.378.277.600,00	(65.698.300,00)	95,45
		<i>Peningkatan Sarana dan Prasarana SMK</i>	2.378.000.000,00	2.121.378.229,00	(256.621.771,00)	89,21
		<i>Peningkatan Sarana Pembelajaran TIK dan Laboratorium SMK</i>	5.637.500.000,00	5.064.140.832,00	(573.359.168,00)	89,83
		<i>Pembinaan dan Pengembangan Manajemen Pengelolaan SMK</i>	2.858.437.200,00	2.802.646.219,00	(55.790.981,00)	98,05
		<i>DAK Reguler SMK</i>	83.236.482.247,00	76.213.600.762,00	(7.022.881.485,00)	91,56
		<i>Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum pada Tingkat Pendidikan Menengah Kejuruan</i>	550.230.000,00	535.293.600,00	(14.936.400,00)	97,29
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	3.279.624.017,00	3.160.514.429,00	(119.109.588,00)	96,37
		<i>Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan</i>	250.892.847,00	236.882.161,00	(14.010.686,00)	94,42

RINCIAN		JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1		2	3	4	5
	<i>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan</i>	635.671.168,00	588.152.300,00	(47.518.868,00)	92,52
	<i>Rapat Koordinasi Pendidikan Se Sulawesi Tengah</i>	305.523.752,00	298.001.000,00	(7.522.752,00)	97,54
	<i>Pembinaan dan Penilaian Sekolah Sehat</i>	445.316.188,00	429.535.350,00	(15.780.838,00)	96,46
	<i>Pengembangan Manajemen Pengelolaan Satuan Pendidikan Menengah</i>	136.767.741,00	136.758.688,00	(9.053,00)	99,99
	<i>Pengembangan Perencanaan dan sosialisasi Program Pendidikan serta Kerjasama lintas sektor/lembaga</i>	558.071.236,00	528.131.700,00	(29.939.536,00)	94,64
	<i>Pengelolaan Manajemen BOS semua Jenjang Pendidikan</i>	253.490.400,00	251.312.345,00	(2.178.055,00)	99,14
	<i>Pengelolaan Manajemen UN</i>	693.890.685,00	691.740.885,00	(2.149.800,00)	99,69
	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	14.853.257.605,00	14.347.806.912,00	(505.450.693,00)	96,60
	<i>Pembinaan Minat, bakat dan Kreatifitas Siswa PLB</i>	5.108.529.195,00	5.042.031.850,00	(66.497.345,00)	98,70
	<i>Pengembangan dan Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik PK-PLK</i>	1.281.002.100,00	1.238.980.851,00	(42.021.249,00)	96,72
	<i>Pengembangan dan Pembinaan Pendidikan Khusus (PLB)</i>	562.750.000,00	560.645.000,00	(2.105.000,00)	99,63
	<i>Pengembangan dan Pembinaan Mutu PK-PLK</i>	1.392.617.835,00	1.352.092.600,00	(40.525.235,00)	97,09
	<i>Pengembangan dan Peningkatan Mutu Manajemen SKO</i>	6.508.358.475,00	6.154.056.611,00	(354.301.864,00)	94,56
	Program Kebudayaan	4.361.903.190,00	4.313.306.051,00	(48.597.139,00)	98,89
	<i>Pelestarian dan Pemanfaatan Peninggalan Purbakala dan Permuseuman</i>	666.852.050,00	651.702.050,00	(15.150.000,00)	97,73
	<i>Pengembangan Sejarah dan Nilai Budaya</i>	1.539.515.140,00	1.512.643.019,00	(26.872.121,00)	98,25

		<i>Pembinaan Kepercayaan kepada TYME dan Tradisi</i>	397.365.900,00	394.594.932,00	(2.770.968,00)	99,30
		<i>Pembinaan Kesenian</i>	402.190.850,00	401.579.050,00	(611.800,00)	99,85
		<i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan</i>	1.355.979.250,00	1.352.787.000,00	(3.192.250,00)	99,76
		Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	185.120.713.863,98	149.606.720.000,00	(35.513.993.863,98)	80,82
		<i>Bantuan Operasional Sekolah (BOS)</i>	180.006.400.000,00	149.606.720.000,00	(30.399.680.000,00)	83,11
		<i>Kegiatan Pelaksanaan Sisa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)</i>	5.114.313.863,98	0,00	(5.114.313.863,98)	0,00

D. Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten kuningan adalah sebagai berikut :

1. Rekap Pegawai Per Golongan Ruang dan Jenis Kelamin

NO	GOLONGAN RUANG	JENIS KELAMIN		TOTAL
		PRI A	WANITA	
1	I/a	0	0	0
2	I/b	0	0	0
3	I/c	0	1	1
4	I/d	0	0	0
1	II/a	19	12	31
2	II/b	10	4	14
3	II/c	10	4	14
4	II/d	5		5
1	III/a	18	19	37
2	III/b	34	38	72
3	III/c	23	35	58
4	III/d	14	20	34
1	IV/a	44	12	56

2	IV/b	46	20	66
3	IV/c	1	3	4
4	IV/d	2	1	3
5	IV/e	0	0	0
TOTAL		226	169	395

2. JUMLAH GURU BEDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN

KABUP A TEN /KOTA	STA T US SEK OL AH	JENJ A NG PEN DI DIKA N	JUMLA H																	
			GURU PNS			GURU TETAP YAYASAN (GTY)			GURU TIDAK TETAP (GTT)			GURU BANTU (GB)			GURU HONORE R (GH)			TOTAL GURU		
			L	P	TO T AL	L	P	TO T AL	L	P	TO T AL	L	P	TO T AL	L	P	TO T AL	L	P	TO T AL
Kab. Banggai			287	308	595	20	36	56	31	39	70	0	0	0	191	286	477	529	669	1198
	Negeri		276	285	561	0	2	2	30	38	68	0	0	0	161	232	393	467	557	1024
		SLB	3	9	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14	15	4	23	27

KABUP A TEN /KOTA	STA T US SEK OL AH	JENJ A NG PEN DI DIKA N	JUMLA H																	
			GURU PNS			GURU TETAP YAYASAN (GTY)			GURU TIDAK TETAP (GTT)			GURU BANTU (GB)			GURU HONORE R (GH)			TOTAL GURU		
			L	P	TO T AL	L	P	TO T AL	L	P	TO T AL	L	P	TO T AL	L	P	TO T AL	L	P	TO T AL
		SMA	172	187	359	0	0	0	26	29	55	0	0	0	107	153	260	305	369	674
		SMK	101	89	190	0	2	2	4	9	13	0	0	0	53	65	118	158	165	323
	Swa s ta		11	23	34	20	34	54	1	1	2	0	0	0	30	54	84	62	112	174
		SLB	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	8	1	8	9
		SMA	6	8	14	4	7	11	0	0	0	0	0	0	8	5	13	18	20	38
		SMK	5	14	19	15	26	41	1	1	2	0	0	0	20	40	60	41	81	122
		SMP T K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	2	3
		SMT K	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
Kab. Banggai Kepulau an			69	78	147	19	10	29	8	5	13	0	0	0	147	150	297	243	243	486
	Neg e ri		68	73	141	0	0	0	8	5	13	0	0	0	137	139	276	213	217	430
		SLB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	3	1	4
		SMA	50	55	105	0	0	0	8	5	13	0	0	0	78	86	164	136	146	282
		SMK	18	18	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	52	108	74	70	144
	Swa s ta		1	5	6	19	10	29	0	0	0	0	0	0	10	11	21	30	26	56
		SMK	1	4	5	19	10	29	0	0	0	0	0	0	6	9	15	26	23	49
		SMT K	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	6	4	3	7
Kab. Banggai Laut			52	47	99	2	3	5	9	9	18	0	0	0	45	62	107	108	121	229
	Neg e ri		47	44	91	0	0	0	9	9	18	0	0	0	44	57	101	100	110	210
		SDLB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	2	4	6
		SMA	36	36	72	0	0	0	9	8	17	0	0	0	20	23	43	65	67	132
		SMK	11	8	19	0	0	0	0	1	1	0	0	0	22	30	52	33	39	72
	Swa s ta		5	3	8	2	3	5	0	0	0	0	0	0	1	5	6	8	11	19

BAB 2 Laporan SPM Bidang Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

		SMK	5	3	8	2	3	5	0	0	0	0	0	0	1	5	6	8	11	19
Kab. Buol			137	145	282	8	5	13	13	21	34	0	0	0	57	83	140	215	254	469
	Neg eri		133	144	277	0	1	1	12	21	33	0	0	0	51	77	128	196	243	439
		SDLB	2	4	6	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	2	6	8
		SLB	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
		SMA	61	70	131	0	0	0	8	16	24	0	0	0	39	49	88	108	135	243
		SMK	69	69	138	0	1	1	4	4	8	0	0	0	12	27	39	85	101	186
		SMP LB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Swa s ta		4	1	5	8	4	12	1	0	1	0	0	0	6	6	12	19	11	30
		SMA	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3	1	4
		SMK	4	1	5	7	3	10	1	0	1	0	0	0	4	6	10	16	10	26
Kab. Donggala			114	155	269	8	10	18	27	56	83	0	0	0	128	201	329	277	422	699
	Neg eri		113	154	267	0	0	0	27	53	80	0	0	0	123	198	321	263	405	668
		SLB	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	8	4	5	9
		SMA	64	99	163	0	0	0	13	19	32	0	0	0	83	141	224	160	259	419
		SMK	49	54	103	0	0	0	14	34	48	0	0	0	36	53	89	99	141	240
	Swa s ta		1	1	2	8	10	18	0	3	3	0	0	0	5	3	8	14	17	31

KABUP A TEN /KOTA	STA T US SEK OL AH	JENJ A N G P E N D I K A N	JUMLA H																	
			GURU PNS			GURU TETAP YAYASAN (GTY)			GURU TIDAK TETAP (GTT)			GURU BANTU (GB)			GURU HONORE R (GH)			TOTAL GURU		
			L	P	TO T AL	L	P	TO T AL	L	P	TO T AL	L	P	TO T AL	L	P	TO T AL	L	P	TO T AL
		SMA	0	0	0	4	6	10	0	0	0	0	0	0	2	2	4	6	8	14
		SMK	1	1	2	4	4	8	0	3	3	0	0	0	3	1	4	8	9	17
Kab. Morowa li			63	90	153	4	16	20	29	43	72	0	0	0	53	82	135	149	231	380
	Neg eri		63	83	146	1	1	2	27	42	69	0	0	0	47	76	123	138	202	340
		SLB	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0	1	0	1	1	6	7
		SMA	39	50	89	0	0	0	19	18	37	0	0	0	21	46	67	79	114	193
		SMK	24	33	57	1	1	2	8	18	26	0	0	0	25	30	55	58	82	140
	Swa sta		0	7	7	3	15	18	2	1	3	0	0	0	6	6	12	11	29	40
		SMA	0	6	6	1	11	12	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	17	19
		SMK	0	1	1	2	4	6	2	1	3	0	0	0	5	6	11	9	12	21
Kab. Morowa li Utara			62	85	147	8	13	21	21	24	45	0	0	0	32	79	111	123	201	324
	Neg eri		57	69	126	0	0	0	21	24	45	0	0	0	30	76	106	108	169	277
		SLB	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	7	7	2	7	9
		SMA	40	49	89	0	0	0	12	16	28	0	0	0	14	42	56	66	107	173
		SMK	16	20	36	0	0	0	8	8	16	0	0	0	16	27	43	40	55	95
	Swa sta		5	16	21	8	13	21	0	0	0	0	0	0	2	3	5	15	32	47
		SMA	2	3	5	2	4	6	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	8	12
		SMK	3	13	16	6	9	15	0	0	0	0	0	0	2	2	4	11	24	35
Kab. Parigi Mouton g			175	158	333	30	34	64	73	108	181	0	0	0	145	218	363	423	518	941
	Neg eri		166	148	314	1	0	1	73	106	179	0	0	0	124	182	306	364	436	800
		SLB	2	4	6	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2	6	8
		SMA	126	107	233	1	0	1	52	72	124	0	0	0	90	135	225	269	314	583
		SMK	38	37	75	0	0	0	21	32	53	0	0	0	34	47	81	93	116	209
	Swa s		9	10	19	29	34	63	0	2	2	0	0	0	21	36	57	59	82	141

	ta																			
		SMA	7	6	13	2	7	9	0	1	1	0	0	0	8	5	13	17	19	36
		SMK	2	4	6	27	27	54	0	1	1	0	0	0	13	31	44	42	63	105
Kab. Poso			199	284	483	14	38	52	15	19	34	0	0	0	89	176	265	317	517	834
	Negeri		171	248	419	0	0	0	15	17	32	0	0	0	55	129	184	241	394	635
		SLB	5	9	14	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	5	10	15
		SMA	97	147	244	0	0	0	8	6	14	0	0	0	29	73	102	134	226	360
		SMK	69	92	161	0	0	0	7	10	17	0	0	0	26	56	82	102	158	260
	Swasta		28	36	64	14	38	52	0	2	2	0	0	0	34	47	81	76	123	199
		SLB	0	2	2	0	3	3	0	0	0	0	0	0	2	5	7	2	10	12
		SMA	10	21	31	2	3	5	0	2	2	0	0	0	12	21	33	24	47	71
		SMK	18	13	31	12	32	44	0	0	0	0	0	0	20	21	41	50	66	116
Kab. Sigi			126	201	327	17	25	42	13	21	34	0	0	0	74	120	194	230	367	597
	Negeri		107	166	273	0	0	0	13	21	34	0	0	0	52	88	140	172	275	447
		SLB	2	17	19	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	5	5	3	23	26
		SMA	79	101	180	0	0	0	9	19	28	0	0	0	34	56	90	122	176	298

KABUP A TEN /KOTA	STA T US SEK OL AH	JENJ A NG PEN DI DIKA N	JUMLA H																	
			GURU PNS			GURU TETAP YAYASAN (GTY)			GURU TIDAK TETAP (GTT)			GURU BANTU (GB)			GURU HONORE R (GH)			TOTAL GURU		
			L	P	TO T AL	L	P	TO T AL	L	P	TO T AL	L	P	TO T AL	L	P	TO T AL	L	P	TO T AL
		SMK	26	48	74	0	0	0	3	1	4	0	0	0	18	27	45	47	76	123
	Swa s ta		19	35	54	17	25	42	0	0	0	0	0	0	22	32	54	58	92	150
		SLB	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	5	3	3	6
		SMA	13	19	32	8	16	24	0	0	0	0	0	0	8	19	27	29	54	83
		SMK	6	15	21	9	9	18	0	0	0	0	0	0	11	11	22	26	35	61
Kab. Tojo Una-Una			90	141	231	1	7	8	5	21	26	0	0	0	52	99	151	148	268	416
	Neg e ri		86	124	210	0	0	0	5	21	26	0	0	0	47	89	136	138	234	372
		SLB	2	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2	8	10
		SMA	41	55	96	0	0	0	3	19	22	0	0	0	31	64	95	75	138	213
		SMK	43	64	107	0	0	0	2	2	4	0	0	0	16	22	38	61	88	149
	Swa s ta		4	17	21	1	7	8	0	0	0	0	0	0	5	10	15	10	34	44
		SMA	1	3	4	1	5	6	0	0	0	0	0	0	1	5	6	3	13	16
		SMK	3	14	17	0	2	2	0	0	0	0	0	0	4	5	9	7	21	28
Kab. Tolitol i			110	160	270	24	31	55	20	20	40	0	0	0	82	123	205	236	334	570
	Neg e ri		102	148	250	0	0	0	20	17	37	0	0	0	71	103	174	193	268	461
		SLB	0	7	7	0	0	0	2	1	3	0	0	0	1	2	3	3	10	13
		SMA	57	71	128	0	0	0	11	8	19	0	0	0	38	50	88	106	129	235
		SMK	45	70	115	0	0	0	7	8	15	0	0	0	32	51	83	84	129	213
	Swa s ta		8	12	20	24	31	55	0	3	3	0	0	0	11	20	31	43	66	109
		SMA	4	4	8	8	12	20	0	0	0	0	0	0	5	13	18	17	29	46
		SMK	4	8	12	16	19	35	0	3	3	0	0	0	6	7	13	26	37	63
Kota Palu			380	652	1032	91	143	234	21	43	64	0	0	0	160	150	310	652	988	1640
	Neg e ri		333	528	861	0	1	1	20	42	62	0	0	0	92	86	178	445	657	1102
		SLB	3	14	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	9	6	20	26

		SMA	177	286	463	0	0	0	11	24	35	0	0	0	54	50	104	242	360	602
		SMK	153	228	381	0	1	1	9	18	27	0	0	0	35	30	65	197	277	474
	Swasta		47	124	171	91	14	2	1	1	2	0	0	0	68	64	132	207	331	538
		SLB	2	9	11	9	14	23	0	0	0	0	0	0	3	7	10	14	30	44
		SMA	28	52	80	41	48	89	0	0	0	0	0	0	26	31	57	95	131	226
		SMK	17	63	80	41	80	121	1	1	2	0	0	0	39	26	65	98	170	268
Grand Total			1864	2504	4368	246	371	617	285	429	714	0	0	0	1255	1829	3084	3650	5133	8783

3. JUMLAH GURU BEDASARKAN KUALIFIKASI

IJAZAH Secara garis besar dapat

KABUPATEN /KOTA	STATUS SEKOLAH	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH GURU BERDASARKAN KUALIFIKASI IJAZAH							
			SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	TOTAL KESELURUHAN
Kab. Banggai			11	0	3	24	1073	86	1	1198
	Negeri		6	0	3	12	920	83	0	1024

KABUPATEN /KOTA	STATUS SEKOLAH	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH GURU BERDASARKAN KUALIFIKASI IJAZAH							TOTAL KESELURUHAN
			SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	
		SLB	3	0	3	0	21	0	0	27
		SMA	3	0	0	7	609	55	0	674
		SMK	0	0	0	5	290	28	0	323
	Swasta		5	0	0	12	153	3	1	174
		SLB	3	0	0	1	5	0	0	9
		SMA	0	0	0	2	36	0	0	38
		SMK	2	0	0	8	108	3	1	122
		SMPTK	0	0	0	1	2	0	0	3
		SMTK	0	0	0	0	2	0	0	2
Kab. Banggai Kepulauan			8	1	1	12	459	5	0	486
	Negeri		4	1	1	8	411	5	0	430
		SLB	1	0	0	0	3	0	0	0
		SMA	2	0	0	3	272	5	0	0
		SMK	1	1	1	5	136	0	0	0
	Swasta		4	0	0	4	48	0	0	0
		SMK	4	0	0	4	41	0	0	0
		SMTK	0	0	0	0	7	0	0	0
Kab. Banggai Laut			3	0	1	4	212	9	0	229
	Negeri		1	0	1	3	197	8	0	210
		SDLB	0	0	1	0	5	0	0	0
		SMA	0	0	0	1	125	6	0	0
		SMK	1	0	0	2	67	2	0	0
	Swasta		2	0	0	1	15	1	0	0
		SMK	2	0	0	1	15	1	0	0
Kab. Buol			3	0	9	9	425	23	0	469
	Negeri		1	0	8	5	404	21	0	439
		SDLB	0	0	6	0	2	0	0	0

		SLB	0	0	0	0	2	0	0	0
		SMA	1	0	2	2	227	11	0	0
		SMK	0	0	0	3	173	10	0	0
		SMPLB	0	0	0	0	0	0	0	0
	Swasta		2	0	1	4	21	2	0	0
		SMA	0	0	0	0	3	1	0	0
		SMK	2	0	1	4	18	1	0	0
Kab. Donggala			8	1	2	12	644	32	0	699
	Negeri		7	1	2	12	614	32	0	668
		SLB	1	0	0	0	8	0	0	0
		SMA	2	0	2	5	395	15	0	0
		SMK	4	1	0	7	211	17	0	0
	Swasta		1	0	0	0	30	0	0	0
		SMA	1	0	0	0	13	0	0	0

KABUPATEN /KOTA	STATUS SEKOLAH	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH GURU BERDASARKAN KUALIFIKASI IJAZAH							TOTAL KESELURUHAN
			SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	
		SMK	0	0	0	0	17	0	0	0
Kab. Morowali			5	0	3	6	347	19	0	380
	Negeri		3	0	2	5	311	19	0	340
		SLB	2	0	2	0	3	0	0	0
		SMA	0	0	0	0	177	16	0	0
		SMK	1	0	0	5	131	3	0	0
	Swasta		2	0	1	1	36	0	0	0
		SMA	0	0	0	1	18	0	0	0
		SMK	2	0	1	0	18	0	0	0
Kab. Morowali Utara			1	1	4	3	294	21	0	324
	Negeri		1	1	2	3	250	20	0	277
		SLB	0	0	2	0	7	0	0	0
		SMA	1	0	0	3	152	17	0	0
		SMK	0	1	0	0	91	3	0	0
	Swasta		0	0	2	0	44	1	0	0
		SMA	0	0	1	0	11	0	0	0
		SMK	0	0	1	0	33	1	0	0
Kab. Parigi Moutong			12	3	3	10	864	49	0	941
	Negeri		5	2	1	7	740	45	0	800
		SLB	0	1	0	0	7	0	0	0
		SMA	4	0	0	3	541	35	0	0
		SMK	1	1	1	4	192	10	0	0
	Swasta		7	1	2	3	124	4	0	0
		SMA	0	0	0	1	33	2	0	0
		SMK	7	1	2	2	91	2	0	0

Kab. Poso			11	4	3	10	741	64	1	834
	Negeri		2	4	2	7	567	52	1	635
		SLB	0	0	2	0	10	3	0	0
		SMA	0	1	0	6	321	31	1	1
		SMK	2	3	0	1	236	18	0	0
	Swasta		9	0	1	3	174	12	0	0
		SLB	5	0	1	0	4	2	0	0
		SMA	0	0	0	1	64	6	0	0
		SMK	4	0	0	2	106	4	0	0
Kab. Sigi			10	1	3	8	514	60	1	597
	Negeri		3	0	3	2	386	53	0	447
		SLB	0	0	1	1	22	2	0	0
		SMA	2	0	1	0	257	38	0	0
		SMK	1	0	1	1	107	13	0	0
	Swasta		7	1	0	6	128	7	1	1
		SLB	3	0	0	1	2	0	0	0
		SMA	2	0	0	2	74	5	0	0

KABUPATEN /KOTA	STATUS SEKOLAH	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH GURU BERDASARKAN KUALIFIKASI IJAZAH							TOTAL KESELURUHAN
			SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	
		SMK	2	1	0	3	52	2	1	1
Kab. Tojo Una-Una			3	0	8	6	382	17	0	416
	Negeri		3	0	7	6	340	16	0	372
		SLB	1	0	5	0	4	0	0	0
		SMA	2	0	2	3	199	7	0	0
		SMK	0	0	0	3	137	9	0	0
	Swasta		0	0	1	0	42	1	0	0
		SMA	0	0	1	0	14	1	0	0
		SMK	0	0	0	0	28	0	0	0
Kab. Tolitoli			5	0	1	6	528	30	0	570
	Negeri		2	0	1	6	424	28	0	461
		SLB	0	0	0	0	12	1	0	0
		SMA	1	0	1	2	220	11	0	0
		SMK	1	0	0	4	192	16	0	0
	Swasta		3	0	0	0	104	2	0	0
		SMA	0	0	0	0	46	0	0	0
		SMK	3	0	0	0	58	2	0	0
Kota Palu			14	0	1	16	1352	256	1	1640
	Negeri		3	0	1	8	881	209	0	1102
		SLB	1	0	1	0	23	1	0	26
		SMA	2	0	0	3	455	142	0	602
		SMK	0	0	0	5	403	66	0	474
	Swasta		11	0	0	8	471	47	1	538
		SLB	2	0	0	0	39	3	0	44
		SMA	5	0	0	4	189	28	0	226
		SMK	4	0	0	4	243	16	1	268
Grand Total			94	11	42	126	7835	671	4	8783

E. Permasalahan Dan Solusi

I. PERMASALAHAN

Pembangunan bidang pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah secara umum mengalami perkembangan kearah yang lebih baik. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya pencapaian Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar, serta pencapaian Rata- rata Lama Sekolah setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan.

Namun demikian, dalam penyelenggaraannya dengan perubahan yang sangat pesat di bidang pendidikan mengakibatkan adanya permasalahan yang harus dicari alternatif pemecahannya. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai berikut:

A. ASPEK REGULASI

Belum adanya Regulasi Khusus di daerah tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pendidikan. Regulasi ini diharapkan merupakan :

1. Dasar pelaksanaan Pemenuhan SPM Bidang Urusan Pendidikan Khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah,
2. Dasar bagi Kabupaten dan Kota dalam pelaksanaan Pemenuhan SPM Bidang Urusan Pendidikan.
3. Dasar aturan dalam pengalokasian anggaran khususnya dalam pemenuhan SPM Bidang Urusan Pendidikan.

B. ASPEK ANGGARAN

Masih minimnya sekali pengalokasian anggaran untuk 2 tahapan dari 4 tahapan Penerapan SPM, dalam hal :

1. **Pendataan dan verifikasi data anak putus sekolah (ATS)** Provinsi Sulawesi Tengah yang mencakup 13 Kabupaten / Kota untuk Jenjang Pendidikan Menengah (SMA, SMK) dan Pendidikan Khusus.
2. **Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar :**
 - a) Pemenuhan **Perlengkapan Dasar bagi Peserta Didik yang berasal**

dari keluarga miskin atau tidak mampu.

- b) Pemenuhan Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan**

II. SOLUSI

Peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya bidang pendidikan ukuran keberhasilannya memerlukan jangka waktu lama dalam arti kata investasi yang ditanamkan di bidang pendidikan (human investation) hasilnya dapat diketahui dalam beberapa tahun ke depan.

Selanjutnya tiap tahun yaitu pada semester I dan semester II, SPM akan selalu dimonitor dan dievaluasi oleh Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, SKPD penanggung jawab SPM, unsur SKPD yang membidangi perencanaan, dan unsur SKPD yang membidangi keuangan,

untuk mengetahui hambatan-hambatan dan kekurangan-kekurangan yang harus segera diatasi dan dicari penyebabnya, untuk mencapai target yang ditentukan, yang bertujuan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

Bertolak dari masih adanya kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan mutu penyusunan program bidang Pendidikan dan Kebudayaan serta anggaran dengan mengacu pada ketentuan.
2. Lebih meningkatkan koordinasi antara Bidang dan Bagian dalam pelaksanaan program- program pendidikan dan Kebudayaan
3. Lebih meningkatkan peran Kelompok Masyarakat dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan.
4. Lebih meningkatkan koordinasi dan sinergitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Kegiatan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan dari Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

BAB 3 *Program dan Kegiatan*

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan sebagai upaya untuk merealisasikan Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka strategi dan kebijakan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

A. Strategi dan Kebijakan Pembangunan Pendidikan untuk Pemerataan Akses dan Pemerataan Layanan Pendidikan

Dalam rangka pemerataan akses dan pemerataan layanan pendidikan, maka strategi dan kebijakan yang dilakukan meliputi:

- a. Pendanaan BOS ;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan wajib belajar
- c. Rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan

- d. Perluasan pendidikan wajib belajar pada jalur nonformal
- e. Perluasan akses pendidikan keaksaraan bagi penduduk usia > 15 tahun
- f. Perluasan akses SLB dan sekolah inklusif
- g. Pengembangan pendidikan layanan khusus
- h. Perluasan Akses PAUD
- i. Pendidikan kecakapan hidup
- j. Perluasan akses SMA/SMK dan SM Terpadu
- k. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
- l. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perluasan akses SMA, SMK/SM Terpadu, SLB dan PT

B. Strategi dan Kebijakan Pembangunan Pendidikan untuk Meningkatkan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing

- a. Pengawasan dan penjaminan mutu secara terprogram dengan mengacu pada SNP.
- b. Perluasan dan peningkatan mutu akreditasi oleh BAN-SM, BAN-PNF, dan BAN PT.
- c. Pengembangan guru sebagai profesi.
- d. Pengembangan Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
- e. Perbaikan dan pengembangan sarana dan prasarana.
- f. Perluasan pendidikan kecakapan hidup.
- g. Pengembangan sekolah Unggul
- h. Akselerasi jumlah program studi kejuruan, vokasi, dan profesi
- i. Teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan

C. Strategi dan Kebijakan Pembangunan Pendidikan untuk Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik

- a. Peningkatan sistem pengendalian internal berkoordinasi dengan aparat fungsional

- b. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat perencanaan dan penganggaran
- c. Peningkatan kapasitas dan kompetensi managerial aparat
- d. Penataan regulasi pengelolaan pendidikan
- e. Peningkatan citra dan layanan publik
- f. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelolaan pendidikan

*D. Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kebudayaan
untuk
Meles
tarikan dan
Mengembangkan
Kebudayaan Daerah*

Dalam rangka pembangunan kebudayaan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah, maka strategi dan kebijakan yang dilakukan meliputi:

- a. Pengembangan nilai-nilai budaya daerah

- b. Pembinaan, pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan keragaman budaya
- c. Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

E. Strategi Kebijakan Pendidikan Dan Kebudayaan

Strategi Kebijakan Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan

Dalam undang-undang nomor 20 Tahun 2003, tentang sistim Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa sistim evaluasi pendidikan dilakukan oleh 3 (tiga) unsur yaitu : 1. Pendidikan, 2. Satuan Pendidikan, 3. Pemerintah.

Yang dilaksanakan oleh pendidikan melalui test formatif pada saat Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) berlangsung, dan yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan adalah Ulangan Umum Semester, serta yang dilakukan oleh Pemerintah adalah Ujian Nasional Hasil Pelaksanaan Ujian Nasional menjadi Ukuran keberhasilan penyelenggaraan Pendidikan di Sulawesi Tengah.

Hasil pencapaian pembangunan pendidikan sesuai dengan prioritas Program telah dicapai keberhasilannya pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan ini diwujudkan dengan tingkat pencapaian Angka Partisipasi (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus sekolah Angka Kelulusan untuk semua jenis dan jenjang pendidikan dari Tahun ke tahun.

Prioritas Daerah dalam upaya percepatan penuntasan pembangunan pendidikan antara lain melalui program dan kegiatan Prioritas Program Pembangunan Pendidikan yaitu antara lain :

	OUTPUTE		OUTCOME		SASARAN (PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN)
1	2	3	4	5	6

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			OUTPUT		OUTCOME		SASARAN (PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN)
			INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
1			2	3	4	5	6
		1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Menengah Atas (%)	100%	Persentase SMA Yang Memenuhi SPM dan 8 SNP	100%	Jenjang Pendidikan SMA baik Negeri dan Swasta
		1.01.02.1.01.01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	31 Sekolah			Sarana Prasarana SMA
		1.01.02.1.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah SMA yang Terpenuhi Penambahan Ruang Kelas Baru	31 Sekolah			Sarana Prasarana SMA
		1.01.02.1.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	31 Sekolah			Sarana Prasarana SMA
		1.01.02.1.01.04 Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	31 Sekolah			Sarana Prasarana SMA
		1.01.02.1.01.05 Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	31 Sekolah			Sarana Prasarana SMA
		1.01.02.1.01.06 Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	31 Sekolah			Sarana Prasarana SMA
		1.01.02.1.01.07 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	31 Sekolah			Sarana Prasarana SMA
		1.01.02.1.01.08 Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	31 Sekolah			Sarana Prasarana SMA
		1.01.02.1.01.09 Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	31 Sekolah			Sarana Prasarana SMA
		1.01.02.1.01.10 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	31 Sekolah			Sarana Prasarana SMA
		1.01.02.1.01.11 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pembangunan Perpustakaan Sekolah	31 Sekolah			Sarana Prasarana SMA
		1.01.02.1.01.12 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	31 Sekolah			Sarana Prasarana SMA
		1.01.02.1.01.13 Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pembangunan Asrama Sekolah	31 Sekolah			Sarana Prasarana SMA
		1.01.02.1.01.14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5 Sekolah			Sarana Prasarana SMA
		1.01.02.1.01.15 Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pembangunan Fasilitas Parkir	31 Sekolah			Sarana Prasarana SMA
		1.01.02.1.01.16 Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pembangunan Kantin Sekolah	31 Sekolah			Sarana Prasarana SMA
		1.01.02.1.01.17 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	31 Sekolah			Sarana Prasarana SMA
		1.01.02.1.01.18 Pembangunan Ruang/Sudut Baca	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pembangunan Ruang/Sudut Baca	20 Unit			Sarana Prasarana SMA

			1.01.02.1.01.19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah SMA yang Terpenuhi Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	31 Sekolah			Sarana Prasarana SMA
			1.01.02.1.01.20 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah SMA yang Terpenuhi Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	31 Sekolah			Sarana Prasarana SMA
			1.01.02.1.01.21 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah SMA yang Terpenuhi Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	31 Sekolah			Sarana Prasarana SMA
			1.01.02.1.01.22 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah SMA yang Terpenuhi Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	31 Sekolah			Sarana Prasarana SMA
			1.01.02.1.01.23 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah SMA yang Terpenuhi Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	31 Sekolah			Sarana Prasarana SMA
			1.01.02.1.01.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah SMA yang Terpenuhi Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	31 Sekolah			Sarana Prasarana SMA
			1.01.02.1.01.25 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah SMA yang Terpenuhi Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	31 Sekolah			Sarana Prasarana SMA
			1.01.02.1.01.26 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA	Jumlah SMA yang Terpenuhi Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA	31 Sekolah			Sarana Prasarana SMA
			1.01.02.1.01.27 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah SMA yang Terpenuhi Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	31 Sekolah			Sarana Prasarana SMA

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	OUTPUT		OUTCOME		SASARAN (PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN)
	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.1.01.28 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah SMA yang Terpenuhi Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	31 Sekolah			Sarana Prasarana SMA
1.01.02.1.01.29 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah SMA yang Terpenuhi Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	31 Sekolah			Sarana Prasarana SMA
1.01.02.1.01.30 Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah SMA yang Terpenuhi Rehabilitasi Asrama Sekolah	31 Sekolah			Sarana Prasarana SMA
1.01.02.1.01.31 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah SMA yang Terpenuhi Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	20 Unit			Sarana Prasarana SMA
1.01.02.1.01.32 Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Jumlah SMA yang Terpenuhi Rehabilitasi Fasilitas Parkir	31 Sekolah			Sarana Prasarana SMA
1.01.02.1.01.33 Rehabilitasi Kantin Sekolah	Jumlah SMA yang Terpenuhi Rehabilitasi Kantin Sekolah	31 Sekolah			Sarana Prasarana SMA
1.01.02.1.01.34 Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah SMA yang Terpenuhi Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	31 Sekolah			Sarana Prasarana SMA
1.01.02.1.01.35 Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca	Jumlah SMA yang Terpenuhi Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca	31 Sekolah			Sarana Prasarana SMA
1.01.02.1.01.36 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pengadaan Mebel Sekolah	31 Sekolah			Sarana Prasarana SMA
1.01.02.1.01.37 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	31 Sekolah			Sarana Prasarana SMA
1.01.02.1.01.38 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pengadaan Perlengkapan Sekolah	4 Sekolah			Sarana Prasarana SMA
1.01.02.1.01.39 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	31 Sekolah			Sarana Prasarana SMA
1.01.02.1.01.40 Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	31 Sekolah			Sarana Prasarana SMA
1.01.02.1.01.41 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	31 Sekolah			Sarana Prasarana SMA
1.01.02.1.01.42 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	31 Sekolah			Sarana Prasarana SMA
1.01.02.1.01.43 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	31 Sekolah			Sarana Prasarana SMA
1.01.02.1.01.44 Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	31 Sekolah			Sarana Prasarana SMA
1.01.02.1.01.45 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas					
1.01.02.1.01.46 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	14 sekolah			Sarana Prasarana SMA
1.01.02.1.01.47 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				Peserta Didik SMA dan PTK SMA

			1.01.02.1.01.48 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumla Dokumen Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	I Kegiatan			Satuan Pendidikan Menengah Atas
			1.01.02.1.01.49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang mendapatkan pembinaan, pengembangan prestasi dibidang sains, dan seni olimpiade, olahraga	500 Siswa			Peserta Didik SMA dan PTK SMA
			1.01.02.1.01.50 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Tersedianya Jumlah Pendidik dan Tenaga kependidikan	611 PTK			PTK SMA
			1.01.02.1.01.51 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				Satuan Pendidikan Menengah Atas
			1.01.02.1.01.52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah sekolah yang mendapat Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	227 Sekolah			Satuan Pendidikan Menengah Atas
			1.01.02.1.01.53 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang tersalurkan Dana Bos	227 Sekolah			Satuan Pendidikan Menengah Atas
			1.01.02.1.01.54 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang tersalurkan Dana Bos	227 Sekolah			Satuan Pendidikan

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	OUTPUT		OUTCOME		SASARAN (PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN)	
	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		
1	2	3	4	5	6	
	Sekolah Menengah Atas				Menengah Atas	
	1.01.02.1.01.55 Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pemeliharaan Mebel Sekolah	31 Sekolah		Sarana Prasarana SMA	
	1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Menengah Kejuruan (%)	100%	Persentase SMK Yang Memenuhi SPM dan 8 SNP	100%	Jenjang Pendidikan SMK baik Negeri dan Swasta
	1.01.02.1.02.01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)			Sarana Prasarana SMK	
	1.01.02.1.02.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah SMK yang Terpenuhi Penambahan Ruang Kelas Sekolah	25 Sekolah		Sarana Prasarana SMK	
	1.01.02.1.02.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah SMK yang Terpenuhi Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	25 Sekolah		Sarana Prasarana SMK	
	1.01.02.1.02.04 Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah SMK yang Terpenuhi Pembangunan Ruang Praktik Siswa	25 Sekolah		Sarana Prasarana SMK	
	1.01.02.1.02.05 Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah SMK yang Terpenuhi Pembangunan Ruang Laboratorium	25 Sekolah		Sarana Prasarana SMK	
	1.01.02.1.02.06 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah SMK yang Terpenuhi Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	25 Sekolah		Sarana Prasarana SMK	
	1.01.02.1.02.07 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah SMK yang Terpenuhi Pembangunan Perpustakaan Sekolah	25 Sekolah		Sarana Prasarana SMK	
	1.01.02.1.02.08 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah SMK yang Terpenuhi Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	25 Sekolah		Sarana Prasarana SMK	
	1.01.02.1.02.09 Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah SMK yang Terpenuhi Pembangunan Asrama Sekolah	25 Sekolah		Sarana Prasarana SMK	
	1.01.02.1.02.10 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah SMK yang Terpenuhi Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	25 Sekolah		Sarana Prasarana SMK	
	1.01.02.1.02.11 Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah SMK yang Terpenuhi Pembangunan Fasilitas Parkir	25 Sekolah		Sarana Prasarana SMK	
	1.01.02.1.02.12 Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah SMK yang Terpenuhi Pembangunan Kantin Sekolah	25 Sekolah		Sarana Prasarana SMK	
	1.01.02.1.02.13 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah SMK yang Terpenuhi Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	25 Sekolah		Sarana Prasarana SMK	
	1.01.02.1.02.14 Pembangunan Ruang/Sudut Baca	Jumlah SMK yang Terpenuhi Pembangunan Ruang/Sudut Baca	25 Sekolah		Sarana Prasarana SMK	
	1.01.02.1.02.15 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah SMK yang Terpenuhi Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	25 Sekolah		Sarana Prasarana SMK	
	1.01.02.1.02.16 Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah SMK yang Terpenuhi Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	25 Sekolah		Sarana Prasarana SMK	
	1.01.02.1.02.17 Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Jumlah SMK yang Terpenuhi Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	25 Sekolah		Sarana Prasarana SMK	

			1.01.02.1.02.18 Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah SMK yang Terpenuhi Rehabilitasi Ruang Laboratorium	25 Sekolah			Sarana Prasarana SMK
			1.01.02.1.02.19 Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah SMK yang Terpenuhi Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	25 Sekolah			Sarana Prasarana SMK
			1.01.02.1.02.20 Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah SMK yang Terpenuhi Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	25 Sekolah			Sarana Prasarana SMK
			1.01.02.1.02.21 Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah SMK yang Terpenuhi Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula	25 Sekolah			Sarana Prasarana SMK
			1.01.02.1.02.22 Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah SMK yang Terpenuhi Rehabilitasi Asrama Sekolah	25 Sekolah			Sarana Prasarana SMK
			1.01.02.1.02.23 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah SMK yang Terpenuhi Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	25 Sekolah			Sarana Prasarana SMK
			1.01.02.1.02.24 Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Jumlah SMK yang Terpenuhi Rehabilitasi Fasilitas Parkir	25 Sekolah			Sarana Prasarana SMK
			1.01.02.1.02.25 Rehabilitasi Kantin Sekolah	Jumlah SMK yang Terpenuhi Rehabilitasi Kantin Sekolah	25 Sekolah			Sarana Prasarana SMK
			1.01.02.1.02.26 Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah SMK yang Terpenuhi Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	25 Sekolah			Sarana Prasarana SMK

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	OUTPUT		OUTCOME		SASARAN (PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN)
	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
1	2	3	4	5	6
	1.01.02.1.02.27 Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca	Jumlah SMK yang Terpenuhi Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca	25 Sekolah		Sarana Prasarana SMK
	1.01.02.1.02.28 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah SMK yang Terpenuhi Pengadaan Mebel Sekolah	25 Sekolah		Sarana Prasarana SMK
	1.01.02.1.02.29 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah SMK yang Terpenuhi Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	25 Sekolah		Sarana Prasarana SMK
	1.01.02.1.02.30 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah SMK yang Terpenuhi Pengadaan Perlengkapan Sekolah	25 Sekolah		Sarana Prasarana SMK
	1.01.02.1.02.31 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah SMK yang Terpenuhi Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			Sarana Prasarana SMK
	1.01.02.1.02.32 Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah SMK yang Terpenuhi Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah			Sarana Prasarana SMK
	1.01.02.1.02.33 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah SMK yang Terpenuhi Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			Sarana Prasarana SMK
	1.01.02.1.02.34 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah SMK yang Terpenuhi Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah			Sarana Prasarana SMK
	1.01.02.1.02.35 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah SMK yang Terpenuhi Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			Sarana Prasarana SMK
	1.01.02.1.02.36 Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah SMK yang Terpenuhi Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah			Sarana Prasarana SMK
	1.01.02.1.02.37 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah SMK yang Terpenuhinya Tersedianya P Biaya Personil Peserta Didik SMK Yang Putus Sekolah dan Tidak Mampu (Pemenuhan SPM)	5400		Peserta Didik SMK Yang Putus Sekolah dan Tidak Mampu
	1.01.02.1.02.38 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah SMK yang Terpenuhi Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa			Sarana Prasarana SMK
	1.01.02.1.02.39 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terimplementasinya kurikulum pembelajaran secara maksimal pada Satuan Pendidikan SMK	185 Sekolah		Peserta Didik SMK dan PTK SMK
	1.01.02.1.02.40 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Dokumen Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	185 Sekolah		Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
	1.01.02.1.02.41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah pembinaan, pengembangan prestasi dibidang sains, dan seni olimpiade, olahraga, sains, dan seni	2035		Peserta Didik SMK dan PTK SMK
	1.01.02.1.02.42 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya Jumlah Pendidik dan Tenaga kependidikan	611 PTK		PTK SMK
	1.01.02.1.02.43 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Pengembangan dan Pembinaan Guru SMK	304		PTK SMK

			1.01.02.1.02.44 Pembangunan Bengkel/Unit Produksi	Jumlah SMK yang Terpenuhi Pembangunan Bengkel/Unit Produksi				Sarana Prasarana SMK
			1.01.02.1.02.45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Serta Manajemen Pengelolaan Pendidikan Menengah Kejuruan	185 Sekolah			Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
			1.01.02.1.02.46 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang tersalurkan Dana Bos	185 Sekolah			Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
			1.01.02.1.02.47 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang tersalurkan Dana Bos	185 Sekolah			Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
			1.01.02.1.02.48 Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah SMK yang Terpenuhi Pemeliharaan Mebel Sekolah				Sarana Prasarana SMK
			1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Khusus (%)	100%	Persentase SLB Yang Memenuhi SPM dan 8 SNP	100%	Jenjang Pendidikan Khusus baik Negeri dan Swasta
			1.01.02.1.03.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)				Sarana Prasarana SLB

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				OUTPUT		OUTCOME		SASARAN (PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN)
				INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
1				2	3	4	5	6
			1.01.02.1.03.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Penambahan Ruang Kelas Sekolah				Sarana Prasarana SLB
			1.01.02.1.03.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				Sarana Prasarana SLB
			1.01.02.1.03.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				Sarana Prasarana SLB
			1.01.02.1.03.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pembangunan Perpustakaan Sekolah				Sarana Prasarana SLB
			1.01.02.1.03.06 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula				Sarana Prasarana SLB
			1.01.02.1.03.07 Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pembangunan Asrama Sekolah				Sarana Prasarana SLB
			1.01.02.1.03.08 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				Sarana Prasarana SLB
			1.01.02.1.03.09 Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pembangunan Fasilitas Parkir				Sarana Prasarana SLB
			1.01.02.1.03.10 Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pembangunan Kantin Sekolah				Sarana Prasarana SLB
			1.01.02.1.03.11 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah				Sarana Prasarana SLB
			1.01.02.1.03.12 Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pembangunan Ruang Laboratorium				Sarana Prasarana SLB
			1.01.02.1.03.13 Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas				Sarana Prasarana SLB
			1.01.02.1.03.14 Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)				Sarana Prasarana SLB
			1.01.02.1.03.15 Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita ©				Sarana Prasarana SLB
			1.01.02.1.03.16 Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)				Sarana Prasarana SLB
			1.01.02.1.03.17 Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras ©				Sarana Prasarana SLB
			1.01.02.1.03.18 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah				Sarana Prasarana SLB
			1.01.02.1.03.19 Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah SLB yang Terpenuhi Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				Sarana Prasarana SLB

			1.01.02.1.03.20 Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah				Sarana Prasarana SLB
			1.01.02.1.03.21 Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah				Sarana Prasarana SLB
			1.01.02.1.03.22 Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah SLB yang Terpenuhi Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula				Sarana Prasarana SLB
			1.01.02.1.03.23 Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Rehabilitasi Asrama Sekolah				Sarana Prasarana SLB
			1.01.02.1.03.24 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				Sarana Prasarana SLB
			1.01.02.1.03.25 Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Jumlah SLB yang Terpenuhi Rehabilitasi Fasilitas Parkir				Sarana Prasarana SLB
			1.01.02.1.03.26 Rehabilitasi Kantin Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Rehabilitasi Kantin Sekolah				Sarana Prasarana SLB
			1.01.02.1.03.27 Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah				Sarana Prasarana SLB
			1.01.02.1.03.28 Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah SLB yang Terpenuhi Rehabilitasi Ruang Laboratorium				Sarana Prasarana SLB
			1.01.02.1.03.29 Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah SLB yang Terpenuhi Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus				Sarana Prasarana SLB

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	OUTPUT		OUTCOME		SASARAN (PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN)
	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
1	2	3	4	5	6
	1.01.02.1.03.30 Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas	Jumlah SLB yang Terpenuhi Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas			Sarana Prasarana SLB
	1.01.02.1.03.31 Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Jumlah SLB yang Terpenuhi Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)			Sarana Prasarana SLB
	1.01.02.1.03.32 Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Jumlah SLB yang Terpenuhi Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita ©			Sarana Prasarana SLB
	1.01.02.1.03.33 Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Jumlah SLB yang Terpenuhi Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)			Sarana Prasarana SLB
	1.01.02.1.03.34 Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Jumlah SLB yang Terpenuhi Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras ©			Sarana Prasarana SLB
	1.01.02.1.03.35 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pengadaan Mebel Sekolah			Sarana Prasarana SLB
	1.01.02.1.03.36 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah			Sarana Prasarana SLB
	1.01.02.1.03.37 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pengadaan Perlengkapan Sekolah			Sarana Prasarana SLB
	1.01.02.1.03.38 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			Sarana Prasarana SLB
	1.01.02.1.03.39 Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah			Sarana Prasarana SLB
	1.01.02.1.03.40 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			Sarana Prasarana SLB
	1.01.02.1.03.41 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah			Sarana Prasarana SLB
	1.01.02.1.03.42 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			Sarana Prasarana SLB
	1.01.02.1.03.43 Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah			Sarana Prasarana SLB
	1.01.02.1.03.44 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah SLB yang Terpenuhi Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus			Sarana Prasarana SLB
	1.01.02.1.03.45 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa			Sarana Prasarana SLB
	1.01.02.1.03.46 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terimplementasinya kurikulum pembelajaran secara maksimal pada Satuan Pendidikan SLB	30 Sekolah		Peserta Didik SLB dan PTK SLB
	1.01.02.1.03.47 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Tersedianya Dokumen Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	30 Sekolah		Sarana Prasarana SLB

			1.01.02.1.03.48 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terwujudnya pembinaan, pengembangan prestasi dibidang sains, dan seni olimpiade, olahraga, sains, dan seni	330			Peserta Didik SLB dan PTK SLB
			1.01.02.1.03.49 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Terlaksanya Pengembangan dan Pembinaan Guru SLB	94 Orang			PTK SLB
			1.01.02.1.03.50 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Terlaksanya Pengembangan dan Pembinaan Guru SLB	94 Orang			PTK SLB
			1.01.02.1.03.51 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Terlaksananya pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Serta Manajemen Pengelolaan Pendidikan Khusus	30 Sekolah			Satuan Pendidikan Khusus
			1.01.02.1.03.52 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang tersalurkan Dana Bos	30 Sekolah			Satuan Pendidikan Khusus
			1.01.02.1.03.53 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang tersalurkan Dana Bos	30 Sekolah			Satuan Pendidikan Khusus
			1.01.02.1.03.54 Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pemeliharaan Mebel Sekolah				Sarana Prasarana SLB

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			OUTPUT		OUTCOME		SASARAN (PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN)
			INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
1			2	3	4	5	6
1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			Persentase Terlaksananya Pemenuhan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pada Jenjang Pendidikan Menengah (SMA, SMK) dan Jenjang Pendidikan Khusus (%)	100%			
1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah			Jumlah Dokumen Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	2 Dokumen	Terlaksananya Pembinaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	100%	Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
		1.01.03.1.01.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	2 Kegiatan			Peserta Didik SMA, SMK dan PTK SMA, SMK
		1.01.03.1.01.02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kegiatan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	2 Kegiatan			Peserta Didik SMA, SMK dan PTK SMA, SMK
		1.01.03.1.01.03 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				Peserta Didik SMA, SMK dan PTK SMA, SMK
		1.01.03.1.01.04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	2 Kegiatan			PTK SMA, SMK
1.01.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus			Jumlah Dokumen Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan khusus	2 Dokumen	Terlaksananya Pembinaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan khusus	100%	Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan khusus
		1.01.03.1.02.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus				Peserta Didik SLB dan PTK SLB
		1.01.03.1.02.02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kegiatan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus				Peserta Didik SLB dan PTK SLB
		1.01.03.1.02.03 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kegiatan Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				Peserta Didik SLB dan PTK SLB
		1.01.03.1.02.04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus				PTK SLB
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			Persentase Pemerataan dan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	100%			

		1.01.04.1.01 Pindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Dokumen Pemetaan distribusi PTK	2 Dokumen	Terpenuhinya Pemerataan dan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100%	Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		1.01.04.1.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	2 Kegiatan			PTK Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
		1.01.04.1.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	2 Kegiatan			PTK Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
		1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Terlaksananya Pengendalian Perizinan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Yang Dilaksanakan Oleh Masyarakat	100%			

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			OUTPUTE		OUTCOME		SASARAN (PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN)
			INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
1			2	3	4	5	6
		1.01.05.1.01 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Izin Sekolah Swasta pada jenjang Pendidikan Menengah Yang Diterbitkan	30 Izin Sekolah Swasta pada jenjang Pendidikan Menengah	Terlaksananya Penerbitan Izin Sekolah Swasta pada Jenjang Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100%	Sekola Swasta Pada Jenjang Pendidikan Menengah
		1.01.05.1.01.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	2 Kegiatan			Satuan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
		1.01.05.1.01.02 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				Satuan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
		1.01.05.1.02 Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Izin Sekolah Swasta pada jenjang Pendidikan Khhusus Yang Diterbitkan	30 Izin Sekolah Swasta pada jenjang Pendidikan Khusus	Terlaksananya Penerbitan Izin Sekolah Swasta pada Jenjang Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100%	Sekola Swasta Pada Jenjang Pendidikan Khusus
		1.01.05.1.02.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				Sekola Swasta Pada Jenjang Pendidikan Khusus
		1.01.05.1.02.02 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				Sekola Swasta Pada Jenjang Pendidikan Khusus
		1.01.05.1.02.03 Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				Sekola Swasta Pada Jenjang Pendidikan Khusus
		1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Terlaksananya Pengembangan Bahasa Dan Sastra Daerah	100%			
		1.01.06.1.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan	2 Bahasa dan Sastra Daerah Pembinaan, Pengembangan	Terlaksananya Kegiatan Pemenuhan Pembinaan Bahasa dan Sastra Daerah	100%	Bahasa dan Sastra daera kewenananan provinsi

			1.01.06.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Provinsi				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 13 Kabupaten/ Kota
			1.01.06.1.01.02 Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Kegiatan Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	2 Kegiatan			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 13 Kabupaten/ Kota
			1.01.06.1.01.03 Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Kegiatan Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 13 Kabupaten/ Kota
			1.01.06.1.01.04 Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Kegiatan Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 13 Kabupaten/ Kota
			1.01.06.1.01.05 Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi	Jumlah Kegiatan Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 13 Kabupaten/ Kota

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			OUTPUTE		OUTCOME		SASARAN (PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN)
			INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
1			2	3	4	5	6
		1.01.06.1.01.06 Peningkatan Apresiasi Siswa terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Kegiatan Peningkatan Apresiasi Siswa terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 13 Kabupaten/ Kota
		1.01.06.1.01.07 Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Kegiatan Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 13 Kabupaten/ Kota
2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							
		2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Kebudayaan	100%			Peningkatan Pengembangan Budaya Sulawesi Tengah
		<i>2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	<i>Jumlah kegiatan Pengelolaan Kebudayaan</i>	<i>2 kegiatan</i>	<i>Meningkatnya Kesadaran Terhadap Budaya untuk Perkuatan Karakter Bangsa</i>	<i>100%</i>	<i>Komunitas Kebudayaan</i>
		2.22.02.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	2 Kegiatan			Pelaku Kebudayaan
		2.22.02.1.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	2 Kegiatan			Pelaku Kebudayaan
		2.22.02.1.01.03 Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana taman budaya	Jumlah Kegiatan Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana taman budaya				Taman Budaya
		<i>2.22.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi</i>	<i>Jumlah kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional</i>	<i>2 kegiatan Pelestarian</i>	<i>Meningkatnya Kesadaran Terhadap Pelestarian Kesenian Tradisional untuk Perkuatan Karakter Bangsa</i>	<i>100%</i>	<i>Komunitas Seni</i>

			2.22.02.1.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	2 Kegiatan			Pelaku Kesenian
			2.22.02.1.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2 Kegiatan			Pelaku Kesenian
			2.22.02.1.02.03 Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Kegiatan Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	2 Kegiatan			Pelaku Kesenian
			2.22.02.1.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Lembaga Adat Yang Dibina	2 Lembaga Adat	Meningkatnya Kesadaran Terhadap Lembaga Adat untuk Perkuatan Karakter Bangsa	100%	Lembaga adat
			2.22.02.1.03.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	2 Kegiatan			Lembaga Adat
			2.22.02.1.03.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	2 Kegiatan			Lembaga Adat

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				OUTPUT		OUTCOME		SASARAN (PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN)
				INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
1				2	3	4	5	6
			2.22.02.1.03.03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat				Lembaga Adat
2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	100%			Peningkatan Kesenian Tradisional Sulawesi Tengah
			2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pembinaan Kesenian	2 kegiatan	Meningkatnya Kesadaran Terhadap Pelestarian Kesenian Tradisional untuk Perkuatan Karakter Bangsa	100%	Komunitas Seni
			2.22.03.1.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	2 Kegiatan			Pelaku Kesenian
			2.22.03.1.01.02 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Kegiatan Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan				Pelaku Kesenian
			2.22.03.1.01.03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional				Pelaku Kesenian
2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				Persentase Pembinaan Sejarah	100%			Peningkatan Pembinaan Sejarah Sulawesi Tengah
			2.22.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal	2 kegiatan	Meningkatnya Apresiasi Masyarakat kepada Sejarah Daerah	100%	Komunitas Sejarah 13 Kab/ Kota
			2.22.04.1.01.01 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	2 Kegiatan			Pelaku Sejarah
			2.22.04.1.01.02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah				
			2.22.04.1.01.03 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Kegiatan Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	2 Kegiatan			Masyarakat dan Pelaku Sejarah
			2.22.04.1.01.04 Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal				Masyarakat dan Pelaku Sejarah

		2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	100%		Peningkatan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Sulawesi Tengah	
		2.22.05.1.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah kegiatan Penetapan Cagar Budaya	2 kegiatan	Persentase Bertambahnya Benda Situs dan Cagar Budaya	100%	Cagar Budaya
		2.22.05.1.01.01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Kegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	2 Kegiatan			Cagar Budaya 13 Kabupaten/ Kota
		2.22.05.1.01.02 Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Kegiatan Penetapan Cagar Budaya	2 Kegiatan			Cagar Budaya 13 Kabupaten/ Kota
		2.22.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya	2 kegiatan	Persentase Bertambahnya Benda Situs dan Cagar Budaya	100%	Cagar Budaya
		2.22.05.1.02.01 Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya	2 Kegiatan			Cagar Budaya 13 Kabupaten/ Kota
		2.22.05.1.02.02 Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya				Cagar Budaya 13 Kabupaten/ Kota
		2.22.05.1.02.03 Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Kegiatan Pemanfaatan Cagar Budaya				Cagar Budaya 13 Kabupaten/ Kota

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				OUTPUT		OUTCOME		SASARAN (PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN)
				INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
1				2	3	4	5	6
			2.22.05.1.02.04 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya				Cagar Budaya 13 Kabupaten/ Kota
			2.22.05.1.03 Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah	2 kegiatan	Persentase Bertambahnya Benda Situs dan Cagar Budaya	100%	Cagar Budaya
			2.22.05.1.03.01 Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi				Cagar Budaya 13 Kabupaten/ Kota
			2.22.05.1.03.02 Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	2 Kegiatan			Cagar Budaya 13 Kabupaten/ Kota
X								
X.XX								
			X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terlaksananya PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	100%			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah	3 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			X.XX.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Dokumen	100%			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			X.XX.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen	100%			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			X.XX.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen	100%			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			X.XX.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen	100%			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			X.XX.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen	100%			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			X.XX.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tercapainya Penyusunan Pelaporan	100%			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

		X.XX.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja	100%			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusnya Dokumen Keuangan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah	3 Dokumen	Tersedianya Dokumen Keuangan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		X.XX.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji Pegawai yang di Bayarkan	5300 Orang			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		X.XX.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		X.XX.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		X.XX.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		X.XX.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				OUTPUT		OUTCOME		SASARAN (PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN)
				INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
1				2	3	4	5	6
			X.XX.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			X.XX.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			X.XX.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen BMD di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen BMD di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			X.XX.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			X.XX.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			X.XX.01.1.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			X.XX.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			X.XX.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			X.XX.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			X.XX.01.1.03.07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			X.XX.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Pendapatan Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Pendapatan Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			X.XX.01.1.04.01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			X.XX.01.1.04.02 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			X.XX.01.1.04.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

		X.XX.01.1.04.04 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		X.XX.01.1.04.05 Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Kegiatan Pengolahan Data Retribusi Daerah				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		X.XX.01.1.04.06 Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Kegiatan Penetapan Wajib Retribusi Daerah				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		X.XX.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		<i>X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Tersusnya Dokumen Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah</i>	<i>100%</i>	<i>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</i>
		X.XX.01.1.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				OUTPUT		OUTCOME		SASARAN (PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN)
				INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
1				2	3	4	5	6
			X.XX.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			X.XX.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			X.XX.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			X.XX.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			X.XX.01.1.05.06 Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Pensiun				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			X.XX.01.1.05.07 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			X.XX.01.1.05.08 Pemindehan Tugas ASN	Jumlah Kegiatan Pemindehan Tugas ASN				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			X.XX.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			X.XX.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			X.XX.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan layanan administrasi umum perkantoran di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah	12 Kegiatan	Tersedianya layanan administrasi umum perkantoran di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			X.XX.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			X.XX.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			X.XX.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			X.XX.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			X.XX.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

		X.XX.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		X.XX.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan/Material			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		X.XX.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		X.XX.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		X.XX.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		X.XX.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		<i>X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah</i>	<i>10 Kegiatan</i>	<i>Tersedianya layanan Barang Milik Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi</i>	<i>100%</i>	<i>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</i>

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			OUTPUT		OUTCOME		SASARAN (PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN)
			INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
1			2	3	4	5	6
					<i>Tengah</i>		
		X.XX.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		X.XX.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		X.XX.01.1.07.03 Pengadaan Alat Besar	Jumlah Kegiatan Pengadaan Alat Besar				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		X.XX.01.1.07.04 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		X.XX.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Kegiatan Pengadaan Mebel				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		X.XX.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		X.XX.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		X.XX.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		X.XX.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		X.XX.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		X.XX.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah	28 Kegiatan	Tersedianya layanan Jasa Penunjang di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		X.XX.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		X.XX.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		X.XX.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

		X.XX.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		<i>X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah</i>	<i>10 Kegiatan</i>	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah</i>	<i>100%</i>	<i>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</i>
		X.XX.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		X.XX.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		X.XX.01.1.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				OUTPUT		OUTCOME		SASARAN (PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN)
				INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
1				2	3	4	5	6
			X.XX.01.1.09.04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			X.XX.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Mebel				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			X.XX.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			X.XX.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			X.XX.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			X.XX.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			X.XX.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			X.XX.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			X.XX.01.1.09.12 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
II. UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM								
			2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
			2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					
			2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	100%			Peningkatan Kesenian Tradisional Sulawesi Tengah

		2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pembinaan Kesenian	2 kegiatan	Meningkatnya Kesadaran Terhadap Pelestarian Kesenian Tradisional untuk Perkuatan Karakter Bangsa	100%	Komunitas Seni
		2.22.03.1.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	2 Kegiatan			Pelaku Kesenian
		2.22.03.1.01.02 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Kegiatan Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan				Pelaku Kesenian
		2.22.03.1.01.03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional				Pelaku Kesenian
		2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	PERSENTASE PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	100%			Peningkatan PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
		2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Museum	2 kegiatan	Terlaksanannya Pengelolaan Museum	100%	Museum

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				OUTPUT		OUTCOME		SASARAN (PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN)
				INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
1				2	3	4	5	6
			2.22.06.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu				Museum
			2.22.06.1.01.02 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman				Museum
			2.22.06.1.01.03 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum				Museum
			2.22.06.1.01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum				Museum
			2.22.06.1.01.05 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Kegiatan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum				Museum
X								
X.XX								
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Persentase Terlaksananya PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PADA KANTOR UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM	100%			UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
		X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi di Lingkungan UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM	3 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi di Lingkungan UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM	100%	UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
			X.XX.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen	100%			UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
			X.XX.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen	100%			UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
			X.XX.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen	100%			UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
			X.XX.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen	100%			UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
			X.XX.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tercapainya Penyusunan Pelaporan	100%			UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
			X.XX.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja	100%			UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM

		<i>X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Tersusunnya Dokumen Keuangan di Lingkungan UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM</i>	<i>3 Dokumen</i>	<i>Tersedianya Dokumen Keuangan di Lingkungan UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM</i>	<i>100%</i>	<i>UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM</i>
		X.XX.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
		X.XX.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
		X.XX.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
		X.XX.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
		X.XX.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
		<i>X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian di Lingkungan UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian di</i>	<i>100%</i>	<i>UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM</i>

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			OUTPUT		OUTCOME		SASARAN (PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN)	
			INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		
1	2	3	4	5	6			
						<i>Lingkungan UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM</i>		
		X.XX.01.1.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM	
		X.XX.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM	
		X.XX.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM	
		X.XX.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM	
		X.XX.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM	
		X.XX.01.1.05.06 Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Pensiun				UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM	
		X.XX.01.1.05.07 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM	
		X.XX.01.1.05.08 Pemindahan Tugas ASN	Jumlah Kegiatan Pemindahan Tugas ASN				UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM	
		X.XX.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM	
		X.XX.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM	
		X.XX.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM	
		X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan layanan administrasi umum perkantoran di Lingkungan UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM	12 Kegiatan		Tersedianya layanan administrasi umum perkantoran di Lingkungan UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM	100%	UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
		X.XX.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM	
		X.XX.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM	
		X.XX.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM	

			X.XX.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor				UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
			X.XX.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan				UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
			X.XX.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
			X.XX.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan/Material				UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
			X.XX.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu				UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
			X.XX.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
			X.XX.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
			X.XX.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		OUTPUT		OUTCOME		SASARAN (PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN)	
		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		
1		2	3	4	5	6	
		X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang di Lingkungan UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM	10 Kegiatan	Tersedianya layanan Barang Milik Daerah di Lingkungan UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM	100%	UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
		X.XX.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
		X.XX.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
		X.XX.01.1.07.03 Pengadaan Alat Besar	Jumlah Kegiatan Pengadaan Alat Besar				UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
		X.XX.01.1.07.04 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
		X.XX.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Kegiatan Pengadaan Mebel				UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
		X.XX.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
		X.XX.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya				UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
		X.XX.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud				UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
		X.XX.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
		X.XX.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
		X.XX.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
		X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang di Lingkungan UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM	28 Kegiatan	Tersedianya layanan Jasa Penunjang di Lingkungan UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM	100%	UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
		X.XX.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
		X.XX.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
		X.XX.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM

			X.XX.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
			X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang di Lingkungan UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM	10 Kegiatan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Lingkungan UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM	100%	UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
			X.XX.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
			X.XX.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
			X.XX.01.1.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				OUTPUT		OUTCOME		SASARAN (PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN)
				INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
1				2	3	4	5	6
			X.XX.01.1.09.04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
			X.XX.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Mebel				UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
			X.XX.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
			X.XX.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
			X.XX.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
			X.XX.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
			X.XX.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
			X.XX.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
				Jumlah Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah				UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
III. CABANG DINAS WILAYAH I								
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								
			1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Menengah (SMA, SMK) dan Jenjang Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah I	100%			Peningkatan Kualitas Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah I

		1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Menengah Atas di Cabang Dinas Wilayah I (%)	100%	Persentase SMA Yang Memenuhi SPM dan 8 SNP di Cabang Dinas Wilayah I	100%	Jenjang Pendidikan SMA baik Negeri dan Swasta di Cabang Dinas Wilayah I
		1.01.02.1.01.47 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				Peserta Didik SMA dan PTK SMA
		1.01.02.1.01.48 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah Dokumen Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	227 Sekolah			Satuan Pendidikan Menengah Atas
		1.01.02.1.01.49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang mendapatkan pembinaan, pengembangan prestasi dibidang sains, dan seni olimpiade, olahraga	2497 Siswa			Peserta Didik SMA dan PTK SMA
		1.01.02.1.01.50 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Tersedianya Jumlah Pendidik dan Tenaga kependidikan	611 PTK			PTK SMA
		1.01.02.1.01.51 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				Satuan Pendidikan Menengah Atas

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				OUTPUT		OUTCOME		SASARAN (PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN)
				INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
1				2	3	4	5	6
			1.01.02.1.01.52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah sekolah yang mendapat Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	227 Sekolah			Satuan Pendidikan Menengah Atas
			1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Menengah Kejuruan (%) di Cabang Dinas Wilayah I (%)	100%	Persentase SMK Yang Memenuhi SPM dan 8 SNP di Cabang Dinas Wilayah I (%)	100%	Jenjang Pendidikan SMK baik Negeri dan Swasta di Cabang Dinas Wilayah I
			1.01.02.1.02.39 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terimplementasinya kurikulum pembelajaran secara maksimal pada Satuan Pendidikan SMK	185 Sekolah			Peserta Didik SMK dan PTK SMK
			1.01.02.1.02.40 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Dokumen Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	185 Sekolah			Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
			1.01.02.1.02.41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah pembinaan, pengembangan prestasi dibidang sains, dan seni olimpiade, olahraga, sains, dan seni	2035			Peserta Didik SMK dan PTK SMK
			1.01.02.1.02.42 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya Jumlah Pendidik dan Tenaga kependidikan	611 PTK			PTK SMK
			1.01.02.1.02.43 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Pengembangan dan Pembinaan Guru SMK	304			PTK SMK
			1.01.02.1.02.45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Serta Manajemen Pengelolaan Pendidikan Menengah Kejuruan	185 Sekolah			Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
			1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah I (%)	100%	Persentase SLB Yang Memenuhi SPM dan 8 SNP di Cabang Dinas Wilayah I (%)	100%	Jenjang Pendidikan Khusus baik Negeri dan Swasta di Cabang Dinas Wilayah I
			1.01.02.1.03.47 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Tersedianya Dokumen Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	30 Sekolah			Sarana Prasarana SLB
			1.01.02.1.03.48 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terwujudnya pembinaan, pengembangan prestasi dibidang sains, dan seni olimpiade, olahraga, sains, dan seni	330			Peserta Didik SLB dan PTK SLB
			1.01.02.1.03.49 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Pengembangan dan Pembinaan Guru SLB	94 Orang			PTK SLB

		1.01.02.1.03.50 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Terlaksanya Pengembangan dan Pembinaan Guru SLB	94 Orang			PTK SLB
		1.01.02.1.03.51 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Terlaksananya pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Serta Manajemen Pengelolaan Pendidikan Khusus	30 Sekolah			Satuan Pendidikan Khusus
X							
X.XX							
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terlaksananya PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PADA KANTOR CABANG DINAS WILAYAH I	100%			CABANG DINAS WILAYAH I
		<i>X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH I</i>	<i>3 Dokumen</i>	<i>Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi di Lingkungan</i>	<i>100%</i>	<i>CABANG DINAS WILAYAH I</i>

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			OUTPUT		OUTCOME		SASARAN (PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN)
			INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
1			2	3	4	5	6
						CABANG DINAS WILAYAH I	
		X.XX.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen	100%			CABANG DINAS WILAYAH I
		X.XX.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen	100%			CABANG DINAS WILAYAH I
		X.XX.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen	100%			CABANG DINAS WILAYAH I
		X.XX.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen	100%			CABANG DINAS WILAYAH I
		X.XX.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tercapainya Penyusunan Pelaporan	100%			CABANG DINAS WILAYAH I
		X.XX.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja	100%			CABANG DINAS WILAYAH I
		X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunya Dokumen Keuangan di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH I	3 Dokumen	Tersedianya Dokumen Keuangan di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH I	100%	CABANG DINAS WILAYAH I
		X.XX.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				CABANG DINAS WILAYAH I
		X.XX.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				CABANG DINAS WILAYAH I
		X.XX.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				CABANG DINAS WILAYAH I
		X.XX.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				CABANG DINAS WILAYAH I
		X.XX.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				CABANG DINAS WILAYAH I
		X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunya Dokumen Administrasi Kepegawaian di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH I	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH I	100%	CABANG DINAS WILAYAH I
		X.XX.01.1.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				CABANG DINAS WILAYAH I
		X.XX.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				CABANG DINAS WILAYAH I

			X.XX.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				CABANG DINAS WILAYAH I
			X.XX.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				CABANG DINAS WILAYAH I
			X.XX.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				CABANG DINAS WILAYAH I
			X.XX.01.1.05.06 Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Pensiun				CABANG DINAS WILAYAH I
			X.XX.01.1.05.07 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				CABANG DINAS WILAYAH I
			X.XX.01.1.05.08 Pemindahan Tugas ASN	Jumlah Kegiatan Pemindahan Tugas ASN				CABANG DINAS WILAYAH I
			X.XX.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				CABANG DINAS WILAYAH I
			X.XX.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				CABANG DINAS WILAYAH I
			X.XX.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				CABANG DINAS WILAYAH I

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			OUTPUT		OUTCOME		SASARAN (PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN)
			INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
1	2	3	4	5	6		
	X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan layanan administrasi umum perkantoran di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH I	12 Kegiatan	Tersedianya layanan administrasi umum perkantoran di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH I	100%	CABANG DINAS WILAYAH I	
	X.XX.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				CABANG DINAS WILAYAH I	
	X.XX.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				CABANG DINAS WILAYAH I	
	X.XX.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				CABANG DINAS WILAYAH I	
	X.XX.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor				CABANG DINAS WILAYAH I	
	X.XX.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				CABANG DINAS WILAYAH I	
	X.XX.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				CABANG DINAS WILAYAH I	
	X.XX.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan/Material				CABANG DINAS WILAYAH I	
	X.XX.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu				CABANG DINAS WILAYAH I	
	X.XX.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				CABANG DINAS WILAYAH I	
	X.XX.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				CABANG DINAS WILAYAH I	
	X.XX.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				CABANG DINAS WILAYAH I	
	X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH I	10 Kegiatan	Tersedianya layanan Barang Milik Daerah di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH I	100%	CABANG DINAS WILAYAH I	
	X.XX.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				CABANG DINAS WILAYAH I	
	X.XX.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				CABANG DINAS WILAYAH I	
	X.XX.01.1.07.03 Pengadaan Alat Besar	Jumlah Kegiatan Pengadaan Alat Besar				CABANG DINAS WILAYAH I	
	X.XX.01.1.07.04 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				CABANG DINAS WILAYAH I	

		X.XX.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Kegiatan Pengadaan Mebel				CABANG DINAS WILAYAH I
		X.XX.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				CABANG DINAS WILAYAH I
		X.XX.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya				CABANG DINAS WILAYAH I
		X.XX.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud				CABANG DINAS WILAYAH I
		X.XX.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				CABANG DINAS WILAYAH I
		X.XX.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				CABANG DINAS WILAYAH I
		X.XX.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				CABANG DINAS WILAYAH I
		<i>X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH I</i>	<i>28 Kegiatan</i>	<i>Tersedianya layanan Jasa Penunjang di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH I</i>	<i>100%</i>	<i>CABANG DINAS WILAYAH I</i>

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				OUTPUT		OUTCOME		SASARAN (PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN)
				INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
1				2	3	4	5	6
			X.XX.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				CABANG DINAS WILAYAH I
			X.XX.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				CABANG DINAS WILAYAH I
			X.XX.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				CABANG DINAS WILAYAH I
			X.XX.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				CABANG DINAS WILAYAH I
			X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH I	10 Kegiatan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH I	100%	CABANG DINAS WILAYAH I
			X.XX.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				\
			X.XX.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				CABANG DINAS WILAYAH I
			X.XX.01.1.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				CABANG DINAS WILAYAH I
			X.XX.01.1.09.04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				CABANG DINAS WILAYAH I
			X.XX.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Mebel				CABANG DINAS WILAYAH I
			X.XX.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				CABANG DINAS WILAYAH I
			X.XX.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				CABANG DINAS WILAYAH I
			X.XX.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				CABANG DINAS WILAYAH I
			X.XX.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				CABANG DINAS WILAYAH I
			X.XX.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				CABANG DINAS WILAYAH I

			X.XX.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				CABANG DINAS WILAYAH I
IV. CABANG DINAS WILAYAH II								
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Menengah (SMA, SMK) dan Jenjang Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah II	100%			Peningkatan Kwalitas Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah II

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			OUTPUT		OUTCOME		SASARAN (PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN)
			INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
1			2	3	4	5	6
		1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Menengah Atas di Cabang Dinas Wilayah II (%)	100%	Persentase SMA Yang Memenuhi SPM dan 8 SNP di Cabang Dinas Wilayah II	100%	Jenjang Pendidikan SMA baik Negeri dan Swasta di Cabang Dinas Wilayah II
		1.01.02.1.01.47 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				Peserta Didik SMA dan PTK SMA
		1.01.02.1.01.48 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah Dokumen Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	227 Sekolah			Satuan Pendidikan Menengah Atas
		1.01.02.1.01.49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang mendapatkan pembinaan, pengembangan prestasi dibidang sains, dan seni olimpiade, olahraga	2497 Siswa			Peserta Didik SMA dan PTK SMA
		1.01.02.1.01.50 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Tersedianya Jumlah Pendidik dan Tenaga kependidikan	611 PTK			PTK SMA
		1.01.02.1.01.51 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				Satuan Pendidikan Menengah Atas
		1.01.02.1.01.52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah sekolah yang mendapat Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	227 Sekolah			Satuan Pendidikan Menengah Atas
		1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Menengah Kejuruan (%) di Cabang Dinas Wilayah II (%)	100%	Persentase SMK Yang Memenuhi SPM dan 8 SNP di Cabang Dinas Wilayah II (%)	100%	Jenjang Pendidikan SMK baik Negeri dan Swasta di Cabang Dinas Wilayah II
		1.01.02.1.02.39 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terimplementasinya kurikulum pembelajaran secara maksimal pada Satuan Pendidikan SMK	185 Sekolah			Peserta Didik SMK dan PTK SMK
		1.01.02.1.02.40 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Dokumen Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	185 Sekolah			Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
		1.01.02.1.02.41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah pembinaan, pengembangan prestasi dibidang sains, dan seni olimpiade, olahraga, sains, dan seni	2035			Peserta Didik SMK dan PTK SMK
		1.01.02.1.02.42 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya Jumlah Pendidik dan Tenaga kependidikan	611 PTK			PTK SMK

		1.01.02.1.02.43 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Pengembangan dan Pembinaan Guru SMK	304			PTK SMK
		1.01.02.1.02.45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Serta Manajemen Pengelolaan Pendidikan Menengah Kejuruan	185 Sekolah			Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
		1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah II (%)	100%	Persentase SLB Yang Memenuhi SPM dan 8 SNP di Cabang Dinas Wilayah II (%)	100%	Jenjang Pendidikan Khusus baik Negeri dan Swasta di Cabang Dinas Wilayah II
		1.01.02.1.03.47 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Tersedianya Dokumen Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	30 Sekolah			Sarana Prasarana SLB
		1.01.02.1.03.48 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terwujudnya pembinaan, pengembangan prestasi dibidang sains, dan seni olimpiade, olahraga, sains, dan seni	330			Peserta Didik SLB dan PTK SLB
		1.01.02.1.03.49 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Pengembangan dan Pembinaan Guru SLB	94 Orang			PTK SLB

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				OUTPUT		OUTCOME		SASARAN (PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN)
				INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
1				2	3	4	5	6
			1.01.02.1.03.50 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Pengembangan dan Pembinaan Guru SLB	94 Orang			PTK SLB
			1.01.02.1.03.51 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Terlaksananya pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Serta Manajemen Pengelolaan Pendidikan Khusus	30 Sekolah			Satuan Pendidikan Khusus
X								
X.XX								
			X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terlaksananya PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PADA KANTOR CABANG DINAS WILAYAH II	100%			CABANG DINAS WILAYAH II
			<i>X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Tersusunya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH II</i>	<i>3 Dokumen</i>	<i>Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH II</i>	<i>100%</i>	<i>CABANG DINAS WILAYAH II</i>
			X.XX.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen	100%			CABANG DINAS WILAYAH II
			X.XX.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen	100%			CABANG DINAS WILAYAH II
			X.XX.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen	100%			CABANG DINAS WILAYAH II
			X.XX.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen	100%			CABANG DINAS WILAYAH II
			X.XX.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tercapainya Penyusunan Pelaporan	100%			CABANG DINAS WILAYAH II
			X.XX.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja	100%			CABANG DINAS WILAYAH II
			X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunya Dokumen Keuangan di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH II	3 Dokumen	Tersedianya Dokumen Keuangan di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH II	100%	CABANG DINAS WILAYAH II
			X.XX.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				CABANG DINAS WILAYAH II

		X.XX.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				CABANG DINAS WILAYAH II
		X.XX.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				CABANG DINAS WILAYAH II
		X.XX.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				CABANG DINAS WILAYAH II
		X.XX.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				CABANG DINAS WILAYAH II
		X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH II	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH II	100%	CABANG DINAS WILAYAH II
		X.XX.01.1.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				CABANG DINAS WILAYAH II
		X.XX.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				CABANG DINAS WILAYAH II

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				OUTPUT		OUTCOME		SASARAN (PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN)
				INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
1				2	3	4	5	6
			X.XX.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				CABANG DINAS WILAYAH II
			X.XX.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				CABANG DINAS WILAYAH II
			X.XX.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				CABANG DINAS WILAYAH II
			X.XX.01.1.05.06 Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Pensiun				CABANG DINAS WILAYAH II
			X.XX.01.1.05.07 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				CABANG DINAS WILAYAH II
			X.XX.01.1.05.08 Pemindahan Tugas ASN	Jumlah Kegiatan Pemindahan Tugas ASN				CABANG DINAS WILAYAH II
			X.XX.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				CABANG DINAS WILAYAH II
			X.XX.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				CABANG DINAS WILAYAH II
			X.XX.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				CABANG DINAS WILAYAH II
			<i>X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Kegiatan layanan administrasi umum perkantoran di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH II</i>	<i>12 Kegiatan</i>	<i>Tersedianya layanan administrasi umum perkantoran di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH II</i>	<i>100%</i>	<i>CABANG DINAS WILAYAH II</i>
			X.XX.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				CABANG DINAS WILAYAH II
			X.XX.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				CABANG DINAS WILAYAH II
			X.XX.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				CABANG DINAS WILAYAH II
			X.XX.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor				CABANG DINAS WILAYAH II
			X.XX.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				CABANG DINAS WILAYAH II
			X.XX.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				CABANG DINAS WILAYAH II
			X.XX.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan/Material				CABANG DINAS WILAYAH II
			X.XX.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu				CABANG DINAS WILAYAH II

		X.XX.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				CABANG DINAS WILAYAH II
		X.XX.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				CABANG DINAS WILAYAH II
		X.XX.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				CABANG DINAS WILAYAH II
		<i>X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH II</i>	<i>10 Kegiatan</i>	<i>Tersedianya layanan Barang Milik Daerah di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH II</i>	<i>100%</i>	<i>CABANG DINAS WILAYAH II</i>
		X.XX.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				CABANG DINAS WILAYAH II
		X.XX.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				CABANG DINAS WILAYAH II
		X.XX.01.1.07.03 Pengadaan Alat Besar	Jumlah Kegiatan Pengadaan Alat Besar				CABANG DINAS WILAYAH II
		X.XX.01.1.07.04 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				CABANG DINAS WILAYAH II

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				OUTPUT		OUTCOME		SASARAN (PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN)
				INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
1				2	3	4	5	6
			X.XX.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Kegiatan Pengadaan Mebel				CABANG DINAS WILAYAH II
			X.XX.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				CABANG DINAS WILAYAH II
			X.XX.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya				CABANG DINAS WILAYAH II
			X.XX.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud				CABANG DINAS WILAYAH II
			X.XX.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				CABANG DINAS WILAYAH II
			X.XX.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				CABANG DINAS WILAYAH II
			X.XX.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				CABANG DINAS WILAYAH II
			X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH II	28 Kegiatan	Tersedianya layanan Jasa Penunjang di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH II	100%	CABANG DINAS WILAYAH II
			X.XX.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				CABANG DINAS WILAYAH II
			X.XX.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				CABANG DINAS WILAYAH II
			X.XX.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				CABANG DINAS WILAYAH II
			X.XX.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				CABANG DINAS WILAYAH II
			X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH II	10 Kegiatan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH II	100%	CABANG DINAS WILAYAH II
			X.XX.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				CABANG DINAS WILAYAH II
			X.XX.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				CABANG DINAS WILAYAH II

			X.XX.01.1.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				CABANG DINAS WILAYAH II
			X.XX.01.1.09.04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				CABANG DINAS WILAYAH II
			X.XX.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Mebel				CABANG DINAS WILAYAH II
			X.XX.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				CABANG DINAS WILAYAH II
			X.XX.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				CABANG DINAS WILAYAH II
			X.XX.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				CABANG DINAS WILAYAH II
			X.XX.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				CABANG DINAS WILAYAH II
			X.XX.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				CABANG DINAS WILAYAH II
			X.XX.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				CABANG DINAS WILAYAH II

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	OUTPUT		OUTCOME		SASARAN (PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN)
	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
1	2	3	4	5	6
IV. CABANG DINAS WILAYAH III					
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Menengah (SMA, SMK) dan Jenjang Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah III	100%		Peningkatan Kualitas Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah III
1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Menengah Atas di Cabang Dinas Wilayah III (%)	100%	Persentase SMA Yang Memenuhi SPM dan 8 SNP di Cabang Dinas Wilayah III	Jenjang Pendidikan SMA baik Negeri dan Swasta di Cabang Dinas Wilayah III
	1.01.02.1.01.47 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik			Peserta Didik SMA dan PTK SMA
	1.01.02.1.01.48 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah Dokumen Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	227 Sekolah		Satuan Pendidikan Menengah Atas
	1.01.02.1.01.49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang mendapatkan pembinaan, pengembangan prestasi dibidang sains, dan seni olimpiade, olahraga	2497 Siswa		Peserta Didik SMA dan PTK SMA
	1.01.02.1.01.50 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Tersedianya Jumlah Pendidik dan Tenaga kependidikan	611 PTK		PTK SMA
	1.01.02.1.01.51 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			Satuan Pendidikan Menengah Atas
	1.01.02.1.01.52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah sekolah yang mendapat Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	227 Sekolah		Satuan Pendidikan Menengah Atas

		1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Menengah Kejuruan (%) di Cabang Dinas Wilayah III (%)	100%	Persentase SMK Yang Memenuhi SPM dan 8 SNP di Cabang Dinas Wilayah III (%)	100%	Jenjang Pendidikan SMK baik Negeri dan Swasta di Cabang Dinas Wilayah III
		1.01.02.1.02.39 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terimplementasinya kurikulum pembelajaran secara maksimal pada Satuan Pendidikan SMK	185 Sekolah			Peserta Didik SMK dan PTK SMK
		1.01.02.1.02.40 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Dokumen Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	185 Sekolah			Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
		1.01.02.1.02.41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah pembinaan, pengembangan prestasi dibidang sains, dan seni olimpiade, olahraga, sains, dan seni	2035			Peserta Didik SMK dan PTK SMK
		1.01.02.1.02.42 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya Jumlah Pendidik dan Tenaga kependidikan	611 PTK			PTK SMK
		1.01.02.1.02.43 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Pengembangan dan Pembinaan Guru SMK	304			PTK SMK

OUTPUT

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1

1.01.02.1.02.45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan

1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus

1.01.02.1.03.47 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus

1.01.0
embin
Bakat
Kreati
1.01.0
nyedi
dan T
Keper
Satua
Khusu
1.01.0
Penge
Pendi
Keper

x

2

Terlaksananya pe
Pengembangan k
Serta Manajem
Pendidikan Mener

**Persentase Ter
Pemenuhan SPM d
Jenjang Pendidikan K
Dinas Wilayah**

Tersedianya Doku
Satuan Pendidid

Terwujudnya p
pengembangan pr
sains, dan seni olim
sains, dan

Terlaksana Penge
Pembinaan C

Terlaksana Penge
Pembinaan C

Terlaksananya pe
Pengembangan Kele
Manajemen Pe
Pendidikan

asta di Cabang Dinas Wilayah III

Sarana Prasarana SLB

PTK SLB

Peserta Didik SLB dan PTK SLB

Satuan Pendidikan
Khusus

PTK SLB

X.XX

X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase
PENUNJANG
PEMERINTAHAN
PADA KANTOR
WILAYAH

X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tersusunnya Dokumen
Penganggaran dan
Lingkungan CABANG DINAS

- X.XX.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
- X.XX.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- X.XX.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- X.XX.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
- X.XX.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- X.XX.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Terlaksananya Pe
Dokumen

X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Terlaksananya Pe
Dokumen

- X.XX.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- X.XX.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- X.XX.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Terlaksananya Pe
Dokumen

Terlaksananya Pe
Dokumen

Tercapainya Penyusunan

Terlaksananya Evaluasi

Tersusunnya Dokumen
Lingkungan CABANG DINAS

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				OUTPUT		OUTCOME		SASARAN (PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN)
				INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
1				2	3	4	5	6
			X.XX.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				CABANG DINAS WILAYAH III
			X.XX.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				CABANG DINAS WILAYAH III
			X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusnya Dokumen Administrasi Kepegawaian di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH III	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH III	100%	CABANG DINAS WILAYAH III
			X.XX.01.1.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				CABANG DINAS WILAYAH III
			X.XX.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				CABANG DINAS WILAYAH III
			X.XX.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				CABANG DINAS WILAYAH III
			X.XX.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				CABANG DINAS WILAYAH III
			X.XX.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				CABANG DINAS WILAYAH III
			X.XX.01.1.05.06 Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Pensiun				CABANG DINAS WILAYAH III
			X.XX.01.1.05.07 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				CABANG DINAS WILAYAH III
			X.XX.01.1.05.08 Pemindahan Tugas ASN	Jumlah Kegiatan Pemindahan Tugas ASN				CABANG DINAS WILAYAH III
			X.XX.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				CABANG DINAS WILAYAH III
			X.XX.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				CABANG DINAS WILAYAH III
			X.XX.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				CABANG DINAS WILAYAH III
			X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan layanan administrasi umum perkantoran di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH III	12 Kegiatan	Tersedianya layanan administrasi umum perkantoran di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH III	100%	CABANG DINAS WILAYAH III

			X.XX.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				CABANG DINAS WILAYAH III
			X.XX.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				CABANG DINAS WILAYAH III
			X.XX.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				CABANG DINAS WILAYAH III
			X.XX.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor				CABANG DINAS WILAYAH III
			X.XX.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				CABANG DINAS WILAYAH III
			X.XX.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				CABANG DINAS WILAYAH III
			X.XX.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan/Material				CABANG DINAS WILAYAH III
			X.XX.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu				CABANG DINAS WILAYAH III
			X.XX.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				CABANG DINAS WILAYAH III
			X.XX.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				CABANG DINAS WILAYAH III

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			OUTPUT		OUTCOME		SASARAN (PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN)
			INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
1			2	3	4	5	6
		X.XX.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				CABANG DINAS WILAYAH III
		X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH III	10 Kegiatan	Tersedianya layanan Barang Milik Daerah di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH III	100%	CABANG DINAS WILAYAH III
		X.XX.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				CABANG DINAS WILAYAH III
		X.XX.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				CABANG DINAS WILAYAH III
		X.XX.01.1.07.03 Pengadaan Alat Besar	Jumlah Kegiatan Pengadaan Alat Besar				CABANG DINAS WILAYAH III
		X.XX.01.1.07.04 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				CABANG DINAS WILAYAH III
		X.XX.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Kegiatan Pengadaan Mebel				CABANG DINAS WILAYAH III
		X.XX.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				CABANG DINAS WILAYAH III
		X.XX.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya				CABANG DINAS WILAYAH III
		X.XX.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud				CABANG DINAS WILAYAH III
		X.XX.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				CABANG DINAS WILAYAH III
		X.XX.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				CABANG DINAS WILAYAH III
		X.XX.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				CABANG DINAS WILAYAH III
		X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH III	28 Kegiatan	Tersedianya layanan Jasa Penunjang di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH III	100%	CABANG DINAS WILAYAH III
		X.XX.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				CABANG DINAS WILAYAH III
		X.XX.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				CABANG DINAS WILAYAH III
		X.XX.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				CABANG DINAS WILAYAH III

		X.XX.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				CABANG DINAS WILAYAH III
		X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH III	10 Kegiatan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH III	100%	CABANG DINAS WILAYAH III
		X.XX.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				CABANG DINAS WILAYAH III
		X.XX.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				CABANG DINAS WILAYAH III
		X.XX.01.1.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				CABANG DINAS WILAYAH III
		X.XX.01.1.09.04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				CABANG DINAS WILAYAH III

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				OUTPUT		OUTCOME		SASARAN (PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN)
				INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
1				2	3	4	5	6
			X.XX.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Mebel				CABANG DINAS WILAYAH III
			X.XX.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				CABANG DINAS WILAYAH III
			X.XX.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				CABANG DINAS WILAYAH III
			X.XX.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				CABANG DINAS WILAYAH III
			X.XX.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				CABANG DINAS WILAYAH III
			X.XX.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				CABANG DINAS WILAYAH III
			X.XX.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				CABANG DINAS WILAYAH III
IV. CABANG DINAS WILAYAH IV								
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								
			1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Menengah (SMA, SMK) dan Jenjang Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah IV	100%			Peningkatan Kualitas Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah IV
			1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Menengah Atas di Cabang Dinas Wilayah IV (%)	100%	Persentase SMA Yang Memenuhi SPM dan 8 SNP di Cabang Dinas Wilayah IV	100%	Jenjang Pendidikan SMA baik Negeri dan Swasta di Cabang Dinas Wilayah IV
			1.01.02.1.01.47 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				Peserta Didik SMA dan PTK SMA

			1.01.02.1.01.48 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumla Dokumen Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	227 Sekolah			Satuan Pendidikan Menengah Atas
			1.01.02.1.01.49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang mendapatkan pembinaan, pengembangan prestasi dibidang sains, dan seni olimpiade, olahraga	2497 Siswa			Peserta Didik SMA dan PTK SMA
			1.01.02.1.01.50 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Tersedianya Jumlah Pendidik dan Tenaga kependidikan	611 PTK			PTK SMA
			1.01.02.1.01.51 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				Satuan Pendidikan Menengah Atas
			1.01.02.1.01.52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah sekolah yang mendapat Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	227 Sekolah			Satuan Pendidikan Menengah Atas

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			OUTPUT		OUTCOME		SASARAN (PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN)
			INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
1	2	3	4	5	6		
	1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Menengah Kejuruan (%) di Cabang Dinas Wilayah IV (%)	100%	Persentase SMK Yang Memenuhi SPM dan 8 SNP di Cabang Dinas Wilayah IV (%)	100%	Jenjang Pendidikan SMK baik Negeri dan Swasta di Cabang Dinas Wilayah IV	
	1.01.02.1.02.39 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terimplementasinya kurikulum pembelajaran secara maksimal pada Satuan Pendidikan SMK	185 Sekolah			Peserta Didik SMK dan PTK SMK	
	1.01.02.1.02.40 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Dokumen Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	185 Sekolah			Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	
	1.01.02.1.02.41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah pembinaan, pengembangan prestasi dibidang sains, dan seni olimpiade, olahraga, sains, dan seni	2035			Peserta Didik SMK dan PTK SMK	
	1.01.02.1.02.42 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya Jumlah Pendidik dan Tenaga kependidikan	611 PTK			PTK SMK	
	1.01.02.1.02.43 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Pengembangan dan Pembinaan Guru SMK	304			PTK SMK	
	1.01.02.1.02.45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Serta Manajemen Pengelolaan Pendidikan Menengah Kejuruan	185 Sekolah			Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	
	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah IV (%)	100%	Persentase SLB Yang Memenuhi SPM dan 8 SNP di Cabang Dinas Wilayah IV (%)	100%	Jenjang Pendidikan Khusus baik Negeri dan Swasta di Cabang Dinas Wilayah IV	
	1.01.02.1.03.47 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Tersedianya Dokumen Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	30 Sekolah			Sarana Prasarana SLB	
	1.01.02.1.03.48 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terwujudnya pembinaan, pengembangan prestasi dibidang sains, dan seni olimpiade, olahraga, sains, dan seni	330			Peserta Didik SLB dan PTK SLB	
	1.01.02.1.03.49 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Pengembangan dan Pembinaan Guru SLB	94 Orang			PTK SLB	
	1.01.02.1.03.50 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Pengembangan dan Pembinaan Guru SLB	94 Orang			PTK SLB	

		1.01.02.1.03.51 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Terlaksananya pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Serta Manajemen Pengelolaan Pendidikan Khusus	30 Sekolah			Satuan Pendidikan Khusus
X							
X.XX							
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terlaksananya PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PADA KANTOR CABANG DINAS WILAYAH IV	100%			CABANG DINAS WILAYAH IV
		<i>X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH IV</i>	<i>3 Dokumen</i>	<i>Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH IV</i>	<i>100%</i>	<i>CABANG DINAS WILAYAH IV</i>

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				OUTPUT		OUTCOME		SASARAN (PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN)
				INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
1				2	3	4	5	6
			X.XX.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen	100%			CABANG DINAS WILAYAH IV
			X.XX.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen	100%			CABANG DINAS WILAYAH IV
			X.XX.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen	100%			CABANG DINAS WILAYAH IV
			X.XX.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen	100%			CABANG DINAS WILAYAH IV
			X.XX.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tercapainya Penyusunan Pelaporan	100%			CABANG DINAS WILAYAH IV
			X.XX.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja	100%			CABANG DINAS WILAYAH IV
			X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunya Dokumen Keuangan di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH IV	3 Dokumen	Tersedianya Dokumen Keuangan di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH IV	100%	CABANG DINAS WILAYAH IV
			X.XX.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				CABANG DINAS WILAYAH IV
			X.XX.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				CABANG DINAS WILAYAH IV
			X.XX.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				CABANG DINAS WILAYAH IV
			X.XX.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				CABANG DINAS WILAYAH IV
			X.XX.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				CABANG DINAS WILAYAH IV
			X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunya Dokumen Administrasi Kepegawaian di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH IV	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH IV	100%	CABANG DINAS WILAYAH IV
			X.XX.01.1.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				CABANG DINAS WILAYAH IV
			X.XX.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				CABANG DINAS WILAYAH IV
			X.XX.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				CABANG DINAS WILAYAH IV

		X.XX.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				CABANG DINAS WILAYAH IV
		X.XX.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				CABANG DINAS WILAYAH IV
		X.XX.01.1.05.06 Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Pensiun				CABANG DINAS WILAYAH IV
		X.XX.01.1.05.07 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				CABANG DINAS WILAYAH IV
		X.XX.01.1.05.08 Pemindehan Tugas ASN	Jumlah Kegiatan Pemindehan Tugas ASN				CABANG DINAS WILAYAH IV
		X.XX.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				CABANG DINAS WILAYAH IV
		X.XX.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				CABANG DINAS WILAYAH IV
		X.XX.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				CABANG DINAS WILAYAH IV
		X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan layanan administrasi umum perkantoran di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH IV	12 Kegiatan	Tersedianya layanan administrasi umum perkantoran di Lingkungan	100%	CABANG DINAS WILAYAH IV

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			OUTPUT		OUTCOME		SASARAN (PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN)
			INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
1			2	3	4	5	6
						CABANG DINAS WILAYAH IV	
		X.XX.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				CABANG DINAS WILAYAH IV
		X.XX.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				CABANG DINAS WILAYAH IV
		X.XX.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				CABANG DINAS WILAYAH IV
		X.XX.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor				CABANG DINAS WILAYAH IV
		X.XX.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				CABANG DINAS WILAYAH IV
		X.XX.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				CABANG DINAS WILAYAH IV
		X.XX.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan/Material				CABANG DINAS WILAYAH IV
		X.XX.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu				CABANG DINAS WILAYAH IV
		X.XX.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				CABANG DINAS WILAYAH IV
		X.XX.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				CABANG DINAS WILAYAH IV
		X.XX.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				CABANG DINAS WILAYAH IV
		X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH IV	10 Kegiatan	Tersedianya layanan Barang Milik Daerah di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH IV	100%	CABANG DINAS WILAYAH IV
		X.XX.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				CABANG DINAS WILAYAH IV
		X.XX.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				CABANG DINAS WILAYAH IV
		X.XX.01.1.07.03 Pengadaan Alat Besar	Jumlah Kegiatan Pengadaan Alat Besar				CABANG DINAS WILAYAH IV
		X.XX.01.1.07.04 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				CABANG DINAS WILAYAH IV
		X.XX.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Kegiatan Pengadaan Mebel				CABANG DINAS WILAYAH IV

		X.XX.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				CABANG DINAS WILAYAH IV
		X.XX.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya				CABANG DINAS WILAYAH IV
		X.XX.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud				CABANG DINAS WILAYAH IV
		X.XX.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				CABANG DINAS WILAYAH IV
		X.XX.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				CABANG DINAS WILAYAH IV
		X.XX.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				CABANG DINAS WILAYAH IV
		X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH IV	28 Kegiatan	Tersedianya layanan Jasa Penunjang di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH IV	100%	CABANG DINAS WILAYAH IV
		X.XX.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				CABANG DINAS WILAYAH IV

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				OUTPUT		OUTCOME		SASARAN (PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN)
				INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
1				2	3	4	5	6
			X.XX.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				CABANG DINAS WILAYAH IV
			X.XX.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				CABANG DINAS WILAYAH IV
			X.XX.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				CABANG DINAS WILAYAH IV
			X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH IV	10 Kegiatan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH IV	100%	CABANG DINAS WILAYAH IV
			X.XX.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				CABANG DINAS WILAYAH IV
			X.XX.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				CABANG DINAS WILAYAH IV
			X.XX.01.1.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				CABANG DINAS WILAYAH IV
			X.XX.01.1.09.04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				CABANG DINAS WILAYAH IV
			X.XX.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Mebel				CABANG DINAS WILAYAH IV
			X.XX.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				CABANG DINAS WILAYAH IV
			X.XX.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				CABANG DINAS WILAYAH IV
			X.XX.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				CABANG DINAS WILAYAH IV
			X.XX.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				CABANG DINAS WILAYAH IV
			X.XX.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				CABANG DINAS WILAYAH IV
			X.XX.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				CABANG DINAS WILAYAH IV

IV. CABANG DINAS WILAYAH V							
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Menengah (SMA, SMK) dan Jenjang Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah V	100%				Peningkatan Kualitas Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah V

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			OUTPUT		OUTCOME		SASARAN (PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN)
			INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
1			2	3	4	5	6
		1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Menengah Atas di Cabang Dinas Wilayah V (%)	100%	Persentase SMA Yang Memenuhi SPM dan 8 SNP di Cabang Dinas Wilayah V	100%	Jenjang Pendidikan SMA baik Negeri dan Swasta di Cabang Dinas Wilayah V
		1.01.02.1.01.47 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				Peserta Didik SMA dan PTK SMA
		1.01.02.1.01.48 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah Dokumen Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	227 Sekolah			Satuan Pendidikan Menengah Atas
		1.01.02.1.01.49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang mendapatkan pembinaan, pengembangan prestasi dibidang sains, dan seni olimpiade, olahraga	2497 Siswa			Peserta Didik SMA dan PTK SMA
		1.01.02.1.01.50 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Tersedianya Jumlah Pendidik dan Tenaga kependidikan	611 PTK			PTK SMA
		1.01.02.1.01.51 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				Satuan Pendidikan Menengah Atas
		1.01.02.1.01.52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah sekolah yang mendapat Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	227 Sekolah			Satuan Pendidikan Menengah Atas
		1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Menengah Kejuruan (%) di Cabang Dinas Wilayah V (%)	100%	Persentase SMK Yang Memenuhi SPM dan 8 SNP di Cabang Dinas Wilayah V (%)	100%	Jenjang Pendidikan SMK baik Negeri dan Swasta di Cabang Dinas Wilayah V
		1.01.02.1.02.39 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terimplementasinya kurikulum pembelajaran secara maksimal pada Satuan Pendidikan SMK	185 Sekolah			Peserta Didik SMK dan PTK SMK
		1.01.02.1.02.40 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Dokumen Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	185 Sekolah			Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
		1.01.02.1.02.41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah pembinaan, pengembangan prestasi dibidang sains, dan seni olimpiade, olahraga, sains, dan seni	2035			Peserta Didik SMK dan PTK SMK
		1.01.02.1.02.42 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya Jumlah Pendidik dan Tenaga kependidikan	611 PTK			PTK SMK

		1.01.02.1.02.43 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksanya Pengembangan dan Pembinaan Guru SMK	304			PTK SMK
		1.01.02.1.02.45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Serta Manajemen Pengelolaan Pendidikan Menengah Kejuruan	185 Sekolah			Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
		1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah V (%)	100%	Persentase SLB Yang Memenuhi SPM dan 8 SNP di Cabang Dinas Wilayah V (%)	100%	Jenjang Pendidikan Khusus baik Negeri dan Swasta di Cabang Dinas Wilayah V
		1.01.02.1.03.47 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Tersedianya Dokumen Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	30 Sekolah			Sarana Prasarana SLB
		1.01.02.1.03.48 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terwujudnya pembinaan, pengembangan prestasi dibidang sains, dan seni olimpiade, olahraga, sains, dan seni	330			Peserta Didik SLB dan PTK SLB

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				OUTPUT		OUTCOME		SASARAN (PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN)
				INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
1				2	3	4	5	6
			1.01.02.1.03.49 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Pengembangan dan Pembinaan Guru SLB	94 Orang			PTK SLB
			1.01.02.1.03.50 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Pengembangan dan Pembinaan Guru SLB	94 Orang			PTK SLB
			1.01.02.1.03.51 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Terlaksananya pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Serta Manajemen Pengelolaan Pendidikan Khusus	30 Sekolah			Satuan Pendidikan Khusus
X								
X.XX								
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Persentase Terlaksananya PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PADA KANTOR CABANG DINAS WILAYAH V	100%			CABANG DINAS WILAYAH V
		X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH V	3 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH V	100%	CABANG DINAS WILAYAH V
			X.XX.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen	100%			CABANG DINAS WILAYAH V
			X.XX.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen	100%			CABANG DINAS WILAYAH V
			X.XX.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen	100%			CABANG DINAS WILAYAH V
			X.XX.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen	100%			CABANG DINAS WILAYAH V
			X.XX.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tercapainya Penyusunan Pelaporan	100%			CABANG DINAS WILAYAH V
			X.XX.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja	100%			CABANG DINAS WILAYAH V
		X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersusunnya Dokumen Keuangan di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH V	3 Dokumen	Tersedianya Dokumen Keuangan di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH V	100%	CABANG DINAS WILAYAH V

		X.XX.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				CABANG DINAS WILAYAH V
		X.XX.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				CABANG DINAS WILAYAH V
		X.XX.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				CABANG DINAS WILAYAH V
		X.XX.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				CABANG DINAS WILAYAH V
		X.XX.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				CABANG DINAS WILAYAH V
		X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusnya Dokumen Administrasi Kepegawaian di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH V	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH V	100%	CABANG DINAS WILAYAH V
		X.XX.01.1.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				CABANG DINAS WILAYAH V

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	OUTPUT		OUTCOME		SASARAN (PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN)
	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
1	2	3	4	5	6
X.XX.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				CABANG DINAS WILAYAH V
X.XX.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				CABANG DINAS WILAYAH V
X.XX.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				CABANG DINAS WILAYAH V
X.XX.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				CABANG DINAS WILAYAH V
X.XX.01.1.05.06 Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Pensiun				CABANG DINAS WILAYAH V
X.XX.01.1.05.07 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				CABANG DINAS WILAYAH V
X.XX.01.1.05.08 Pemindahan Tugas ASN	Jumlah Kegiatan Pemindahan Tugas ASN				CABANG DINAS WILAYAH V
X.XX.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				CABANG DINAS WILAYAH V
X.XX.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				CABANG DINAS WILAYAH V
X.XX.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				CABANG DINAS WILAYAH V
X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan layanan administrasi umum perkantoran di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH V	12 Kegiatan	Tersedianya layanan administrasi umum perkantoran di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH V	100%	CABANG DINAS WILAYAH V
X.XX.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				CABANG DINAS WILAYAH V
X.XX.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				CABANG DINAS WILAYAH V
X.XX.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				CABANG DINAS WILAYAH V
X.XX.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor				CABANG DINAS WILAYAH V
X.XX.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				CABANG DINAS WILAYAH V
X.XX.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				CABANG DINAS WILAYAH V
X.XX.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan/Material				CABANG DINAS WILAYAH V

		X.XX.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu				CABANG DINAS WILAYAH V
		X.XX.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				CABANG DINAS WILAYAH V
		X.XX.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				CABANG DINAS WILAYAH V
		X.XX.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				CABANG DINAS WILAYAH V
		<i>X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH V</i>	<i>10 Kegiatan</i>	<i>Tersedianya layanan Barang Milik Daerah di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH V</i>	<i>100%</i>	<i>CABANG DINAS WILAYAH V</i>
		X.XX.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				CABANG DINAS WILAYAH V
		X.XX.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				CABANG DINAS WILAYAH V
		X.XX.01.1.07.03 Pengadaan Alat Besar	Jumlah Kegiatan Pengadaan Alat Besar				CABANG DINAS WILAYAH V

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				OUTPUT		OUTCOME		SASARAN (PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN)
				INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
1				2	3	4	5	6
			X.XX.01.1.07.04 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				CABANG DINAS WILAYAH V
			X.XX.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Kegiatan Pengadaan Mebel				CABANG DINAS WILAYAH V
			X.XX.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				CABANG DINAS WILAYAH V
			X.XX.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya				CABANG DINAS WILAYAH V
			X.XX.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud				CABANG DINAS WILAYAH V
			X.XX.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				CABANG DINAS WILAYAH V
			X.XX.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				CABANG DINAS WILAYAH V
			X.XX.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				CABANG DINAS WILAYAH V
			X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH V	28 Kegiatan	Tersedianya layanan Jasa Penunjang di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH V	100%	CABANG DINAS WILAYAH V
			X.XX.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				CABANG DINAS WILAYAH V
			X.XX.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				CABANG DINAS WILAYAH V
			X.XX.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				CABANG DINAS WILAYAH V
			X.XX.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				CABANG DINAS WILAYAH V
			X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH V	10 Kegiatan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH V	100%	CABANG DINAS WILAYAH V
			X.XX.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				CABANG DINAS WILAYAH V
			X.XX.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				CABANG DINAS WILAYAH V

			X.XX.01.1.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				CABANG DINAS WILAYAH V
			X.XX.01.1.09.04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				CABANG DINAS WILAYAH V
			X.XX.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Mebel				CABANG DINAS WILAYAH V
			X.XX.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				CABANG DINAS WILAYAH V
			X.XX.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				CABANG DINAS WILAYAH V
			X.XX.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				CABANG DINAS WILAYAH V
			X.XX.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				CABANG DINAS WILAYAH V
			X.XX.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				CABANG DINAS WILAYAH V

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				OUTPUT		OUTCOME		SASARAN (PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN)
				INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
1				2	3	4	5	6
			X.XX.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				CABANG DINAS WILAYAH V
IV. CABANG DINAS WILAYAH VI								
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								
			1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Menengah (SMA, SMK) dan Jenjang Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah VI	100%			Peningkatan Kualitas Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah VI
			1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Menengah Atas di Cabang Dinas Wilayah VI (%)	100%	Persentase SMA Yang Memenuhi SPM dan 8 SNP di Cabang Dinas Wilayah VI	100%	Jenjang Pendidikan SMA baik Negeri dan Swasta di Cabang Dinas Wilayah VI
			1.01.02.1.01.47 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				Peserta Didik SMA dan PTK SMA
			1.01.02.1.01.48 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah Dokumen Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	227 Sekolah			Satuan Pendidikan Menengah Atas
			1.01.02.1.01.49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang mendapatkan pembinaan, pengembangan prestasi dibidang sains, dan seni olimpiade, olahraga	2497 Siswa			Peserta Didik SMA dan PTK SMA
			1.01.02.1.01.50 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Tersedianya Jumlah Pendidik dan Tenaga kependidikan	611 PTK			PTK SMA

		1.01.02.1.01.51 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				Satuan Pendidikan Menengah Atas
		1.01.02.1.01.52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah sekolah yang mendapat Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	227 Sekolah			Satuan Pendidikan Menengah Atas
		1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Menengah Kejuruan (%) di Cabang Dinas Wilayah VI (%)	100%	Persentase SMK Yang Memenuhi SPM dan 8 SNP di Cabang Dinas Wilayah VI (%)	100%	Jenjang Pendidikan SMK baik Negeri dan Swasta di Cabang Dinas Wilayah VI
		1.01.02.1.02.39 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terimplementasinya kurikulum pembelajaran secara maksimal pada Satuan Pendidikan SMK	185 Sekolah			Peserta Didik SMK dan PTK SMK
		1.01.02.1.02.40 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Dokumen Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	185 Sekolah			Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
		1.01.02.1.02.41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah pembinaan, pengembangan prestasi dibidang sains, dan seni olimpiade, olahraga, sains, dan seni	2035			Peserta Didik SMK dan PTK SMK

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				OUTPUT		OUTCOME		SASARAN (PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN)
				INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
1				2	3	4	5	6
			1.01.02.1.02.42 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya Jumlah Pendidik dan Tenaga kependidikan	611 PTK			PTK SMK
			1.01.02.1.02.43 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksanya Pengembangan dan Pembinaan Guru SMK	304			PTK SMK
			1.01.02.1.02.45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Serta Manajemen Pengelolaan Pendidikan Menengah Kejuruan	185 Sekolah			Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
			1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah VI (%)	100%	Persentase SLB Yang Memenuhi SPM dan 8 SNP di Cabang Dinas Wilayah VI (%)	100%	Jenjang Pendidikan Khusus baik Negeri dan Swasta di Cabang Dinas Wilayah VI
			1.01.02.1.03.47 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Tersedianya Dokumen Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	30 Sekolah			Sarana Prasarana SLB
			1.01.02.1.03.48 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terwujudnya pembinaan, pengembangan prestasi dibidang sains, dan seni olimpiade, olahraga, sains, dan seni	330			Peserta Didik SLB dan PTK SLB
			1.01.02.1.03.49 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Terlaksanya Pengembangan dan Pembinaan Guru SLB	94 Orang			PTK SLB
			1.01.02.1.03.50 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Terlaksanya Pengembangan dan Pembinaan Guru SLB	94 Orang			PTK SLB
			1.01.02.1.03.51 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Terlaksananya pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Serta Manajemen Pengelolaan Pendidikan Khusus	30 Sekolah			Satuan Pendidikan Khusus
X								
X.XX								
			X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terlaksananya PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PADA KANTOR CABANG DINAS WILAYAH VI	100%			CABANG DINAS WILAYAH VI

		<i>X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH VI</i>	<i>3 Dokumen</i>	<i>Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH VI</i>	<i>100%</i>	<i>CABANG DINAS WILAYAH VI</i>
		X.XX.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen	100%			CABANG DINAS WILAYAH VI
		X.XX.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen	100%			CABANG DINAS WILAYAH VI
		X.XX.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen	100%			CABANG DINAS WILAYAH VI
		X.XX.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen	100%			CABANG DINAS WILAYAH VI
		X.XX.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tercapainya Penyusunan Pelaporan	100%			CABANG DINAS WILAYAH VI
		X.XX.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja	100%			CABANG DINAS WILAYAH VI

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			OUTPUT		OUTCOME		SASARAN (PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN)
			INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
1			2	3	4	5	6
		X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Keuangan di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH VI	3 Dokumen	Tersedianya Dokumen Keuangan di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH VI	100%	CABANG DINAS WILAYAH VI
		X.XX.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				CABANG DINAS WILAYAH VI
		X.XX.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				CABANG DINAS WILAYAH VI
		X.XX.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				CABANG DINAS WILAYAH VI
		X.XX.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				CABANG DINAS WILAYAH VI
		X.XX.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				CABANG DINAS WILAYAH VI
		X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH VI	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH VI	100%	CABANG DINAS WILAYAH VI
		X.XX.01.1.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				CABANG DINAS WILAYAH VI
		X.XX.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				CABANG DINAS WILAYAH VI
		X.XX.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				CABANG DINAS WILAYAH VI
		X.XX.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				CABANG DINAS WILAYAH VI
		X.XX.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				CABANG DINAS WILAYAH VI
		X.XX.01.1.05.06 Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Pensiun				CABANG DINAS WILAYAH VI
		X.XX.01.1.05.07 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				CABANG DINAS WILAYAH VI
		X.XX.01.1.05.08 Pemindahan Tugas ASN	Jumlah Kegiatan Pemindahan Tugas ASN				CABANG DINAS WILAYAH VI
		X.XX.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				CABANG DINAS WILAYAH VI
		X.XX.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				CABANG DINAS WILAYAH VI

		X.XX.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				CABANG DINAS WILAYAH VI
		X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan layanan administrasi umum perkantoran di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH VI	12 Kegiatan	Tersedianya layanan administrasi umum perkantoran di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH VI	100%	CABANG DINAS WILAYAH VI
		X.XX.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				CABANG DINAS WILAYAH VI
		X.XX.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				CABANG DINAS WILAYAH VI
		X.XX.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				CABANG DINAS WILAYAH VI
		X.XX.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor				CABANG DINAS WILAYAH VI
		X.XX.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				CABANG DINAS WILAYAH VI

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				OUTPUT		OUTCOME		SASARAN (PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN)
				INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
1				2	3	4	5	6
			X.XX.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				CABANG DINAS WILAYAH VI
			X.XX.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan/Material				CABANG DINAS WILAYAH VI
			X.XX.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu				CABANG DINAS WILAYAH VI
			X.XX.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				CABANG DINAS WILAYAH VI
			X.XX.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				CABANG DINAS WILAYAH VI
			X.XX.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				CABANG DINAS WILAYAH VI
			<i>X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH VI</i>	<i>10 Kegiatan</i>	<i>Tersedianya layanan Barang Milik Daerah di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH VI</i>	<i>100%</i>	<i>CABANG DINAS WILAYAH VI</i>
			X.XX.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				CABANG DINAS WILAYAH VI
			X.XX.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				CABANG DINAS WILAYAH VI
			X.XX.01.1.07.03 Pengadaan Alat Besar	Jumlah Kegiatan Pengadaan Alat Besar				CABANG DINAS WILAYAH VI
			X.XX.01.1.07.04 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				CABANG DINAS WILAYAH VI
			X.XX.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Kegiatan Pengadaan Mebel				CABANG DINAS WILAYAH VI
			X.XX.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				CABANG DINAS WILAYAH VI
			X.XX.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya				CABANG DINAS WILAYAH VI
			X.XX.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud				CABANG DINAS WILAYAH VI
			X.XX.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				CABANG DINAS WILAYAH VI
			X.XX.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				CABANG DINAS WILAYAH VI
			X.XX.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				CABANG DINAS WILAYAH VI

		X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH VI	28 Kegiatan	Tersedianya layanan Jasa Penunjang di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH VI	100%	CABANG DINAS WILAYAH VI
		X.XX.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				CABANG DINAS WILAYAH VI
		X.XX.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				CABANG DINAS WILAYAH VI
		X.XX.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				CABANG DINAS WILAYAH VI
		X.XX.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				CABANG DINAS WILAYAH VI
		X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH VI	10 Kegiatan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH VI	100%	CABANG DINAS WILAYAH VI
		X.XX.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				CABANG DINAS WILAYAH VI

4.2 Urusan Kesehatan

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu pelayanan Dasar. Untuk mekanisme penerapan SPM maka tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan:

1. Pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis;
2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan Dasar;
3. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan Dasar; dan
4. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, yang kesemuanya itu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan bukan oleh kementerian terkait.

selanjutnya, mengingat makna Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak hanya pada Daerah kabupaten dan kota namun juga pada Daerah provinsi maka SPM tentu juga harus dimaknai tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah kabupaten/kota saja tetapi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi.

2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten Kota jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam Peraturan Meteri Kesehatan tersebut sebagai berikut :

2.1.1 Jenis Pelayanan Dasar daerah Provinsi

- 1) Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.
- 2) pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi.

2.2 Target Pencapaian SPM

Berdasarkan Permendagri no, 100 tahun 2018 Capaian kinerja pemerintah daerah baik Provinsi maupun kabupaten/Kota dalam memberikan standar pelayanan Minimal bidang kesehatan dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100 persen (%)

No	Jenis Pelayanan Dasar/ Indikator SPM	Nilai (%)	Waktu Pencapaian (Tahun)	Perhitungan Pembiayaan (Rp)
A	PROVINSI			
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.			
	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana	100	2021	223.190.000

	dan/atau berpotensi bencana			
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi			
	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	100	2021	288.375.525

2.3 Realisasi

No	Indikator SPM	Sasaran Dalam Tahun	Capaian Dalam Tahun	%
A	PROVINSI			
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.	4.553	4.553 penduduk	100%
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi	20.720 Penduduk	20.720 Penduduk	100%

Adapun capaian SPM bidang Kesehatan tahun 2021 yang ditetapkan dengan target pencapaian SPM diuraikan sebagai berikut :

Provinsi :

1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana adalah 100%, dengan menghitung Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun di bagi Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana dalam satu tahun yang sama dikali 100%.

Pencapaian indikator Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan & Masalah Kesehatan pada tahun 2019 belum mencapai target. dimana secara provinsi capaian Kab/Kota yang membentuk PSC 119 baru mencapai 30,77%, dan tenaga sumber daya kesehatan PSC yang terlatih kegawatdaruratan (BHD,GELS,ACLS,ATLS) masih sebatas PSC Dinas Kesehatan Provinsi. Namun sebagai awal dari penerapan SPM ini Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah melalui UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (P2KT) telah membuat peta rawan bencana serta penentuan jumlah penduduk di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang berpotensi bencana tersebut.

Kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian target antara lain :

- a. KIE bagi petugas kesehatan
 - 1) Penguatan kapasitas cluster kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana
 - 2) Percepatan pembentukan PSC 119 di Kabupaten/Kota
 - 3) Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) bagi petugas kesehatan

b. KIE bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana

1) Pemantauan Potensi Krisis Kesehatan Kabupaten/ Kota

2) Penyuluhan dan pelayanan kesehatan dasar pada masyarakat di hunian sementara
Petobo dan desa Bangga

2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi

Capaian kinerja Pemerintah daerah Provinsi dalam melakukan pelayanan kepada sasaran kondisi KLB , dengan menghitung Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB dikali 100%.

Untuk memenuhi target kinerja tersebut dilakukan melalui kegiatan antara lain :

No	Kegiatan
I	Program Surveilans APBD
a.	Bimtek Surveilans aktif Rumah Sakit dan Yankes Swasta Untuk Kasus PD3I dan Penyakit menular Lainnya
b.	Pemantauan Verifikasi Rumor dan Signal Masalah Kesehatan Serta Komunikasi Cepat Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon
c.	Penyelidikan Epidemiologi KLB
d.	Supervisi Surveilans Campak AFP dan PD3I Lainnya

2.4 Alokasi Anggaran

No	Indikator SPM	APBD	APBN
A	PROVINSI		
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.	223.190.000	-
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi	288.375.525	-

2.5 Dukungan Personil

- 1) Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi terdiri dari :
 - Pejabat structural sebanyak 4 orang
 - Dokter sebanyak 1 orang
 - Perawat sebanyak 9 orang
 - Kesehatan masyarakat sebanyak 5 orang
 - Kesehatan lingkungan sebanyak 2 orang
 - Staf administrasi sebanyak 11 orang
- 2) Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi terdiri dari :
 - Personil Provinsi : 12 Orang

- Personil Kabupaten kota : 39 Orang

2.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi terdiri dari :
 - Koordinasi tingkat cluster kesehatan masih belum berjalan dengan baik, terutama dalam mengedukasi pengurangan resiko krisis kesehatan terhadap penduduk yang terdampak ataupun penduduk yang tinggal diwilayah berpotensi bencana.
 - Pengetahuan petugas kesehatan di kabupaten/kota terutama puskesmas terkait krisis kesehatan akibat bencana masih kurang.
 - KIE pengurangan resiko krisis kesehatan akibat bencana masih merupakan tugas dan tanggungjawab pelaksana program penanggulangan krisis kesehatan dan masalah kesehatan.
 - Minimnya pembiayaan untuk penanganan krisis kesehatan.
 - Belum optimal kerjasama Lintas Sektor dalam Pelaksanaan penanganan krisis kesehatan akibat bencana
- 2) Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi

- Kejadian luar biasa (KLB) terjadi di wilayah Sulawesi Tengah yang sebagian merupakan daerah sulit memerlukan alat transportasi yang memadai dalam penanganan KLB

Solusi

- 1) Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi terdiri dari :
 - Melakukan Penguatan kapasitas cluster kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana
 - Melakukan Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) bagi petugas kesehatan
 - Melakukan Pertemuan Penguatan LP dan LS
 - Melakukan penyusunan peta rawan bencana di setiap kabupaten/kota dan puskesmas untuk pengurangan resiko krisis kesehatan
 - Melakukan kegiatan pemantauan potensi Krisis Kesehatan Kabupaten/ Kota
- 2) Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi
 - Tidak tersedianya kendaraan Operasional khusus Penyelidikan Epidemiologi KLB dalam menunjang Indikator program yaitu Penanganan < 24 Jam dengan mempertimbangkan keadaan di lapangan yang menjangkau tidak hanya sampai di Kabupaten/Kota tetapi harus sampai di Kecamatan bahkan Desa-desa.

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

**CAPAIAN SPM KEGIATAN AIR LIMBAH
TAHUN ANGGARAN 2021
DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

	URAIAN	LOKASI	Nilai Kontrak	Rumah Tangga		Jumlah Bilik	Program		Kegiatan (Output)		KETERANGAN	
				Jumlah (Unit)			Target	Capaian	Target	Capaian		
1	Pembuatan Tangki Individual Desa Lengkeka Kab. Poso	Desa Lengkeka Kec. Lore Barat Kab. Poso (Kawasan Schistosomiasis)	Rp 575.375.000	16	KK	16	16	16 KK	16 KK	16 unit	16 unit	Kawasan Schistosomiasis
JUMLAH			Rp 740.573.000	46	KK	18	22	46 KK	46 KK	22 Unit	22 unit	
Jumlah Rumah Tangga Terlayani (KK)				46	KK							

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

Penerapan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR RI dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya.

A. Pengumpulan Data

Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ada 2 (dua) jenis pelayanan dasar yang masuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat yakni :

- 1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi. Adapun indikator pencapaian adalah jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni
- 2) Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi. Adapun indikator pencapaiannya adalah jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi rumah yang layak huni

**A. FORM 4.A.1 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana
Provinsi**

ROVINSI : SULAWESI TENGAH													
No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jenis Bencana	Tingkat Kerawanan Bencana (Rendah/Sedang/Tinggi)	Luas Perumahan (Ha)	Jumlah Jiwa	Jumlah Rumah (Unit)	Jumlah KK	Kondisi Fisik Rumah (unit)		Status kepemilikan rumah (unit)	
										RLH	RTLH	Hak Milik	Sewa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kota Palu	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Banjir ▪ Longsor ▪ Tsunami ▪ Gempa bumi ▪ Likuifaksi 	-	-							-
2	Kabupaten Sigi	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Banjir ▪ Tanah Longsor ▪ Gempa Bumi ▪ Likuifaksi 	-	-							-
3	Kabupaten Donggala	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Banjir ▪ Tanah Longsor ▪ Gempa bumi ▪ Tsunami 	-	-							-
4	Kabupaten Parigi Moutong	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Banjir ▪ Gempa bumi ▪ Tsunami 	-	-							-

B. FORM 4.A.2 Identifikasi Lahan Potensial Sebagai Relokasi P Provinsi

Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana

PROVINSI : SULAWESI TENGAH							
No	Kabupaten/Kota	Provinsi Kecamatan	Kelurahan/Desa	Luas Lahan (Ha)	Pemilik	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Kota Palu	Tatanga	Duyu	46,44	-		
			Palu Selatan	Petobo	0,64	-	
		Palu Barat	Balaroa		3,62	-	
					2,58	-	
					0,22	-	
		Mantikulore	Tondo		30,00	-	
					2,00	-	
					0,78	-	
		Palu Utara	Mamboro	Kayumalue Pajeko	0,06	-	
				Tawaeli	Panau	0,16	-
		2	Kabupaten Sigi	Biomaru	Pombewe	10,00	-
	12,10				-		
	1,44				-		
Loru	0,66				-		
Lolu	2,16				-		
Jono Oge	0,78				-		
Kalukubula	0,58				-		
Bulupuntu	1,00				-		
Sidondo I	0,24				-		
	6,00				-		
Dolo Selatan	Bangga				2,28	-	
					0,28	-	
					2,00	-	
					1,92	-	
					1,34	-	
					1,00	-	
T anambulava	Lambara				1,24	-	
					1,28	-	
Kulawi	Sibalaya Utara				2,62	-	
					1,26	-	
Marawola	Sibalaya Selatan				0,86	-	
			0,12	-			
3	Kabupaten Donggala	Banawa	Loli Tasiburi	1,18	-		
				Ganti	1,64	-	
				Loli Dondo	0,74	-	
				Loli Saluran	0,36	-	
		T anantovea	Wani 1		1,40	-	
					0,42	-	
					0,96	-	
		Sirenja	Lompio		5,64	-	
					2,30	-	
					0,02	-	
					0,26	-	
					4,58	-	
					0,32	-	
					1,38	-	
					1,94	-	
4	Kabupaten Parigi Moutong	-	-	-	-	-	
TOTAL				160,80			

C. FORM 4.B.2 Perhitungan Kebutuhan Biaya Layanan Pemenuhan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Bencana Provinsi

PROVINSI : SULAWESI TENGAH				
No	Kegiatan	Komponen Biaya	Perhitungan Biaya (Rp)	
A.	Pengumpulan Data		Rp (Sub Total)	
1.	Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana	Survei Sekunder	Rp (Sub Total)	
		1 Data Wilayah Administrasi	Org*Hari	
		2 Identifikasi melalui citra	Org*Hari	
		Survei Primer	Rp (Sub Total)	
		1 Pemetaan	Org*Hari	
2.	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Survei Sekunder	Rp (Sub Total)	
		1 Data aset lahan pemda	Org*Hari	
		2 Identifikasi melalui citra	Org*Hari	
		Survei Primer	Rp (Sub Total)	
		1 Pemetaan	Org*Hari	
3.	Data Rumah Korban Bencana alam	Pendataan rumah korban	Rp (Sub Total)	
4.	Pendataan rumah sewa	Survei Primer	Rp (Sub Total)	
B.	Sosialisasi		Rp (Sub Total)	
1.	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi rumah kepada masyarakat/ sukarelawan tanggap bencana	Transportasi	Orang*kali	
		Konsumsi Rapat	Orang*kali	
		Penggandaan Materi Pelatihan	Eks	
		ATK	LS	
		Narasumber	Orang*kali	
C.	Pembentukan Tim Satgas		Rp (Biaya C1)	
1	Pelatihan Tim Satgas	Diklat	Orang*kali	
		Transportasi	Orang*kali	
		Konsumsi Rapat	Orang*kali	
		Penggandaan Materi Pelatihan	Eks	
		ATK	LS	
		Pelatih/Praktisi	Orang*kali	
D.	Pendataan Cepat		Rp (Sub Total)	
1	Pengisian Form A dan B	Surveyor	Org*Hari	
		Penggandaan Form	Eks	
		Pengolahan Data	Org*Hari	
E.	Verifikasi penerima layanan SPM		Rp (Sub Total)	
1	Rembug Warga untuk menentukan calon penerima dan layanan SPM	Konsumsi Rapat	Orang*kali	
		Transportasi	Orang*kali	
		Penggandaan Materi	Eks	
F.	Penyusunan Rencana Aksi		Rp (Biaya F1)	
1	Penyelenggaraan rapat koordinasi untuk menyepakati Penerima dan jenis pelayanan	Konsumsi Rapat	Orang*kali	
		Transportasi	Orang*kali	
		Penggandaan Materi	Eks	
		ATK	LS	
G.	Rehabilitasi Rumah		Rp (Sub Total)	
1.	Pembentukan tim	Tenaga Ahli Sipil/Arsitektur	Org*bulan	
		2. Pelatihan fasilitator	Konsumsi Rapat	Orang*kali
			Pelatih/Praktisi	Orang*kali
			Transportasi	Orang*kali
		Penggandaan Materi	Eks	

3.	Pelaksanaan rehabilitasi rumah	Pembangunan Fisik Rumah	Rp	
H.	Pembangunan Kembali		Rp (Sub Total)	
1.	Pembentukan tim	Tenaga Ahli Sipil/Arsitektur	Org*bulan	
2.	Pelatihan fasilitator	Konsumsi Rapat	Orang*kali	
		Pelatih/Praktisi	Orang*kali	
		Transportasi	Orang*kali	
		Penggandaan Materi	Eks	
3.	Penyusunan DED Pembangunan Kembali Rumah Layak Huni Dengan Spesifikasi Ramah Bencana	Rembug Desa	Rp (Sub Total)	
		1 Media diskusi	Rp	
		2 Transportasi	Org*Hari	
		3 Konsumsi Rapat	Orang*kali	
4.	Pembangunan Rumah	Pembangunan Fisik Rumah	Rp	
I.	Pembangunan Baru/ Relokasi		Rp (Sub Total)	
1.	Pengadaan Lahan	Pembebasan Lahan	Rp	
2.	Penyusunan <i>site plan</i> dan DED Rumah Bersama Penerima Pelayanan Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni	Rembug Warga	Rp (Sub Total)	
		1 Media diskusi	Rp	
		2 Transportasi	Org*Hari	
		3 Konsumsi Rapat	Orang*kali	
			Tenaga Ahli	
		1 Tenaga Ahli Perencana	Org*bulan	
		2 Tenaga Ahli Arsitektur	Org*bulan	
		3 Tenaga Ahli Teknik Sipil	Org*bulan	
		4 Tenaga Ahli ME	Org*bulan	
		5 Tenaga Ahli <i>Plumbing</i>	Org*bulan	
3.	Pembangunan Rumah Khusus +	Pembangunan Fisik Rumah	Rp	
J.	Penyusunan Laporan Pelaksanaan		Rp (Sub Total)	
1.	Penyusunan Laporan Pelaksanaan SPM	Pembahasan (paket meeting)	Orang*kali	
		Transportasi	Orang*kali	
		Praktisi/Narasumber	Orang*kali	
		Penggandaan dokumen	Eks	
K.	Pembinaan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)	
1.	Pembinaan SPM kepada pelaksana SPM kabupaten/kota.	Pembahasan (paket meeting)	Orang*kali	
		Transportasi	Orang*kali	
		Praktisi/Narasumber	Orang*kali	
		Penggandaan dokumen	Eks	
L.	Pemantauan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)	
1.	Perangkat Pemantauan SPM	Pengadaan sistem informasi	Rp	
2.	Pemantauan kinerja penerapan SPM	Operator Pelaksana Update	Orang*kali	
		Survei lapangan	Orang*kali	
M.	Evaluasi Penerapan SPM		Rp (Sub Total)	
1.	Rapat evaluasi penerapan	Pembahasan (paket meeting)	Orang*kali	
		Transportasi	Orang*kali	
		Praktisi/Narasumber	Orang*kali	
		Penggandaan dokumen	Eks	

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Perumahan Rakyat Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh adalah sebagai berikut :

Permasalahan :

1. Pemenuhan layanan 1 jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi, rumah yang terdampak sejumlah 110.214 unit yang ditangani dengan 2 Pola yaitu :
 - Perbaikan rumah secara Stimulan = 98.512 Unit
 - Relokasi (Huntap) = 11.702 UnitUntuk Stimulan pendanaan sudah tersedia melalui BNPB dan dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten/Kota, sedangkan untuk Pola relokasi (Huntap) penanganan bantuan melalui sumber dana APBN (PUPR), NGO, APBD Provinsi, masih menyisakan 586 Unit rumah yang membutuhkan dana.
2. Permasalahan lahan huntap yang telah ditetapkan oleh pemerintah masih menjadi kendala yang belum terselesaikan

Solusi :

1. Pembangunan huntap yang masih membutuhkan penambahan pendanaan untuk penyelesaian tahap rehabilitasi dan rekonstruksi yang merupakan layanan SPM bidang perumahan rakyat
2. Hendaknya Pemerintah Pusat dan Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota, saling bersinergi untuk mendapatkan data yang valid warga terdampak bencana yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni terutama pembangunan huntap relokasi
3. Pemerintah Kabupaten/kota yang masih memiliki permasalahan lahan hendaknya serius dalam penyelesaian lahan yang akan digunakan sebagai tempat relokasi huntap,

4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

TARGET CAPAIAN KINERJA (SPM) URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021

Jenis Pelayanan Dasar	Realisasi Tahun 2021			Satuan Kerja / Lembaga Penanggung Jawab	
	Indikator	Komponen	Nilai		
1	2	3	4	5	
Pemeliharaan Ketentraman & Ketertiban Masyarakat	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	Jumlah warga negara yang mendapatkan layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	12.179	100%	Satuan Polisi Pamong Praja
		Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan pada kawasan yang terkena dampak akibat dari penegakan hukum dan perkara x 100%	12.179		

**Perhitungan Biaya SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Sulawesi Tengah**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Kegiatan dan biaya Tahun 2021				
			Langkah Kegiatan / Variabel / Komponen	Satuan	Volume	Rumus	NILA I
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	A. Pengumpulan data				
			1. Jumlah warga	org	12.179		
			2. Identitas warga	berkas	12.179		
			B. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar				
			1. Pelayanan kerugian materi				
			- rusak ringan	Paket	0		
			- rusak sedang dan/ atau berat	buah	0		
			2. Pelayanan pengobatan				
			- Cidera ringan	org	0		
			- Cidera berat	org	0		

CAPAIAN, TARGET, DAN RENCANA PEMBIAYAAN SPM TANTRIBUM DAN PENANGGULANGAN BENCANA

PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	JENIS LAYANAN	INDIKATOR	TARGET NASIONAL	BATAS WAKTU	CAPAIAN 2020	GAP (%)	CAPAIAN, TARGET, DAN RENCANA PEMBIAYAAN SPM						
							2020			2021			
							TARGET	SUB KEGIATAN	RENCANA PEMBIAYAAN	TARGET	SUB KEGIATAN	RENCANA PEMBIAYAAN	
1		2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	
1	Pemeliharaan Ketentraman & Ketertiban Umum Masyarakat	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada			100%		6	Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Gubernur	597.595.000		8	Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Gubernur	588.296.850
JUMLAH									597.595.000			588.296.850	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		DPA- RINCIAN BELANJA SKPD
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021		
Rinciaan Anggaran Belanja menurut Program dan Kegiatan		
Urusan Pemerintahan	: 1	Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
Bidang Urusan	: 1 05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Program	: 1 05 .0 2	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sasaran Program	: Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah	
Capaian Program	: Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Pelanggaran Perda/ Perkada	
Kegiatan	: 1 05 .0 .2.01 2	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Organisasi	: 1 05 .0 .2.01. 2	Satuan Polisi Pamong Praja
Unit	: 1 05 .0 .2.01. 2	Penegakan Perda/Perkada
Alokasi Tahun T-1	: Rp 588.296.850	
Alokasi Tahun T	: Rp	
Alokasi Tahun T+1	: Rp	
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	100%
Masukan	Dana yang dianggarkan pada Anggaran Tahun 2021	588.296.850
Keluaran	Jumlah Pelanggaran K3 yang terselesaikan	100 %
	Jumlah Pelanggaran K3 Keseluruhan	
Hasil	Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Perda/Perkada	96,43%
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Masyarakat	

Sub Kegiatan		:	5.2.16.02	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Perkada					
Sumber Pendanaan		:	APBD						
Lokasi		:	Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah						
Keluaran Sub Kegiatan		:	- Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada					12.179	Org/ Pkt
Waktu Pelaksanaan		:	Mulai 2 Januari 2022 Sampai dengan 31 Desember 2022						
Keterangan		:							
Kode Rekening	Uraian				Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
					Volum e	Satua n	Harga	PPN	
<i>1</i>	<i>2</i>				<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7 = 3x5</i>
5	BELANJA DAERAH								588.296.850
5 1	BELANJA OPERASI								588.296.850
5 1 0 2	Belanja Barang dan Jasa								588.296.850
5 1 0 2 01	Belanja Barang								588.296.850
5 1 0 2 01 01	Belanja Barang Pakai Habis								
5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi								
	Pelayanan Kerugian Materi								
				- Rusak Ringan (BELANJA BAHAN BAKU BANGUNAN)	0	Pkt	0		
				- Rusak Berat (BELANJA BAHAN BAKU BANGUNAN)	0	Pkt	0		
5 1 0 2 02	Belanja Jasa								
5 1 0 2 02 01	Belanja Jasa Kantor								
5 1 02 02 01 0070	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan								
				- PELAYANAN PENGOBATAN CIDERA RINGAN	0	Org	0		

4.6 Urusan Sosial

Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya.

1. *Jenis Pelayanan Dasar*

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota ada 5 (lima) jenis pelayanan dasar yang masuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial yakni pada pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial yaitu program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dan program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kelima pelayanan dasar dimaksud meliputi:

- 1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti.
- 2) Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti.
- 3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti.
- 4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti.
- 5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Pemerintah provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan pelayanan sosial bagi sasaran penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial terutama gelandangan dan pengemis adalah melalui mekanisme dalam panti. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 45 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas Badan dan sudah mempunyai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang melaksanakan pelayanan sosial berbasis panti yaitu UPT Panti Sosial Anak di Kota Palu, UPT Panti Sosial Tresna Wredha Madago di Tentena, Kabupaten Poso (yang melaksanakan pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar lingkup provinsi), UPT Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial di Biromaru, Kabupaten Sigi (yang melaksanakan pelayanan sosial bagi tuna sosial seperti wanita tuna sosial, gelandangan, pengemis, orang dengan gangguan jiwa berat pasca rehabilitasi medis).

1. 1. Pelayanan Dasar kepada Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas yang menjadi prioritas sasaran Dinas Sosial adalah penyandang disabilitas terlantar dan miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan atau yang terdapat dalam panti disabilitas terdaftar di Sulawesi Tengah sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel. 2.1

Data Penyandang Disabilitas Terlantar Tahun 2021

NO	KABUPATEN/KOTA	DISABILITAS	
		PANTI	BUKAN PANTI
Kabupaten/ Regency			
1	KAB. SIGI		1475
2	KAB. DONGGALA		1692
3	KAB. PARIGI MOUTONG		2324
4	KAB. TOLITOLI		1135
5	KAB. POSO		1781
6	KAB. TOUNA		879
7	KAB. MORUT		734
8	KAB. MOROWALI	267	583
9	KAB. BANGGAI		2214
10	KAB. BANGKEP		1073
11	KAB. BALUT		315
12	KAB. BUOL		1217
Kota / Manucipolity			
13	KOTA PALU	297	870
SULAWESI TENGAH		564	16292

Sumber : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial / DTKS Tahun 2020 (Sesuai Kepmensos No.146/huk/2020)

1. 2. Pelayanan Dasar kepada Anak Terlantar

Anak terlantar yang berasal dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan 40% terbawah di Sulawesi Tengah sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana tabel dibawah ini

:

Tabel 2.2

Jumlah Anak Terlantar Tahun 2021

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH ANAK TERLANTAR (JIWA)
1	2	3
1.	BANGGAI	46.191
2.	BANGGAI KEPULAUAN	18.357
3.	BANGGAI LAUT	6.942
4.	BUOL	28.701
5.	DONGGALA	55.159
6.	KOTA PALU	28.036
7.	MOROWALI	15.162
8.	MOROWALI UTARA	14.385
9.	PARIGI MOUTONG	78.187
10.	POSO	33.163
11.	SIGI	37.321
12.	TOJO UNA-UNA	23.678
13.	TOLI-TOLI	35.302
TOTAL		420.620

Sumber : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS Tahun 2021(Sesuai Kepmensos No.146/huk/2020)

Sedangkan anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan pengasuhan di dalam panti se Sulawesi Tengah sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.3.

Jumlah Panti Asuhan Anak dan Anak dalam pengasuhan panti Tahun 2021

NO	KABUPATEN/KOTA	PANTI ASUHAN		ANAK ASUH	
		PEMERINTAH	NON PEMERINTAH	PEMERINTAH	NON PEMERINTAH
1	2	3	4	5	6
	Kabupaten/ Regency				
1	Banggai Kepulauan	-	2 Panti	-	152 Anak
2	Banggai	-	17 Panti	-	645 Anak
3	Morowali	-	2 Panti	-	78 Anak
4	Poso	-	21 Panti	-	521 Anak
5	Donggala	-	5 Panti	-	176 Anak
6	Toli Toli	-	8 Panti	-	229 Anak
7	Buol	-	5 Panti	-	28 Anak
8	Parigi Moutong	-	4 Panti	-	142 Anak
9	Tojo Una-una	-	1 Panti	-	80 Anak
10	Sigi	-	12 Panti	-	372 Anak
11	Banggai Laut	-	3 Panti	-	30 Anak
12	Morowali Utara	-	3 Panti	-	135 Anak
13	Kota / Municipality				
14	Palu	1	55 Panti	-	1198 Anak
	Sulawesi Tengah	1	138 Panti	0	3786 Anak

Sumber : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2021 (Sesuai Kepmensos No.146/huk/2020)

UPT. Panti Sosial Anak dalam memberikan pelayanan sosial berupa bimbingan motivasi kepada anak- anak jalanan yang merupakan rujukan dari anak- anak jalan binaan Dinas Sosial Kabupaten Kota di Sulawesi Tengah dan bimbingan keterampilan bagi anak-anak yang putus sekolah sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri dan mandiri.

1. 3. Pelayanan Dasar kepada Lanjut Usia Terlantar

Tabel 2.4.

Data Pelayanan Dasar Lanjut Usia Tahun 2021

REKAP DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) LANSIA
KABUPATEN/KOTA PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	NAMA KABUPATEN	JUMLAH LANJUT USIA TERLANTAR (JIWA)
1	BANGGAI	18.242
2	BANGGAI KEPULAUAN	6.121
3	MOROWALI	4.804
4	POSO	13.296
5	DONGGALA	12.479
6	TOJO UNA-UNA	6.285
7	SIGI	10.109
8	BANGGAI LAUT	1.645
9	MOROWALI UTARA	5.071
10	TOLI-TOLI	8.480
11	BUOL	6.337
12	PARIGI MOUTONG	18.339
13	PALU	6.932
JUMLAH		118.140

Sumber : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2021 (Sesuai Kepmensos No.146/huk/2020)

2. Target Pencapaian SPM Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

Tabel. 2.5.

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Dalam Panti

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	IKK OUTPUT		IKK OUTCOME		ANGGARAN	KET
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET		
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	1 Jumlah Penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	23 Org	Presentasi Jumlah Penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	5%	48.615.600	
		2 Jumlah Penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket Sandang di dalam panti	-	Presentasi Jumlah Penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket Sandang di dalam panti	-		
		3 Jumlah Asrama yang tersedia dan mudah di akses (panti)	-	Presentasi Jumlah Asrama yang tersedia dan mudah di akses (panti)	5		
		4 Jumlah Alat bantu yang disediakan di dalam panti	-	Presentasi Jumlah Alat bantu yang disediakan di dalam panti	-		
		5 Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	-	Presentasi Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	-		
		6 Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	-	Presentasi Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	-		
		7 Jumlah perbekalan kesehatan (peralatan ,kesehatan) yang disediakan di dalam panti	-	Presentasi Jumlah perbekalan kesehatan (peralatan ,kesehatan) yang disediakan di dalam panti	-		
		8 Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di dalam panti	-	Presentasi Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di dalam panti	-		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	IKK OUTPUT		IKK OUTCOME		ANGGARAN	KET	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
		9	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan di dalam panti	13 Org	Presentasi Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan di dalam panti	4%	85.657.000	
		10	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	-	Presentasi Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	-		
		11	Jumlah pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	-	Presentasi Jumlah pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	-		
		12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang di fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan di dalam panti	-	Presentasi Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang di fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan di dalam panti	-		
		13	Jumlah disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	-	Presentasi Jumlah disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	-		
		14	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	-	Presentasi Jumlah Penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	-		
		15	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	-	Presentasi Jumlah Penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	-		

Tabel. 2.6.

Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Dalam Panti

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	IKK OUTPUT		IKK OUTCOME		ANGGARAN	KET
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET		
1	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	1 Jumlah Anak terlantar yang menerima paket permakanaan di dalam panti sesuai standar gizi	25 Org	Presentasi Jumlah Anak terlantar yang menerima paket permakanaan di dalam panti sesuai standar gizi	1%	123.100.000	
		2 Jumlah Anak terlantar yang menerima paket Sandang di dalam panti	15 Org	Presentasi Jumlah Anak terlantar yang menerima paket Sandang di dalam panti	1%	24.931.250	
		3 Jumlah Asrama yang tersedia dan mudah di akses (panti)	-	Presentasi Jumlah Asrama yang tersedia dan mudah di akses (panti)	138		
		4 Jumlah Alat bantu yang disediakan di dalam panti	-	Presentasi Jumlah Alat bantu yang disediakan di dalam panti	-		
		5 Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	25 Org	Presentasi Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	1%	31.067.000	
		6 Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	-	Presentasi Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	-		
		7 Jumlah peralatan kesehatan yang disediakan di dalam panti	-	Presentasi Jumlah peralatan kesehatan yang disediakan di dalam panti	-		
		8 Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater peksos medis) yang disediakan di dalam panti	-	Presentasi Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater peksos medis) yang disediakan di dalam panti	-		
		9 Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang dilaksanakan di dalam panti	-	Presentasi Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang dilaksanakan di dalam panti	13		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	IKK OUTPUT		IKK OUTCOME		ANGGARAN	KET	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
		10	Jumlah paket bimbingan fisik , mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan di dalam panti	15 Org	Presentasi Jumlah paket bimbingan fisik , mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan di dalam panti	1%	127.160.600	
		11	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari hari yang disediakan di dalam panti	25 Org	Presentasi Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari hari yang disediakan di dalam panti	1%	34.728.875	
		12	Jumlah anak terlantar yang di fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan dan kartu identitas anak dan akta lahir di dalam panti	-	Presentasi Jumlah anak terlantar yang di fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan dan kartu identitas anak dan akta lahir di dalam panti	-		
		13	Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	1 Lap	Presentasi Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	-	3.000.000	
		14	Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	-	Presentasi Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	-		
		15	Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	1 Lap	Presentasi Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	12%	1.800.000	

Tabel. 2.7.

Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	IKK OUTPUT		IKK OUTCOME		ANGGARAN	KET
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET		
1	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar dalam panti	1 Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	48 Org	Presentasi Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	29%	840.450.000	
		2 Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket Sandang di dalam panti	48 Org	Presentasi Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket Sandang di dalam panti	2%	20.544.000	
		3 Jumlah Asrama yang tersedia dan mudah di akses (panti)	5	Presentasi Jumlah Asrama yang tersedia dan mudah di akses (panti)	-		
		4 Jumlah Alat bantu yang disediakan di dalam panti	-	Presentasi Jumlah Alat bantu yang disediakan di dalam panti	-		
		5 Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	48 Org	Presentasi Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	2%	20.591.368	
		6 Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	-	Presentasi Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	-		
		7 Jumlah paket bimbingan fisik , mental, spiritual dan sosial yang disediakan di dalam panti	575 Org	Presentasi Jumlah paket bimbingan fisik , mental, spiritual dan sosial yang disediakan di dalam panti	24%	1.058.083.000	
		8 Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater peksos medis) yang disediakan di dalam panti	-	Presentasi Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater peksos medis) yang disediakan di dalam panti	-		
		9 Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	-	Presentasi Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	-		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	IKK OUTPUT		IKK OUTCOME		ANGGARAN	KET	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
		10	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	48 Org	Presentasi Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	-	14.795.500	
		11	Jumlah lanjut usia terlantar yang di fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan di dalam panti	-	Presentasi Jumlah lanjut usia terlantar yang di fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan di dalam panti	-		
		12	Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	48 Org	Presentasi Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	-	4.382.000	
		13	Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	1 Lap	Presentasi Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	-	3.382.000	
		14	Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	1 Lap	Presentasi Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	-	6.080.000	
		15	Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapatkan pemulasaran	5 Org	Presentasi Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapatkan pemulasaran	100%	20.000.000	

Tabel. 2.8.

Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Dalam Panti

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	IKK OUTPUT		IKK OUTCOME		ANGGARAN	KET
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET		
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis dalam panti	1	Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi 45 Org	Presentasi Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	20%	66.750.000	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	IKK OUTPUT		IKK OUTCOME		ANGGARAN	KET	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
		2	Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket Sandang di dalam panti	25 Org	Presentasi Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket Sandang di dalam panti	25%	32.892.500	
		3	Jumlah Asrama yang tersedia dan mudah di akses (panti)	-	Presentasi Jumlah Asrama yang tersedia dan mudah di akses (panti)	1		
		4	Jumlah Alat bantu yang disediakan di dalam panti	-	Presentasi Jumlah Alat bantu yang disediakan di dalam panti	-		
		5	Jumlah pembekalan kesehatan yang di sediakan dalam panti	45 Org	Persentase pembekalan kesehatan yang di sediakan dalam panti	-	47.019.140	
		6	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	-	Presentasi Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	-		
		7	Jumlah paket bimbingan fisik , mental, spiritual dan sosial yang disediakan di dalam panti	-	Presentasi Jumlah paket bimbingan fisik , mental, spiritual dan sosial yang disediakan di dalam panti	-		
		8	Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater peksos medis) yang disediakan di dalam panti	-	Presentasi Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater peksos medis) yang disediakan di dalam panti	-		
		9	Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	-	Presentasi Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	-		
		10	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	25 Org	Presentasi umlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	20%	11.300.000	
		11	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar	25 Org	Presentasi Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar	-	105.531.000	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	IKK OUTPUT		IKK OUTCOME		ANGGARAN	KET
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET		
		12	Jumlah gelandangan dan pengemis yang di fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, KTP, akta kelahiran, surat nikah dan atau KIA di dalam panti	-	Presentasi Jumlah gelandangan dan pengemis yang di fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, KTP, akta kelahiran, surat nikah dan atau KIA di dalam panti	-	
		13	Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	1 Lap	Presentasi Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	-	10.000.000
		14	Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	-	Presentasi Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	-	
		15	Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	-	Presentasi Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	-	

Tabel. 2.9.

Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	IKK OUTPUT		IKK OUTCOME		ANGGARAN	KET
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET		
1	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	1	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	2816 Org	Presentasi Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	6%	515.933.725
		2	Jumlah korban bencana yang menerima paket Sandang	-	Presentasi Jumlah korban bencana yang menerima paket Sandang	-	
		3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	-	Presentasi Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	2	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	IKK OUTPUT		IKK OUTCOME		ANGGARAN	KET
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET		
		4	Jumlah Paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	-	Presentasi Jumlah Paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	-	
		5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	34 Org	Presentasi Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	-	99.999.825
		6	Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang tersedia	-	Presentasi Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang tersedia	-	

3. Realisasi

Tabel. 2.10.

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Dalam Panti

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	IKK OUTPUT			IKK OUTCOME			ANGGARAN (Rp)		KET
		URAIAN	TARGET	REALISASI	URAIAN	TARGET	REALISASI	PAGU	REALISASI	
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar didalam panti		36 Org	36 Org			98,84%	134.272.600	132.717.400	
		1	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standargizi	23 Org	23 Org	Presentasi Jumlah Penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	5%	99,80%	48.615.600	48.519.000
		2	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket Sandang di dalam panti	-	-	Presentasi Jumlah Penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket Sandang di dalam panti	-	-	-	-
		3	Jumlah Asrama yang tersedia dan mudah di akses (panti)	-	-	Presentasi Jumlah Asrama yang tersedia dan mudah di akses (panti)	5	-	-	-

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	IKK OUTPUT			IKK OUTCOME			ANGGARAN (Rp)		KET	
		URAIAN	TARGET	REALISASI	URAIAN	TARGET	REALISASI	PAGU	REALISASI		
		4	Jumlah Alat bantu yang disediakan di dalam panti	-	-	Presentasi Jumlah Alat bantu yang disediakan di dalam panti	-	-	-	-	
		5	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	-	-	Presentasi Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	-	-	-	-	
		6	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	-	-	Presentasi Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	-	-	-	-	
		7	Jumlah perbekalan kesehatan (peralatan ,kesehatan) yang disediakan di dalam panti	-	-	Presentasi Jumlah perbekalan kesehatan (peralatan ,kesehatan) yang disediakan di dalam panti	-	-	-	-	
		8	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di dalam panti	-	-	Presentasi Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di dalam panti	-	-	-	-	
		9	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan di dalam panti	13 Org	13 Org	Presentasi Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan di dalam panti	4%	98,30%	85.657.000	84.198.400	
		10	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	-	-	Presentasi Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	-	-	-	-	
		11	Jumlah pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	-	-	Presentasi Jumlah pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	-	-	-	-	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	IKK OUTPUT			IKK OUTCOME			ANGGARAN (Rp)		KET	
		URAIAN	TARGET	REALISASI	URAIAN	TARGET	REALISASI	PAGU	REALISASI		
		12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang di fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan di dalam panti	-	-	Presentasi Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang di fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan di dalam panti	-	-	-	-	
		13	Jumlah disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	-	-	Presentasi Jumlah disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	-	-	-	-	
		14	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	-	-	Presentasi Jumlah Penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	-	-	-	-	
		15	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	-	-	Presentasi Jumlah Penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	-	-	-	-	

Tabel. 2.11.

Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Dalam Panti

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	IKK OUTPUT			IKK OUTCOME			ANGGARAN (Rp)		KET
		URAIAN	TARGET	REALISASI	URAIAN	TARGET	REALISASI	PAGU	REALISASI	
1	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti		25 Org	25 Org			99,29%	345.787.725	344.325.475	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	IKK OUTPUT			IKK OUTCOME			ANGGARAN (Rp)		KET	
		URAIAN	TARGET	REALISASI	URAIAN	TARGET	REALISASI	PAGU	REALISASI		
		1	Jumlah Anak terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	25 Org	25 Org	Presentasi Jumlah Anak terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	1%	99.99%	123.100.000	123.090.000	
		2	Jumlah Anak terlantar yang menerima paket Sandang di dalam panti	15 Org	15 Org	Presentasi Jumlah Anak terlantar yang menerima paket Sandang di dalam panti	1%	99.87%	24.931.250	24.900.000	
		3	Jumlah Asrama yang tersedia dan mudah di akses (panti)	-	-	Presentasi Jumlah Asrama yang tersedia dan mudah di akses (panti)	138	-	-	-	
		4	Jumlah Alat bantu yang disediakan di dalam panti	-	-	Presentasi Jumlah Alat bantu yang disediakan di dalam panti	-	-	-	-	
		5	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	25 Org	25 Org	Presentasi Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	1%	100%	31.067.000	31.046.000	
		6	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	-	-	Presentasi Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	-	-	-	-	
		7	Jumlah peralatan kesehatan yang disediakan di dalam panti	-	-	Presentasi Jumlah peralatan kesehatan yang disediakan di dalam panti	-	-	-	-	
		8	Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater peksos medis) yang disediakan di dalam panti	-	-	Presentasi Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater peksos medis) yang disediakan di dalam panti	-	-	-	-	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	IKK OUTPUT			IKK OUTCOME			ANGGARAN (Rp)		KET	
		URAIAN	TARGET	REALISASI	URAIAN	TARGET	REALISASI	PAGU	REALISASI		
		9	Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang dilaksanakan di dalam panti	-	-	Presentasi Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang dilaksanakan di dalam panti	13	-	-	-	
		10	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan di dalam panti	15 Org	15 Org	Presentasi Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan di dalam panti	1%	98.89%	127.160.600	125.760.600	
		11	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang disediakan di dalam panti	25 Org	25 Org	Presentasi Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang disediakan di dalam panti	1%	100%	34.728.875	34.728.875	
		12	Jumlah anak terlantar yang difasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan dan kartu identitas anak dan akta lahir di dalam panti	-	-	Presentasi Jumlah anak terlantar yang difasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan dan kartu identitas anak dan akta lahir di dalam panti	-	-	-	-	
		13	Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	1 Lap	1 Lap	Presentasi Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	-	100%	3.000.000	3.000.000	
		14	Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	-	-	Presentasi Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	-	-	-	-	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	IKK OUTPUT			IKK OUTCOME			ANGGARAN (Rp)		KET
		URAIAN	TARGET	REALISASI	URAIAN	TARGET	REALISASI	PAGU	REALISASI	
		Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga 15	1 Lap	1 Lap	Presentasi Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	12%	100%	1.800.000	1.800.000	

Tabel. 2.12.

Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	IKK OUTPUT			IKK OUTCOME			ANGGARAN		KET
		URAIAN	TARGET	REALISASI	URAIAN	TARGET	REALISASI	PAGU	REALISASI	
1	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar dalam panti		623 Org	623 Org			99,62%	1.988.307.868	1.980.912.018	
		Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket permakanaan di dalam panti sesuai standar gizi	48 Org	48 Org	Presentasi Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket permakanaan di dalam panti sesuai standar gizi	29%	99,96%	840.450.000	840.090.000	
		Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket Sandang di dalam panti	48 Org	48 Org	Presentasi Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket Sandang di dalam panti	2%	100,00%	20.544.000	20.544.000	
		Jumlah Asrama yang tersedia dan mudah di akses (panti)	5	-	Presentasi Jumlah Asrama yang tersedia dan mudah di akses (panti)	-	-	-	-	
		Jumlah Alat bantu yang disediakan di dalam panti	-	-	Presentasi Jumlah Alat bantu yang disediakan di dalam panti	-	-	-	-	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	IKK OUTPUT			IKK OUTCOME			ANGGARAN		KET	
		URAIAN	TARGET	REALISASI	URAIAN	TARGET	REALISASI	PAGU	REALISASI		
		5	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	48 Org	48 Org	Presentasi Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	2%	100,00%	20.591.368	20.591.368	
		6	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	-	-	Presentasi Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	-	-	-	-	
		7	Jumlah paket bimbingan fisik , mental, spiritual dan sosial yang disediakan di dalam panti	575 Org	575 Org	Presentasi Jumlah paket bimbingan fisik , mental, spiritual dan sosial yang disediakan di dalam panti	24%	99,99%	1.058.083.000	1.057.955.150	
		8	Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater peksos medis) yang disediakan di dalam panti	-	-	Presentasi Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater peksos medis) yang disediakan di dalam panti	-	-	-	-	
		9	Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	-	-	Presentasi Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	-	-	-	-	
		10	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	48 Org	48 Org	Presentasi Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	-	96,43%	14.795.500	14.267.500	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	IKK OUTPUT			IKK OUTCOME			ANGGARAN		KET
		URAIAN	TARGET	REALISASI	URAIAN	TARGET	REALISASI	PAGU	REALISASI	
		11 Jumlah lanjut usia terlantar yang di fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan di dalam panti	-	-	Presentasi Jumlah lanjut usia terlantar yang di fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan di dalam panti	-	-	-	-	
		12 Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	48 Org	48 Org	Presentasi Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	-	30,44%	4.382.000	1.334.000	
		13 Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	1 lap	1 Lap	Presentasi Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	-	65,94%	3.382.000	2.230.000	
		14 Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	1 lap	1 Lap	Presentasi Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	-	64,14%	6.080.000	3.900.000	
		15 Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapatkan pemulasaran	5 Org	5 Org	Presentasi Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapatkan pemulasaran	100%	100,00%	20.000.000	20.000.000	

Tabel. 2.13.

Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Dalam Panti

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	IKK OUTPUT			IKK OUTCOME			ANGGARAN		KET
		URAIAN	TARGET	REALISASI	URAIAN	TARGET	REALISASI	PAGU	REALISASI	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis dalam panti		45 Org	45 Org			95,77%	273.492.640	258.620.650	
		1 Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket permakanaan di dalam panti sesuai standar gizi	45 Org	45 Org	Presentasi Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket permakanaan di dalam panti sesuai standar gizi	20%	95%	66.750.000	63.126.950	
		2 Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket Sandang di dalam panti	25 Org	25 Org	Presentasi Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket Sandang di dalam panti	25%	100%	32.892.500	32.892.500	
		3 Jumlah Asrama yang tersedia dan mudah di akses (panti)	-	-	Presentasi Jumlah Asrama yang tersedia dan mudah di akses (panti)	-	-	-	-	
		4 Jumlah Alat bantu yang disediakan di dalam panti	-	-	Presentasi Jumlah Alat bantu yang disediakan di dalam panti	-	-	-	-	
		5 Jumlah pembekalan kesehatan yang di sediakan dalam panti	45 Org	45 Org	Persentase pembekalan kesehatan yang di sediakan dalam panti-	-	88,76%	47.019.140	41.735.800	
		6 Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	-	-	Presentasi Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	-	-	-	-	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	IKK OUTPUT			IKK OUTCOME			ANGGARAN		KET	
		URAIAN	TARGET	REALISASI	URAIAN	TARGET	REALISASI	PAGU	REALISASI		
		7	Jumlah paket bimbingan fisik , mental, spiritual dan sosial yang disediakan di dalam panti	-	-	Presentasi Jumlah paket bimbingan fisik , mental, spiritual dan sosial yang disediakan di dalam panti	-	-	-	-	
		8	Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater peksos medis) yang disediakan di dalam panti	-	-	Presentasi Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater peksos medis) yang disediakan di dalam panti	-	-	-	-	
		9	Jumlah pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	-	-	Presentasi Jumlah pekerja sosial profesional/te naga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	-	-	-	-	
		10	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	25 Org	25 Org	Presentasi umlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	20%	100%	11.300.000	11.300.000	
		11	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar	25 Org	25 Org	Presentasi Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar	-	94,35	105.531.000	99.565.400	
		12	Jumlah gelandangan dan pengemis yang di fasilitasi pembuatan nomor induk kependudu	-	-	Presentasi Jumlah gelandangan dan pengemis yang di fasilitasi pembuatan nomor induk kependuduka	-	-	-	-	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	IKK OUTPUT			IKK OUTCOME			ANGGARAN		KET
		URAIAN	TARGET	REALISASI	URAIAN	TARGET	REALISASI	PAGU	REALISASI	
		kan, KTP, akta kelahiran, surat nikah dan atau KIA di dalam panti			n, KTP, akta kelahiran, surat nikah dan atau KIA di dalam panti					
		Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	1 Lap	1 Lap	Presentasi Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	-	100%	10.000.000	10.000.000	
		Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	-	-	Presentasi Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	-	-	-	-	
		Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	-	-	Presentasi Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	-	-	-	-	

Tabel. 2.14.

Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	IKK OUTPUT			IKK OUTCOME			ANGGARAN		KET
		URAIAN	TARGET	REALISASI	URAIAN	TARGET	REALISASI	PAGU	REALISASI	
1	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi		2850 Org	2850 Org			98,83%	615.933.550	608.750.550	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	IKK OUTPUT			IKK OUTCOME			ANGGARAN		KET
		URAIAN	TARGET	REALISASI	URAIAN	TARGET	REALISASI	PAGU	REALISASI	
		1 Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	2816 org	2816 Org	Presentasi Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	6%	98,66%	515.933.725	509.010.725	
		2 Jumlah korban bencana yang menerima paket Sandang	-		Presentasi Jumlah korban bencana yang menerima paket Sandang	-	-	-	-	
		3 Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	-	-	Presentasi Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	-	-	-	-	
		4 Jumlah Paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	-	-	Presentasi Jumlah Paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	-	-	-	-	
		5 Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	34 org	34 Org	Presentasi Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	-	99.74%	99.999.825	99.739.825	
		6 Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang tersedia	-	-	Presentasi Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang tersedia	-	-	-	-	

Atas dasar pemahaman bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan hak dan pelayanan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk kesejahteraan masyarakat, maka dibutuhkan Rencana Aksi yang tepat bagi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Provinsi Sulawesi Tengah yakni terintegrasinya pencapaian penerapan SPM dalam

dokumen perencanaan pembangunan serta tersinerginya rencana pencapaian penerapan SPM tersebut dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Mencermati capaian penerapan SPM Bidang Sosial pada tahun 2021 ada pada tabel data realisasi kinerja SPM Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, beberapa hal yang dapat disimpulkan yakni:

1. Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti mencapai **100%**. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah provinsi Sulawesi Tengah telah menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi dengan pencapaian kinerja sangat baik.
2. Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak terlantar dalam panti sosial skala provinsi mencapai **100%** . Hal ini disebabkan karena panti sosial skala provinsi yaitu UPT Panti Sosial Anak telah menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi dengan pencapaian kinerja sangat baik.
3. Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar dalam panti sosial skala provinsi mencapai **100%** . Hal ini disebabkan karena panti sosial skala provinsi yaitu UPT PSTW Madago telah menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi dengan pencapaian kinerja sangat baik..
4. Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial terlantar di dalam panti mencapai **100%**. Hal ini disebabkan karena UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial Provinsi Sulawesi Tengah telah menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi dengan pencapaian kinerja sangat baik.
5. Pemberian bantuan dan perlindungan bagi korban bencana skala provinsi mencapai **100%**. Hal ini disebabkan karena Dinas Sosial Provinsi telah melaksanakan penanganan bagi korban bencana dengan pencapaian kinerja sangat baik.

Mencermati pencapaian penerapan SPM Bidang Sosial tersebut di atas, tentunya target SPM Bidang Sosial yang sudah dicapai akan dipertahankan, dengan pencapaian tersebut dibutuhkan evaluasi dan koordinasi dengan pihak terkait khususnya mengenai keterbatasan alokasi anggaran pada urusan sosial sehingga pada tahun depan dapat terjadi peningkatan dan dapat memperkecil deviasi capaian dari target yang sudah ditetapkan.

Tabel. 2.15.

Realisasi Program / Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Sumber Dana APBD

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2		3	4	5	6	7
	UNIT DINAS						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 2. Nilai SAKIP 3. Indeks Kepuasan Masyarakat	20.146.032.332	17.990.847.703	89,30%	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah, Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	260.650.000	257.985.150	98,98%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	29.030.000	27.465.325	94,61%	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan DPA	80.120.000	79.829.825	99,64%	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	151.500.000	150.690.000	99,47%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	18.128.759.703	15.990.714.970	88,21%	

			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah laporan pembayarangaji dan tunjangan	17.688.809.703	15.550.967.270	87,91%	
--	--	--	-----------------------------------	--	---	----------------	----------------	--------	--

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2		3	4	5	6	7
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan	439.950.000	439.747.700	99,95%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	81.971.500	81.810.800	99,80%	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan SKP yang tepat waktu	81.971.500	81.810.800	99,80%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	169.539.800	168.917.900	99,63%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket pengadaan	5.000.000	5.000.000	100,00%	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket pengadaan	10.000.000	10.000.000	100,00%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi yang dilaksanakan	154.539.800	153.917.900	99,60%	

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2		3	4	5	6	7
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan PengadaanBarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	381.492.500	377.410.000	98,93%	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	35.600.000	34.850.000	97,89%	
		Pegadaan Mebel	Jumlah Mebeler yangdiadakan	25.000.000	24.900.000	99,60%	
		Pegadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesinlainnya	200.892.500	198.375.000	98,75%	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor atauBangunan lainnya	120.000.000	119.285.000	99,40%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan PenyediaanJasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	737.258.829	729.135.343	98,90%	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Administrasi Persuratan yang dikelola	8.310.000	8.310.000	100,00%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik	137.314.054	129.205.568	94,09%	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah unit barang, Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara	53.343.750	53.343.750	100,00%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Layanan umumkantor yang dikelola	538.291.025	538.276.025	100,00%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerahyang dipelihara	386.360.000	384.873.540	99,62%	

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2		3	4	5	6	7
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang dipelihara	168.860.000	168.295.540	99,67%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	67.500.000	67.089.000	99,39%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara.	150.000.000	149.489.000	99,66%	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		1. Persentase Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat Lintas Kabupaten/Kota Yang Diterbitkan 2. Persentase Lembaga Sosial Masyarakat yang Aktif dalam Pelayanan Sosial 3. Persentase SDM Kesos yang Profesional	418.714.575	415.685.978	99,28%	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat yang diterbitkan	23.564.550	23.564.550	100,00%	

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan	
1	2		3	4	5	6	7	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian GratisBerhadiah dan PengumpulanUang atau Barang		Jumlah rekomendasi penerbitan izin UGB dan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat	23.564.550	23.564.550	100,00%	
	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi		1.	Jumlah Lembaga sosial kemasyarakatan yang diberdayakan dalam pendampingan ProgramKesos,	395.150.025	392.121.428	99,23%	
			2.	Jumlah SDM Kesos yang mengikuti seminar, bimbingan, pemantapan dan pendampingan Program Kesos				
		Peningkatan Kemampuan PotensiPekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi		Jumlah PSM yang meningkatkankapasitasnya	41.300.000	41.300.000	100,00%	
		Peningkatan Kemampuan PotensiTenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang MeningkatkanKapasitasnya	75.726.300	75.276.300	99,41%	
		Peningkatan Kemampuan PotensiSumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi		Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	46.947.925	46.497.425	99,04%	
		Peningkatan Kemampuan PotensiSumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan		Jumlah Lembaga Sosial kemasyarakatan (KT dan LKS) yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	231.175.800	229.047.703	99,08%	

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Ketetapan
1	2		3	4	5	6	7
3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	5.000.000	4.690.000	93,80%	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal		Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang difasilitasi pemulangan ke daerah asal	5.000.000	4.690.000	93,80%	
		Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang menerima pelayanan sosial dan dipulangkan Ke Daerah asal	5.000.000	4.690.000	93,80%	
4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		1. Persentase lanjut usia terlantar, penyandang Disabilitas dan anak terlantar yang menerima Rehabilitasi Sosial di dalam Panti dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Dasar 2. Persentase Gelandangan dan Pengemis serta PMKS Lainnya yang terpenuhi kebutuhannya di dalam panti	1.741.597.175	1.732.117.041	99,46%	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Ketetapan
1	2		3	4	5	6	7
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalamPanti		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di DalamPanti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	134.272.600	132.717.400	98,84%	
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Panti	48.615.600	48.519.000	99,80%	
		Pemberian Bimbingan Fisik,Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yangmendapatkan bimbingan fisik, mental spiritual diDalam Panti	85.657.000	84.198.400	98,30%	
	Rehabilitasi SosialDasar Anak Terlantar di Dalam Panti		Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	203.294.000	199.584.000	98,18%	
		Penyediaan Makanan	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Panti	203.294.000	199.584.000	98,18%	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		Jumlah Lanjut Usia terlantaryang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	1.159.518.000	1.159.065.150	99,96%	
		Penyediaan Makanan	Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Panti	101.435.000	101.110.000	99,68%	
		Pemberian Bimbingan Fisik,Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Lanjut Usia Terlantaryang mendapatkan bimbingan fisik, mental spiritual dan bantuan sosial di Dalam Panti	1.058.083.000	1.057.955.150	99,99%	

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Ketetapan
1	2		3	4	5	6	7
	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		1. Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima pelayanan sosial dan bantuan sosial dalam panti	124.498.075	121.727.417	97,77%	
			2. Jumlah dokumen penaganangelandangan dan pengemis dalam panti				
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	124.498.075	121.727.417	97,77%	
	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti		Jumlah Tuna Sosial diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Pelayanan Sosial dan Bantuan Sosial	120.014.500	119.023.074	99,17%	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah sosial	Jumlah Tuna Sosial diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Pelayanan Sosial dan Bantuan Sosial	120.014.500	119.023.074	99,17%	
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		1. Persentase PMKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial 2. Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	3.301.067.600	2.750.482.440	83,32%	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan	
1	2		3	4	5	6	7	
		Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal		Jumlah anak yang mendapatkan orang tua angkat sesuai ketentuan yang berlaku	20.000.000	19.966.000	99,83%	
		Pengangkatan Anak antar WNI		Jumlah anak yang mendapatkan rekomendasi pengangkatan anak	20.000.000	19.966.000	99,83%	
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi		Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	3.281.067.600	2.730.516.440	83,22%	
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah laporan Data Peserta PKH yang akurat	72.220.750	71.960.090	99,64%	
		Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan data fakir miskin Sulawesi Tengah	118.742.000	117.997.200	99,37%	
		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Jumlah Keluarga fakir miskin yang menerima bantuan modal usaha berkelompok, perorangan dan atau bantuan stimulan	3.090.104.850	2.540.559.150	82,22%	
6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		1. Persentase Korban Bencana Skala Provinsi Yang Ditangani Dan Mendapatkan Layanan Psikososial 2. Persentase Relawan Bencana Sosial yang melakukan pelayanan psikososial dan penanganan kelompok rentan	615.933.550	608.750.550	98,83%	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi		Jumlah korban bencana yang ditangani dan Mendapatkan Layanan Psikososial, Jumlah Tenaga Pelopor Perdamaian yang Siap Ditugaskan	615.933.550	608.750.550	98,83%		

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2		3	4	5	6	7
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Korban Bencana Alam yang menerima bantuan logistik makanan	515.933.725	509.010.725	98,66%	
		Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	99.999.825	99.739.825	99,74%	
7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase Masyarakat Dan Lembaga yang Menggunakan TMPN Provinsi Dalam Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan	307.743.885	304.094.185	98,81%	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		Meningkatnya masyarakat yang menggunakan fasilitas TMPN Provinsi	307.743.885	304.094.185	98,81%	
		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan nasional Provinsi yang direhabilitasi	100.000.000	99.560.000	99,56%	
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah laporan pemeliharaan sarana dan Prasarana TMP dan jumlah kegiatan yang menggunakan fasilitas TMP	207.743.885	204.534.185	98,45%	
1	UPT PSA						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			344.552.250	334.761.726	97,16%	UPT PSA
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	110.694.000	109.144.000	98,60%	

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2		3	4	5	6	7
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.471.500	2.471.500	100,00%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan dan perlengkapan perkantoran	1.000.000	1.000.000	100,00%	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Laporan penyediaan Bahan / Material perkantoran	1.830.000	1.830.000	100,00%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat koordinasi yang dilaksanakan	105.392.500	103.842.500	98,53%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	216.108.250	208.379.326	96,42%	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Administrasi persuratan yang dikelola	1.253.000	1.253.000	100,00%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.646.400	37.264.776	83,47%	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit barang, peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	5.548.950	5.547.050	99,97%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	164.659.900	164.314.500	99,79%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	17.750.000	17.238.400	97,12%	

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2		3	4	5	6	7
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan yang mendapatkan pemeliharaan	17.750.000	17.238.400	97,12%	
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		- Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar penyandang Disabilitas, anak dan lanjut usia dalam panti, serta meningkatnya sinergitas penanganan tuna sosial. - Persentase lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas dan anak terlantar yang menerima rehabilitasi sosial di dalam panti dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar.	346.787.725	344.315.475	99,29%	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti		Jumlah Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	346.787.725	344.315.475	99,29%	
		Penyediaan Makanan	Jumlah Anak yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Panti	123.100.000	123.090.000	99,99%	
		Penyediaan Sandang	Jumlah Anak yang mendapatkan layanan penyediaan sandang di Dalam Panti	24.931.250	24.900.000	99,87%	
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Anak yang mendapatkan perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	31.067.000	31.046.000	99,93%	
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Anak yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial di Dalam Panti	127.160.600	125.750.600	98,89%	

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2		3	4	5	6	7
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Jumlah Anak yang mendapatkan Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari di Dalam Panti	34.728.875	34.728.875	100,00%	
		Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Anak yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar di Dalam Panti	3.000.000	3.000.000	100,00%	
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Anak yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga di Dalam Panti	1.000.000	0		
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Anak yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga di Dalam Panti	1.800.000	1.800.000	100,00%	
	jumlah			691.339.975	679.077.201	98,23%	
	UPT PSRTS						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			176.659.902	143.037.150	80,97%	UPT PSRTS
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	42.871.352	42.871.352	100,00%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.709.352	5.709.352	100,00%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat koordinasi yang dilaksanakan	37.162.000	37.162.000	100,00%	

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2		3	4	5	6	7
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.270.750	91.591.166	75,53%	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Administrasi persuratan yang dikelola	1.999.000	1.325.000	66,28%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.478.400	20.572.816	41,58%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan Umum Kantor yang dikelola	69.793.350	69.693.350	99,86%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	12.517.800	8.574.632	68,50%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan yang mendapatkan pemeliharaan	10.017.800	6.074.632	60,64%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan yang mendapatkan pemeliharaan	2.500.000	2.500.000	100,00%	
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		- Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar penyandang Disabilitas, anak dan lanjut usia dalam panti, serta meningkatnya sinergitas penanganan tuna sosial. - Persentase lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas dan anak terlantar yang menerima rehabilitasi	278.207.640	263.335.650	94,65%	

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Ketetapan
1	2		3	4	5	6	7
			sosial di dalam panti dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar.				
	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	278.207.640	263.335.650	94,65%	
		Penyediaan Permakanan	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Panti	66.750.000	63.126.950	94,57%	
		Penyediaan Sandang	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan penyediaan sandang di Dalam Panti	32.892.500	32.892.500	100,00%	
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	47.019.140	41.735.800	88,76%	
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari di Dalam Panti	11.300.000	11.300.000	100,00%	
		Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan Bimbingan Keterampilan Dasar di Dalam Panti	105.531.000	99.565.400	94,35%	
		Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan Akses Kelayanan Pendidikan	10.000.000	10.000.000	100,00%	

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Ketetapan
1	2		3	4	5	6	7
			dan Kesehatan Dasar di Dalam Panti				
		Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah gelandangan dan pengemis yang dipulangkan ke Daerah Asal	4.715.000	4.715.000	100,00%	
	JUMLAH			454.867.542	406.372.800	89,34%	
	UPT PSTW Tentena Madago						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			161.305.429	153.674.686	95,27%	UPT PSTW Tentena
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.437.000	6.700.000	64,19%	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	10.437.000	6.700.000	64,19%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	3.996.437	3.996.437	100,00%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.996.437	3.996.437	100,00%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.671.992	100.878.249	96,38%	

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2		3	4	5	6	7
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Administrasi persuratan yang dikelola	998.000	998.000	100,00%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.499.267	33.305.724	91,25%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan Umum Kantor yang dikelola	67.174.725	66.574.525	99,11%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	42.200.000	42.100.000	99,76%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan yang mendapatkan pemeliharaan	42.200.000	42.100.000	99,76%	
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		jumlah kendaraan yang mendapatkan pemeliharaan	930.224.868	922.956.868	99,22%	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		Jumlah Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	930.224.868	922.956.868	99,22%	
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Panti	840.450.000	840.090.000	99,96%	
		Penyediaan Sandang	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan layanan penyediaan sandang di Dalam Panti	20.544.000	20.544.000	100,00%	

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2		3	4	5	6	7
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Lanjut Usia terlantaryang mendapatkan perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	20.591.368	20.591.368	100,00%	
		Pemberian Bimbingan AktivitasHidup Sehari-Hari	Jumlah Lanjut Usia terlantaryang mendapatkan Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari di Dalam Panti	14.795.500	14.267.500	96,43%	
		Akses Ke Layanan Pendidikan danKesehatan Dasar	Jumlah Lanjut Usia terlantaryang mendapatkan Akses KeLayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar di Dalam Panti	4.382.000	1.334.000	30,44%	
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Lanjut Usia terlantaryang mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga di Dalam Panti	3.382.000	2.230.000	65,94%	
		Pemberian Pelayanan ReunifikasiKeluarga	Jumlah Lanjut Usia Terlantaryang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga di Dalam Panti	6.080.000	3.900.000	64,14%	
		Pemulasaraan	Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan layanan pemulasaraan di Dalam Panti	20.000.000	20.000.000	100,00%	
	JUMLAH			1.091.530.297	1.076.631.554	98,64%	
	JUMLAH TOTAL DINAS			26.536.089.117	23.806.667.897	89,71%	
	JUMLAH TOTAL DINAS + UPTD			28.773.826.931	25.968.749.452	90,25%	

Tabel. 2.16.

Realisasi Program / Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Sumber Dana APBN

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
B	APBN				
1.	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		196.096.000	193.696.000	98,78%
	Kegiatan : Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum	1 Nilai hasil pengawasan kearsipan Kementerian dari ANRI	196.096.000	193.696.000	98,78%
		2 Jumlah dokumen rekomendasi analisis kebijakan bidang penyelenggaraan Kesos			
		3 Nilai Indikator kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Sosial			
		4 Persentase (%) sarana prasarana yang terpelihara			
		5 Indeks pencapaian Renstra			
		6 Hasil (nilai) evaluasi SAKIP Kemensos			
		7 Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Kementerian Sosial			
		8 Jumlah rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan program			
		9 Persentase daerah yang melaksanakan SPM bidang sosia			

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
2.	PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL		419.902.000	418.725.500	99,72%
	Kegiatan : Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial	1 Perizinan Lembaga	50.000.000	50.000.000	100,00%
	Kegiatan : Pemberdayaan dan Pelayanan Perizinan	1 Persentase (%) Peningkatan Pihak-Pihak Yang Berperan Serta dalam Penanaman dan Pendayagunaan Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan 2 Persentase (%) penyelenggaraan UGB/PUB tertib aturan 3 Persentase (%) Peningkatan Pihak-Pihak yang Berperan Serta dalam Pendayagunaan Nilai Kesetiakawanan Sosial 4 Persentase (%) TMPN/TMP/MPN yang direhab dandipelihara	174.932.000	173.765.500	99,33%
	Kegiatan : Penyelenggaraan Layanan dan Pendampingan Terpadu	1 Indeks partisipasi sosial PSKS kelembagaan (karangTaruna, lembaga pemberdayaan peduli keluarga, forum CSR kesos dan LKS) 2 Persentase Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan SLRT 3 Indeks partisipasi sosial PSKS perorangan (TKSK, PSM, dan Peksos) 4 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang diberdayakan 5 Kabupaten /Kota yang mengembangkan SLRT	108.400.000	108.400.000	100,00%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
	Kegiatan : Penyelenggaraan Pemberdayaan Ekonomi	1 Presentase (%) KPM yang mendapatkan dukungan mitra usaha	34.390.000	34.390.000	100,00%
	Kegiatan : Penyelenggaraan Pemberdayaan Komunitas Adat	1 Warga KAT Yang Mendapat Pemberdayaan Tahun I	52.180.000	52.180.000	100,00%
3.	PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL		2.224.202.000	2.187.677.100	98,36%
	Kegiatan : Pencegahan dan Perlindungan Korban Bencana	1 Jumlah Kelompok Masyarakat Rawan Bencana Sosial yang mendapat bantuan	1.113.482.000	1.103.957.100	99,14%
		2 Jumlah Korban Bencana sosial yang mendapat bantuan			
		3 Jumlah Tenaga Pelopor Perdamaiian yang siap ditugaskan			
		4 Anak sekolah yang mendapatkan edukasi bencana			
	Kegiatan : Penyelenggaraan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan	1 Keluarga miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat	1.110.720.000	1.083.720.000	97,57%
		2 KPM yang mengakses layanan Pendidikan			
		3 KPM yang mengakses layanan Kesehatan			
		4 Kelompok Ibu-Ibu penerima manfaat PKH yang mendapatkan pendampingan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2/FDS)			
		5 Sumber Daya Manusia yang dikelola			
4.	PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL		2.213.350.000	2.211.206.800	99,90%
	Kegiatan : penyelenggaraan Program Sembako	1 Persentase (%) Keluarga Miskin dan Rentan yang Meningkatkan Kemampuannya Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar	2.213.350.000	2.211.206.800	99,90%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
5.	PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL		179.090.000	178.358.100	99,59%
	Kegiatan : Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	1 Desa /Kelurahan Yang Mendapatkan Penyuluhan	179.090.000	178358100	99,59%
JUMLAH TOTAL			5.232.640.000	5.189.663.500	99,18%

4. Alokasi Anggaran

Pada tahun 2021, sumber penganggaran pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah berasal dari dua sumber yakni APBD dan APBN (Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan), dengan rincian sebagai berikut:

- **APBD,**

Pagu Anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp. 28.773.862.931,- (*dua puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua sembilan ratus tiga puluh satu rupiah*), realisasinya Rp. 25.968.749.452,- (*dua puluh lima milyar sembilan ratus enam puluh delapan tujuh ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh dua rupiah*) atau 90,25 %.

- **APBN**

Alokasi dana dekonsentrasi sebesar Rp. 5.232.640.000,- (*lima milyar dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah*), realisasinya Rp. 5.189.663.500,- (*lima milyar seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah*) atau 99,18%.

5. Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah didukung oleh Sumber Daya Aparatur yang berjumlah 166 orang Pegawai Negeri Sipil, dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel. 2.17.

**Struktur Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Pangkat / Golongan
Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022**

NO	Perangkat Daerah OPD	Pangkat / Golongan																Jumlah
		IV/d	IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	I/d	I/c	I/b	I/a	
1	2	3																4
1	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah	1	-	5	11	21	9	16	15	4	2	24	5	-	-	-	-	113
2	UPT Panti Sosial Anak	-	-	-	1	5	3	3	3	-	-	1	1	-	-	-	-	17
3	UPT Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial	-	-	-	1	2	-	1	4	-	-	7	2	-	-	-	-	17
4	UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena	-	-	-	-	3	2	2	2	5	3	2	-	-	-	-	-	19
Total																		166

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Tabel. 2.18.

**Struktur Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022**

NO	Perangkat Daerah OPD	Kualifikasi Pendidikan										Jumlah
		S3	S2	S1	DIV	DIII	DII	DI	SMA/ SLTA	SMP/ SLTP	SD	
1	2	3										4
1	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah	2	17	48	2	4	-	-	40	-		113
2	UPT Panti Sosial Anak	-	2	10	1	-	-	-	4	-		17
3	UPT Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial	-	-	6	-	-	-	-	11	-		17
4	UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena	-	-	7	-	-	-	-	12	-		19
Total												166

Sumber :Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

6. *Permasalahan dan Solusi*

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh adalah sebagai berikut :

Permasalahan :

- Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tidak memiliki panti rehabilitasi penyandang disabilitas.

Solusi :

- Terdapat 5 (lima) Panti Masyarakat yang menangani sasaran penyandang disabilitas terletak di Kota Palu yaitu Panti Tadulako, Panti Putra Muhammadiyah, Panti Mekar Abadi, Panti Bhakti Putra dan Panti Tepeasa Maroso yang -berada di Kabupaten morowali, sedangkan untuk penanganan disabilitas dalam panti, kami akan melakukan kajian mengenai urgensi pendirian panti rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.

BAB V

PENUTUP

Secara umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 mengalami peningkatan capaian yang signifikan sehingga mampu memberi kontribusi bagi upaya pencapaian visi dan misi Pemerintahan Daerah provinsi Sulawesi Tengah. Pada hakekatnya program yang dicanangkan dalam perencanaan strategis untuk tahun 2021 ini yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan telah diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran program pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Peningkatan kinerja tersebut adalah berkat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat dan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, yang diharapkan akan memberikan tambahan penguatan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Meskipun demikian masih dibutuhkan kerja keras, semangat, kemampuan dan dukungan moral yang kuat bagi pembangunan di daerah ini, mudah-mudahan kinerja yang dicapai pada tahun 2021 ini dapat lebih meningkat pada tahun-tahun mendatang dan segala kekurangan yang ada dapat kita jadikan koreksi bagi peningkatan kinerja Penyelenggaraan Pemerintah serta Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat yang kita capai pada tahun 2021 menjadi kebanggaan kita bersama dan perlu disyukuri. Oleh karena itu disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas dukungan dan kerjasama segenap pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah serta seluruh lapisan masyarakat atas terciptanya sinergitas dan hubungan harmonis yang terbangun selama ini

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Taufiq dan Hidayah-Nya serta melindungi dan memberi petunjuk kepada kita semua.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah - Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus 	<p>58,378518</p> <p>88,355263</p>	
2	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan - Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi - Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi - Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi 	<p>1,5831206</p> <p>79,48718</p> <p>99,959925</p> <p>98,392526</p>	
3	Pekerjaan Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir - Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi - Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi - Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota - Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional - Rasio kemantapan jalan - Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli 	<p>0,4220932</p> <p>3,0697452</p> <p>4,9154032</p> <p>1,25</p> <p>0</p> <p>62,29757</p> <p>32,93532</p>	
4	Urusan Perumahan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni - Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni - Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani - Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU 	<p>92,07451</p> <p>0</p> <p>40,71025</p> <p>15,86515</p>	
5	Urusan Trantibun dan Linmas	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan - Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan 	<p>100</p> <p>4</p>	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		<ul style="list-style-type: none"> - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal - Persentase penanganan pra bencana - Persentase penanganan tanggap darurat bencana 	<p style="text-align: center;">0</p> <p style="text-align: center;">100</p> <p style="text-align: center;">100</p>	
6	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase anak terlantar yang tepenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti - Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti - Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti - Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti - Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi 	<p style="text-align: center;">3,34599</p> <p style="text-align: center;">0,393701</p> <p style="text-align: center;">1,181393</p> <p style="text-align: center;">100</p> <p style="text-align: center;">118,386</p>	
7	Urusan Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja - Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi - Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja - Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) - Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi - Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan 	<p style="text-align: center;">30,76923</p> <p style="text-align: center;">35,66176</p> <p style="text-align: center;">0,002477</p> <p style="text-align: center;">87,2963</p> <p style="text-align: center;">37,3454</p> <p style="text-align: center;">87,2963</p>	
8	Urusan Perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase ARG pada belanja langsung APBD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000) 	<p style="text-align: center;">0,062925</p> <p style="text-align: center;">2,925548</p> <p style="text-align: center;">34,52729</p>	
9	Urusan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase cadangan pangan 	<p style="text-align: center;">60933,15</p>	
10	Urusan Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan - Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu - Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota 	<p style="text-align: center;">91,81818</p> <p style="text-align: center;">91,81818</p> <p style="text-align: center;">0</p>	
11	Urusan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi 	<p style="text-align: center;">77,78</p>	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		- Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	25,92593	
12	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	- Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun - Pemanfaatan data kependudukan	50 3,571429	
13	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	- Persentase pengentasan desa tertinggal - Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	7,110092 1,094891	
14	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	- TFR (Angka Kelahiran Total) - Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) - Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	2,43 53,83403 11,95987	
15	Urusan Perhubungan	- Rasio konektivitas provinsi - V/C Ratio di Jalan Provinsi	0,5633 1,54	
16	Urusan Komunikasi dan Informatika	- Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo - Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi - Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Provinsi	100 100 0,001551	
17	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	- Meningkatnya Koperasi yang berkualitas - Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	16,84211 1,385215	
18	Urusan Penanaman Modal	- Persentase peningkatan investasi di provinsi	38,27197	
19	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	- Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri - Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan - Peningkatan Prestasi Olahraga	0,002463 0,003695 179	
20	Urusan Statistik	- Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah - Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	7,407407 0	
21	Urusan persandian	- Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	0	
22	Urusan kebudayaan	- Terlestarikannya Cagar Budaya	6859,091	
23	Urusan perpustakaan	- Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat - Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	3,26 0	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
24	Urusan kearsipan	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat 	80,75 80,83	
25	Urusan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP) - Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku 	1073638 75,85	
26	Urusan pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan - Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi - Tingkat hunian akomodasi - Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku 	25 -50,00021 15,24551 100	
27	Urusan pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Produktivitas pertanian per hektar per tahun - Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular 	475,1806 -46,5812	
28	Urusan kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial - Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi) - Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi 	180,8696 0,00372 2,166403	
29	Urusan energi dan sumber daya mineral	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda - Persentase Desa Yang Teraliri Listrik 	0 99,85149	
30	Urusan perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas - Persentase penanganan pengaduan konsumen - Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku - Tertib Usaha - Persentase kinerja realisasi pupuk 	39.026 100 23,07692 0 72,40313	
		<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan 	78,65169	
		<ul style="list-style-type: none"> - Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok 	10,81	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
31	Urusan perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> - Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi - Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP - Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait - Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait - Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait - Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini 	<p>14,70588</p> <p>204,6</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>85</p>	
32	Urusan transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya - Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya - Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya 	0	